



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TAHUN 2005-2025

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI PAPUA
2013**



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2005 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 8 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2005-2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2005-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2005 -2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai Badan Legislatif Daerah Provinsi Papua.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Papua untuk Periode 20 (dua puluh) Tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Papua periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Papua dan memperhatikan RPJM Nasional.
8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Papua untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan RPJPD adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) di Provinsi Papua dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah dalam kerangka dan tujuan nasional.

(2). Tujuan penyusunan...../4

- (2) Tujuan penyusunan RPJPD adalah :
- a. memberikan gambaran umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir tahun 2025;
 - b. menjabarkan indikasi dari gambaran umum yang diinginkan dan bagaimana mencapainya;
 - c. memberikan pedoman umum bagaimana mencapai sasaran pembangunan yang dibagi dalam 4 (empat) tahapan berbentuk arah kebijakan;
 - d. merupakan pedoman bagi calon Gubernur dalam menyusun visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan;
 - e. merupakan pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMD;
 - f. RPJPD menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup penyusunan RPJPD, meliputi :

- a. penjabaran visi, misi, dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah; dan
- b. arah kebijakan pembangunan dan sasaran pokok di setiap tahap pembangunan 5 (lima) tahunan.

BAB IV SISTEMATIKA Pasal 4

- (1) Sistematika RPJPD, yang terdiri dari :
- a. Pendahuluan : latar belakang, maksud dan tujuan, hubungan antara RPJPD dengan dokumen rencana pembangunan lainnya, dan sistematika penulisan;
 - b. Gambaran Umum Kondisi Daerah : aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah;
 - c. Analisis Isu-Isu Strategis : permasalahan pembangunan, dan isu strategis;
 - d. Visi dan Misi Daerah : visi, misi dan tujuan dan sasaran;
 - e. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah : sasaran pembangunan jangka panjang, arah pembangunan daerah, dan sasaran pokok;
 - f. Kaidah Pelaksanaan : prinsip kaedah pelaksanaan, dan perubahan dokumen perencanaan; dan
 - g. Penutup.
- (2) Sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V VISI DAN MISI Pasal 5

- (1) Visi Provinsi Papua adalah : **“Papua yang Mandiri Secara Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Politik”**.

(2). Misi Provinsi...../5

- (2) Misi Provinsi Papua adalah :
 - a. mewujudkan kemandirian sosial;
 - b. mewujudkan kemandirian budaya;
 - c. mewujudkan kemandirian ekonomi dan pengembangan wilayah;
 - d. mewujudkan kemandirian politik; dan
 - e. mewujudkan kemandirian masyarakat asli Papua.
- (3) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dijelaskan lebih lanjut dalam dokumen RPJPD.

BAB VI
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 6

- (1) Arah kebijakan pembangunan daerah periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Provinsi Papua.
- (2) Arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Gubernur.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada arah kebijakan dan pencapaian sasaran pokok pada masing-masing tahapan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Gubernur yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.
- (2) Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD dapat digunakan sebagai pedoman penentuan prioritas dan sasaran pembangunan RKPD dalam hal RPJMD periode berkenaan belum ditetapkan.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Pemerintahan Gubernur berikutnya dan/atau masa Pemerintahan Penjabat Gubernur.

BAB VII
KAIDAH PELAKSANAAN
Pasal 9

- (1) RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD sesuai dengan arah kebijakan dan pencapaian sasaran pokok pada masing-masing tahapan.
- (2) Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD digunakan sebagai pedoman penentuan prioritas dan sasaran pembangunan RKPD dalam hal RPJMD periode berkenaan belum ditetapkan.

BAB VIII
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 10

Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan, maka Gubernur yang sedang menjabat pada periode tahun terakhir RPJPD (Tahun 2024) diwajibkan menyusun rancangan RPJPD periode berikutnya.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 30 Desember 2013

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 31 Desember 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
T.E.A HERY DOSINAEN, S.IP
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2013 NOMOR 21

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 21 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI PAPUA TAHUN 2005 - 2025

I. UMUM

Sejak 1 Mei 1963 Papua menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cita-cita yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengalami berbagai tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengarah pada disintegrasi bangsa yaitu tuntutan untuk menentukan nasib sendiri dan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dikarenakan masih tingginya kesenjangan antar kelompok, antar wilayah dan antar daerah.

Dalam kurun waktu tersebut, kebijakan dan arah pembangunan kurang memberikan arti penting dalam perubahan kondisi masyarakat, karena proses pembangunan secara nasional yang menyeragamkan seluruh daerah di Indonesia, berorientasi pada hasil bersifat pragmatis dan tidak bertorientasi pada proses. Hal ini menempatkan Papua pada kondisi yang kurang menguntungkan dalam pembangunan. Proses pelembagaan sosial kemasyarakatan dan hukum tidak dikembangkan bahkan ditekan secara politis, sehingga menimbulkan ketidakadilan di bidang sosial, ekonomi, politik dan hukum yang merupakan persoalan mendasar di Papua dan mengancam keberlanjutan proses pembangunan.

Dalam situasi dan kondisi seperti itu, pada tahun 2001 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagai pengakuan dan pemberian kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Papua menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Ini merupakan babak baru bagi Provinsi Papua untuk menata dan membangun dirinya sesuai dengan adat istiadat dan potensi yang dimiliki untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik.

Untuk itu, dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi Provinsi Papua untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelebagaannya sehingga Provinsi Papua dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Papua untuk mencapai tujuan nasional dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yaitu mensejahterakan kehidupan rakyat Papua khususnya orang asli Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional dan tujuan otonomi khusus tersebut perlu ditetapkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Papua.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Pasal 1 ayat (2) kurun waktu RPJP Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Pelaksanaan RPJP Daerah 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJM Daerah setiap 5 (lima) tahun. RPJP Daerah digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJMD sesuai dengan visi, misi, dan program Gubernur yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan keuangan daerah, serta program prioritas daerah.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Gubernur yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun pertama periode Pemerintahan Gubernur berikutnya, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD dapat digunakan sebagai pedoman penentuan prioritas dan sasaran pembangunan RKPD.

Dalam hal RPJMD periode berkenaan belum ditetapkan, namun demikian Gubernur terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan APBD pada tahun pertama pemerintahannya, melalui mekanisme perubahan APBD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKPD dan RAPBD sebagaimana dimaksud diatas, maka jangka waktu keseluruhan RPJPD adalah 2005-2025.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005–2025 adalah untuk :

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

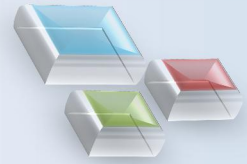
Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

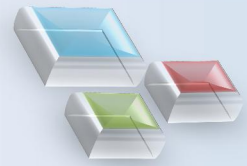
DAFTAR ISI



Daftar Isi	ii - iii
Daftar Tabel.....	iv – v
Daftar Gambar.....	vi
Daftar Grafik.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I - 2
1.3. Maksud dan Tujuan	I - 4
1.4. Hubungan RPJPD Provinsi Papua dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I - 4
1.5. Sistematika Penulisan	I - 6
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II - 8
2.1. Penerapan Otonomi Khusus	II - 8
2.1.1. Perlindungan, Keberpihakan, dan Pemberdayaan	II - 9
2.1.2. Hak-Hak Dasar	II - 9
2.1.3. Politik, Hukum dan HAM	II - 11
2.1.4. Kewenangan Pemerintahan Otonomi Khusus	II - 13
2.2. Aspek Geografi dan Demografi	II - 14
2.2.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II - 14
2.2.2. Potensi Pengembangan Wilayah	II - 23
2.2.3. Wilayah Rawan Bencana	II - 32
2.2.4. Aspek Demografi	II - 33
2.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II - 36
2.3.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II - 36
2.3.2. Kesejahteraan Sosial.....	II - 42
2.3.3. Seni Budaya dan Olahraga	II - 48
2.4. Aspek Pelayanan Umum	II - 52
2.4.1. Urusan Layanan Wajib	II - 52
2.4.2. Urusan Layanan Pilihan	II - 80
2.5. Aspek Daya Saing Daerah	II - 88
2.5.1. Kemampuan Ekonomi Daerah	II - 88
2.5.2. Fasilitas Wilayah / Infrastruktur	II - 90
2.5.3. Investasi.....	II - 92
BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	III - 96
3.1. Permasalahan Pembangunan	III - 96
3.1.1. Kependudukan	III - 97

3.1.2.	Pendidikan	III - 98
3.1.3.	Kesehatan	III - 99
3.1.4.	Pekerjaan Umum	III - 100
3.1.5.	Perhubungan	III - 100
3.1.6.	Ketahanan Pangan	III - 100
3.1.7.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	III - 101
3.1.8.	Sumber Daya Alam dan Lingkungan	III - 102
3.1.9.	Perekonomian dan Keuangan Daerah	III - 103
3.1.10.	Pertanahan	III - 104
3.1.11.	Ketersediaan Listrik	III - 105
3.1.12.	Sarana Air Bersih	III - 105
3.1.13.	Sanitasi	III - 105
3.1.14.	Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan	III - 105
3.1.15.	Penataan Ruang	III - 106
3.1.16.	Perencanaan Pembangunan	III - 106
3.1.17.	Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Kampung	III - 107
3.1.18.	Ketentraman dan Ketertiban	III - 107
3.2.	Isu Strategis	III - 107
3.2.1.	Isu Internasional	III - 108
3.2.2.	Isu Nasional	III - 108
BAB IV	VISI DAN MISI	IV - 119
4.1.	Visi	IV - 119
4.2.	Misi	IV - 122
BAB V	SASARAN DAN ARAH PEMBANGUNAN	V - 125
5.1	Sasaran Pembangunan Jangka Panjang	V - 125
5.2	Arah Pembangunan Daerah	V - 130
5.2.1	Arah Kebijakan Jangka Panjang	V - 130
5.2.2	Tahapan Pembangunan Jangka Panjang	V - 155
5.3	Sasaran Pokok	V - 162
BAB VI	KAJIAN PELAKSANAAN	VI - 165
6.1.	Prinsip Kaidah Pelaksanaan	VI - 165
6.2.	Perubahan Dokumen Perencanaan	VI - 166
BAB VII	PENUTUP	VII - 167

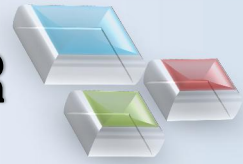
DAFTAR TABEL



Tabel 2.1	Nama Kabupaten, Ibukota, Luas Wilayah, Jumlah Distrik Dan Kampung/Kelurahan Di Provinsi Papua	7
Tabel 2.2	Luas Laut Dan Panjang Garis Pantai Di Provinsi Papua	10
Tabel 2.3	Kawasan Perbatasan Dan Pulau-Pulau Terluar Di Provinsi Papua	10
Tabel 2.4	Kondisi Kelerengan Di Provinsi Papua	11
Tabel 2.5	Rata-rata Suhu Udara dan Kelembaban Berdasarkan Stasiun Tahun 2010 dan 2011 di Papua	12
Tabel 2.6	Panjang Sungai Dan Luas Daerah Tangkapan Di Provinsi Papua	13
Tabel 2.7	Tutupan Lahan Provinsi Papua	15
Tabel 2.8	Distribusi Penggunaan Lahan Provinsi Papua	16
Tabel 2.9	Potensi Mineral Logam Dan Non-Logam Di Provinsi Papua.....	20
Tabel 2.10	Hasil Identifikasi Bahaya Menurut Pembagian Wilayah Di Provinsi Papua	25
Tabel 2.11	Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk	27
Tabel 2.12	Nominal Dan Pertumbuhan PDRB Tahun 2006 S/D 2010.....	30
Tabel 2.13	Persentase Kontribusi Pdrb Sektoral Provinsi Papua Dengan Dan Tanpa Tambang Tahun 2006-2010.....	32
Tabel 2.14	PDRB Provinsi Papua Berdasarkan Penggunaan	33
Tabel 2.15	Kecenderungan Komponen-Komponen Ipm Di Provinsi Papua Tahun 2006 – 2010.....	37
Tabel 2.17	Beberapa Pendapat Ilmuwan Antropologi Mengenai Pengelompokan . Masyarakat Dan Budaya Asli Papua	42
Tabel 2.18	Tingkat Kelulusan Siswa Di Provinsi Papua	48
Tabel 2.19	Perkembangan Jumlah Puskesmas, Pustu, Puskesmas Keliling Dan Posyandu Provinsi Papua Tahun 2006 – 2010	49
Tabel 2.20	Perkembangan Jumlah Tenaga Dokter Dan Medis Lainnya di Provinsi Papua	50
Tabel 2.21	Panjang Jalan Di Provinsi Papua Di Rinci Menurut Status Jalan, Kawasan Pembangunan Dan Kabupaten/Kota Tahun 2008.....	53
Tabel 2.22	Bandar Udara Pusat Penyebaran Di Provinsi Papua.....	54

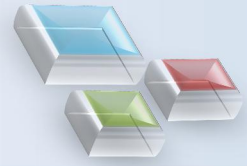
Tabel 2.23	Kondisi Pelabuhan Udara Perintis Di Provinsi Papua.....	55
Tabel 2.24	Kondisi Pelabuhan Laut Utama Di Provinsi Papua.....	56
Tabel 2.25	Lokasi, Jenis, Dan Debit Sumber Air Bersih Di Provinsi Papua.....	60
Tabel 2.26	Kawasan Konservasi Provinsi Papua.....	63
Tabel 2.27	Luas Lahan Gambut Di Provinsi Papua (Dalam Ha)	65
Tabel 2.28	Kawasan Mangrove Di Provinsi Papua	66
Tabel 2.29	Satuan Wilayah Pengembangan Provinsi Papua	69
Tabel 2.30	Instansi Pemerintah yang ada Di Provinsi Papua.....	72
Tabel 2.31	Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Pengusahaan Tahun 2007.....	75
Tabel 2.32	Potensi Perkebunan Rakyat Di Provinsi Papua Tahun 2008.....	75
Tabel 2.33	Luas Hutan Menurut Peta Paduserasi Provinsi Papua (Ha).....	76
Tabel 2.34	Produksi Pertambangan PT. Freeport Menurut Jenis Hasil.....	77
Tabel 2.35	Produksi Perikanan Provinsi Papua (TON)	78
Tabel 2.36	Kepadatan Jaringan Listrik PLN Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2010	85
Tabel 2.37	Potensi Sungai Di Provinsi Papua Sebagai Pembangkit Tenaga Listrik	85
Tabel 2.38	Rencana dan Realisasi PMDN dan PMA di Provinsi Papua Tahun 2007-2009.....	86
Tabel 2.39	Posisi Dana Simpanan Dan Posisi Kredit Rupiah Dan Valuta Asing di Provinsi Papua Tahun 2007 – 2009 (RP TRILYUN).....	87
Tabel 3.1	Tahapan Dan Skala Prioritas Rjpn 2005-2025	109
Tabel 3.2	Tabel 5.1 Indikator Makro Pencapaian Sasaran Pembangunan Jangka Panjang	131
Tabel 5.2	Indikator Target Kinerja Sasaran Pokok Pembangunan Provinsi Papua 2005 – 2025.....	163
Tabel 5.3	Isu Strategis Provinsi Papua	109

DAFTAR GAMBAR



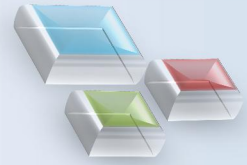
Gambar 2.1 Peta Administratif Provinsi Papua	9
Gambar 2.2 Peta Produksi Perikanan Budidaya Propinsi Papua	19
Gambar 2.3 Peta Kemiskinan Di Provinsi Papua Tahun 2009	40
Gambar 2.4 Peta Budaya Papua Berdasarkan Penyebaran Bahasa	44
Gambar 2.5 Peta Rumah Tangga Tanpa Akses Ke Air Bersih.....	59
Gambar 4.1 Keterhubungan 4 (Empat) Elemen Pokok Visi	120
Gambar 5.1 Tahapan Pembangunan Jangka Panjang	158

DAFTAR GRAFIK



Grafik 2.1	Piramida Penduduk Provinsi Papua Tahun 2010	29
Grafik 2.2	PDRB Perkapita Dengan Tambang Dan Tanpa Tambang (Juta Rupiah) Provinsi Papua Tahun 2006-2010.....	34
Grafik 2.3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi Di Indonesia Tahun 2010.....	36
Grafik 2.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010	36
Grafik 2.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Papua, 2005 - 2010	46
Grafik 2.6	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Papua Tahun 2005-2010	46
Grafik 2.7	Jumlah Guru Provinsi Papua Tahun 2005-2010.....	47
Grafik 2.8	Distribusi Panjang Jalan Menurut Statusnya di Provinsi Papua Tahun 2009 (%)	52
Grafik 2.9	Kondisi Jalan Di Provinsi Papua Tahun 2009(Dalam %).....	52
Grafik 2.10	Perkembangan Produktifitas Lahan Tanaman Pangan Di Provinsi Papua Tahun 2006 – 2009.....	74

BAB I PENDAHULUAN



1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945, salah satu tujuan penyelenggaraan negara adalah terciptanya kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan menjadi isu utama penyelenggaraan pembangunan Provinsi Papua yang hingga kini masih jauh dari harapan. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagai pengakuan dan pemberian kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Papua menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua meskipun dalam pelaksanaannya masih sering berbenturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun hal ini bukan merupakan babak baru bagi Provinsi Papua untuk menata dan membangun dirinya sesuai dengan adat istiadat dan potensi yang dimiliki sehingga berbagai permasalahan dasar pembangunan diharapkan dapat ditanggulangi. Beberapa masalah yang masih menjadi ganjalan dan merupakan bagian dari problem nasional adalah kebijakan dan arah pembangunan selama ini belum berdampak langsung secara nyata bagi masyarakat, menimbulkan kesenjangan antar kelompok, antar wilayah, dan antar sektor. Kegagalan dalam pelembagaan sosial kemasyarakatan dan hukum yang mengakibatkan ketidakadilan di bidang sosial, ekonomi, politik, dan hukum juga sering terjadi sehingga mengarah pada disintegrasi Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta mengancam keberlanjutan proses pembangunan.

Sebagai upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan dan mengakomodir Undang-Undang OTSUS, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua. Tujuan dari penyusunan RPJPD ini adalah untuk mencapai tujuan nasional dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yaitu menyejahterakan kehidupan rakyat Papua khususnya orang asli Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional dan tujuan otonomi khusus

tersebut, perlu ditetapkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Papua.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 150 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai acuan kebijakan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, tak terkecuali Provinsi Papua. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, untuk kurun waktu 2005-2025, sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap 5 (lima) tahun. Dokumen perencanaan tersebut bersifat makro yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah, di mana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua harus dapat menjadi acuan bagi penyusunan RPJMD Provinsi Papua dan yang akan diturunkan lagi sebagai acuan Renstra dan RKPD. Kesemua dokumen ini berpedoman pada visi dan misi arah pembangunan jangka panjang sehingga terdapat kesinambungan dan target sasaran yang utuh dengan tujuan utama pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan kelestarian serta keutuhan ciptaan guna mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat.

1.1 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 merupakan landasan konstitusional dari RPJP Provinsi Papua, sedangkan landasan operasional adalah ketentuan peraturan perundangan yang berhubungan dengan pembangunan Provinsi Papua.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat, Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1969;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 47);
3. Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Lembar Negara Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
7. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125;
10. Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025,;
11. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725;
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693;
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

RPJP Provinsi Papua disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Provinsi Papua dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah dalam kerangka dan tujuan nasional.

Tujuan penyusunan RPJPD Provinsi Papua adalah:

- a. Memberikan gambaran umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir tahun 2025;
- b. Menjabarkan indikasi dari gambaran umum yang diinginkan dan bagaimana mencapainya;
- c. Memberikan pedoman umum bagaimana mencapai sasaran pembangunan yang dibagi dalam 4 (empat) tahapan berbentuk arah kebijakan;
- d. Merupakan pedoman bagi calon Gubernur dalam menyusun visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan;
- e. Merupakan pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMD;
- f. Menjadi acuan bagi Kabupaten/Kota untuk penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota

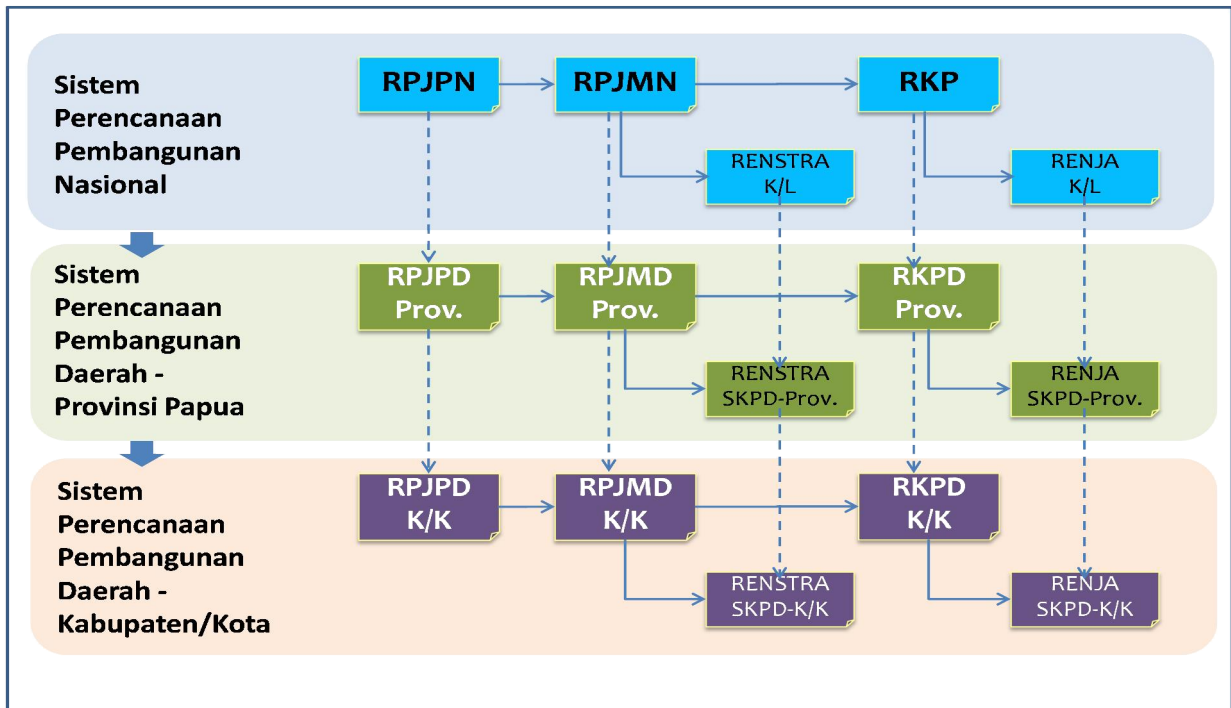
1.3 HUBUNGAN RPJPD PROVINSI PAPUA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga kesinambungan kemajuan dan kesatuan Nasional. Oleh karena itu, sistem perencanaan pembangunan saling terkait, mulai dari tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Masing-masing tingkatan perencanaan memiliki tujuan spesifik, tetapi juga memiliki tujuan agregatif dari sistem perencanaan yang ada di bawahnya.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan RPJP, RPJM dan RKPD. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua merupakan

hasil integrasi dari Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap dinamika lingkungan, baik skala internasional, nasional, maupun regional. Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang berada di wilayah Papua dapat dilihat pada gambar berikut ini

Gambar 1.1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

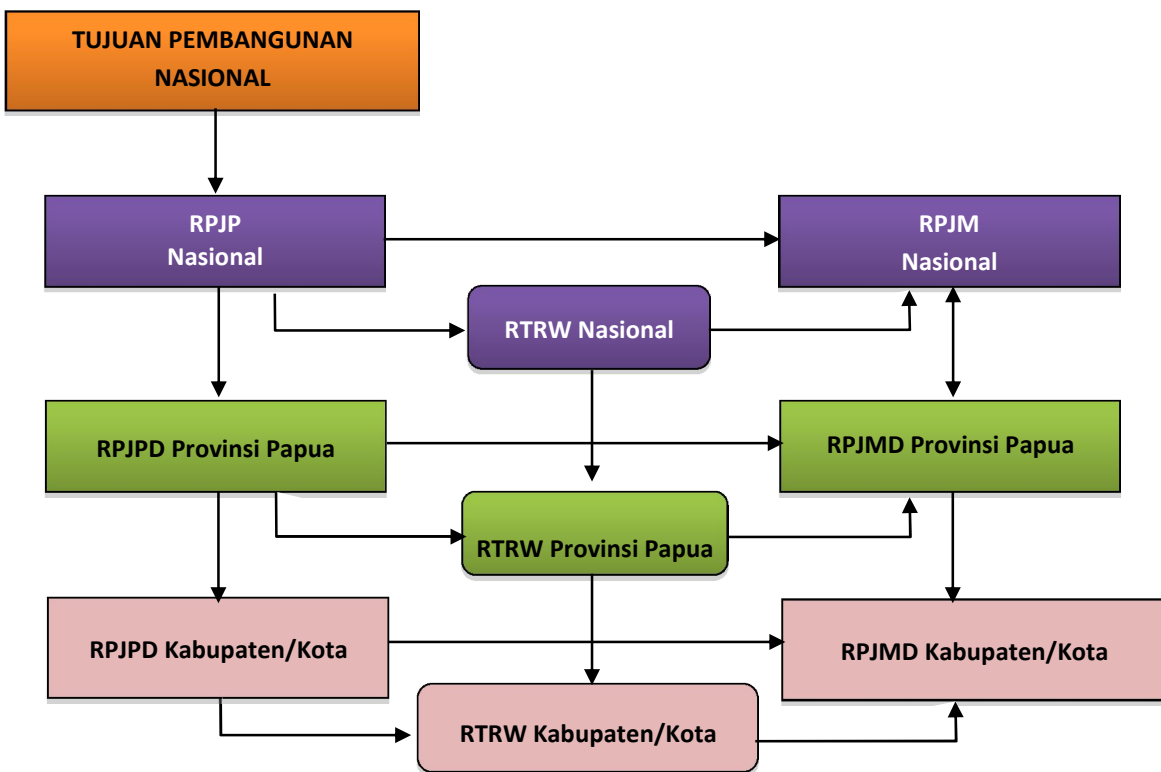


Sebagaimana dapat dilihat pada gambar di atas, secara hierarki, RPJPD Provinsi Papua disusun berdasarkan RPJP Nasional dan menjadi acuan bagi penyusunan RPJPD kabupaten/kota di seluruh wilayah Provinsi Papua. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua merupakan penjelmaan dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Provinsi Papua dengan memperhatikan RPJM Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua mengurutkan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, dan program kewilayahan dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Atas dokumen-dokumen

perencanaan dimaksud, SKPD menyusun dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan dalam bentuk Renstra SKPD dan Renja SKPD.

Penyusunan RPJPD Provinsi Papua antara lain didasarkan pada kajian aspek tata ruang yang ada. Selanjutnya, visi dan misi pembangunan jangka panjang ikut menentukan perencanaan tata ruang wilayah provinsi. Sasaran dan arah pembangunan jangka panjang harus dapat diterjemahkan ke dalam perencanaan tata ruang. Berikut ini diagram alur yang memperlihatkan kedudukan RTRW Provinsi Papua dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional. Pada gambar di bawah tampak jelas bahwa peran RPJPD sangat penting dalam kaitannya dengan RTRW provinsi dan kedudukannya bagi perencanaan jangka panjang (RPJPD dan RTRW) kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua. Kedua dokumen tersebut menjadi salah satu rujukan utama penyusunan RPJMD.

Gambar 1.2 Hubungan RPJPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan RPJPD Provinsi Papua meliputi 7 (tujuh) bab, terdiri dari:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Maksud dan tujuan
- 1.3 Landasan hukum
- 1.4 Hubungan antara RPJPD dengan dokumen Rencana Pembangunan Lainnya.
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

- 2.1 Aspek Geografis dan Demografis
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum
- 2.4 Aspek Daya Saing Daerah.

BAB III Analisis Isu-isu Strategis

- 3.1 Permasalahan Pembangunan
- 3.2 Isu strategis.

BAB IV Visi dan Misi Daerah

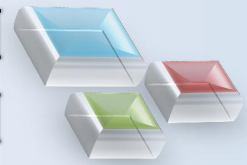
- 4.1 Visi
- 4.2 Misi
- 4.3 Tujuan dan Sasaran

BAB V Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

- 5.1 Sasaran Pembangunan Jangka Panjang
- 5.2 Arah Pembangunan Daerah
- 5.2 Sasaran Pokok

BAB VI Kaidah Pelaksanaan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



Papua merupakan provinsi yang terletak di bagian paling Timur Indonesia dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini. Papua sebelumnya dikenal dengan berbagai nama, seperti New Guinea, berasal dari bahasa Spanyol, Nueva Guinea, diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Ortiz De Retez pada tahun 1545 karena melihat ciri-ciri fisik manusia yang sama dengan manusia yang hidup di belahan Afrika, Guinea. Nugini Belanda (*Nederlands New Guinea*), diberi nama oleh pemerintahan Belanda pada tahun 1956, Provinsi Irian Barat pada periode 1969 – 1973, lalu menjadi Provinsi Irian Jaya dan hingga akhirnya menjadi Provinsi Papua secara resmi setelah ditetapkannya UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Oleh karena itu pada sub bab selanjutnya diawali dengan penjelasan penerapan Otonomi Khusus di Provinsi Papua.

Pada dasarnya penduduk asli Papua terdiri atas kelompok-kelompok suku yang hidup di daerah-daerah pedalaman dataran tinggi/pegunungan dan dataran rendah/pesisir. Orang asli Papua terdiri dari 253 suku dan bahasa yang berbeda, yang berciri fisik, berkulit hitam dan berambut keriting. Bersama masyarakat asli Australia (Aborigin) dan Negritos dari Filipina, masyarakat adat Papua merupakan tipe kelompok Negroid Timur.

2.1 PENERAPAN OTONOMI KHUSUS

Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang kemudian menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Khusus sendiri adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran Provinsi Papua, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua diberikan oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 No. 135 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4151) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 57 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843). Undang-undang Otsus

yang terdiri dari 79 pasal ini mengatur kewenangan-kewenangan Provinsi Papua dalam menjalankan Otonomi Khusus. Otonomi khusus ini diberikan sebagai salah satu cara untuk membangun kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan meletakkan dasar yang kukuh bagi berbagai upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Provinsi Papua.

2.1.1 Perlindungan, Keberpihakan, dan Pemberdayaan

Penerapan Otonomi Khusus di Provinsi Papua didasari dengan Perlindungan, Keberpihakan dan Pemberdayaan Orang Asli Papua, dimana orang asli Papua berhak memperoleh kesempatan dan diutamakan untuk mendapatkan pekerjaan dalam semua bidang pekerjaan, dan pembangunan diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur kampung dan pemberdayaan ekonomi.

Usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan, yang pengaturannya ditetapkan dengan Perdasus. Pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat yang dilakukan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat adat agar dapat berperan dalam perekonomian seluas-luasnya. Penanam modal yang melakukan investasi di wilayah Provinsi Papua harus mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat setempat. Pemberian kesempatan berusaha Perundingan yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan penanam modal harus melibatkan masyarakat adat setempat.

2.1.2 Hak-Hak Dasar

Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun. Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Masyarakat adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.

Hak-hak masyarakat adat tersebut meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak Ulayat

adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya.

Orang asli Papua berhak memperoleh kesempatan dan diutamakan untuk mendapatkan pekerjaan dalam semua bidang pekerjaan di wilayah Provinsi Papua berdasarkan pendidikan dan keahliannya. Dalam hal mendapatkan pekerjaan di bidang peradilan, orang asli Papua berhak memperoleh keutamaan untuk diangkat menjadi Hakim atau Jaksa di Provinsi Papua. Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Sedangkan penduduk Papua, adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua.

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan penduduk Provinsi Papua wajib menegakkan, memajukan, melindungi, dan menghormati Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua. Untuk hal itu Pemerintah membentuk perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Provinsi Papua. Untuk menegakkan Hak Asasi Manusia kaum perempuan, Pemerintah Provinsi berkewajiban membina, melindungi hak-hak dan memberdayakan perempuan secara bermartabat dan melakukan semua upaya untuk memposisikannya sebagai mitra sejajar kaum laki-laki.

Dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa di Provinsi Papua dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Tugas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah melakukan klarifikasi sejarah Papua untuk pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merumuskan dan menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi.

Dalam hal keagamaan, setiap penduduk Provinsi Papua memiliki hak dan kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban untuk menjamin :

1. Kebebasan, membina kerukunan, dan melindungi semua umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

2. Menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama.
3. Mengakui otonomi lembaga keagamaan.
4. Memberikan dukungan kepada setiap lembaga keagamaan secara proporsional berdasarkan jumlah umat dan tidak bersifat mengikat.

Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan di Provinsi Papua. Pemerintah Provinsi wajib melindungi, membina, dan mengembangkan kebudayaan asli Papua. Pemerintah Provinsi berkewajiban membina, mengembangkan, dan melestarikan keragaman bahasa dan sastra daerah guna mempertahankan dan memantapkan jati diri orang Papua. Selain bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa Inggris ditetapkan sebagai bahasa kedua di semua jenjang pendidikan. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di jenjang pendidikan dasar sesuai kebutuhan.

Dalam PERDASUS Nomor 1 Tahun 2007 Pasal 8 disebutkan bahwa Kabupaten/Kota memperoleh 60% dari dana OTSUS yang diberikan. Bagian masing – masing Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, kondisi geografis dan tingkat kesulitan wilayah, pendapatan asli daerah, penerimaan pajak bumi dan bangunan dan PDRB. Sedangkan untuk formula penghitungan besaran alokasi dengan kriteria tersebut diatur oleh peraturan Gubernur.

Berdasarkan PERDASUS Nomor 1 Tahun 2007 Pasal 10 dan 11, disebutkan pula bahwa untuk Provinsi peruntukan bagi masing-masing bidang adalah: pendidikan sebesar 30%, Kesehatan dan gizi sebesar 15%, pemberdayaan ekonomi masyarakat sebesar 15%, pembangunan infrastruktur kampung sebesar 10%, belanja aparatur pemerintah provinsi, DPRP dan MRP sebesar 8% dan dana abadi sebesar 5%. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota peruntukan bagi masing bidang antara lain: pendidikan sebesar 30%, kesehatan dan gizi sebesar 15%, pemberdayaan ekonomi masyarakat sebesar 15%, pembangunan infrasturktur Kampung sebesar 10%, belanja aparatur sebesar 5% dan dana abadi sebesar 5%.

2.1.3 Politik, Hukum dan HAM

Pemerintahan Daerah Provinsi Papua terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) sebagai badan legislatif, dan Pemerintah Provinsi sebagai badan eksekutif. Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dibentuk Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli

Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

Kekuasaan legislatif Provinsi Papua dilaksanakan oleh DPRP. Jumlah anggota DPRP adalah 1 1/4 (satu seperempat) kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh mudah, jika jatah anggota DPRD Papua menurut UU Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD adalah 100 kursi maka jumlah kursi DPRP adalah 125 kursi.

Pemerintah Provinsi Papua dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai Kepala Eksekutif yang disebut Gubernur. Gubernur dibantu oleh Wakil Kepala Daerah yang disebut Wakil Gubernur. Tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan dengan Perdasus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan Provinsi-provinsi lain di Indonesia, yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua memerlukan syarat khusus, diantaranya adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:

1. Orang asli Papua.
2. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdikan kepada rakyat Provinsi Papua.
3. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana, kecuali dipenjara karena alasan-alasan politik.
4. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dipenjara karena alasan-alasan politik.

MRP beranggotakan orang-orang asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan yang jumlahnya masing-masing sepertiga dari total anggota MRP. Keanggotaan dan jumlah anggota MRP ditetapkan dengan Perdasus. Masa keanggotaan MRP adalah 5 (lima) tahun. Pelantikan anggota MRP dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri. MRP mempunyai tugas dan wewenang, yang diatur dengan Perdasus, antara lain :

1. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh DPRP.
2. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama-sama dengan Gubernur.

2.1.4 Kewenangan Pemerintahan Otonomi Khusus

Sedangkan untuk peraturan daerah, Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam UU 21/2001. Perdasus dibuat dan ditetapkan oleh DPRP bersama-sama Gubernur dengan pertimbangan dan persetujuan MRP. Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perdasi dibuat dan ditetapkan oleh DPRP bersama-sama Gubernur.

Di dalam UU No.21 tahun 2001 diatur tentang jenis-jenis pendapatan daerah yang dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis penerimaan. Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memberikan prioritas kepada Provinsi Papua. Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun. Dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Pada tahun 2004 pembagian dana OTSUS didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan RI No.352/KM.3-44/SKO-OTSUS/2004 tanggal 08 Juli 2004 dan No.0598/KM.3-44/SKO-OTSUS/2004 tanggal 7 September 2004 dan No.1115/ KM.344/SKO-OTSUS/ 2004 tanggal 14 Desember 2004.

Dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua (dan provinsi-provinsi hasil pemekarannya) mendapat bagi hasil dari pajak dan sumber daya alam sebagai berikut:

1. Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 90% (sembilan puluh persen).
2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 80% (delapan puluh persen).
3. Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar 20% (dua puluh persen).
4. Kehutanan sebesar 80% (delapan puluh persen).
5. Perikanan sebesar 80% (delapan puluh persen).
6. Pertambangan umum sebesar 80% (delapan puluh persen).
7. Pertambangan minyak bumi 70% (tujuh puluh persen) selama 25 tahun terhitung dari tahun 2001. Mulai tahun ke-26 menjadi 50% (lima puluh persen).
8. Pertambangan gas alam 70% (tujuh puluh persen) selama 25 tahun terhitung dari tahun 2001. Mulai tahun ke-26 menjadi 50% (lima puluh persen).

Sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) penerimaan Pertambangan minyak bumi dan gas alam dialokasikan untuk biaya pendidikan, dan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) untuk kesehatan dan perbaikan gizi.

2.2 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.2.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Provinsi Papua secara geografis terletak antara garis koordinat 10⁰’ LU - 9⁰30’ LS dan 134⁰ BT-141⁰01’ BT, yang berbatasan dengan Samudra Pasifik (Sebelah Utara), Laut Arafura (Sebelah Selatan), Papua Barat (Sebelah Barat) dan Papua Nugini (Sebelah Timur). Provinsi Papua memiliki luas wilayah 317.062 km² atau 20% dari luas daratan Indonesia. Daratan didominasi oleh pegunungan dan perbukitan dan juga memiliki pulau yang berjejer di sepanjang pesisirnya. Di bagian tengah Papua terdapat pegunungan tengah yang membelah pulau ini menjadi dua yaitu Papua bagian utara dan Papua bagian selatan. Secara Administratif Provinsi Papua terdiri dari 29 wilayah administratif yaitu 1 Kota Jayapura dan 28 kabupaten yaitu Merauke, Jayawijaya, Jayapura, Paniai, Puncak Jaya, Nabire, Mimika, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Tolikara, Sarmi, Keerom, Waropen, Supiori, Mamberamo Raya, Nduga, Lani Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Puncak, Dogiyai, Deyiai, Intan Jaya. Di antara daerah tersebut sebanyak 14 kabupaten (setengahnya) terletak di daerah pegunungan dan 14 kabupaten lainnya terletak di daerah dataran rendah dan pesisir.

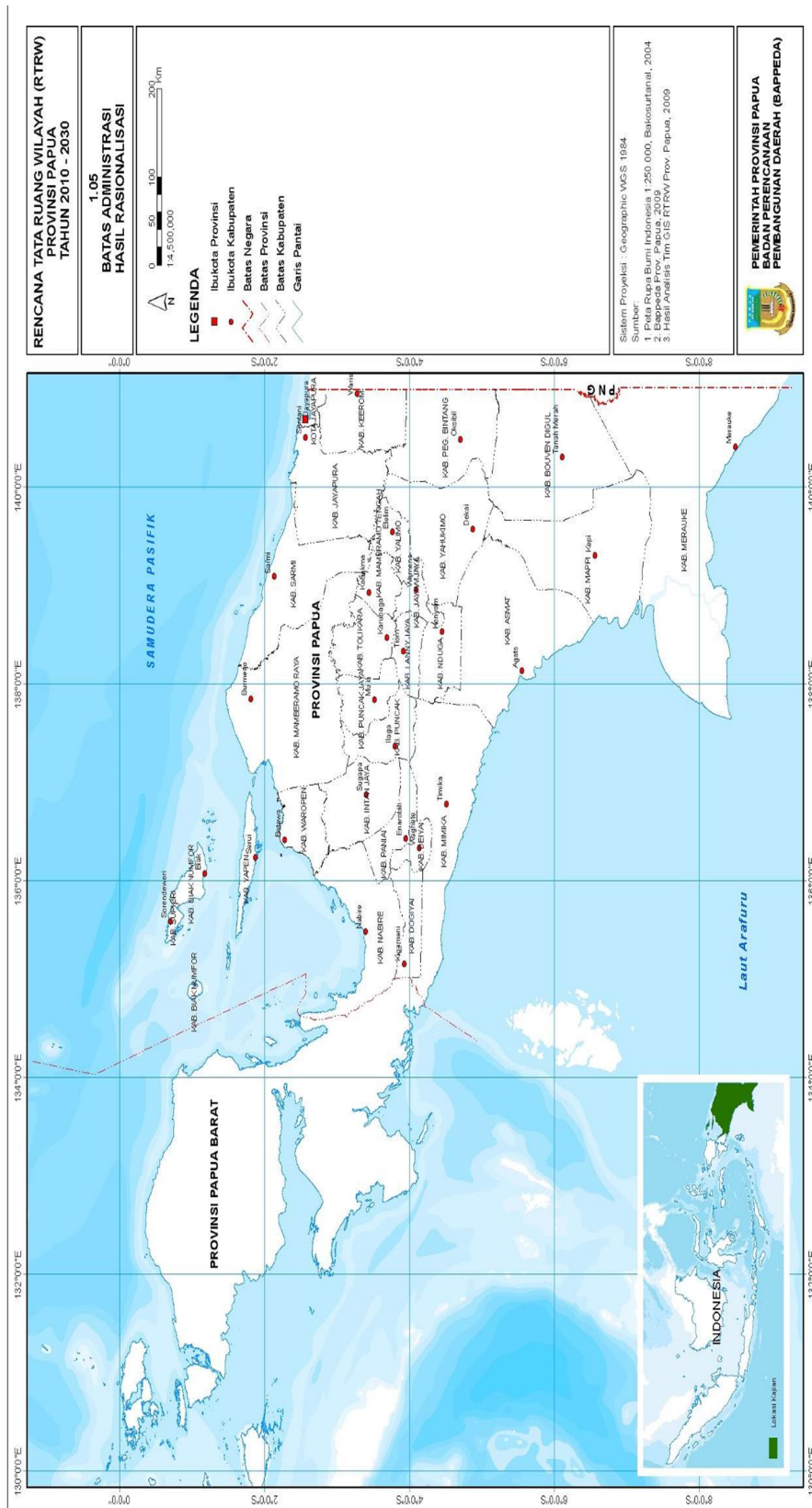
Tabel 2.1 Nama Kabupaten, Ibukota, Luas Wilayah, Jumlah Distrik Dan Kampung/Kelurahan Di Provinsi Papua

No	Kabupaten/Kota	Nama Ibukota	Jumlah Distrik	Jumlah Kampung/Kelurahan	Luas Berdasarkan Bps (Km ²)
1	Merauke	Merauke	20	168	47,406,90
2	Jayawijaya	Wamena	11	117	2 331,19
3	Jayapura	Sentani	19	142	14 390,16
4	Paniai	Enarotali	10	70	20 686,54
5	Puncak Jaya	Mulia	8	67	2 446,50
6	Nabire	Nabire	14	81	4 549,75
7	Mimika	Timika	12	85	2 300,37
8	KepulauanYapen	Serui	12	111	4 936,37

No	Kabupaten/Kota	Nama Ibukota	Jumlah Distrik	Jumlah Kampung/ Kelurahan	Luas Berdasarkan Bps (Km ²)
9	Biak Numfor	Biak	19	187	13 017,45
10	BovenDigoel	Tanah Merah	20	108	24 665,98
11	Mappi	Keppi	10	137	23 178,45
12	Asmat	Agats	8	147	24 687,57
13	Yahukimo	Dekai	51	518	15 057,90
14	PegununganBintang	Oksibil	34	275	14 655,36
15	Tolikara	Karubaga	35	514	6 149,67
16	Sarmi	Sarmi	10	86	13 965,58
17	Keerom	Arso	7	61	9 015,03
18	Waropen	Botawa	10	69	5 381,47
19	Supiori	Sorendiwari	5	38	634,24
20	Memberamo Raya	Burmeso	8	58	28 034,86
21	Nduga	Kenyam	8	32	5 825,22
22	Lanny Jaya	Tiom	10	143	3 439,79
23	Memberamo Tengah	Kobakma	5	59	3 384,14
24	Yalimo	Elelim	5	27	3 658,76
25	Puncak	Ilaga	8	80	5 618,84
26	Dogiyai	Kigamani	10	79	4 522,15
27	Deyiai	Tigi	5	30	2 325,88
28	Intan Jaya	Sugapa	6	37	9 336,60
29	Kota Jayapura	Jayapura	5	39	950,38
Papua			389	3,619	316 553,07

Sumber: BPS Provinsi Papua

Gambar 2.1 Peta Administratif Provinsi Papua



Kondisi Kawasan

Selain berupa daratan, Provinsi Papua juga merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan lautan yaitu Laut Arafuru dan Samudera Pasifik. Keadaan ini membuat Papua sangat kaya di bidang perikanan laut tangkap. Kabupaten Mimika dan Mamberamo Raya merupakan dua kabupaten yang memiliki luas wilayah laut terluas yaitu masing-masing 2.832,30 km² dan 1.650 km². Pengembangan ekonomi berdasarkan potensi ikan tangkap sangat berpotensi untuk dikembangkan.

Tabel 2.2 Luas Laut Dan Panjang Garis Pantai Di Provinsi Papua

KABUPATEN/ KOTA	SATUAN	LUAS WILLAYAH LAUT	SATUAN	PANJANG GARIS PANTAI
Supiori	Km ²	35,83	Km	281
Biak Numfor	Km ²	47,85	Km	548,9
Yapen	Km ²	40,03	Km	897,72
Waropen	Km ²	666,69	Km	225,59
Sarmi	Km ²	31,85	Km	306, 10
Nabire	Km ²	234,97	Km	560,18
Mamberamo Raya	Km ²	1650,37	Km	291,55
Jayapura	Km ²	1,35	Km	134,5
Kota Jayapura	Km ²	2,81	Km	116,77
Mimika	Km ²	2832,3	Km	444,44
Mappi	Km ²	582,14	Km	161,5
Asmat	Km ²	2845,91	Km	287,71
Merauke	Km ²	3179,51	Km	775,16

Sumber : BPS, Provinsi Kabupaten dan Kota tahun 2008, Bakorsutanl, dan hasil pengukuran GIS skala 1:250.000 tahun 2009 dari citra landsat 2000.

Selain karena letaknya yang berbatasan dengan laut, Provinsi Papua juga merupakan kawasan strategis nasional karena berbatasan langsung dengan Papua New Guinea dan Australia di mana sebagian pulau yang berbatasan dengan kedua negara tersebut ada yang berpenduduk dan ada yang tidak berpenduduk. Ada enam pulau yang ada di negara perbatasan dengan data sebagai berikut :

Tabel 2.3 Kawasan Perbatasan Dan Pulau-Pulau Terluar Di Provinsi Papua

No	Nama Pulau	Kabupaten/Kota	Negara yang berbatasan	Keterangan
1	P. Fanildo	Supiori	Palau	Tidak berpenduduk
2	P. Brass	Supiori	Palau	Berpenduduk
3	P. Bepondi	Supiori	Palau	Berpenduduk
4	P. Liki	Sarmi	Palau	Berpenduduk
5	P. Kolepon/P. Dolok	Merauke	Australia	Berpenduduk

Sumber : Biro Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah Provinsi Papua 2008

Provinsi Papua memiliki tiga deretan pegunungan yaitu (1) di lingkaran luar terdapat Pegunungan Utara, (2) di lingkaran dalam terdapat deretan Pegunungan Selatan, dan (3) deretan Pegunungan Tengah yang merupakan tepi dari *The Australian Continent*. Di bawah bentangan pegunungan di Papua tersebut terdapat berbagai potensi pertambangan alam yang besar, antara lain emas, tembaga, perak dan minyak bumi beserta turunannya.

Topografi

Wilayah Provinsi Papua berada pada ketinggian diantara 0 – 3.000 meter berupa wilayah daratan, pesisir, hingga pegunungan dengan wilayah tertinggi di Kabupaten Puncak Jaya dengan ketinggian 2.980 mdpl, sedangkan yang paling rendah adalah Kota Jayapura yang rata-rata hanya 4 mdpl. Berdasarkan hasil analisis GIS RTRW Provinsi Papua tahun 2009, terdapat 43,3% tanah di wilayah Papua berada di kelas kemiringan di atas 40 derajat.

Tabel 2.4 Kondisi Kelerengan Di Provinsi Papua

Lereng (%)	Kategori	Luas (Km2)	%	Kabupaten
0 – 8	Landai	14.518.478,84	45,9	Merauke, Asmat, Mappi, Mamberamo Raya, Mimika
8 – 15	Agak curam	3.015.352,51	9,5	Bouven Digul, Merauke, Mappi, Mamberamo Raya, Sarmi
15 – 40	Terjal	406.596,40	1,3	Sarmi, Mamberamo Raya, Jayapura, Keerom, Nabire
40 >	Sangat Terjal	13.708.119,14	43,3	Pegunungan Bintang, Memberamo Raya, Yahukimo, Puncak Jaya, Nabire

Sumber: Hasil analisis GIS RTRW Provinsi Papua, 2009

Klimatologi

Klimat Papua termasuk dalam iklim hutan hujan tropis (*tropical rain forest*), yang dipengaruhi oleh musim kemarau, hujan dan angin Muson. Penentuan musim hujan dan kemarau di Papua agak sulit dilakukan dengan tegas oleh karena di musim kemarau untuk beberapa waktu curah hujan pun tetap tinggi. Namun demikian secara umum musim kemarau di Papua terjadi di bulan Juni–September, dan musim hujan di bulan Desember–Maret, dengan masa peralihan pada bulan April–Mei dan bulan Oktober–November.

Berdasarkan data tahun 2011, rata-rata suhu udara di Papua berkisar antara 19,8°C hingga 28,4°C, di mana suhu rata-rata terendah terjadi di stasiun pengamatan

Wamena sedangkan suhu rata-rata tertinggi terpantau di stasiun pengamatan Dok II Jayapura. Sedangkan dari sisi kelembaban udara terpantau di stasiun Nabire yaitu 86 sedangkan yang terendah terpantau di stasiun Wamena (77). Kondisi ini berbeda dengan kondisi pada tahun 2011 di mana rata-rata suhu terendah tercatat di Wamena yaitu 20°C sedangkan yang tertinggi terpantau di stasiun Merauke yaitu 28,3°C.

Tabel 2.5 Rata-rata Suhu Udara dan Kelembaban Berdasarkan Stasiun Tahun 2010 dan 2011 di Papua

Stasiun	2010				2011			
	Max	Min	Rata-rata	Kelembaban	Max	Min	Rata-rata	Kelembaban
Merauke	31.6	24.5	27.6	81	31	23,9	27,4	80
Wamena	27.3	14.8	19.8	77	24	13,6	22,1	76
Sentani	31.7	23.5	27.5	82	31,8	23,9	26,9	83
Nabire	32.1	23.7	22.6	86	31,9	23,7	28,7	85
Serui	31.3	23.7	27.6	81	-	-	-	-
Biak	30.5	24.6	27.3	85	29,8	24,5	27,1	85
Dok II JYPR	32.1	25.3	28.4	79	31,9	25	28,1	79
Sarmi	32	23.7	28.2	85	-	-	-	-

Sumber: BPS, Provinsi Papua, 2012

Hidrologi

Provinsi Papua merupakan provinsi terluas di Indonesia dan masih memiliki alam yang baik. Ada 64 DAS yang terdapat di Provinsi Papua dengan total panjang sungai adalah 35,924.737 dan total luas daerah tangkapan adalah 572,753.823. Keberadaan DAS ini menunjukkan bahwa Provinsi Papua memiliki kekayaan sumber daya air dan wilayah ekosistem DAS yang luar biasa sepanjang kondisi DAS tetap terus dipertahankan. Keberlanjutan fungsi ekosistem DAS mampu mendukung berbagai kebutuhan hidup manusia baik dari sisi keberlanjutan tanah, air, dan udara, serta berbagai keanekaragaman hayati yang ada. Potensi alam ini merupakan modal pembangunan dan sumber hidup masyarakat Papua yang harus terus dikelola dengan baik agar berkelanjutan. Provinsi Papua mempunyai rawa yang luas terutama disepanjang pesisir pantai selatan Papua yang terbentang hingga ke hulu sungai-sungai di pedalaman. Daerah rawa sangat potensial dengan keanekaragaman hewan dan biota hidup seperti ikan, buaya dan udang.

Tabel 2.6 Panjang Sungai Dan Luas Daerah Tangkapan Di Provinsi Papua

No	Nama DAS	Panjang Sungai (Km)	Luas Daerah Tangkapan (Km ²)
1	Memberamo Hilir	660.457	80.099,16
2	Turitatu Hilir	788.626	47.872,90
3	Turiku Hilir	930.094	34.912,40
4	Apauwer	252.59	2.998,00
5	Wiru	155.114	2.494,80
6	Verkume	155.798	1.845,50
7	Biri	116.087	2.173,00
8	Sermo	151.866	1.599,20
9	Tor	244.29	3.153,60
10	Van Dallen	513.64	8.585,15
11	Wediman	875.27	11.492,30
12	Digul Kanan	420.912	7.253,70
13	Digul Hilir	1.178.81	33.698,04
14	Digul Kiri	615.753	6.162,50
15	Digul Timur	196.058	3.189,91
16	Digul Barat	196.01	2.489,90
17	Ein Hilir	1.956.46	65.315,43
18	Ein Hulu	509.886	5.337,72
19	Wapoga	574.393	10.637,14
20	Sobger	1.262.169	35.174,80
21	Turitatu Tengah	662.304	20.312,70
22	Bigadu	315.5	9.103,53
23	Sirowo	150.915	4.013,00
24	Turiku Hulu	10.628.779	7.925,61
25	Maro	559.804	9.909,00
26	Tami	320.328	7.015,40
27	Omba	157.253	3.427,60
28	Yawe	147.289	4.170,30
29	Lorentz	747.383	8.717,65
30	Kumbe	262.015	3.282,00
31	Wanggar	361.35	4.776,20
32	Kapiraya	121.26	2.860,90
33	Peter	682.955	10.992,30
34	Otokwa	187.337	3.395,30
35	Sentani	35.04	968,60
36	Grime	110.725	1.050,00
37	Bunga	397.783	3.457,07
38	Vriendschaps	475.472	5.912.508,00
39	Bian	640.218	12.080,12

No	Nama DAS	Panjang Sungai (Km)	Luas Daerah Tangkapan (Km ²)
40	Kamura	118.525	2.187,60
41	Rombak	346.119	3.005,25
42	Nadubuai	222.608	1.971,20
43	Brazza	990.666	10.088,02
44	Parongga	31.33	593,20
45	Yawe	61.296	1.272,00
46	Akimuga	288.925	2.660,10
47	Mimika	477.71	4.670,01
48	Aidoma	306.834	3.184.599,00
49	Minajerwi	447.597	5.054,70
50	Cemara	280.4	2.556,40
51	Otokwa	181.007	1.662,00
52	Nordwest	624.39	7.832,82
53	Odamun	264.36	6.808,00
54	Dolok	224.573	3.119,20
55	Bulaka	331.26	6.418,01
56	Siriwo	155.759	1.187,60
57	Kumbe	38.4	483,90
58	Paranggo	94.882	774,90
59	Kamura	270.438	2.243,20
60	Mappi	524.98	7.596,00
61	Biak	84.27	467,15
62	Supiori	83.457	245.917,00
63	Yapen	298.986	1.266.089,00
64	Gesa	457.979	5.551,02

Sumber: RTRW 2009, Pemerintah Provinsi Papua

Penggunaan Lahan

Selain kekayaan alam berupa DAS yang sangat luas, Provinsi Papua masih memiliki kawasan hutan yang luas dengan tutupan lahan yang relatif masih utuh. Dari data luas tutupan lahan tampak bahwa hutan lahan kering primer dan hutan rawa primer merupakan daerah yang terluas yaitu masing-masing sekitar 15 juta ha dan 4,5 juta ha, kemudian hutan lahan kering sekunder seluas 3,2 juta ha dan savana seluas 1,4 juta ha. Selebihnya terbagi dalam klasifikasi pertanian, permukiman, tanah terbuka, dan rawa.

Tabel 2.7 Tutupan Lahan Provinsi Papua

No	Jenis Tutupan Lahan	Jumlah (Ha)	Jumlah (%)
1	Hutan Lahan Kering Primer	15.095.379	49,00
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	3.242.254	10,52
3	Hutan Mangrove Primer	1.108.293	3,60
4	Hutan Mangrove Sekunder	66.992	0,22
5	Hutan Rawa Primer	4.490.323	14,58
6	Hutan Rawa Sekunde	606.928	1,97
7	Hutan Tanaman Industri	3.578	0,01
8	Pelabuhan Udara/Laut	894	0,00
9	Perkebunan	45.449	0,15
10	Permukiman	69.490	0,23
11	Pertambangan	1.417	0,00
12	Pertanian campur semak	819.624	2,66
13	Pertanian Lahan Kering	68.304	0,22
14	Rawa	551.113	1,79
15	Savana	1.404.474	4,56
16	Sawah	11.052	0,04
17	Semak/Belukar	755.429	2,45
18	Semak/Belukar Rawa	1.272.003	4,13
19	Tambak	471	0,00
20	Tanah Terbuka	606.038	1,97
21	Transmigrasi	86.968	0,28
22	Tubuh Air	500.520	1,62
23	Tidak Teridentifikasi	844.521	2,74
	Jumlah	30.806.993	100

Sumber : RTRW 2009, Pemerintah Provinsi Papua

Sedangkan berdasarkan jenis penggunaannya maka jenis penggunaan untuk hutan lindung dan hutan produksi memiliki luasan yang hampir sama yaitu masing-masing sekitar 8,3 juta Ha dan 8,2 juta Ha, sedangkan untuk jenis penggunaan hutan produksi konversi dan KSA/KPA mencapai luasan 6,4 juta Ha dan 5,6 juta Ha. Sisanya adalah untuk jenis penggunaan hutan produksi terbatas (1,8 juta Ha), APL seluas 0,8 juta Ha, dan Perairan sekitar 0,5 juta Ha.

Tabel 2.8 Distribusi Penggunaan Lahan Provinsi Papua

No	Kabupaten/Kota	Luas Lahan Dalam Ha						Jumlah
		Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Produksi Konversi	Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Suaka / Pelestarian Alam	Areal Penggunaan Lain	
1	Kota Jayapura	11.754	28.9	21.561	3.298	5.892	13.051	84.456
2	Merauke	252.374	1.248.515	1.543.531		1.429.707	203.398	4.677.525
3	Jayawijaya	215.553		77.821		43.195	131.636	468.205
4	Jayapura	512.369	146.398	335.827	304.697	88.14	34.07	1.421.501
5	Nabire	347.386	232.044	130.029	276.269	104.816	82.983	1.173.527
6	Kep. Yapen	15.26	2.903	25.189	88.473	112.728	223	244.776
7	Biak Numfor	120.491	32.646		56.703	4.296	14.087	228.223
8	Paniai	1.044.711	232.274	165.943	14.093	40.52	7.113	1.504.654
9	Puncak Jaya	379.693		289.655		310.62	4.706	984.674
10	Mimika	386.433	188.165	592.093	145.601	687.345	60.209	2.059.846
11	Boven Digoel	90.65	1.688.782	772.427	71.339		37.999	2.661.197
12	Mappi	156.495	1.538.991	831.888	29.567		12.001	2.568.942
13	Asmat	331.123	830.229	235.142	69.697	310.075	24.85	1.801.116
14	Yahukimo	930.551	314.508	273.292	404	156.71	11.31	1.686.775
15	Peg. Bintang	1.254.541	14.679	72.99	13.927	6.867	19.647	1.382.651
16	Tolikara	173.439		103.544		175.388	3.527	455.898
17	Sarmi	180.699	379.367	308.074	270.192	267.262	19.356	1.424.950
18	Keerom	329.016	82.949	179.44	135.16	7.967	92.528	827.06
19	Waropen	236.301	134.116	152.437	10.546		19.839	553.239
20	Supiori	1.176	1.248			41.1	21.723	65.247
21	Mamb. Raya	496.492	881.086	188.153	225.666	898.542	7.699	2.697.638
22	Mamb. Tengah	138.884		17.745		93.819	1.621	252.069
23	Yalimo	168.779		654		52.407		221.84
24	Lanny Jaya	123.549		123.037		191.152	12.678	450.416
25	Nduga		97.822	48		598.405	1.096	697.371
26	Puncak							-
27	Dogiyai	295.655	31.688	45.685	53.483	37.24		463.751
28	Intan Jaya							-
29	Deiyai							-
J u m l a h		8.193.374	8.107.310	6.486.205	1.769.115	5.664.193	837.35	31.057.547

Sumber: RTRW 2009, Pemerintah Provinsi Papua

2.2.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua tahun 2010-2030, maka potensi pengembangan wilayah dalam jangka panjang adalah sebagai berikut :

Lahan Pertanian

Sumber daya lahan adalah sumber daya yang berupa ruang lahan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan kehidupan yang berupa lahan pertanian, lahan perkebunan. Papua merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan paling tinggi di Indonesia. Pada tahun 2003 kemiskinan di wilayah perdesaan berkisar sekitar 55%, sedangkan di perkotaan hanya 28%. Diindikasikan bahwa kemiskinan terjadi pada penduduk dengan mata pencaharian bertani. Sampai saat ini budaya bertani penduduk asli Papua masih peramu, dan sebagian sebagai peladang berpindah. Dengan demikian sebagian besar sumberdaya lahan di Provinsi Papua belum dimanfaatkan secara optimal. Percepatan pembangunan pertanian dapat diupayakan melalui klarifikasi status lahan untuk pembangunan pertanian oleh Pemerintah dan masyarakat adat, pengembangan infrastruktur pertanian termasuk jaringan jalan, pasar, peningkatan SDM, dan pemberdayaan masyarakat untuk membangun sektor pertanian. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lahan yang tersedia secara tepat dan lestari akan dapat mengangkat Provinsi Papua sebagai sentra produksi pertanian di wilayah timur, memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua, dan melestarikan sumber pangan lokal yang sudah terbukti adaptif untuk ketahanan pangan dan kelestarian budaya setempat.

Perikanan Tangkap

Wilayah perairan Papua sendiri, potensi lestari untuk ikan pelagis besar secara keseluruhan adalah 612.200 ton/tahun dan perikanan demersal untuk perairan Arafura dan sekitar perairan Papua sendiri sebesar 230.400 ton/tahun. Namun demikian jika mengaju pada hasil penelitian Uktoselja (1998), khususnya pada ikan cakalang yang ditangkap di perairan Indonesia Timur termasuk Papua, peningkatan produksi di atas perlu dicermati secara mendalam dan hati-hati. Sebagai petaan dapat dikemukakan bahwa persentase ukuran ikan cakalang > 2.6 kg yang tertangkap mengalami penurunan, dari 85,3% pada tahun 1991 menjadi 36,8% pada tahun 1996 (Uktolseja, 1998).

Di samping itu, selain potensi ikan-ikan pelagis dan ikan demersal yang telah disebutkan diatas, masih terdapat beberapa potensi perikanan laut Papua antara lain kepiting lobster, pari, udang serta beberapa potensi budidaya kerapu dan rumput laut. Kepiting banyak ditemui di Kabupaten Waropen, sedangkan udang di sekitar pesisir Asmat, Mappi, Sarmi dan Kabupaten Nabire. Begitu pula lobster banyak ditemui di Kabupaten Sarmi.

Sebagaimana tertera pula dalam Lampiran IX PP nomor 26 tahun 2008 tentang RTRWN, tertulis tentang kawasan andalan perikanan berada di daerah-daerah berikut :

- ❖ Timika (Tembagapura) dan sekitarnya
- ❖ Kawasan Biak
- ❖ Kawasan Merauke dan sekitarnya
- ❖ Kawasan Mamberamo – Lereh (Jayapura) dan sekitarnya
- ❖ Kawasan Andalan Laut Teluk Cenderawasih – Biak dan sekitarnya
- ❖ Kawasan Andalan Laut Jayapura – Sarmi

Kabupaten Merauke merupakan salah satu daerah dengan produksi perikanan tangkap yang paling tinggi di Papua mengingat lokasinya yang berhadapan dengan perairan lepas Laut Arafura yang terkenal dengan potensi ikan demersal dan pelagik nya. Namun potensi dapat dikembangkan dengan kegiatan ekonomi perikanan dan juga pengelolaan lebih lanjut seperti pengolahan ikan, pengalengan dan lain sebagainya. Saat ini untuk pengalengan ikan terdapat di Kecamatan Wanam Kabupaten Merauke. Terlihat dari fasilitas yang ada untuk perikanan yaitu TPI dan PPI nya hingga kini tidak berfungsi sama sekali. Hal ini menurut sumber Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Merauke diakibatkan karena perilaku nelayan-nelayan lokal yang masih sulit untuk pergi ke suatu tempat yang telah disediakan. Namun disisi lain terdapat satu fasilitas skala nasional yang sedang dibangun di Gudang Arang Kabupaten Merauke yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS). Dengan adanya fasilitas ini diharapkan semua kapal-kapal penangkap ikan akan masuk mendaratkan hasil tangkapannya disini dahulu sebelum di ekspor atau dikirim antar pulau keluar dari Merauke. Berdasarkan pengamatan tim survey, saat ini kondisi pelabuhan perikanan samudera masih dalam tahap pembangunan tiang pancang.

Sarana pendukung produksi perikanan yang ada di Merauke juga sudah didukung oleh adanya Balai Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPPMP), dimana fungsi dan tugas balai ini adalah mengeluarkan sertifikasi dan pengujian baku mutu untuk produksi perikanan yang akan di ekspor. Negara tujuan ekspor dari wilayah Merauke ini mencapai Hongkong, Spanyol, Vietnam, China, Thailand, Australia, Jepang dan Italia untuk jenis komoditi udang beku. Sedangkan untuk ikan beku negara tujuan ekspor adalah China dan Thailand serta fillet ikan dengan negara tujuan Australia. Jenis-jenis produk olahan lainnya antara lain ikan asin, gelembung ikan, kulit dan sirip hiu, kulit pari, kulit buaya, tulang hiu, dan ebi.

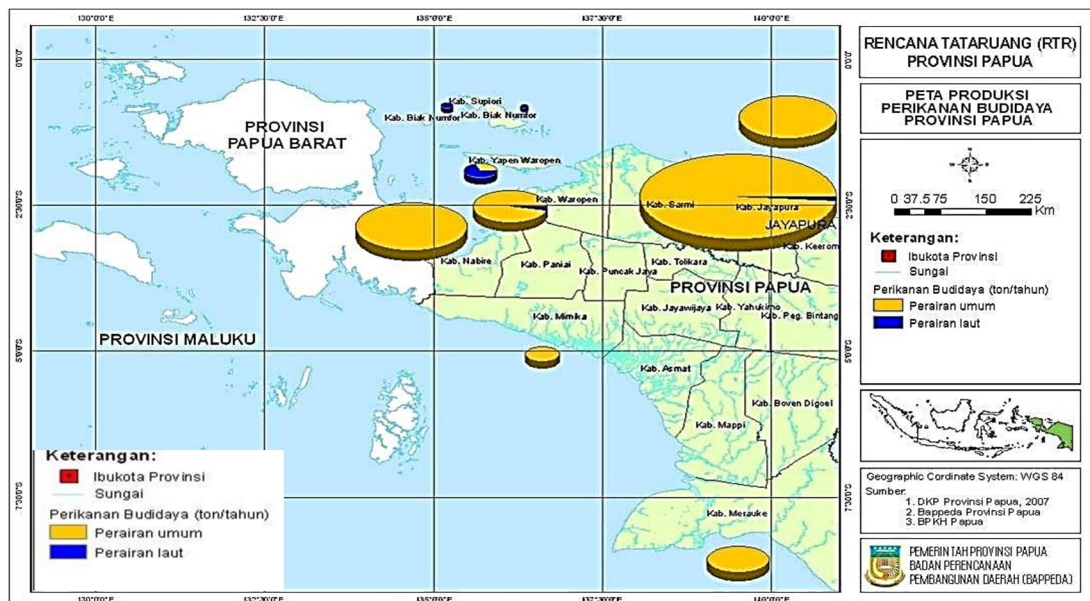
Perikanan Budidaya

Kawasan perikanan budidaya berdasarkan aturan Tata Ruang Nasional Pasal 67 ayat 1 dan 2 ditetapkan dengan kriteria :

- 1) Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan budidaya dan industri pengolahan hasil perikanan; dan/atau
- 2) Tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

Perikanan yang termasuk di sini adalah perikanan budidaya perairan umum, terutama kerapu dan baronang. Sedangkan untuk perairan laut terbesar adalah di Kabupaten Biak dengan budidaya rumput laut sebagai unggulan. Saat ini Dinas Perikanan dan Kelautan sudah akan memberikan pengembangan budidaya terutama rumput laut mengingat kondisi fisik dan lokasi di pulau-pulau yang berada di kabupaten Biak sangat menunjang untuk pengembangan budidaya ini. Perlu diperhatikan bahwa pengembangan budidaya ke depan tidak saja menguatkan infratraktur dan fisik sarana melainkan perlu pula dipersiapkan sumberdaya manusia dan pengelola budidaya yang memiliki ketekunan untuk berusaha, mampu mengatasi permasalahan lokal serta siap bersaing dengan kondisi persaingan ke depan paling tidak untuk skala lokal Papua dan antar pulau.

Gambar 2.2 Peta Produksi Perikanan Budidaya Propinsi Papua



Untuk Kabupaten Merauke, sedang dikembangkan komoditas jenis Udang Serak, dengan dukungan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Merauke. Dari Total 50 hektar yang

tersedia, baru terealisasi kurang lebih 24 hektar di Kecamatan Kurik dan Semangga. Selain itu di wilayah Kampung Payum Kabupaten Merauke juga direncanakan akan dibuka tambak udang seluas 150 hektar hasil kerja sama dengan investor.

Pertambangan

Provinsi Papua yang diketahui terbentuk sejak jutaan tahun yang lalu sebagai hasil benturan Lempeng Benua Australia (*Australia Plate*) yang bergerak ke Utara dengan Lempeng Pasifik (*PacificCrustal Plate*) yang bergerak ke arah Barat. Akibat benturan antara lempeng tersebut di atas menimbulkan keuntungan dan kerugian. Keuntungannya adalah dengan terjadinya penerobosan batuan beku dengan komposisi sedang ke dalam batuan sedimen di atasnya, memungkinkan terbentuknya mineralisasi logam yang berasosiasi dengan perak dan emas. Konsentrasi mineral logam diperkirakan terdapat pada Lajur Pegunungan Tengah Papua.

Posisi tektonik Papua yang berada di Lingkar Pasifik, yang berupa cincin gunung api memberikan potensi endapan mineral yang besar, telah diketahui sepanjang jalur tersebut dari Amerika Selatan, Philipina, Papua New Guinea sampai ke Selandia Baru telah ditemukan banyak endapan emas dan tembaga kelas dunia. Posisi ini sangat menguntungkan bagi Provinsi Papua dantak tertutup kemungkinan terdapat endapan logam selain Grasberg dan Ertsberg yang telah ditemukan pada saat ini yang ditambang oleh PT. Freeport Indonesia (PFI).

Dari data sekunder yang terhimpun, diperoleh data potensi mineral logam maupun non logam yang dapat dilihat pada Tabel Potensi Mineral Logam dan Non Logam untuk daerah-daerah yang potensial di seluruh Provinsi Papua.

Tabel 2.9 Potensi Mineral Logam Dan Non-Logam Di Provinsi Papua

KABUPATEN /KOTA	LOKASI	JENIS GALIAN MINERAL	KETERANGAN
Kota Jayapura*	S.Numbai, Kodam	Emas	Peninjauan Kanwil DPE (Positif)
	S. Yapis, Kel. Imbi	Emas	Peninjauan Kanwil DPE (Indikasi)
	S. APO	Emas	Peninjauan Kanwil DPE (Indikasi)
	S. Entrop	Emas	Peninjauan Kanwil DPE (Indikasi)
	S. Perumnas IV	Emas	Peninjauan Kanwil DPE (Positif)
	S. Borgonjie	Emas	Peninjauan Kanwil DPE



KABUPATEN /KOTA	LOKASI	JENIS GALIAN MINERAL	KETERANGAN	
			(Indikasi)	
	S. Kujabu, Waena	Emas	Peninjauan Kanwil DPE (Indikasi)	
Kab. Jayapura	Sentani	Kobal	Belum Diteliti Secara Detail (Indikasi)	
		Tungsten	Belum Diteliti Secara Detail (Indikasi)	
		Nikel	Belum Diteliti Secara Detail (Indikasi)	
		Asbes	Belum Diteliti Secara Detail (Indikasi)	
	S. Kemiri	Emas	Peninjauan Kanwil DPE (Indikasi)	
	Senatani	Emas	Peninjauan Kanwil DPE (Indikasi)	
	S. Deyau, Sentani	Emas	Peninjauan Kanwil DPE (Indikasi)	
	S. Sawe, Sentani	Emas	Peninjauan Kanwil DPE (Indikasi)	
	S. Ayapo, Sentani	Emas	Peninjauan Kanwil DPE (Positif)	
	S. Tami	Krom	Kadar 3.45-42.52% (Data Kanwil DPE)	
	Tg. Tanahmerah	Talk	Sebagai Lapisan Atau Lensa Dengan Tebal 1 Meter, Dijumpai Pada Batas Serpentinit Dan Sekis Kristalin	
	Waris	Emas	Data Kanwil DPE	
		Tembaga	Cu 1284 Ppm	
		Timah Hitam	Pb 3312 Ppm	
	Web	Emas	Anomali Geokimia	
		Perak		
	Arso	Krom	Indikasi	
		Batubara	Indikasi	
	Depapre	Marmar	Data Kanwil DPE	
	Bonggo	Batubara	Indikasi	
	Genyem,	Batubara	Kadar 4470 Kal/Gram, Belerang 5.6%,	
Nimboran		Abu 12.5%, Kelembaban 18.2%		
		Karbon Tertambat 27.3%, Zat Terbang 42.1%		
Siduarsi	Nikel Laterit	Indikasi		
S. Pis dan S.Pas	Emas	Indikasi		

KABUPATEN /KOTA	LOKASI	JENIS GALIAN MINERAL	KETERANGAN
	Senggi	Tembaga	Anomali 669 Ppm
		Timah Hitam	Anomali 2482 Ppm
Kab. Jayawijaya	Kurulu	Pasir Kuarsa	Sumberdaya 387 Juta Metrik Ton, Kadar Sio292.2-99.6%
		Batu Gamping	Kadar Cao 39.05-50.75% Dan Mgo 0.35-3.76%
	Assolokobal	Pasir Kuarsa	Sumberdaya 21.594.200 Ton
		Batu Gamping	Cadangan 3.391.300 Ton
	Asologaima	Batubara	Data Kanwil DPE (Indikasi)
	Borme Utara	Emas	Anomali Geokimika (Indikasi)
	Okbibab	Tungsten	Indikasi
	Soba	Pb-Zn	Indikasi
		(Timbal-Seng)	Indikasi
	Holuwon	Pb-Zn	Indikasi
		(Timbal-Seng)	Indikasi
	Bokondini	Tembaga	Indikasi
		Emas	Indikasi
	Tiom	Emas, Batugaram	Indikasi
	Mbua	Batubara	Indikasi
	Nalca	Emas	Anomali Geokimia (Indikasi)
Dabera	Emas	Data PT Freeport Ind	
	Tembaga	Indikasi	
Aboyi	Emas	Indikasi	
	Molibdenum	Indikasi	
Kab. Nabire	Yaur (Kwatisore)	Pasir Kuarsa	Sumberdaya 4.095 Juta Ton
		Granit	Sumberdaya 125 Juta Ton
		Marmer	Penyebaran 16.25 Km2
			Sumberdaya 163 Juta Ton Berwarna Abu-Abu Kehitaman, Kuat Tekan 942-100 Kg/Cm2
		Penyerapan Air 0.09-10, Berat Jenis 2.76-2.78	
Logari	Emas	Anomali Geokimia, Data PT IEMC	
S. Sanoba, Nabire	Emas	Data Kanwil DPE (Positif)	
S. Nabaruwa, Nabire	Emas	Data Kanwil DPE (Positif)	
Nabaruwa, Nabire	Marmer	Sumberdaya 150 Juta Ton	
Uwapa	Seng	Indikasi	
	Kaolin	Sumberdaya 12 Juta Ton	

KABUPATEN /KOTA	LOKASI	JENIS GALIAN MINERAL	KETERANGAN
	S. Bumi, Topo	Emas	Data Kanwil DPE
	S. Cemara, Topo	Emas	Data Kanwil DPE
	Haiura	Emas	Anomali Geokimia
		Tembaga	Data PT IEMC
	Wapoga	Emas	Anomali Geokimia
			Data PT IEMC
Kab. Biak Numfor	Supiori	Emas	Data Kanwil DPE
		Batukapur	Indikasi
	Korido	Kalsit	Berupa Bongkah Berukuran 15-20 Cm
	Biak	Phosphat	Indikasi
Pasir Besi		Indikasi	
Yapen Waropen	Waropen Bawah	Emas	Data Kanwil DPE
	Waropen Atas	Batubara	Indikasi
	Yapen	Pasir Besi	Indikasi
	P. Num	Nikel	Indikasi
Merauke	Jair	Emas	Indikasi
		Perak	Indikasi
	Mediptana	Tembaga	Kadar Cu 50.90 Ppm
		Timah Hitam	Kadar Pb 55.80 Ppm
		Seng	Kadar Zn 7.87 Ppm
Kuoh	Emas	Indikasi	
Puncak Jaya	Obaa	Emas	Indikasi
		Perak	Indikasi
	Ilu	Arsenit	Indikasi
		Tembaga	Nilai Anomali, Cu 16-60.6 Ppm, Pb 11.1-37.1 Ppm
	Ilaga	Arsenit	Anomali Geokimia
		Tembaga	Data PT Freeport Ind
		Emas	PT NBM
	Perak		
Paniai	Enarotali	Pasir Kuarsa	
	Bilogai (Wabu)	Emas	Cadangan Terindikasi
		Garnet	Data PT Freeport Ind
	Mapia	Emas	Cadangan Terindikasi
		Tembaga	PT NBM
	Kemabu	Tembaga	Anomali Geokimia
		Emas	Data PT Freeport Ind
	Uwagimamo	Emas	Anomali Geokimia
Tembaga		Data PT Freeport Ind	
	Bismuth		

KABUPATEN /KOTA	LOKASI	JENIS GALIAN MINERAL	KETERANGAN
	Mandoga	Tembaga	Anomali Geokimia
		Emas	Data PT Freeport Ind
	Komopa	Tembaga	Cadangan Terindikasi
		Emas	PT NBM
Mimika	Tembagapura	Tembaga	Telah Diusahakan PT FI
		Perak	Kadar Cu 1.59%,Au 1.78Ppm
		Emas	

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua

Keterangan : Kabupaten pemekaran masih digabung dengan kabupaten induk

Pariwisata

Kekayaan potensi pariwisata Provinsi Papua hingga kini masih lebih banyak yang belum dikembangkan dengan baik, sehingga belum menjadi obyek wisata yang menarik bagi wisatawan asing dan domestik. Untuk pengembangan sektor pariwisata di Provinsi Papua, obyek wisata potensial dibagi menjadi tujuh kawasan/obyek wisata ditambah satu jenis obyek wisata yang belum berhasil teridentifikasi jenisnya, seperti berikut ini:

- ❖ Kawasan Wisata Bahari: termasuk kategori Wisata Bahari adalah obyek wisata yang terdapat di pantai, teluk, danau, tanjung dan laut.
- ❖ Kawasan Wisata Air Terjun: Obyek Wisata Air Terjun, termasuk obyek wisata sungai.
- ❖ Kawasan Wisata Pulau: Provinsi Papua selain sebagai salah satu pulau besar di Indonesia, juga memiliki ratusan pulau-pulau kecil.
- ❖ Kawasan Wisata Budaya: Provinsi Papua, selain kaya akan sumberdaya alam, juga memiliki keragaman budaya lokal yang tinggi dan unik. Budaya orang Papua didominasi oleh refleksi hubungan mereka dengan alam dan leluhurnya.
- ❖ Kawasan Wisata Sejarah: Provinsi Papua selain memiliki obyek wisata seperti yang telah disebutkan di atas, juga memiliki obyek wisata yang bernuansa sejarah, terutama yang mengpetakan jejak sejarah perjuangan Provinsi Papua.
- ❖ Obyek Wisata Religi: Di Provinsi Papua juga terdapat obyek wisata yang berlatar belakang keagamaan, yang disebut sebagai Obyek Wisata Religi.
- ❖ Kawasan Wisata Alam: Panorama alam di Provinsi Papua, baik di darat maupun di laut, banyak menyimpan pesona alam yang bisa menyejukkan hati dan pandangan bagi pencinta keindahan alami.
- ❖ Obyek Wisata Lain-lain: Dari sumber-sumber kawasan/obyek wisata potensial terdapat beberapa obyek wisata yang belum teridentifikasi jenisnya, yaitu: KP Asmat (Kabupaten Asmat), TW Parieri (Kabupaten Biak Numfor), SM. D. Bian (Kabupaten

Boven Digoel), DS. Anguruk (Kabupaten Mappi), TR. Timika dan Kuala Kencana (Kabupaten Mimika), KP Paradoi (Kabupaten Nabire), dan KP. Kurudu dan KP. Paradoi (Kabupaten Waropen).

2.2.3 Wilayah Rawan Bencana

Beberapa wilayah di Provinsi Papua rentan terhadap bencana dan telah diidentifikasi seperti tampak pada **Error! Reference source not found**. Berdasarkan hasil identifikasi tampak bahwa bahaya geologi sering terjadi di wilayah Pesisir Selatan Papua dan Pesisir Utara dan Kepulauan Papua, sedangkan bahaya tanah longsor juga teridentifikasi sering terjadi di kedua wilayah tersebut ditambah sebagian wilayah Pegunungan Tengah. Untuk bahaya Tsunami pernah terjadi di wilayah Pesisir Utara dan Kepulauan. Sedangkan bahaya iklim seperti banjir terjadi di wilayah Papua Selatan dan Utara, sedangkan kekeringan terjadi di wilayah Pegunungan Tengah meskipun seluruh wilayah Papua juga berpotensi untuk mengalami kekeringan.

Tabel 2.10 Hasil Identifikasi Bahaya Menurut Pembagian Wilayah Di Provinsi Papua

Pembagian Wilayah	Kabupaten/ Kota	Bahaya Geologi				Bahaya Iklim		
		Gempa Bumi	Tsunami	Gunung Api	Tanah Longsor	Badai Tropis	Banjir	Kekeringan
Pesisir Selatan Papua	Asmat	o	x	x	v	o	v	o
	Boven Digoel	o	x	x	v	x	o	o
	Mappi	o	x	x	o	v	v	o
	Merauke	o	x	x	o	v	v	v
	Mimika	o	x	x	v	o	v	o
Pesisir Utara Papua dan Kepulauan	Biak	v	v	x	o	v	v	o
	Dogiyai	v	o	x	o	o	o	o
	Jayapura	v	o	x	v	o	v	o
	Keerom	v	o	x	v	o	v	o
	Kota Jayapura	v	o	x	v	v	v	o
	Mamb. Raya	v	o	x	v	o	v	o
	Nabire	v	o	x	v	o	o	o
	Sarmi	v	o	x	v	v	o	o
	Supiori	v	v	x	o	v	o	o
	Waropen	v	v	x	v	o	o	o
Yapen	v	v	x	v	v	o	o	
Tengah Papua Pegunungan	Jayawijaya	v	x	x	v	x	v	v
	Lanny Jaya	v	x	x	o	x	o	v
	Mamb. Tengah	v	x	x	o	x	v	o
	Nduga	v	x	x	o	x	o	o
	Paniai	v	x	x	v	x	v	o

Pembagian Wilayah	Kabupaten/ Kota	Bahaya Geologi				Bahaya Iklim		
		Gempa Bumi	Tsunami	Gunung Api	Tanah Longsor	Badai Tropis	Banjir	Kekeringan
	Peg. Bintang	v	x	x	vv	x	o	o
	Puncak	v	x	x	o	x	o	v
	Puncak Jaya	v	x	x	v	x	o	v
	Tolikara	v	x	x	o	x	o	vv
	Yahukimo	v	x	x	vv	x	v	vv
	Yalimo	v	x	x	o	x	o	o

Keterangan:

Sumber :

x = Tidak terjadi

o = Mungkin terjadi

v = Telah terjadi

vv = Sering terjadi

1. Katalog gempa bumi merusak, **BADAN GEOLOGI (2006)**

2. Atlas Nasional Indonesia, **BAKOSURTANAL (2008)**

3. Badan Kesatuan Bangsa Prov. Papua (2009)

2.2.3 Aspek Demografi

Dalam bidang kependudukan terdapat beberapa isu dan masalah penting. Pertama adalah ketidakseimbangan antara pertambahan jumlah penduduk dengan ketersediaan fasilitas kesejahteraan. Pertambahan penduduk baik secara alamiah maupun karena dampak migrasi kurang dibarengi penyediaan fasilitas kesejahteraan yang memadai. Dampaknya ialah berbagai indikator kesejahteraan penduduk selama 30 tahun belakangan ini hanya meningkat tipis.

Berdasarkan hasil Sensus 2010 penduduk Papua berjumlah 2.833.381 jiwa atau rata-rata mengalami pertumbuhan 5,24% per tahun. Angka Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) ini adalah yang tertinggi di Indonesia selama kurun waktu 2000-2010. Wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak adalah di Kotamadya Jayapura sebanyak 9,56% diikuti oleh Kabupaten Merauke dan Kabupaten Jayawijaya dengan persentase yang hampir sama yaitu masing-masing sekitar 6,9%. Wilayah lain dengan jumlah penduduk tinggi adalah di Kabupaten Yahukimo, Mimika, Jayapura, Nabire, Biak Numfor, Paniai, Puncak Jaya, Tolikara, dan Lanny Jaya. Sedangkan sisanya rata-rata berpenduduk kurang dari 100.000 jiwa.

Dari kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa persebaran jumlah penduduk di Provinsi Papua tidak merata dan dengan tingkat kepadatan yang rendah 8,9 jiwa per km², sekaligus merupakan angka kepadatan penduduk terendah di Indonesia. Wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi ada di kota Jayapura mencapai 326 penduduk per km². Sebagian besar daerah yang memiliki kepadatan penduduk rendah berada di wilayah pegunungan dan pedalaman. Wilayah dengan kepadatan penduduk sekitar lebih dari 50 jiwa per km² ada di Kabupaten Lanny Jaya dan Biak Numfor, dan selebihnya kurang dari jumlah tersebut bahkan di beberapa tempat hanya mencapai 1 orang per km². Hal ini

jelas menunjukkan betapa tidak meratanya persebaran penduduk di wilayah yang sangat luas dan menjadi kendala bagi pelaksanaan pembangunan khususnya kemampuan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat. Biaya pelayanan kepada masyarakat juga menjadi sangat mahal. Situasi ini tampak jelas terlihat pada kendala pelayanan pendidikan, kesehatan, dan akses pada sarana dan prasarana kebutuhan hidup dasar. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi tampaknya menjadi daya tarik yang paling besar pengaruhnya terhadap tingkat kepadatan penduduk. Artinya semakin banyak dan baik sarana dan prasarana transportasi yang tersedia maka semakin padat jumlah penduduknya; sebaliknya semakin kurang ketersediaan sarana dan prasarana transportasi maka kepadatan penduduknya semakin rendah.

Tabel 2.11 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk

No	Kabupaten/Kota	Jumlah	Luas Wilayah	Kepadatan (org/km ²)
1	Merauke	195.716	43.240.95	4,53
2	Jayawijaya	196.085	27.649.45	7.09
3	Jayapura	111.943	14.350.95	7.80
4	Nabire	129.893	11.544.68	11.25
5	Yapen Waropen	82.951	2.424.56	34.21
6	Biak Numfor	126.798	1.965.05	64.53
7	Paniai	153.432	11.479.21	22.30
8	Puncak Jaya	101.148	5.329.30	18.98
9	Mimika	182.001	22.903.78	7.95
10	Boven Digoel	55.784	27.880.73	2.00
11	Mappi	81.658	25.944.01	3.15
12	Asmat	76.577	18.427.31	4.16
13	Yahukimo	164.512	12.955.75	12.70
14	Pegunungan Bintang	65.434	16.043.91	4.08
15	Tolikara	114.427	5.176.42	22.11
16	Sarmi	32.971	10.704.98	3.08
17	Keerom	48.536	8.767.58	5.54
18	Waropen	24.639	15.255.78	1.62
19	Supiori	15.874	969.260	16.38
20	Mamberamo Raya	18.365	16.852.18	1.09
21	Nduga	79.053	4.748.97	16.65
22	Lanny Jaya	148.522	2.961.09	50.16
23	Mamberamo Tengah	39.537	9.100.01	4.34
24	Yalimo	50.763	36.739.30	1.38
25	Puncak	93.218	10.421.83	8.94
26	Dogiyai	84.230	5.258.67	16.02
27	Intan Jaya	40.490	-	-

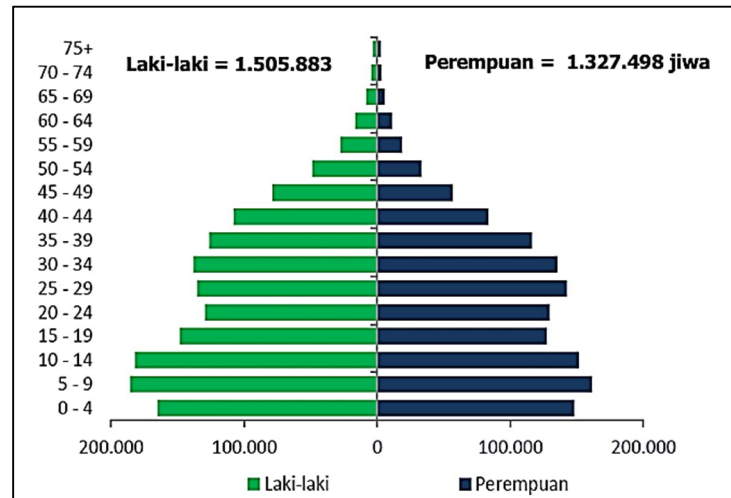
No	Kabupaten/Kota	Jumlah	Luas Wilayah	Kepadatan (org/km ²)
28	Deiyai	62.119	-	-
29	Kota Jayapura	256.705	786.18	326.52
	Jumlah	2.833.381	756.882	3.74

Sumber: Papua Dalam Angka (2011)

Jumlah penduduk Papua pada tahun 2009 adalah 2.097.482 jiwa dan meningkat menjadi 2,833,381 jiwa pada tahun 2010 menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk yang sangat tinggi selama 1 tahun terakhir. Hal ini mungkin disebabkan oleh tingginya arus migrasi dari luar Papua ke tanah Papua. Luasnya lahan, tingginya potensi pemanfaatan sumber daya alam dan kesempatan berusaha menjadi salah satu faktor pemicu migrasi ke wilayah ini, atau karena adanya pemekaran wilayah yang menyebabkan masih terjadi kerancuan dalam pendataan jumlah penduduk. Daerah dengan pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kabupaten Tolikara (12,59%) sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Pegunungan Bintang hanya sekitar 2,48 %.

Data piramida penduduk (**Error! Reference source not found.**) mengindikasikan komposisi penduduk usia muda (0 – 14 tahun) masih lebih banyak dibandingkan usia dewasa (14 tahun ke atas). Data ini antara lain menjelaskan tingginya angka kelahiran bayi, tingginya angka kematian ketika memasuki usia tua, terutama di atas 60 tahun. Rasio ketergantungan penduduk cukup tinggi yaitu 48,3%, artinya setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung 48 jiwa tidak produktif sehingga pendapatan keluarga lebih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Khusus untuk Papua dengan tingkat pendapatan per kapita riil yang masih rendah serta iklim berusaha yang belum berkembang, tingginya angka rasio ketergantungan ini menambah kesulitan tersendiri bagi masyarakat untuk mengembangkan diri. Selain itu, dari penduduk Papua pada tahun 2009 yang berjumlah sekitar 2,9 juta jiwa, sebagian besar (77%) tinggal di perdesaan sedangkan 33% sisanya tinggal di perkotaan. Lebih lanjut, dari jumlah penduduk Papua, 37,53% merupakan penduduk miskin dengan rata-rata garis kemiskinan mencapai Rp 282.776,-/kapita/bulan, di mana 96% penduduk miskin tinggal di perdesaan dan 4% sisanya di perkotaan. Pembangunan masyarakat desa untuk meningkatkan kualitas penduduk Papua harus menjadi agenda utama pembangunan.

Grafik 2.1 Piramida Penduduk Provinsi Papua Tahun 2010



Sumber : Papua Dalam Angka (2011)

2.3 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan pembangunan manusia ditinjau dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni dan olahraga.

2.3.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Produksi Domestik Regional Bruto sebagai indikator ekonomi dan pendapatan masyarakat terbentuk dari penjumlahan nilai tambah di semua sektor yang dikelompokkan melalui 9 (sembilan) lapangan usaha. Pada tahun 2010, PDRB Papua pada harga berlaku dengan tambang mencapai Rp 89.451,2 milyar atau meningkat sekitar 15% dari PDRB tahun 2009. Angka pertumbuhan ini tertinggi di Indonesia. Sumbangan terbesar berasal dari sektor pertambangan yang mencapai nilai Rp 56.484,33 milyar atau sekitar 63,1 % kemudian disusul oleh sektor pertanian yang utamanya berasal dari sub tanaman pangan yaitu sebesar 9,45%. Ketergantungan yang sangat tinggi pada sektor pertambangan masih mendominasi sumber penerimaan bagi Provinsi Papua. Dalam jangka panjang ketergantungan ini harus digantikan dengan sumber-sumber penerimaan yang baru yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan maupun dari kegiatan ekonomi lainnya yang tidak bersifat ekstraktif sumber daya alam. Selain bahwa tingkat ketergantungan pada tambang masih sangat tinggi, penghitungan PDRB berdasarkan harga berlaku masih mengandung inflasi sehingga tidak riil. Untuk itu, jika dilihat berdasarkan harga konstan tahun 2000, tampak bahwa PDRB Papua pada tahun 2010 sebesar Rp 22.620,3 milyar atau justru turun (2,65%) dibandingkan PDRB tahun 2009 atas dasar harga konstan tahun 2000. Hal ini disebabkan oleh adanya

penurunan sumbangan dari sektor pertambangan. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya pertumbuhan ekonomi riil di Papua, perlu dilihat juga dari PDRB tanpa tambang pada harga konstan tahun 2000.

PDRB Papua pada tahun 2010 tanpa tambang tercatat sebesar Rp 33.292,3 milyar atau meningkat sebesar 16,21% dibandingkan tahun 2009, namun apabila dilihat dari harga konstan tahun 2000, maka PDRB Papua tanpa tambang hanya mencapai 13.310,1 milyar atau hanya mengalami kenaikan sebesar 6,19% dibandingkan tahun 2009. Kontribusi terbesar tetap berasal dari sektor pertanian yang mencapai 11,98% pada tahun 2010 atau mengalami penurunan dibanding tahun 2009 yang mencapai 13,32%. Penurunan kontribusi sektor pertanian ini harus mendapatkan perhatian khusus karena sumber utama kegiatan perekonomian di Papua masih didominasi oleh sektor pertanian yang mampu memberikan lapangan pekerjaan formal maupun informal bagi masyarakat Papua. Termasuk di dalamnya sebagai upaya untuk ketahanan pangan. Secara umum, pertumbuhan PDRB Papua berdasarkan harga berlaku dengan tambang selama 5 tahun terakhir yaitu dari periode tahun 2006-2010 mengalami rata-rata pertumbuhan 18,15% per tahun, atau 4,58% per tahun apabila dihitung atas dasar harga konstan tahun 2000. Dengan demikian tampak bahwa tingkat inflasi di Papua relatif tinggi sehingga memberi pengaruh yang sangat signifikan pada harga riil. Sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi Papua tanpa tambang yang dihitung berdasarkan harga berlaku meningkat rata-rata 25,03% per tahun, angka pertumbuhan yang sangat tinggi khususnya disebabkan oleh tingginya nilai tambah di sektor bangunan, angkutan dan telekomunikasi yang mencapai indeks pertumbuhan hingga di atas 1.000. Namun apabila dilihat berdasarkan harga konstan tahun 2000 tanpa tambang maka tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun mencapai 10,79%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat inflasi di Papua sangat tinggi dan dominasi sektor pertambangan terhadap kontribusi perekonomian Papua sangat kuat.

Tabel 2.12 Nominal Dan Pertumbuhan PDRB Tahun 2006 S/D 2010

(Dengan Tambang)

Tahun	PDRB Harga Berlaku		PDRB Harga Konstan 2000	
	Rp	Pertumbuhan	Rp	Pertumbuhan
2006	46895.22	7.52%	18402.17	-17.14%
2007	55380.45	18.09%	19200.29	4.34%
2008	61516.15	11.08%	18931.83	-1.40%
2009	77728.45	26.35%	23237.12	22.74%
2010	89451.25	15.08%	22620.3	-2.65%

(Tanpa Tambang)

Tahun	PDRB Harga Berlaku		PDRB Harga Konstan 2000	
	Rp	Pertumbuhan	Rp	Pertumbuhan
2006	14787.69	18.48%	8646	8.88%
2007	17496.62	18.32%	9404.5	8.77%
2008	21928.51	25.33%	10489.19	11.53%
2009	27409.14	24.99%	11886.1	13.32%
2010	33292.35	21.46%	13310.18	11.98%

Sumber: *Produksi Domestik Regional Bruto, 2011*

Apabila dilihat dari kontribusinya tampak bahwa sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi tertinggi pada PDRB setiap tahunnya bahkan mencapai di atas 60% per tahun. Namun apabila sektor pertambangan dihilangkan, maka kontribusi terbesar berasal dari sektor pertanian diikuti sektor konstruksi dan jasa, kemudian sektor perdagangan dan pengangkutan. Secara khusus harus dicermati bahwa ketergantungan pada sektor tambang, khususnya yang saat ini masih dikelola oleh PT Freeport harus mulai dikurangi dan melakukan konsentrasi pada sektor-sektor lain yang masih sangat potensial untuk dikembangkan khususnya sektor pertanian baik untuk sub sektor tanaman pangan maupun sub sektor perikanan. Karena sesungguhnya kedua sub sektor tersebut merupakan basis pendapatan masyarakat Papua yang masih sangat tergantung pada pemanfaatan lahan. Untuk kegiatan investasi lainnya, khususnya dalam skala besar, harus memperhatikan keseimbangan lingkungan baik dari sisi ekonomi yang berarti harus mampu menciptakan dampak pengganda bagi masyarakat lokal, tetap menjamin keberlangsungan hidup sosial masyarakat tanpa menimbulkan gangguan, dan dari sisi lingkungan tetap terjaga kelestariannya. Namun demikian, dalam kenyataannya kontribusi sektor pertanian dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan dari 34,81% hingga menjadi 25,4%, demikian pula untuk sektor industri dan pengolahan yang terus turun dari 5,6 menjadi 3,72. Mengingat bahwa kedua sektor ini secara signifikan mampu memberi peluang pekerjaan bagi masyarakat asli Papua dibandingkan dengan sektor lain, maka harus ada usaha keras dari semua pihak untuk meningkatkannya. Kontribusi sektor konstruksi yang tinggi lebih berasal dari kegiatan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, yang dalam jangka panjang hal ini harus mampu menjadi pendorong kegiatan di sektor-sektor lainnya.

Tabel 2.13 Persentase Kontribusi Pdrb Sektoral Provinsi Papua Dengan Dan Tanpa Tambang Tahun 2006-2010

(Dengan Tambang)

Sektor	2006	2007	2008	2009	2010	2006	2007	2008	2009	2010
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Pertanian	17.51	17.01	18.06	15.27	16.66	10.98	10.01	10.32	9.36	9.45
Tanaman Bahan Makanan	8.21	8.28	8.98	7.55	8.26	4.94	4.66	5.06	4.20	4.12
Tanaman Perkebunan	0.72	0.76	0.85	0.74	0.81	0.50	0.51	0.55	0.48	0.47
Peternakan	1.03	1.07	1.19	1.05	1.18	0.60	0.58	0.63	0.58	0.58
Kehutanan	2.73	2.52	2.47	2.07	2.26	1.92	1.59	1.51	1.30	1.23
Perikanan	4.82	4.38	4.57	3.85	4.15	3.02	2.66	2.57	2.80	3.05
Pertambangan & Penggalian	53.51	51.58	45.29	49.47	41.89	68.76	68.72	64.73	65.08	63.15
Industri Pengolahan	2.62	2.48	2.56	2.22	2.47	1.78	1.62	1.62	1.40	1.39
Listrik, Gas, & Air Bersih	0.23	0.23	0.24	0.21	0.23	0.17	0.16	0.16	0.14	0.13
Konstruksi	5.70	6.34	7.67	7.37	8.81	4.11	4.66	6.01	6.62	7.81
Perdagangan, Hotel, & Restoran	6.08	6.39	7.19	6.53	7.42	4.44	4.44	4.87	4.44	4.41
Pengangkutan & Komunikasi	5.51	6.10	7.10	6.61	7.73	3.88	4.05	4.52	4.31	4.35
Keuangan, Sewa, & Jasa Perush.	1.64	2.30	2.72	3.21	3.50	1.08	1.48	1.77	2.15	2.08
Jasa-jasa	7.21	7.57	9.16	9.10	11.30	4.78	4.86	6.00	6.50	7.24
PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.01

(Tanpa Tambang)

Sektor	2006	2007	2008	2009	2010	2006	2007	2008	2009	2010
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Pertanian	37.26	34.73	32.60	29.86	28.31	10.98	31.69	28.95	26.54	25.40
Tanaman Bahan Makanan	17.47	16.91	16.22	14.77	14.04	4.94	14.76	14.21	11.91	11.07
Tanaman Perkebunan	1.53	1.56	1.54	1.45	1.38	0.50	1.62	1.55	1.37	1.26
Peternakan	2.20	2.18	2.14	2.06	2.00	0.60	1.84	1.75	1.63	1.55
Kehutanan	5.81	5.14	4.46	4.05	3.83	1.92	5.04	4.23	3.68	3.32
Perikanan	10.26	8.94	8.24	7.54	7.06	3.02	8.43	7.21	7.95	8.20
Pertambangan & Penggalian	1.05	1.14	1.25	1.22	1.24	68.76	0.99	1.06	0.98	0.98
Industri Pengolahan	5.58	5.07	4.63	4.34	4.20	1.78	5.13	4.54	3.98	3.72
Listrik, Gas, & Air Bersih	0.48	0.47	0.44	0.41	0.39	0.17	0.51	0.45	0.40	0.36
Konstruksi	12.13	12.94	13.85	14.41	14.97	4.11	14.74	16.85	18.77	20.98
Perdagangan, Hotel, & Restoran	12.94	13.05	12.97	12.77	12.60	4.44	14.06	13.65	12.58	11.84
Pengangkutan & Komunikasi	11.72	12.45	12.82	12.93	13.13	3.88	12.83	12.69	12.22	11.69
Keuangan, Sewa, & Jasa Perush.	3.49	4.70	4.92	6.27	5.96	1.08	4.69	4.95	6.10	5.58
Jasa-jasa	15.34	15.45	16.53	17.80	19.20	4.78	15.37	16.84	18.44	19.45
PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.01

Sumber: PDRB Provinsi Papua, 2011

Dilihat dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Papua pada tahun 2010 masih digerakkan oleh konsumsi masyarakat di mana dari tahun ke tahun persentasenya meningkat yaitu dari 35,78% pada tahun 2006 menjadi 43,42% pada tahun 2010. Selain itu, perlu diperhatikan pula bahwa dilihat dari harga berlaku, margin atau perbedaan antara penggunaan untuk ekspor dan import tampak tidak stabil karena pada tahun 2008 net impor mencapai sekitar Rp 12 trilyun kemudian meningkat menjadi Rp 22,7 trilyun pada tahun berikutnya, lalu turun kembali menjadi Rp 16,2 trilyun.

Tabel 2.14 PDRB Provinsi Papua Berdasarkan Penggunaan

(Atas Harga Berlaku)

Penggunaan	2006		2007		2008		2009		2010	
	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%
Konsumsi rumah tangga	16.779.623,65	35,78%	21.096.520,87	38,09%	26.805.923,28	43,58%	32.950.177,43	42,39%	38.836.824,40	43,42%
Konsumsi Lembaga Swasta Non Profit	439.986,15	0,94%	520.762,13	0,94%	632.536,70	1,03%	838.929,29	1,08%	987.951,84	1,10%
Konsumsi Pemerintah dan Pertahanan	5.461.532,06	11,65%	9.288.343,07	16,77%	11.973.273,29	19,46%	13.993.682,85	18,00%	16.337.640,03	18,26%
Pembentukan Modal Tetap Bruto	10.397.055,88	22,17%	13.801.150,36	24,92%	17.231.780,86	28,01%	20.809.024,47	26,77%	24.592.564,15	27,49%
Perubahan Stok	-3.663.760,44	-7,81%	-4.927.488,78	-8,90%	-7.150.549,59	-11,62%	-13.559.341,96	-17,44%	-7.576.055,92	-8,47%
Ekspor Luar Negeri dan Antar Pulau	41.710.687,93	88,94%	40.886.731,33	73,83%	46.326.026,33	75,31%	61.402.531,23	79,00%	62.889.221,24	70,31%
Impor dari Luar Negeri dan Antar Pulau	24.229.896,35	51,67%	25.285.565,55	45,66%	34.302.752,40	55,76%	38.706.438,78	49,80%	46.625.896,98	52,12%
Total	46.895.228,88	100%	55.380.453,43	100,00%	61.516.238,47	100,00%	77.728.564,53	100,00%	89.451.248,76	100,00%

(Atas Harga Konstan)

Penggunaan	2006		2007		2008		2009		2010	
	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%	Juta Rupiah	%
Konsumsi rumah tangga	10.321.829,49	56,09%	11.760.152,86	61,25%	13.276.616,12	70,13%	14.919.170,43	64,20%	16.176.947,76	71,52%
Konsumsi Lembaga Swasta Non Profit	276.278,31	1,50%	315.497,47	1,64%	354.801,57	1,87%	448.100,93	1,93%	510.464,46	2,26%
Konsumsi Pemerintah dan Pertahanan	2.397.416,72	13,03%	3.240.554,93	16,88%	3.655.087,26	19,31%	4.233.819,97	18,22%	4.552.240,20	20,12%
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.593.868,33	30,40%	6.719.645,83	35,00%	7.599.749,30	40,14%	8.428.341,91	36,27%	9.252.147,73	40,90%
Perubahan Stok	-1.989.524,82	-10,81%	-4.006.147,25	-20,87%	-3.733.814,40	-19,72%	-3.713.573,88	-15,98%	-2.888.410,62	-12,77%
Ekspor Luar Negeri dan Antar Pulau	15.805.419,02	85,89%	14.212.159,21	74,02%	13.037.047,22	68,86%	13.124.408,47	56,48%	10.848.611,15	47,96%
Impor dari Luar Negeri dan Antar Pulau	14.003.089,63	76,09%	13.041.565,62	67,92%	15.257.645,48	80,59%	14.203.152,87	61,12%	15.831.704,80	69,99%
Total	18.402.197,42	100,00%	19.200.297,42	100,00%	18.931.841,59	100,00%	23.237.114,94	100,00%	22.620.295,88	100,00%

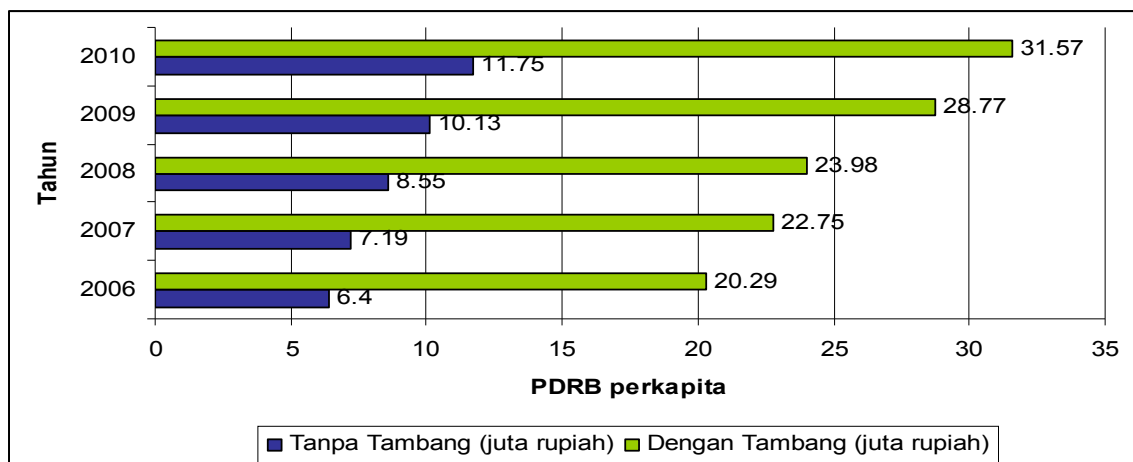


Apabila dilihat dari harga konstan akan tampak bahwa kegiatan ekonomi di bidang ekspor-impor di Papua sangat belum stabil dan belum bisa diandalkan karena sepanjang tahun mengalami defisit bahkan dengan angka yang semakin besar yaitu dari minus Rp 2,2 trilyun pada tahun 2008 menjadi minus Rp 5 trilyun pada tahun 2010, meskipun sempat mengalami perbaikan pada tahun 2009 yaitu mengalami minus Rp 1,1 trilyun. Berdasarkan data ini dapat dikatakan bahwa Papua belum mampu mengurangi ketergantungannya dari luar di mana hal ini tercermin melalui angka impor yang terus meningkat, sedangkan kegiatan ekspor yang diharapkan dapat menjadi sumber penerimaan atau devisa belum mampu terus berkembang secara kokoh.

Selama periode 2006-2010, PDRB perkapita tanpa tambang tumbuh rata-rata 16,43% dan PDRB perkapita dengan tambang tumbuh 11,8%. Hingga tahun 2010, nilai PDRB perkapita termasuk tambang Provinsi Papua mencapai Rp 31,57 juta atau tumbuh 9,73% dari tahun sebelumnya. Namun, pertumbuhan tersebut lebih lambat dibanding pertumbuhan di tahun 2009 yang mencapai 19,97%. Pertumbuhan di tahun 2009 ini merupakan yang tertinggi dalam kurun lima tahun terakhir.

Pada tahun 2009, PDRB per kapita tertinggi terdapat di Kabupaten Mimika, Boven Digoel, Kota Jayapura dan Supiori yaitu masing-masing sebesar Rp 295,51 juta, Rp 37,31 juta dan Rp 26,57 juta, serta Rp 26,49 juta. Tingginya PDRB perkapita Mimika disebabkan tingginya produksi PT Freeport di sektor pertambangan yang menyumbang sekitar 60 persen dari PDRB Papua. Jika hasil sektor pertambangan dihilangkan, PDRB perkapita Mimika hanya Rp 14,24 juta. PRDB perkapita terkecil adalah Kabupaten Yahukimo yang hanya mencapai Rp. 1,55 juta.

Grafik 2.2 PDRB Perkapita Dengan Tambang Dan Tanpa Tambang (Juta Rupiah) Provinsi Papua Tahun 2006-2010



Sumber: PDRB Provinsi Papua, 2012

Dengan menggunakan kriteria Bank Dunia, distribusi pendapatan Provinsi Papua cenderung tidak mengalami perbaikan selama 5 tahun terakhir (2006-2010). Sepanjang periode ini 40 persen rumah tangga yang tergolong berpendapatan rendah setiap tahunnya rata-rata memperoleh bagian pendapatan per kapita hanya sekitar 16,74 persen, sedangkan untuk 20 persen rumah tangga yang berpendapatan tinggi memperoleh pembagian yang sangat besar dengan rata-rata per tahun sekitar 45,31 persen. Kondisi tersebut menandakan bahwa selama 5 tahun ini distribusi pendapatan di Provinsi Papua mengalami ketimpangan sedang (*moderate inequality*). Namun, bila menggunakan indikator angka Rasio Gini, sepanjang tahun 2005-2010 Rasio Gini berada pada rata-rata 0,36 yang berarti termasuk dalam kategori ketimpangan rendah.

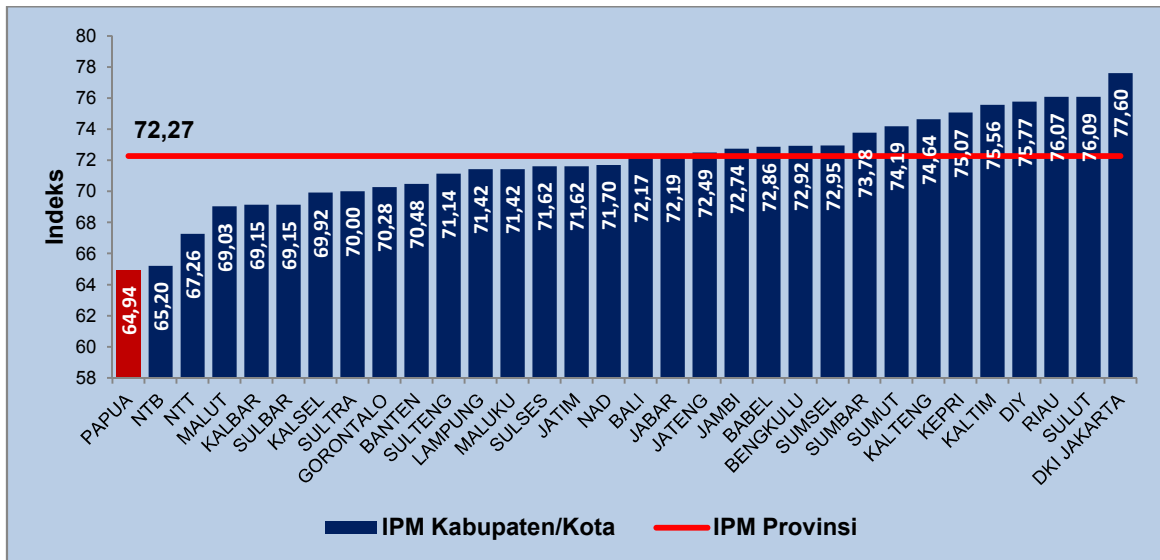
2.3.1 Kesejahteraan Sosial

Prestasi pembangunan kesejahteraan sosial suatu wilayah telah banyak menggunakan ukuran non ekonomi. Salah satu pendekatan nonekonomi yang lazim digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*). Dalam prakteknya ada 4 komponen pokok yang dipakai untuk mengukur besarnya angka IPM, yaitu (1) angka harapan hidup, (2) angka melek huruf, (3) rata-rata lama sekolah, dan (4) angka pengeluaran riil perkapita.

Jika diamati, pencapaian angka IPM di Provinsi Papua selalu mengalami pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2010 angka IPM Provinsi Papua mencapai 64,94 mengalami peningkatan yang cukup berarti yakni sebanyak 0,53 poin dari tahun 2009. Capaian IPM ini berarti pembangunan manusia masuk dalam kategori menengah bawah yaitu capaian IPM antara 50,0 – 65,9.

Angka IPM Provinsi Papua terlihat terendah di Indonesia. Dengan kata lain kualitas pembangunan manusia yang berhasil dicapai oleh Pemerintah Papua selama ini terendah dibandingkan daerah lainnya. Seluruh fakta ini menjelaskan bahwa pembangunan manusia, khususnya Kesehatan dan Pendidikan serta unsur lain yang membentuk IPM perlu difokuskan dan diprioritaskan dalam pembangunan jangka panjang di Provinsi Papua. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

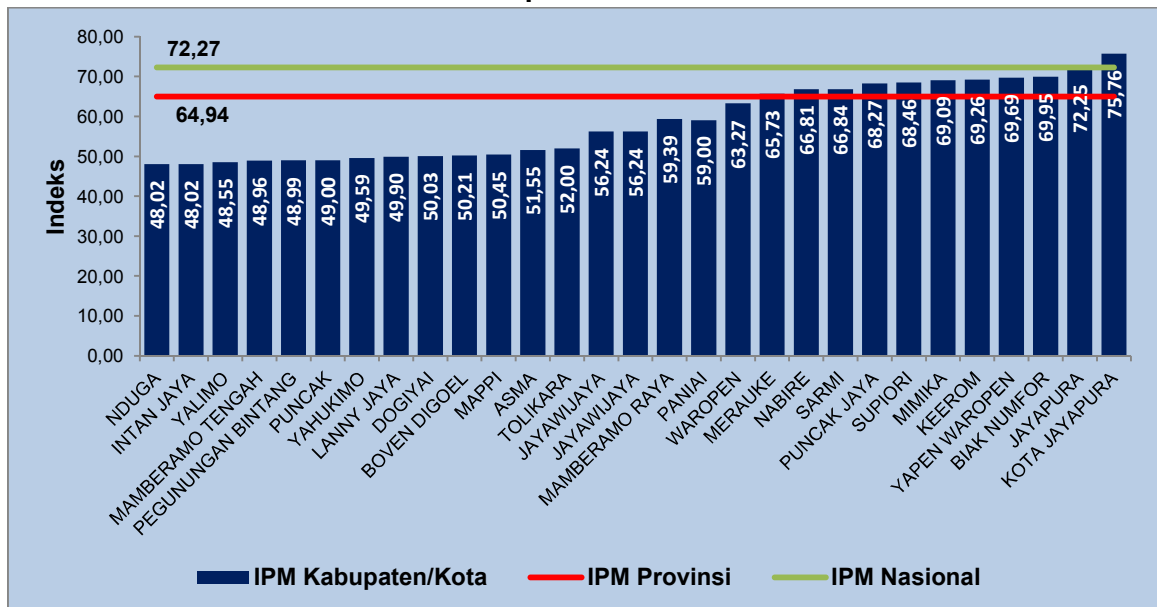
Grafik 2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi Di Indonesia Tahun 2010



Sumber : Indikator Kesejahteraan Daerah Provinsi Papua, TNP2K, 2011

Sedangkan jika dilihat pada Kabupaten/Kota di Papua, bahwa kabupaten Nduga memiliki IPM yang paling terendah dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di Papua. Grafik tersebut dapat dilihat dibawah ini:

Grafik 2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010



Sumber : Indikator Kesejahteraan Daerah Provinsi Papua, TNP2K, 2011

Tabel 2.15 Kecenderungan Komponen-Komponen Ipm Di Provinsi Papua Tahun 2006 – 2010

Tahun	Harapan Hidup (Tahun)	Angka Melek Huruf (Persen)	Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran Perkapita (Ribu Rp)	IPM Provinsi
2006	67,60	75,41	6,30	589,30	62,75
2007	67,90	75,41	6,52	593,42	63,41
2008	68,10	75,41	6,52	599,65	64,00
2009	68,35	75,58	6,57	603,88	64,53
2010	68,60	75,60	6,66	606,38	64,94

Sumber: Indikator Penting, BPS Provinsi Papua, 2011

Sepanjang tahun 2006-2010, tingkat melek huruf dan rata-rata lama sekolah di Provinsi Papua paling rendah di seluruh Indonesia. Perkembangannya setiap tahun juga menunjukkan tidak adanya perubahan yang berarti, cenderung stagnan. Sebagai misal adalah diantara tahun 2006 - 2008 persentase melek huruf penduduk di Provinsi Papua mengalami perkembangan yang stagnan sebesar 75,41 persen setiap tahun, walaupun kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2009 dan 2010 hingga mencapai 75,60. Begitu juga dengan lama sekolah dapat dikatakan berkembang sangat lambat, di mana selama tahun 2007 hingga 2009 tidak mengalami pertambahan yaitu pada kisaran 6,5 tahun. Baik melek huruf maupun rata-rata lama sekolah di Papua ini terpaut sangat jauh bila dibandingkan dengan Indonesia secara keseluruhan (lihat tabel II.16).

Selain IPM yang rendah, terjadinya ketimpangan pencapaian IPM antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Papua juga merupakan masalah yang krusial untuk dipecahkan karena hal tersebut juga menandakan terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Sebagian kabupaten di daerah pegunungan dan pedalaman mempunyai IPM kurang dari 50,0 yang tergolong rendah menurut peringkat kinerja pembangunan manusia dari UNDP. Sedangkan di sebagian besar kabupaten/kota di daerah pesisir dan dataran rendah umumnya memiliki IPM yang dikategorikan menengah ke atas, karena pencapaian IPM di atas 66,0 seperti Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Nabire, Mimika, dan Sarmi. Hal ini berdampak buruk bagi proses pembangunan yang berkelanjutan di Papua. Ketimpangan IPM antar wilayah menyulitkan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan karena kualitas SDM rendah. Untuk itu penting sekali bagi Papua untuk mengurangi ketimpangan IPM yang terjadi, terutama sekali ketimpangan IPM antara daerah-daerah di pegunungan dan pedalaman dengan pesisir dan dataran rendah.

Tabel 2.16 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua Tahun 2008 – 2010

Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup (Tahun)			Angka Melek Huruf (Persen)			Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)			Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah)			IPM		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2010	
A. Daerah Pesisir dan Daratan Rendah															
Kota Jayapura	68.23	68.34	68.46	99.09	99.1	99.58	10.86	10.88	11	625.93	632.54	636.93	74.56	75.16	
Jayapura	66.96	67.14	67.32	96	96.31	96.65	8.75	9.05	9.54	618.26	621.43	622.12	71.02	71.66	
Biak Numfor	65.94	66.21	66.48	97.48	97.75	98.27	9.25	9.26	9.55	590.18	592.01	593.5	68.99	69.95	
Kep. Yapen	67.01	67.52	68.04	88.12	88.28	88.82	6.5	6.53	6.58	631.91	633.24	634.83	68.68	69.13	
Keerom	66.75	66.93	67.1	91.1	91.12	92.15	7.3	7.32	7.36	615.84	618.7	618.86	68.55	68.89	
Mimika	69.55	69.87	70.2	86.9	87.29	87.96	6.7	6.71	6.79	606.3	609.2	611.86	67.99	68.49	
Supiori	65.48	65.72	65.96	95.37	95.71	96.19	7.7	7.97	8.03	595.83	597.09	598.6	67.55	68.06	
Sarmi	66.17	66.26	66.35	87.1	87.11	87.55	6.4	6.41	6.44	611.65	614.73	614.89	66.35	66.65	
Nabire	67.12	67.33	67.55	83.2	83.52	83.59	6.46	6.48	6.55	612.26	615.25	616.41	66.1	66.54	
Merauke	62.13	62.25	62.76	87.1	87.37	87.99	8.48	8.63	9.33	595.94	597.2	597.46	64.44	64.77	
Waropen	64.86	65.19	65.53	76.5	76.88	77.11	6.27	6.29	6.33	602.42	603.76	605.71	62.46	62.85	
B. Daerah Pedalaman dan Pegunungan															
Puncak Jaya	67.21	67.52	67.62	86.8	86.81	86.81	6.1	6.11	6.11	626.46	629.72	629.72	67.78	68.21	
Paniai	67.1	67.4	67.4	62.9	62.91	62.93	6.2	6.21	6.21	583.44	585.77	588.34	59.17	59.53	
Memberamo Raya	64.86	65.95	66.06	64.1	66.06	65.04	4.32	4.46	5.17	596.11	597.25	597.25	57.78	58.57	
Jayawijaya	66.06	66.24	66.42	51.63	51.65	52.52	3.77	3.79	4.82	589.09	592.33	593.5	54.72	55.09	
Tolikara	65.72	65.84	65.95	32.86	32.87	32.87	2.4	2.94	2.94	608.49	610.64	611.64	50.85	51.48	
Asmat	66.1	66.66	67.22	31	31.07	31.1	3.86	3.94	4.33	589.58	592.21	593.31	50.27	50.86	
Mappi	65.79	65.99	66.18	31.3	31.35	31.43	3.8	3.89	3.89	582.77	584.06	586.21	49.59	49.88	
Boven Digoel	66.43	66.75	67.03	31.7	31.75	32.94	3	3.1	3.1	579.57	580.88	581.19	49.2	49.56	
Yahukimo	66.25	66.53	66.81	31.8	31.81	32.52	2.4	2.42	2.47	581.79	584.45	584.54	48.85	49.22	
Dogiyai	66.8	66.95	67.09	32.53	32.99	34.02	3.04	3.43	3.87	566.32	568.42	570.51	48.6	49.23	
Puncak	67.09	67.26	67.44	32.1	32.11	32.11	2.78	2.79	2.8	565.78	568.13	570.4	48.43	48.71	
Lanny Jaya	65.95	66.12	66.29	32.65	32.68	36.72	3.1	3.33	3.7	565.35	567.59	568.59	48.12	48.57	
Peg. Bintang	65.33	65.55	65.76	31.6	31.76	32.32	2.1	2.45	2.46	579.2	582.55	585.04	47.94	48.54	
Memberamo Tengah	66	66.13	66.27	32.12	32.13	34.34	2.89	2.9	2.9	565.67	568.31	570.95	47.9	48.18	
Yalimo	65.99	66.17	66.35	32.24	32.77	33.3	2.71	2.72	2.74	565.21	567.52	569.66	47.75	48.55	
Nduga	65.36	65.5	65.65	30.52	30.53	30.53	2.78	2.79	2.79	570.21	572.79	575.39	47.45	48.02	
Deiyai	-	66.59	66.59	-	26.87	28.45	-	2.24	2.5	-	584.35	584.45	-	48.02	48.57
Intan Jaya	-	66.8	66.8	-	27	27.39	-	1.81	2.07	-	585.55	588.12	-	47.94	48.42
Papua	68.1	68.35	68.6	75.41	75.58	75.6	6.52	6.57	6.66	599.65	603.88	606.38	64	64.53	

Sumber: Badan Pusat Statistik Papua, 2011

Pendidikan

Angka Melek Huruf (AMH) untuk usia 15 tahun terus mengalami perbaikan. Angka melek huruf untuk penduduk usia tersebut meningkat dari 75,40 persen pada tahun 2006 menjadi 75,60 persen pada tahun 2010. Secara absolut, jumlah penduduk buta aksara yang mencapai 552.000 jiwa pada tahun 2005 berkurang menjadi 230.000 jiwa, pada tahun 2009. Namun, disparitas angka melek huruf antar Kabupaten/Kota cukup tinggi. Kota Jayapura sebagai ibukota provinsi, angka melek hurufnya tertinggi (99 persen). Kabupaten Biak, Supiori, Jayapura, dan Keerom AMH-nya sekitar 90%. Namun, sejumlah kabupaten hasil pemekaran seperti Kabupaten Tolikara, Asmat, Yahukimo, Nduga, dan Mamberamo Tengah, AMH-nya di bawah 50 persen. Kondisi ini menjelaskan pentingnya prioritas pemberantasan buta huruf di sebagian besar wilayah pedalaman dan pegunungan Provinsi Papua dan diperlukan upaya untuk meningkatkan kemampuan baca sebagai sarana pengetahuan masyarakat untuk meningkatkan kualitasnya.

Kesehatan

Pencapaian status kesehatan dan gizi masyarakat merupakan kinerja sistem kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah serta berbagai komponen masyarakat. Kinerja pembangunan kesehatan dicapai melalui pendekatan enam sub-sistem, yaitu sub-sistem: (1) upaya kesehatan; (2) pembiayaan kesehatan; (3) sumberdaya manusia kesehatan; (4) sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; (5) manajemen dan informasi kesehatan; dan (6) pemberdayaan masyarakat.

Angka kematian bayi di Papua telah mengalami peningkatan yang berarti ditandai dengan menurunnya angka kematian bayi dari 56 pada tahun 2000 menjadi 41 bayi yang meninggal per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Namun demikian, dibanding AKB secara nasional, AKB Provinsi Papua masih lebih besar, dimana AKB Indonesia di tahun 2007 hanya sebesar 31 per 1000 kelahiran hidup (Capaian MDG's Papua 2008).

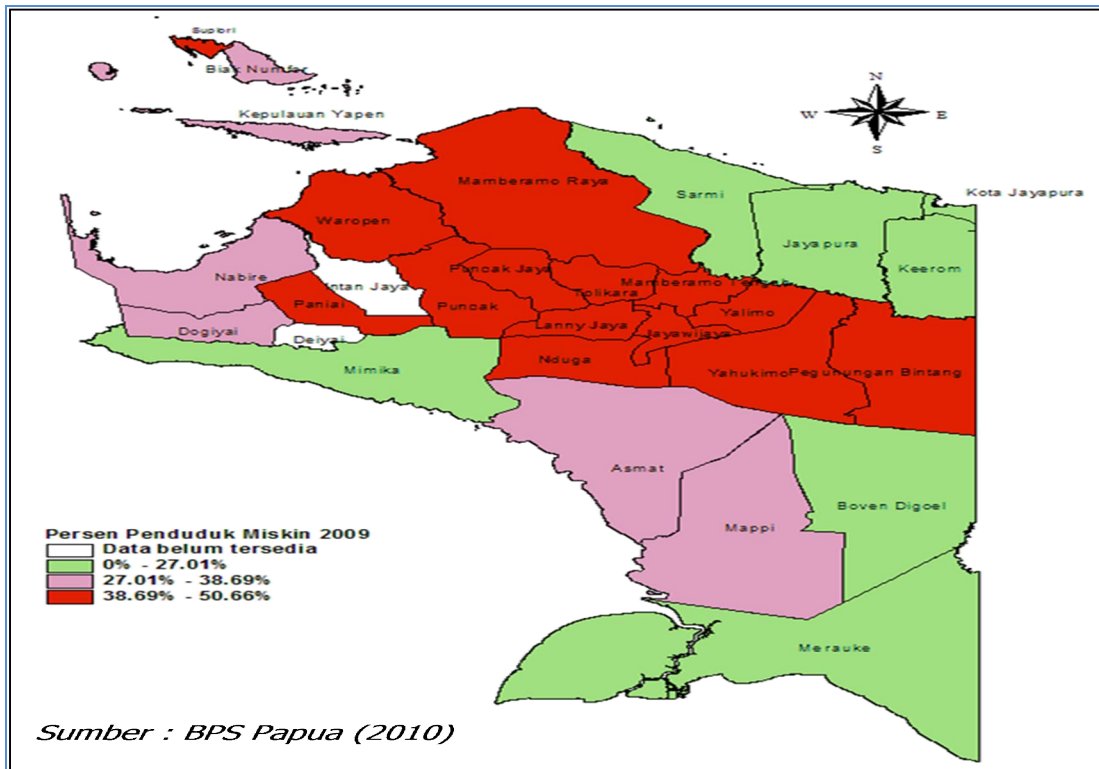
Sementara itu, proporsi pertolongan persalinan oleh tenaga medis terlatih terus mengalami penurunan dari 59,53 persen pada tahun 2004 menjadi sebesar 46,90 persen pada tahun 2008. Persentase penolong kelahiran dengan tenaga medis terendah terdapat di Kabupaten Yahukimo yaitu 10.71 persen sedangkan yang tertinggi di Kabupaten Mimika sebesar 79.76 persen. Semakin rendahnya peranan tenaga medis terlatih (dokter/bidan/mantri kesehatan) dalam menolong proses kelahiran merupakan salah satu faktor besarnya angka kematian ibu (Capaian MDG's Papua 2008).

Kemiskinan

Persentase penduduk miskin Papua telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2006 persentase penduduk miskin adalah 41,52 persen. Angka ini turun hingga mencapai 36,8 persen pada tahun 2010. Angka kemiskinan ini masih jauh tinggi dibanding rata-rata nasional yang hanya 17,75 persen pada tahun 2006 dan 13,33 persen pada tahun 2010.

Terlepas dari kondisi faktual di atas, bagi pemerintah Provinsi Papua, kemiskinan itu merupakan permasalahan yang paling mendesak dan selalu menjadi prioritas untuk ditanggulangi, mengingat dampak negatif yang ditimbulkannya sangat besar terhadap pelaksanaan pembangunan, misalnya dapat mengurangi produktifitas, memperbesar konflik multidimensi, meningkatkan eksploitasi sumber daya yang berlebihan, dan sebagainya. Oleh karena itu, seberapa besar pun jumlahnya, selama masih ada penduduk yang dikategorikan miskin, pemerintah provinsi telah berkomitmen untuk mengentaskannya. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah Papua ketika dihadapkan dengan kondisi bahwa kebanyakan jumlah penduduk miskin berada di daerah-daerah pegunungan dan pedalaman yang sangat sulit di jangkau dari pusat ibu kota, menjadikan terisolasinya penduduk dari jangkauan pasar, informasi dan teknologi (Gambar G-II.5).

Gambar 2.3 Peta Kemiskinan Di Provinsi Papua Tahun 2009



Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan diartikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan terdiri dari tiga pilar yaitu: (i) ketersediaan pangan; (ii) akses terhadap pangan; dan (iii) pemanfaatan pangan.

Kerangka konsep ketahanan pangan mempertimbangkan ketersediaan pangan, akses terhadap pangan dan pemanfaatan pangan sebagai aspek-aspek utama penopang ketahanan pangan serta menghubungkan aspek-aspek tersebut dengan kepemilikan aset rumah tangga, strategi penghidupan, dan lingkungan politik, sosial, kelembagaan dan ekonomi. Dengan kata lain, status ketahanan pangan suatu rumah tangga, atau individu ditentukan oleh interaksi dari faktor lingkungan pertanian (agro-environmental), sosial ekonomi dan biologi dan bahkan faktor politik.

Kerawanan pangan dapat bersifat kronis atau sementara/transien. Kerawanan pangan kronis adalah ketidakmampuan jangka panjang atau yang terus menerus untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum. Keadaan ini biasanya terkait dengan faktor struktural, yang tidak dapat berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintah daerah, kepemilikan lahan, hubungan antar etnis, tingkat pendidikan, dll. Kerawanan Pangan Sementara (Transitory Food Insecurity) adalah ketidakmampuan jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.

Keadaan ini biasanya terkait dengan faktor dinamis yang berubah dengan cepat seperti penyakit infeksi, bencana alam, pengungsian, berubahnya fungsi pasar, tingkat besarnya hutang, perpindahan penduduk (migrasi) dll. Kerawanan pangan sementara yang terjadi secara terus menerus dapat menyebabkan menurunnya kualitas penghidupan rumah tangga, menurunnya daya tahan, dan bahkan bisa berubah menjadi kerawanan pangan kronis.

2.3.3 Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan masyarakat Papua tidak dapat terlepas dari unsur kebudayaan. Berhasil tidaknya pembangunan di Papua sangat dipengaruhi oleh fleksibilitas dan responsibilitas budaya orang Papua terhadap program-program pembangunan yang dijalankan. Oleh karenanya mengenal lebih jauh budaya Papua merupakan salah satu *key word* dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Papua dalam perspektif jangka panjang.

Penduduk asli Papua sebenarnya termasuk dalam rumpun bangsa Papua-Melanesia yang bermukim di daerah Melanesia yakni sekelompok pulau yang berada di sebelah timur laut Australia. Masyarakatnya terdiri atas suku-suku bangsa dan beraneka ragam kebudayaannya. Menurut Tim Peneliti Universitas Cenderawasih di tahun 1991 telah diidentifikasi adanya 44 suku bangsa yang masing-masing merupakan sebuah kesatuan masyarakat, kebudayaan dan bahasa yang berdiri sendiri. Sebagian besar dari 44 suku bangsa itu terpecah lagi menjadi 177 suku (Djoht, 2002).

Van Baal (1951) dalam Djoht (2002) mengatakan bahwa ciri utama kebudayaan Papua adalah tidak adanya integrasi yang kuat dari kebudayaan-kebudayaan mereka. Ciri-ciri kebudayaan tersebut muncul karena kebudayaan orang Papua yang rendah tingkat teknologinya dan yang dihadapkan pada lingkungan hidup yang keras sehingga dengan mudah menerima dan mengambil alih suatu unsur kebudayaan lain yang lebih maju atau lebih cocok. Adapun ciri-ciri yang menonjol dari Papua adalah keanekaragaman kebudayaannya, namun dibalik keanekaragaman tersebut terdapat kesamaan ciri-ciri kebudayaan mereka. Berdasarkan kecirian yang khas tersebut beberapa ahli antropologi telah membuat pengelompokan mengenai kehidupan masyarakat dan budaya Papua sebagai berikut.

Secara garis besarnya budaya asli orang Papua dapat dipetakan berdasarkan mata pencaharian dan atau letak geografi, lihat Tabel 2.5. Umumnya jika dipetakan berdasarkan mata pencaharian, budaya Papua dapat dibagi menjadi budaya orang Papua yang sudah mengenal pasar, dan yang masih subsistens.

Tabel 2.17 Beberapa Pendapat Ilmuwan Antropologi Mengenai Pengelompokan Masyarakat Dan Budaya Asli Papua

NO	PENULIS/ KONSEPTOR	PENGELOMPOKKAN
1.	Petocz (1987)	Kategori masyarakat Papua didasarkan pada tinggi daratan diatas permukaan laut : <ul style="list-style-type: none"> • Hutan Bakau, terdapat di rawa-rawa berair asin payau. Vegetasi ini tumbuh di sepanjang cekungan yang landai dan paling berkembang di daerah yang terlindung dari gamparan gelombang air laut. Hutan bakau yang paling luas terdapat di muara teluk Bintuni. • Rawa, disepanjang pantai selatan, dataran rendah daerah Kepala Burung dan pantai utara delta Mamberamo kearah barat sampai muara teluk Cenderawasih. • Hutan basah dataran rendah • Zone pegunungan bawah • Zone pegunungan atas • Zone Alpin

NO	PENULIS/ KONSEPTOR	PENGELOMPOKAN
2.	Walker dan Mansoben (1990)	Menggolongkan masyarakat dan kebudayaan Papua menurut tipe-tipe mata pencaharian yaitu : <ul style="list-style-type: none"> • Daerah rawa-rawa, pantai dan banyak sungai • Daerah kaki bukit dan lembah-lembah kecil • Daerah dataran tinggi.
3.	Parsudi Suparlan (1994)	Membagi pola-pola kebudayaan Papua dalam spektrum yang lebih umum dan luas <ul style="list-style-type: none"> • Wilayah pantai dan pulau, yang terdiri atas : (1) Daerah pantai utara, (2) Daerah-daerah pulau-pulau Biak-Numfor, Yapen, Waigeo dan pulau-pulau kecil lainnya, (3) Daerah pantai selatan yang penuh dengan daerah berlumpur dan pasang surut serta perbedaan musim kemarau dan hujan yang tajam. • Wilayah pedalaman yang mencakup : (1) Daerah sungai-sungai dan rawa-rawa (2) Daerah danau dan sekitarnya (3) Daerah kaki bukit dan lembah-lembah kecil. • Wilayah dataran tinggi
4.	Koentjaraningrat (1994)	Pengelompokan budaya Papua berdasarkan letak geografis dan mata pencahariannya yaitu : <ul style="list-style-type: none"> • Penduduk Pantai dan Hilir. Kelompok ini telah lama mengadakan kontak dengan dunia modern/luar. Mereka sudah mengalami pendidikan formal dan kebutuhan hidup tergantung pada pasar dengan sumber alam yang melimpah. • Masyarakat Pedalaman. Kelompok-kelompok kecil yang tinggal di sepanjang sungai, di hutan-hutan rimba. Mereka adalah peramu yang sering berpindah-pindah tempat tinggal, jumlah penduduknya tidak besar. • Masyarakat Pegunungan Tengah. Kelompok masyarakat ini terdiri dari beberapa suku bangsa yang tinggal di lembah-lembah, di pegunungan tengah yang terdiri dari pegunungan Mooke, Sudirman. Pemeliharaan ternak babi dan pembudidayaan Ubi jalar merupakan kegiatan ekonomi yang maha penting

Sedangkan menurut letak geografi dapat dibagi berdasarkan masyarakat yang menetap di pantai, rawa, dataran rendah, pedalaman dan pegunungan. Akan tetapi jika mengikuti bahasa yang digunakan, maka peta budaya orang Papua sesungguhnya dapat di bagi menjadi 272 ragam budaya sesuai dengan banyaknya jumlah bahasa yang digunakan di Tanah Papua, lihat Gambar II.8.

Gambar 2.4 Peta Budaya Papua Berdasarkan Penyebaran Bahasa



Untuk cabang olah raga Provinsi Papua terkenal dengan gudangnya atlet. Cabang olahraga sepak bola misalnya, banyak pemain-pemain nasional berbakat yang berasal dari Provinsi Papua. Antusiasme masyarakat terhadap cabang olahraga inipun sangat

tinggi. Berkaitan dengan bidang pemuda dan olahraga, Provinsi Papua memiliki bakat-bakat yang unggul di berbagai cabang olah raga, sayangnya masih banyak bakat-bakat yang belum tersalurkan. Oleh karena itu pengembangan cabang olahraga sepak bola seperti ini perlu dilakukan untuk meningkatkan Kualitas pemuda dan juga keolahragaan di Provinsi Papua.

Selain itu, agar kegiatan olahraga di Provinsi Papua semakin berkembang, maka perlu diselenggarakan acara-acara olahraga, baik lokal, nasional dan internasional. Dengan banyaknya kegiatan ini maka diharapkan masyarakat Provinsi Papua akan mampu meningkatkan prestasi olahraga, baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu contoh kegiatan adalah olahraga yang dilakukan di laut atau danau yang juga bisa menarik daya tarik wisatawan.

2.1. ASPEK PELAYANAN UMUM

Aspek pelayanan umum berkaitan dengan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua, baik pada urusan wajib maupun pilihan.

2.4.1 Urusan Layanan Wajib

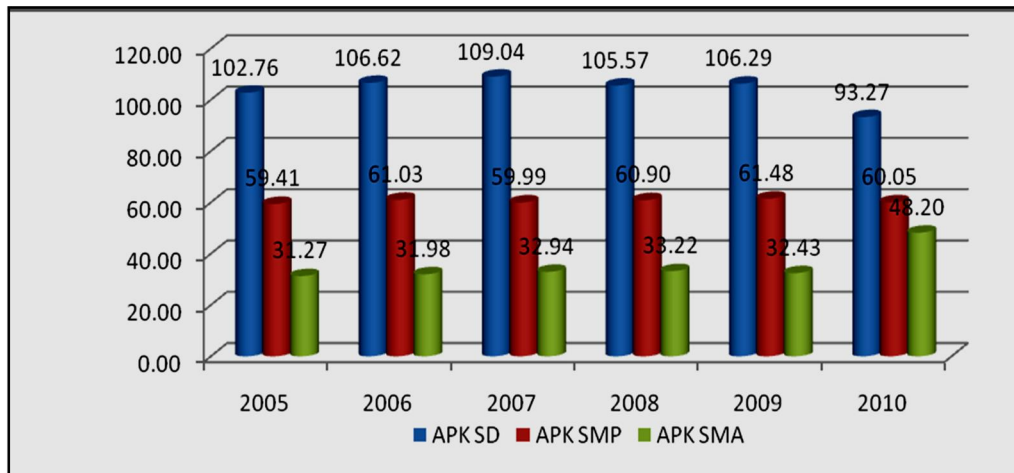
Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pendidikan

Meskipun pembangunan pendidikan telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah dari 6,20 tahun pada tahun 2005 menjadi sebesar 6,66 tahun pada tahun 2010, namun tetap menunjukkan bahwa program pendidikan dasar 9 tahun belum tercapai.

Gambar G-II.2 dan Gambar G-II.3 memperlihatkan perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada semua jenjang pendidikan. Dalam kurun waktu 2005-2009, APK SD menunjukkan kecenderungan peningkatan yaitu 102,76 persen pada tahun 2005 hingga 106,29 persen, namun sedikit menurun pada tahun 2010 menjadi 93,27 persen. Sementara itu, APK SMP bergerak secara fluktuatif pada periode tersebut namun tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Demikian halnya dengan tingkat SMA, APK mencapai titik 31,27 pada tahun 2005 dan hampir tidak menunjukkan perubahan berarti hingga mencapai titik 48,20 pada tahun 2010.

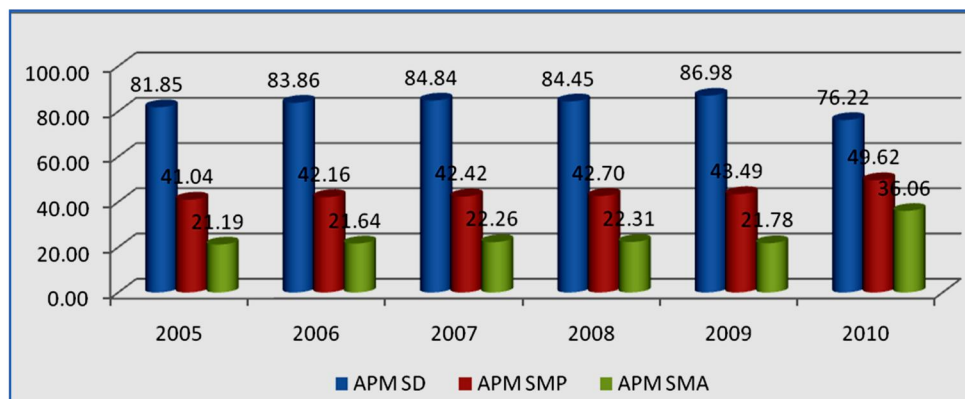
Grafik 2.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Papua, 2005 - 2010



Sumber: Papua Dalam Angka, BPS Provinsi Papua, 2011

Pergerakan APM pada masing-masing jenjang pendidikan juga cenderung meningkat, namun pada tahun 2010 terjadi penurunan pada tingkat SD. APM SD pada tahun 2005 sebesar 81,85 persen terus meningkat hingga mencapai 86,98 persen pada tahun 2009, namun menurun pada tahun 2010 menjadi 76,22 persen. Sebaliknya, masing-masing APM SMP dan SMA menunjukkan kecenderungan positif yaitu pada tahun 2005, APM SMP dan SMA adalah 41,04% dan 21,19 %. Ini terus meningkat hingga pada tahun 2010 mencapai 49,62 persen (APM SMP) dan 36,06 % (APM SMA).

Grafik 2.6 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Papua Tahun 2005-2010



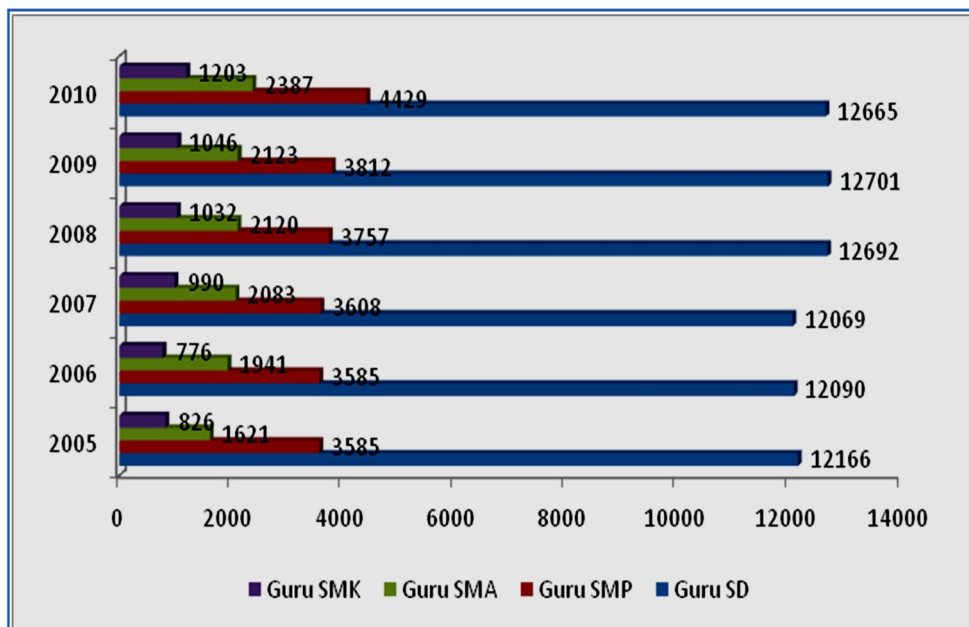
Sumber: Papua Dalam Angka, BPS Provinsi Papua, 2011

Berdasarkan data Susenas tahun 2008, jumlah anak usia dini (3-6 tahun) di Provinsi Papua adalah sebanyak 222.456 anak, di mana sebanyak 18.737 anak telah atau sedang mengikuti pendidikan PAUD baik melalui jalur formal maupun non formal. Dengan demikian, baru 8,42 persen anak di Provinsi Papua yang memperoleh akses

terhadap PAUD, dengan rincian 2,97 persen telah mengikuti program PAUD dan 5,45 persen sedang mengikuti program PAUD. Angka PAUD pada tahun 2008 terlihat menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2007, anak yang memperoleh akses PAUD di Papua sebesar 12,64 persen. Kondisi ini masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan angka partisipasi PAUD di Indonesia sebesar 20 persen dari 20 juta anak yang ada, dan ini merupakan angka terendah di dunia (UNESCO). Dengan kata lain kesenjangan pendidikan antara Papua dengan rata-rata Indonesia masih sangat tinggi.

Ada banyak hal yang menyebabkan masih rendahnya partisipasi masyarakat di pendidikan, antara lain akses ke sekolah, biaya pendidikan dan transportasi, jarak dari rumah ke sekolah, ketersediaan tenaga guru, sarana prasarana, dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Keterbatasan tenaga guru juga merupakan masalah lain. Dari sisi jumlah maupun rasio guru murid, terlihat bahwa jumlah guru cukup memadai. Masalahnya, banyak guru yang enggan ditempatkan di daerah-daerah terpencil, sehingga terjadi kesenjangan jumlah guru antara daerah yang dekat dengan pusat kota dengan daerah–daerah terpencil seperti di wilayah pegunungan dan pesisir pantai.

Grafik 2.7 Jumlah Guru Provinsi Papua Tahun 2005-2010



Sumber: Papua Dalam Angka, BPS Provinsi Papua, 2011

Tabel 2.18 Tingkat Kelulusan Siswa Di Provinsi Papua

VARIABEL	TAHUN					
	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011
PESERTA UJIAN	PERSENTASE KELULUSAN					
SMP	81,90	89,25	90,42	91,15	99,25	99,29
SMA (IPA)	93,09	88,24	85,51	92,41	99,40	98,95
SMA (IPS)	81,89	80,21	75,42	81,62	98,21	97,96
SMA (BAHASA)	95,50	85,96	80,68	76,16	100,00	100,00
SMK	88,98	82,22	90,55	88,90	97,00	92,9

Sumber: Buku Refleksi Pembangunan Provinsi Papua

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pada tahun 2010 terdapat 2.134 unit sekolah dasar, 479 unit SMP, dan 250 unit SMA/SMK. Sementara jumlah guru di tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK masing-masing sebanyak 12.665 orang, 4.429 orang, dan 3.590 orang, serta jumlah murid SD, SMP dan SMA/SMK masing-masing adalah 374.835 orang, 94.466 orang dan 69.303 orang. Dengan demikian maka rasio murid terhadap guru SD, SMP dan SMA/SMK adalah 30,03 pada tingkat SD, SMP 21,46 dan SMA/SMK 18,61. Selanjutnya, rasio murid terhadap sekolah dasar adalah 175,65, tingkat SLTP adalah 197,22 dan tingkat SLTA/SMK adalah 277,21.

Kesehatan

Ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan sangat berperan penting dalam pembangunan kesehatan. Di provinsi Papua ketersediaan fasilitas kesehatan terutama daerah-daerah terpencil, lebih bergantung pada puskesmas keliling dalam rangka penyampaian pelayanan kesehatan terhadap masyarakat umum maupun bayi dan balita.

Berdasarkan data tahun 2006 – 2010, ketersediaan rumah sakit dan fasilitas lainnya seperti Puskesmas, Posyandu dan lainnya, terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2006 terdapat 18 rumah sakit, baik rumah sakit umum pemerintah maupun swasta. Jumlah ini mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2010, terdapat 30 rumah sakit. Peningkatan ini menggambarkan kemajuan dalam hal penyediaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Papua. Pada tahun 2006, rasio penduduk terhadap jumlah rumah sakit adalah 1: 111.152 orang. Sementara pada tahun 2010, rasio tersebut tersebut adalah 1: 94.446 orang. Namun demikian, jumlah dan kualitas pelayanannya masih sangat kurang terutama dalam hal ketersediaan obat-obatan yang dibutuhkan serta penanganan penyakit yang membutuhkan perawatan intensif.

Sementara itu, perkembangan ketersediaan fasilitas kesehatan lainnya seperti Puskesmas, Pustu dan lainnya, juga mengalami pertumbuhan yang positif seperti yang digambarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.19 Perkembangan Jumlah Puskesmas, Pustu, Puskesmas Keliling Dan Posyandu Provinsi Papua Tahun 2006 – 2010

Tahun	Puskesmas	Pustu	Puskesmas Keliling	Posyandu
2006	164	589	281	-
2007	245	735	539	4512
2008	260	731	783	-
2009	296	731	783	4165
2010	320	791	857	4427

Sumber: Papua Dalam Angka , BPS Provinsi Papua, 2011

Dari segi pelayanan kesehatan dasar, dapat dilihat dari ketersediaan sarana dan tenaga kesehatan terhadap penduduk, misalnya Puskesmas dan Pustu terhadap jumlah penduduk mengalami peningkatan dua kali lipat, antara tahun 2006 dan 2010. Pada tahun 2006 jumlah Puskesmas adalah 164 unit, sementara pada tahun 2010 terdapat 320 unit.

Jarak terjauh dari komunitas masyarakat ke fasilitas puskesmas terdapat di Kabupaten Jayawijaya yang mencapai lebih dari 100 km. Hal tersebut cukup ekstrim mengingat puskesmas terdekat terdapat di kabupaten lain. Lain halnya dengan kabupaten lain yang jaraknya tidak lebih dari 50 km. Begitu juga dengan kemudahan akses dalam memperoleh obat-obatan. Hal ini terlihat dari jumlah apotek yang ada. Pada tahun 2009, jumlah Apotek paling banyak terdapat di Kota Jayapura yaitu sebanyak 70 buah, diikuti oleh Mimika dan Merauke masing-masing sebanyak 16 buah dan Jayapura sebanyak 15 buah, sedangkan di beberapa wilayah lain bahkan belum tersedia.

Tantangan lain di bidang kesehatan adalah antara lain masih terbatasnya tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan di puskesmas, terutama di daerah terpencil. Ini disebabkan oleh sedikit sekali dokter dan bidan yang bersedia untuk ditempatkan di wilayah terpencil. Di sini terlihat bahwa permasalahan tidak saja terbatas pada jumlah tenaga kesehatan, melainkan juga masalah motivasi dan komitmen dari para tenaga kesehatan ini. Selain itu juga dari segi pendidikan dan keterampilan, para tenaga kesehatan yang ada rata-rata belum mengenyam pendidikan sarjana.

Tabel 2.20 Perkembangan Jumlah Tenaga Dokter Dan Medis Lainnya di Provinsi Papua

Tahun	Dokter	Perawat	Bidan
2006	164	589	281
2007	245	735	539
2008	260	731	783
2009	296	731	783
2010	320	791	857

Sumber: Papua Dalam Angka (diolah)

Budaya masyarakat yang belum sepenuhnya sadar tentang pentingnya kesehatan juga merupakan tantangan lain, banyak penduduk di daerah terpencil yang lebih percaya kepada dukun daripada dokter atau bidan, khususnya dalam perawatan ibu hamil, melahirkan, dan balita. Akibatnya kasus ibu yang meninggal saat melahirkan dan bayi yang meninggal cukup banyak.

Tantangan yang perlu mendapat perhatian yang serius oleh pemerintah provinsi Papua adalah masalah sanitasi tempat tinggal masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di pedalaman. Fasilitas air bersih sangat sulit di wilayah tersebut. Ketersediaan akses dan air bersih di Papua belum menjangkau seluruh penduduk dan baru sekitar 34% penduduk yang mendapatkan akses air bersih. Sumber mata air juga relatif berjarak cukup jauh dengan kampung. Selain itu, sebagian besar dari mereka masih tinggal di rumah dengan sirkulasi udara yang buruk dan belum memiliki fasilitas saluran pembuangan yang memadai.

Terkesan bahwa masyarakat kurang mendapat informasi tentang hidup sehat. Umumnya penyuluhan masyarakat yang bersifat pencegahan masih sangat kurang, dan penanganan lebih cenderung pada upaya pengobatan. Demikian pula penyuluhan terkait penggunaan MCK. Sebagian besar penduduk membuang kotorannya di sungai-sungai ataupun semak belukar. Hal ini sangat mungkin terkait dengan kurangnya kapasitas staf kesehatan di lapangan, serta kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada tenaga kesehatan.

Isu penting lainnya di bidang kesehatan adalah jumlah penderita HIV/AIDS. Berdasarkan pada data tahun 2009, penderita HIV/AIDS adalah 1.432 orang, sedangkan pada tahun 2010 menjadi 730 orang. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya penanganan HIV/AIDS di Papua telah membuahkan hasil yang baik. Kendati demikian kondisi ini belum bisa diterima begitu saja karena ada kemungkinan bahwa jumlah

penderita HIV/AIDS melebihi jumlah yang ada. Hal ini karena animo masyarakat untuk memeriksakan status kesehatan masih rendah, termasuk mereka yang tidak terjangkau oleh pelayanan kesehatan dan pendataan yang tidak mampu menjangkau seluruh masyarakat. Selain itu, penyakit malaria juga masih terus berkembang.

Pekerjaan Umum

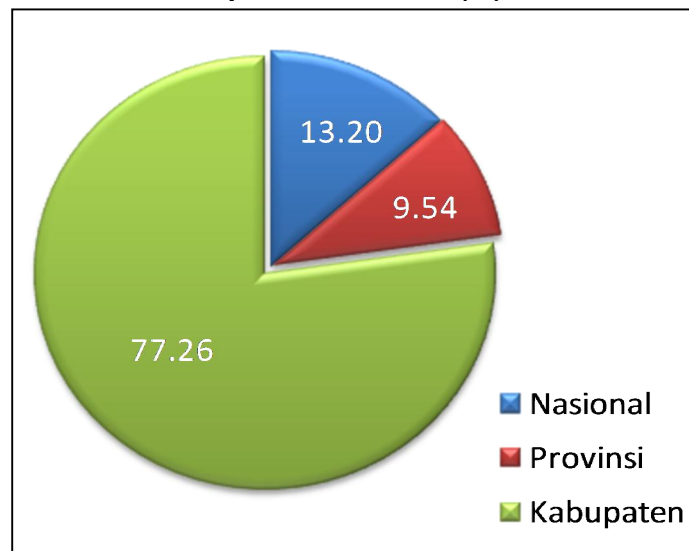
Salah satu komponen pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah adalah penyediaan infrastruktur. Penyelenggaraan pelayanan umum dalam bentuk infrastruktur mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Dengan infrastruktur yang baik, mobilitas masyarakat lebih mudah dilakukan untuk mendukung aktivitas masyarakat termasuk mendorong peningkatan produktifitas bagi faktor-faktor produksi.

Secara umum ketersediaan sarana dan prasarana masih sangat terbatas baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kondisi ini diakibatkan oleh 1) Luasnya jangkauan pelayanan akibat penyebaran masyarakat dalam kelompok-kelompok kecil; 2) Kondisi topografi dan morfologi wilayah yang sangat beragam; dan 3) Keterbatasan pendanaan pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

Dalam beberapa tahun terakhir ini ketersediaan jalan bagi masyarakat berkembang cukup baik. Setiap tahunnya dapat ditingkatkan panjang jalan kurang lebih 2 persen per tahun, atau sekitar 5 km per tahun. Sehingga total panjang jalan di Papua sampai dengan tahun 2009 adalah 15.702,78 km dengan rincian menurut statusnya yakni jalan nasional sekitar 13,20 persen, jalan provinsi sebanyak 9,54 persen, dan jalan kabupaten/kota sebesar 77,26 persen.

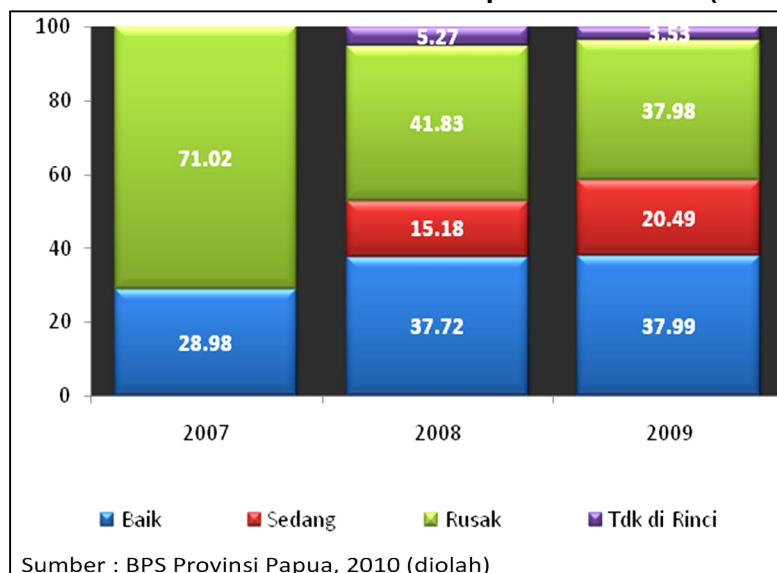
Dengan luas wilayah sebesar 319.036,05 km², ini berarti rasio aksesibilitas jalan di Provinsi Papua hingga tahun 2009 adalah 0,0492 km/km², yang berarti untuk setiap luas wilayah 1 km² hanya terdapat jalan sepanjang 0,0492 km. Sedangkan rasio mobilitasnya mencapai 7,39 km/1000 orang, dengan kata lain untuk per 1000 penduduk tersedia jalan sepanjang 7,39 km. Bandingkan dengan Indonesia yang mempunyai rasio aksesibilitas mencapai 0,20 km/km² dan rasio mobilitasnya sekitar 1,65 km/1000 orang. Dengan melihat kondisi seperti ini maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesulitan untuk mengakses jalan di Papua paling tinggi dan tingkat mobilitas yang paling rendah di Indonesia.

Grafik 2.8 Distribusi Panjang Jalan Menurut Statusnya di Provinsi Papua Tahun 2009 (%)



Sebagian besar jalan di Provinsi Papua dalam kondisi rusak, baik rusak ringan maupun rusak berat, terutama antara tahun 2007-2009, proporsi jalan yang mengalami kerusakan sangat tinggi sekitar 50,28 persen per tahun, sedangkan yang baik hanya 34,90 persen per tahun. Kondisi inilah yang menyebabkan mengapa pembangunan dan peningkatan jalan terlihat lebih lambat dibandingkan dengan pemeliharaan jalan.

Grafik 2.9 Kondisi Jalan Di Provinsi Papua Tahun 2009(Dalam %)



Jika di rinci menurut kabupaten/kota, perkembangan panjang jalan dapat dibagi kedalam 6 kawasan pembangunan, yakni Kawasan Jayapura-Lereh, Kawasan Sarmi-Mamberamo, Kawasan Biak-Teluk Cenderawasih, Kawasan Pegunungan Tengah, Kawasan Pantai Selatan-Timika, dan Kawasan Merauke-Asiki, Mappi. Berdasarkan status jalan,

penyebaran jalan kabupaten/kota merupakan yang terbanyak dibandingkan jalan nasional maupun provinsi untuk setiap kawasan pembangunan, yakni sekitar 79,18 persen dari total panjang jalan 12.977,62 km. Sementara berdasarkan kawasan, program pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan paling banyak terlihat di Kawasan Biak-Teluk Cenderawasih dan Merauke-Asiki-Mappi masing-masing sepanjang 3.903,77 km dan 3.274,33 km.

Tabel 2.21 Panjang Jalan Di Provinsi Papua Di Rinci Menurut Status Jalan, Kawasan Pembangunan Dan Kabupaten/Kota Tahun 2008

NO.	KAWASAN	NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN	TOTAL
1.	Jayapura-Lereh	519,13	453,63	1 542,59	2 515,35
	Kota Jayapura	-	53,00	385,35	438,35
	Kabupaten Jayapura	519,13	400,63	579,99	1 499,75
	Keerom	-	-	577,25	577,25
2.	Sarmi-Memberamo	-	164,00	144,54	308,54
	Sarmi	-	164,00	144,54	308,54
	Mamberamo	-	-	-	-
3.	Biak-Teluk Cenderawasih	402,21	439,75	3 061,81	3 903,77
	Nabire	314,03	40,00	997,76	1 351,79
	Waropen	-	31,00	-	31,00
	Yapen	53,30	130,50	1 326,25	1 510,05
	Biak Numfor	34,88	200,29	737,80	972,97
	Supiori	-	37,96	-	37,96
4.	Pegunungan Tengah	-	-	2 612,84	2 612,84
	Paniai	-	-	1 173,46	1 173,46
	Puncak jaya	-	-	1 439,38	1 439,38
	Tolikara	-	-	-	-
	Yahukimo	-	-	-	-
	Pegunungan Bintang	-	-	-	-
5.	Pantai Selatan - Timika	-	38,75	632,58	671,33
	Mimika	-	38,75	632,58	671,33
	Asmat	-	-	-	-
6.	Merauke-Asiki, Mappi	604,91	243,00	2 426,42	3 274,33
	Merauke	604,91	243,00	1 330,18	2 178,09
	Boven Digul	-	-	402,96	402,96
	Mappi	-	-	693,28	693,28
	Total	1,526.25	1 175,13	10 276,24	12 977,62

Sumber: RTRW Provinsi Papua, 2009

Perhubungan

Kondisi topografi yang berbukit, jurang, gunung dan kepulauan mengakibatkan sarana dan prasarana transportasi udara menjadi tumpuan utama penduduk Papua selama ini. Ada 5 bandara di Papua yang tersedia untuk melayani rute antar provinsi

yaitu Bandara Sentani di Kabupaten Jayapura, Bandara Mopah di Kabupaten Merauke, Bandara Moses Kilangin di Kabupaten Timika, Bandara Frans Kaisepo di Kabupaten Biak, Bandara Nabire di Kabupaten Nabire, dan terakhir Bandara Wamena di Kabupaten Wamena. Empat bandara yang disebutkan pertama sudah dapat menampung pesawat dengan jenis Boeing 737/400 dan DC 10. Sedangkan kapasitas Bandara Nabire dan Wamena hanya untuk pesawat F-27. Selengkapnya infrastruktur bandara pusat penyebaran di Provinsi Papua dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.22 Bandar Udara Pusat Penyebaran Di Provinsi Papua

NAMA BANDARA/ KABUPATEN	RUNWAY (M)	KONTRUKSI	KAPASITAS	APRON (M)	TEMINAL PENUMPANG (M)
Sentani - Jayapura	2 180 x 45	Aspal Beton	Boeing 737/400	470 x 81	4 292
Mopah - Merauke	1 850 x 30	Aspal Beton	Boeing 737/400	160 x 80	750
Wamena - Wamena	1 650 x 30	Aspal Kolakan	F-27	180 x 45	660
Nabire - Nabire	1 400 x 30	Aspal kolakan	F-27	150 x 80	430
Frans Kaisiepo - Biak	3 570 x 45	Aspal Beton	DC - 10	170 x 60	2 224
Moses Kilangin - Timika	2 200 x 45	Aspal Beton	Boeing 737/400	70 x 60	na

Sumber: Dinas Perhubungan Papua (2008)

Selain bandara antar provinsi yang berkapasitas pesawat besar, di Provinsi Papua juga sudah banyak dibangun fasilitas bandara perintis di beberapa kabupaten, yang umumnya mempunyai kapasitas pesawat kecil seperti DHC-6, dan C.208. Jumlah bandara perintis saat ini kurang lebih sebanyak 39 bandara yang sebagian besar memiliki landasan dengan kontruksi aspal kolakan, aspal penetrasi, aspal beton, coil cemen dan rumput atau tanah keras. Khusus untuk Kabupaten Asmat, oleh karena wilayahnya sebagian besar berawa, bandara yang dibangun menggunakan kontruksi plat baja. Selengkapnya kondisi bandara perintis di Papua dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.23 Kondisi Pelabuhan Udara Perintis Di Provinsi Papua

NAMA BANDARA	RUNWAY (M)	KONTRUKSI	KAPASITAS	APRON (M)	T. PENUMPANG (M)
Serui - Yapen	650 x 20	Aspal Kolakan	DHC - 6	70 x 40	280
Dabra - Jayapura	600 x 20	Rumput	DHC - 6	-	-
Senggeh - Keerom	600 x 20	Rumput	DHC - 6	-	-
Lereh - Jayapura	600 x 30	Rumput	DHC - 6	-	-
Waris - Keerom	600 x 23	Rumput	DHC - 6	-	-
Molof - Keerom	750 x 23	Rumput	DHC - 6	-	-
Mararena - Sarmi	700 x 20	Aspal Penetrasi	DHC - 6	47 x 13	120
Kepi - Mappi	700 x 23	Aspal Penetrasi	DHC - 6	-	120
Ewer - Asmat	600 x 18	Plat Baja (PSP)	DHC - 6	-	120
Mindiptanah - Boven Digul	600 x 20	Rumput	DHC - 6	-	120
Kimaam - Merauke	650 x 18	Soil Cemen	DHC - 6	-	120
Senggo - Mappi	762 x 20	Rumput	DHC - 6	-	120
Bade - Mappi	600 x 20	Rumput	DHC - 6	-	120
Kamur - Mappi	700 x 45	Rumput	DHC - 6	-	-
Muting - Merauke	600 x 23	Rumput	DHC - 6	-	-
Okaba - Merauke	600 x 30	Rumput	DHC - 6	-	-
Tanah Merah - Boven Digul	1,000 x 20	Aspal Penetrasi	DHC - 6	70 x 40	120
Merdey - Manokwari	600 x 20	Rumput	DHC - 6	-	120
Batom - Pegunungan Bintang	850 x 20	Aspal Penetrasi	DHC - 6	-	-
Oksibil - Pegunungan Bintang	700 x 23	Aspal Penetrasi	DHC - 6	60 x 40	120
Tion - Jayawijaya	700 x 30	Rumput	DHC - 6	-	-
Bokondini - Jayawijaya	600 x 23	Rumput	DHC - 6	-	-
Karubaga - Jayawijaya	730 x 20	Rumput	DHC - 6	-	120
Mulia - Puncak Jaya	850 x 23	Aspal Penetrasi	DHC - 6	75 x 40	120
Illu - Puncak Jaya	800 x 30	Aspal Penetrasi	DHC - 6	-	-
Ilaga - Puncak Jaya	600 x 25	Rumput	DHC - 6	-	120
Sinak - Puncak Jaya	650 x 18	Rumput	DHC - 6	-	-
Sugapa - Paniai	650 x 24	Rumput	DHC - 6	-	-
Enarotali - Paniai	900 x 20	Aspal Penetrasi	DHC - 6	-	120
Obano - Paniai	730 x 20	Rumput	DHC - 6	-	120
Moanamani - Nabire	1,000 x 18	Rumput	DHC - 6	60 x 40	120
Waghete - Paniai	900 x 18	Rumput	DHC - 6	70 x 40	120
Utarom - Kaimana	1,650 x 30	Aspal Kolakan	F - 28	-	270
Yemburwo - Biak Numfor	1,800 x 23	Aspal	DHC - 6	-	-
Kokonau - Mimika	600 x 18	Aspal Penetrasi	DHC - 6	40 x 30	-
Jila - Mimika	500 x 15	Rumput	DHC - 6	40 x 30	-
Agimuga - Mimika	600 x 15	Rumput	DHC - 6	40 x 30	-
Bomakia - Boven Digul	400 x 24	Rumput	DHC - 6	-	-
Manam - Merauke	750 x 25	Aspal Beton	DHC - 6	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan (2008)

Infrastruktur transportasi lainnya yang masih diandalkan oleh penduduk di Papua selama ini adalah angkutan laut, sungai dan penyeberangan. Di sepanjang wilayah pesisir pantai Papua mulai dari Jayapura, Nabire, Biak Numfor, Kepulauan Yapen, Waropen, dan seterusnya sampai ke Merauke sudah banyak dibangun pelabuhan-pelabuhan laut dan dermaga. Tiga diantaranya yang paling besar saat ini adalah pelabuhan laut Jayapura, Biak dan Merauke. Pada **Error! Reference source not found.** terlihat bahwa ketiga pelabuhan besar ini sudah dapat menampung kontainer dengan kapasitas lapangan penumpukan kontainer untuk pelabuhan laut Jayapura yaitu 8.000 m², pelabuhan laut Merauke yaitu 2.450 m², dan pelabuhan laut Biak yaitu 3.600 m². Saat ini pelabuhan dengan dermaga yang paling panjang di Provinsi Papua adalah pelabuhan laut Jayapura dan Biak, masing-masing memiliki dermaga dengan panjang 132 m dan 142 m. Sedangkan untuk kolam labuh pada setiap pelabuhan antara 12.900 m² sampai dengan 19.800 m².

Tabel 2.24 Kondisi Pelabuhan Laut Utama Di Provinsi Papua

Fasilitas	Jayapura	Merauke	Biak
Panjang Dermaga (m)	132	74	142
Daya Dukung (ton/m ³)	2.5	2.5	2.5
Kolam Labuh (m ²)	19 800	19 800	12 900
Luas Lantai (m ²)	1 200	240	150
Lapangan Penumpukan Kontainer (m ²)	8 000	2 450	3 600
Gudang Lini I 1(satu) unit (m ²)	2 200	640	800

Sumber: Dinas Perhubungan (2008)

Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan laut dan udara dapat digambarkan sebagai berikut:

- Tersedianya 1 pelabuhan internasional, 25 pelabuhan nasional, 1 pelabuhan regional dan 78 pelabuhan lokal, serta beroperasinya kapal PELNI 8 buah;
- Meningkatnya operator angkutan udara seperti Garuda, Merpati, Batavia Air, Expres Air, Trigana Air, dan sebagainya;
- Tersedianya bandara internasional di Biak, bandara domestik di Merauke dan Jayapura, bandara khusus Timika, 56 bandara sebagai pusat penyebaran dan bandara lokal yang dikelola oleh yayasan;
- Ketersediaan kapal laut mencakup 5 buah kapal baru dari 8 buah yang dibutuhkan; dan

e. Dilaksanakannya penerbangan perintis dan berkembangnya penerbangan swasta yang melayani daerah pedalaman/terpencil, sehingga akses antar wilayah semakin meningkat.

Namun karena kondisi cuaca berubah-ubah dan topografi yang berat, maka rawan akan terjadinya kecelakaan penerbangan, hal ini menjadi kendala untuk meningkatkan kapasitas pelayanan. Beberapa permasalahan dalam pengembangan perhubungan laut dan udara yaitu:

- a. Hubungan transportasi udara di kabupaten baru dan pusat-pusat permukiman masyarakat lokal belum berkembang akibat terbatasnya prasarana dan sarana transportasi seperti bandara dan sarana pendukung lainnya;
- b. Sebagian pusat-pusat permukiman masyarakat di wilayah pesisir belum memiliki dermaga dan fasilitas pendukung, sehingga kapal tidak dapat melaksanakan bongkar muat dengan aman dan tepat waktu;
- c. Sejumlah daerah pemekaran seperti Sarmi, Mappi, Boven Digul, dan Asmat belum memiliki dermaga yang layak;
- d. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM dalam pengelolaan manajemen transportasi;
- e. Transportasi udara di beberapa kabupaten baru seperti Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Sarmi dan Mappi membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana.

Perumahan

Kondisi perumahan dan permukiman baik di kawasan perkotaan, perdesaan maupun di wilayah pedalaman dan terpencil didominasi oleh rumah dengan kondisi di bawah standar dan belum layak huni. Kondisi ini dilatarbelakangi oleh

- a. Pola permukiman masyarakat yang terpencar karena memiliki tradisi adat yang kuat;
- b. Ketersediaan sarana prasarana lingkungan perumahan dan permukiman yang tidak memadai sehingga terbentuk kawasan kumuh (*slum area*);
- c. Kemampuan ekonomi masyarakat yang masih rendah; dan
- d. Pembangunan kawasan perumahan dan permukiman yang berada pada kawasan lindung.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir pemerintah telah membangun sekitar 13.429 unit rumah untuk memenuhi kebutuhan perumahan layak huni bagi masyarakat lokal. Selain pembangunan permukiman penduduk juga dilakukan pemberian bantuan bahan non-

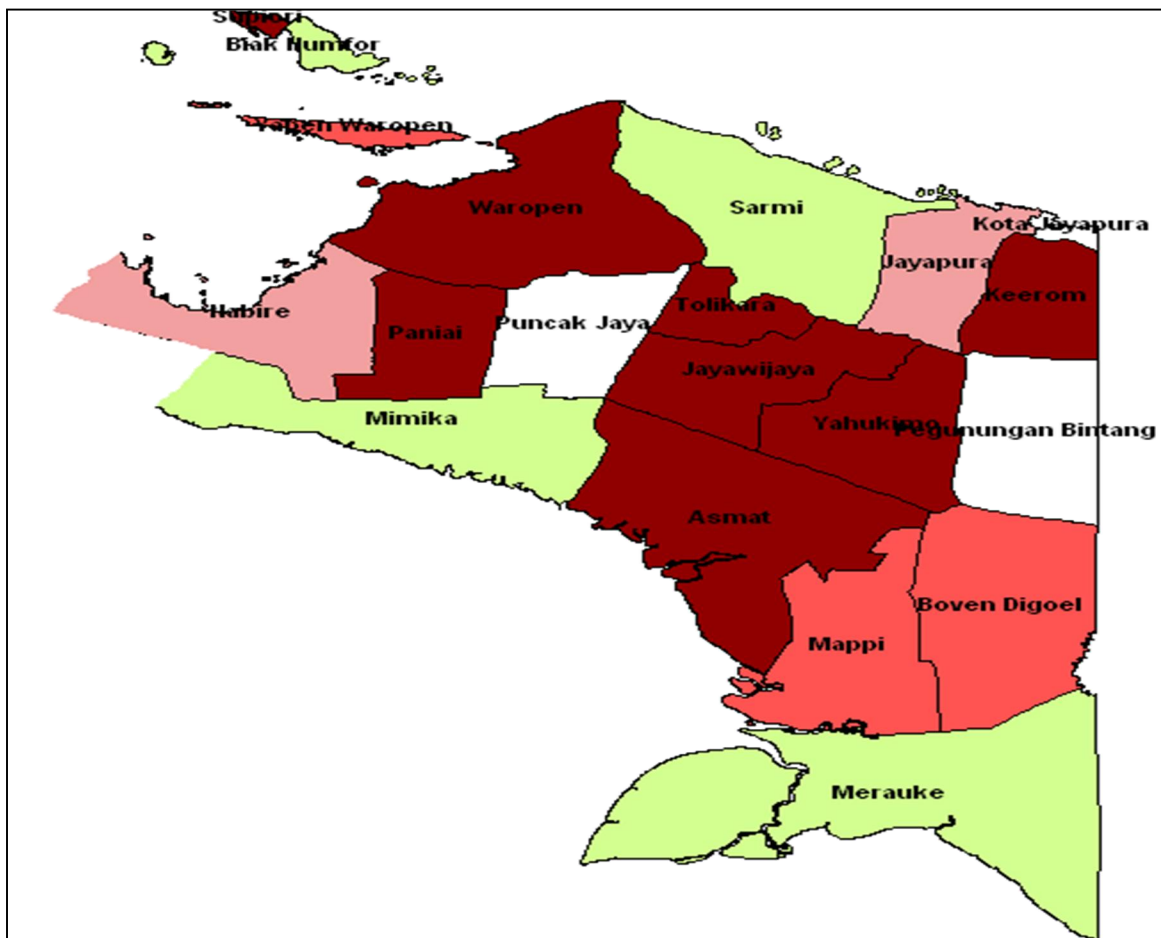
lokal, pembangunan sarana air bersih dan pembangunan fasilitas pendukung seperti penerangan kampung, jalan desa, rumah ibadah dan pelayanan kesehatan.

Di samping itu keberpihakan kepada masyarakat guna memperbaiki tingkat kesejahteraan sosial melalui pembangunan perumahan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan akan perumahan dan permukiman yang layak akan bertambah pula, khususnya permukiman bagi penduduk asli yang tersebar di daerah pedalaman/perkampungan dan terpencil yang masih sulit dijangkau. Tingginya biaya pembangunan rumah yang menggunakan bahan-bahan bangunan yang harus didatangkan dari luar Papua harus disiasati dengan pembangunan berbahan dasar lokal dan disesuaikan dengan kebutuhan perumahan sehat dan layak huni termasuk sanitasinya. Dalam proyeksi penduduk 20 tahun kedepan (2005-2025) diperkirakan jumlah penduduk 3.313.537 jiwa, kebutuhan rumah diperkirakan dengan asumsi 5 jiwa/kepala keluarga kurang lebih 660.000 unit atau setiap tahun perlu dibangun sebanyak 33.000 unit.

Provinsi Papua masih tertinggal dibidang ketersediaan air bersih (air ledeng, pompa dan sumur terlindungi yang berjarak 10 meter atau lebih dari penampungan kotoran/tinja) dan fasilitas sanitasi. Secara rata-rata, akses yang dimiliki masih dibawah rata-rata nasional. Masyarakat yang memiliki akses terhadap air bersih di Papua adalah 35% sedangkan rata-rata nasional adalah 59%. Demikian juga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi. Secara rata-rata, masyarakat yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi adalah 56% sedangkan rata-rata nasional adalah 74% (Peach, 2009).

Menurut Direktorat Permukiman dan Perumahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2009 akses penduduk Papua terhadap sanitasi lingkungan yang baik masih jauh dari rata-rata nasional. Akses rumah tangga untuk mendapat sanitasi yang baik di Papua terendah dari semua provinsi, hanya 21,48 persen. Selain itu banyak keluarga yang sudah mempunyai jamban keluarga tapi tidak menggunakannya. Secara umum kondisi Papua masih di bawah rata-rata nasional, artinya upaya perbaikan sanitasi harus ditingkatkan, agar kualitas kesehatan masyarakat semakin meningkat.

Gambar 2.5 Peta Rumah Tangga Tanpa Akses Ke Air Bersih



Sumber: WFP (2009)

WFP (*World Food Programme*) pada tahun 2009 telah memetakan kerawanan rumahtangga dalam mengakses air bersih di Provinsi Papua (**Error! Reference source not found.**). Di sebagian besar daerah pegunungan pada umumnya ketidakmampuan rumah tangga terhadap akses air bersih sangat tinggi yakni lebih dari 70%, artinya dari total rumah tangga yang ada lebih dari 70% dianggap tidak mampu mengakses air bersih, ini berarti hanya 30% rumah tangga saja yang dinyatakan mampu. Daerah-daerah pegunungan yang dimaksud adalah Paniai, Yahukimo, Jayawijaya dan Tolikara. Selain itu beberapa daerah pesisir dan dataran rendah yang terpetakan juga mempunyai tingkat rawan air bersih yang tinggi adalah Asmat, Yapen Waropen dan Keerom.

Tabel 2.25 Lokasi, Jenis, Dan Debit Sumber Air Bersih Di Provinsi Papua

NO.	Nama Sumber	Lokasi	Jenis Sumber	Debit (liter/detik)
1	Sungai Sabron	Sabron Sari/Dosay	Air Sungai	190
2	Sungai Nawa	Nawa/Arso	Air Sungai	20
3	Sungai Jaifuri	Jaifuri/Arso	Air Sungai	12,5
4	Sungai Pau	Ampas/Waris	Air Sungai	1,5
5	Sungai Ziu	Ampas/Waris	Air Sungai	14
6	M.A. Wangacai	Ampas/Waris	Mata Air	1
7	M.A. Batamba	Kalifum/Waris	Mata Air	10
8	M.A. Kalifun	Kalifum/Waris	Mata Air	1
9	M.A. Temba	Senggi/Senggi	Mata Air	4
10	M.A. Wing	Warlef/Senggi	Mata Air	-
11	Sungai Nawai	Senggi/Senggi	Air Sungai	4
12	Sungai Tusum	Senggi/Senggi	Air Sungai	54
13	Sungai Titfe	Sewan/Sarmi	Air Sungai	300
14	M.A. Mawesmukti	Mawesmukti/Bonggo	Mata Air	10
15	M.A. Kanaki	Kanaki/Yapen Barat	Mata Air	5
16	Kali Dowai	Ansus/Yapen Barat	Air Sungai	5
17	Kali Merawapi	Ansus/Yapen Barat	Air Sungai	10
18	Kali Mareni	Wooi/Yapen Barat	Air Sungai	500
19	Kali Aibondeni	Aibondeni/Yapen Barat	Air Sungai	5
20	Kali Wowuti	Wowuti/Angkaisera	Air Sungai	15
21	Kali Warironi	Randawaya/Yapen Timur	Air Sungai	100
22	M.A. Watopa	Sarafambai/Ureifasei	Mata Air	0
23	M.A. Nonomi 1	Nonomi/Ureifasei	Mata Air	0
24	M.A. Nonomi 2	Nonomi/Ureifasei	Mata Air	0
25	Sungai Sanggei	Khemon Jaya/Ureifasei	Air Sungai	2,7
26	Sungai Botawa	Botasa	Air Sungai	525
27	Sungai Buruadewa	Harapan Jaya / Inggerus	Air Sungai	80
28	M.A. Adibay	Adibay/ Biak Timur	Mata Air	6
29	Sungai Warsa	Warsa	Air Sungai	100
30	Sungai Sordori	Yawosi/Warsa	Air Sungai	5
31	Sungai Korim	Korim/Biak Utara	Air Sungai	13
32	Sungai Nyiben	Wafor/Supiori Timur	Air Sungai	460
33	Sungai Korido	Korido/Supiori Selatan	Air Sungai	3
34	Sungai Biha	Biha/Makimi	Air Sungai	100
35	Sungai Musairo	Legare Jaya/Makimi	Air Sungai	3
36	M.A. Siriwini	Siriwini	Mata Air	5
37	M.A. Kurulu	Kurulu/Kurulu	Mata Air	15
38	M.A. Asologaima	Asologaima	Mata Air	15
39	M.A. Pikhe	Pikhe/Wamena	Mata Air	15

NO.	Nama Sumber	Lokasi	Jenis Sumber	Debit (liter/detik)
40	Sungai Melage	Kurima	Air Sungai	200
41	M.A. Karubate	Mulia	Mata Air	22
42	Sungai Dinggok	Mulia	Air Sungai	284
43	Sungai Wuyu	Mulia	Air Sungai	2,215
44	Kali Wuyu	Mulia	Air Sungai	419
45	M.A. Okut	Oksibil	Mata Air	8
46	Sungai Okpol	Oksibil	Air Sungai	26
47	M.A. Sungai Okaluk	Oksibil	Air Sungai	5
48	Kolam Oksibil	Oksibil	Air Sungai	711
49	Sungai Oktenma	Oksibil	Air Sungai	121
50	Sungai Sombong	Oksibil	Air Sungai	-
51	Sungai Merah	Batom	Air Sungai	348
52	Sungai Kanga	Kuamki Baru/Mimika Baru	Air Sungai	8,97
53	Sungai Kanga2	Manggalum	Air Sungai	20
54	M.A. Mindiptana	Mindiptana	Mata Air	1
		J u m l a h		578,108

Sumber : RTRW Provinsi Papua 2009

Lingkungan Hidup

Potensi sumber daya alam yang sangat besar harus dikelola dengan kebijakan dan praktek pembangunan serta pemanfaatan SDA yang memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Salah satu tantangan yang ada adalah kurang adanya kemauan yang kuat dan konsisten dari semua pihak (Pemerintah, DPR, Dunia Usaha, dan masyarakat) yang menjadikan lingkungan sebagai indikator pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup berimplikasi terjadinya eksternalitas negatif, seperti kerusakan lingkungan terutama pengrusakan hutan dengan penebangan liar, pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung lahan, hutan bakau semakin berkurang dan adanya pencemaran/kerusakan lingkungan pada daerah pantai/perairan dan kegiatan pertambangan yang merusak ekosistem yang ada. Kondisi ini diakibatkan oleh:

- a. Tidak adanya penegakan hukum (*law enforcement*);
- b. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang tidak berpihak kepada masyarakat adat;
- c. Kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tumpang tindih dan cenderung tidak ada koordinasi antar sektor; dan
- d. Tekanan pertumbuhan penduduk;

- e. Konsistensi dan keseriusan untuk mengelola lingkungan dan menjadikannya modal pembangunan yang berkelanjutan dan dalam jangka panjang.

Pengelolaan sumber daya hutan alam di Papua harus segera ditertibkan untuk mengurangi kerusakan hutan yang sudah mencapai 35 %. Hal ini dilihat dari:

- a. Beroperasinya 46 HPH dengan luas areal konsesi 10.046.690 ha;
- b. Kemampuan produksi serta penebangan rata-rata 1 HPH 1.000 ha/thn, maka dalam 10 tahun ke depan diperkirakan terjadi pengrusakan hutan $10 \times 46 \text{ HPH} \times 1.000 \text{ ha} = 460.000 \text{ ha}$;
- c. Kerusakan hutan yang tidak alami mengakibatkan populasi mamalia dan spesies burung menurun secara dratis seperti Cendrawasih, Kakatua, dan lain-lain yang merupakan spesies langka dan diperkirakan 15 tahun mendatang akan punah;
- d. Belum memberikan kesempatan kepada masyarakat adat memperoleh pendapatan dari hasil hutan atas hak ulayatnya. Kebijakan dalam bentuk IPK melalui KOPERMAS, masih membatasi kapasitas adat dan KOPERMAS sehingga dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan penebangan liar diluar konsesi tanpa pengendalian yang mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan;
- e. Belum jelas kewenangan dalam pengelolaan hutan dan adanya perbedaan persepsi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Meningkatnya pengalihan status lahan di kawasan hutan lindung dan hutan suaka alam untuk kegiatan pembangunan mengakibatkan berkurangnya lahan-lahan yang berfungsi lindung sebagai penopang keseimbangan lingkungan. Areal air tawar telah berkurang, danau telah berkurang fungsinya bahkan hutan bakaupun terancam punah. Pengalihan fungsi lahan telah menyebabkan gangguan terhadap keseimbangan hidrologis, berkurangnya air tanah, erosi dan banjir.

Tabel 2.26 Kawasan Konservasi Provinsi Papua

No	Provinsi/Kabupaten/kota		Surat Keputusan				Luas GIS (ha)	Perbedaan Luas
	Fungsi	Nama Kawasan	Kabupaten	No. SK	Tanggal	Luas (Ha)		
1	CA	Peg. Cycloop*	Kota & kab. Jayapura	Mentan No.56/Ktis/Umr/1/1978	26 Januari 1978	22.500,00	30.570,34	-8.070,34
2	CA	Enarotali*	Deiyai, Dogiyai, Paniai	Mentan No.84/Kpits/Umr/2/1980	11 Februari 1980	300.000,00	98.797,20	201.202,80
3	CA	Biak Utara	Biak Numfor	Menhut No. 212/Kpits/Umr/11/1982	4 Agustus 1982	11.000,00	3.525,74	7.474,26
4	CA	Yapen Tengah	Kep. Yapen	Menhut No. 26/Kpits-Il/1999				
				Menhutan No. 755/Kpits-Umr/10/1982	12 Oktober 1982	119,140,75	111,989,20	7,151,55
5	CA	Pulau Supriori	Supiori	Mentan No.336/Kpits/Umr/7/1982	7 Desember 1982	42.000,00	40.738,95	1.261,05
6	CA	Tanjung Way	Nabire	Menhut No.891/Kpits-Il/1999	14 Oktober 1999	4.378,70	6.589,46	-2.210,76
7	CA	Peg. Wayland*	Deiyai, Dogiyai, Paniai	Menhut No.891/Kpits-Il/1999	14 Oktober 1999	223.000,00	134.326,67	88.673,33
8	CA	Bupul*	Merauke	Menhut No.891/Kpits-Il/1999	14 Oktober 1999	92.704,00	126.853,57	-34.149,57
9	SM	Pulau Dolok*	Merauke	Mentan No. 371/Kpits-Umr/6/1978	9 Juni 1978	600.000,00	702.291,84	-102.291,84
10	SM	Jayawijaya/Peg. Bintang*	Yahukimo, Peg. Bintang, Yalimo	Mentan No.914/Kpits/Umr/10/1981	30-Oct-1981	800.000,00	741.290,40	58.709,60
11	SM	Foja Mamberamo*	Kab. Jayapura, Keerom, Sarmi, Mamberamo Raya, Mamberamo	Mentan No.782/Kpits/Umr/10/1982	21-Oct-1982	1.018.000,00	1.682.782,13	335.217,87
		Perluasan SM Foja Mamberamo		Menhut No.820/Kpits/Umr/11/1982	10-Nov-1982	1.000.000,00		
12	SM	Danau Bian*	Merauke	Menhut No.119/Kpits-Il/1990	19 Maret 1990	69.390,00	115.219,24	-45.829,24
13	SM	Pulau Pombo	Merauke	Menhut No.820/Kpits/Umr/11/1982	10-Nov-1982	100,00	162,51	-62,51
14	SM	Komolon*	Merauke	Menhut No.820/Kpits/Umr/11/1982	10-Nov-1982	84,130,40	72,125,26	12,005,14
15	SM	Savan	Merauke	Menhut No.891/Kpits-Il/1999	14-Oct-1999	8,261,00	7,527,00	734,00
16	TN	Lorentz**	A-smat, Milmika, Ihtan Jaya, Jayawijaya, Lani Jaya, Nluga, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, Yahukimo	Menhut 154/Kpits-Il/1997	19 Maret 1997	2.450.000,00	2.333.228,27	116.771,73
17	TN	Wasur	Merauke	Menhut No.282/Kpits-V/1/1997	23 Mei 1997	413,810,00	407,297,14	6,512,86
18	TW	Nabire/Borote/Anggromeos*	Nabire	Mentan No.21/Kpits/Umr/1980	12 Januari 1980	100,00	2,142,78	-2,042,78
19	TW	Teluk Yolefa*	Kota Jayapura	Menhut No. 714/Kpits-Il/1996	11-Nov-1996	1,650,00	1,122,97	527,03
20	TW (L)	Kep. Padaido	Biak Numfor	Menhut No.91/Kpits-V/1997	13-Pebr-97	183.000,00	80.281,66	102.718,34
21	TN (L)	Teluk Cenderawasih***	Nabire, Kep. Yapen, Waropen	Menhut No.472/Kpits-Il/1993	2-Sep-93	1,453,500,00	396.379,93	1,057,120,07
22	TN	KKLD Biak Numfor	Biak Numfor				22,752,82	
						8,896,464,85	7,117,995,10	

Sumber : BPKH X Jayapura & hasil perhitungan GIS
 Keterangan: * ditetapkan sebagai kawasan lindung nasional dalam RTRWN
 ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional dalam RTRWN
 * luas menurut SK Menhut termasuk yang berada di Prov. Papua Barat

Terdapat 22 kawasan konservasi di Provinsi Papua, yaitu:

- 1 kawasan ditentukan sebagai kawasan strategis nasional, yaitu TN Lorentz
- 11 kawasan ditentukan sebagai kawasan lindung nasional
- 1 kawasan merupakan KKLD
- 9 kawasan lainnya, yang penunjukannya didasarkan pada SK Menteri Pertanian/Kehutanan, ditentukan sebagai kawasan konservasi.

Di samping itu potensi lestari hutan komersial mencapai 540 juta m³, perairan dengan luas 228.000 km² mempunyai potensi sebanyak 1.3 juta ton, dan potensi pariwisata budaya yang sangat beragam dan unik memiliki magnet tersendiri yang dapat memikat wisatawan untuk datang ke Papua (Suebu, 2007). Dengan seluruh kekayaan alam yang begitu besar jumlahnya akhirnya menempatkan Propinsi Papua pada deretan lima besar propinsi terkaya di negara Indonesia.

Kekayaan sumberdaya alam berupa terumbu karang pada beberapa daerah pesisir seperti Biak, Yapen Waropen, dan Supiori yang memiliki luas wilayah laut dan memiliki terumbu karang yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, namun terjadi eksploitasi dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab karena tidak adanya pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum. Fungsi ekosistem terumbu karang masih belum dipahami, sehingga pengambilan ikanyang merusak terumbu karang berpotensi menghancurkan ekosistem perairan laut yang pada akhirnya akan berdampak pada kelestarian sumber daya ikan maupun pesisir dan pantai sekitarnya.

Tabel 2.27 Luasan Terumbu Karang Di Pesisirprovinsi Papua

KABUPATEN/ KOTA	LUAS WILLAYAH LAUT (KM2)
Supiori	175,90
Biak Numfor	263,31
Yapen	114,60
Waropen	19,19
Sarmi	17,89
Nabire	126,26
Mamberamo Raya	0,00
Jayapura	na
Kota Jayapura	1,41
Mimika	na
Mappi	0,00
Asmat	na
Merauke	na

Sumber: Conservation International, 2003 (diolah)

Potensi sumber daya alam lainnya adalah lahan gambut yang cukup luas di wilayah Provinsi Papua. Lahan gambut yang memiliki fungsi tata air harus dipahami dengan sungguh-sungguh. Pembukaan lahan gambut berpotensi menimbulkan emisi karbon yang akan mempengaruhi kenaikan suhu bumi. Ketentuan untuk tidak melakukan aktivitas yang bersifat membuka lahan di areal lahan gambut harus benar-benar dipatuhi agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Adapun data tentang luas dan kedalaman lahan gambut di Provinsi Papua dapat dilihat pada:

Tabel 2.27 Luas Lahan Gambut Di Provinsi Papua (Dalam Ha)

No	Kabupaten/Kota	Extremely Deep (>200cm)	Very Deep (76200cm)	Deep (51-75cm) /very Deep (75-200cm)	Deep (51-75cm)	Jumlah
1	KOTA JAYAPURA	617	6,09		3,959	10,666
2	KAB. MERAUKE		10,088	21,530	152,774	174,304
3	KAB. JAYAWIJAYA		79,25		89,452	89,452
4	KAB. JAYAPURA	18,52	113		24,61	53,218
5	KAB. NABIRE	68,708	40,546		413,669	561,626
6	KAB. KEPULAUAN YAPEN	2,137	158,633			2,25
7	KAB. BIAK NUMFOR		26,663			
8	KAB. PANIAI	9,645	20,465		265,303	274,948
9	KAB. PUNCAK JAYA	119,634	10,783		319,652	439,285
10	KAB. MIMIKA	391,081	6,766		584,821	1,016,449
11	KAB. BOUVEN DIGOEL		38,557	12,779	12,883	184,295
12	KAB. MAPPI	32,867	132,431	436,475	61,908	557,913
13	KAB. ASMAT	1,001,663	3	500,086	264,624	1,786,838
14	KAB. YAHUKIMO	5,189	42,687		992,235	1,008,207
15	KAB. PEG. BINTANG		347,779		692,458	699,223
16	KAB. TOLIKARA	127,151	42,171		356,351	522,059
17	KAB. SARMI	43,345	50,589			175,776
18	KAB. KEEROM	3,674	18,071		146,216	149,894
19	KAB. WAROPEN	30,566	1,075			73,253
20	KAB. SUPIORI					
21	KAB. MEMBERAMO RAYA	160,108				507,887
22	KAB. MEMB_TENGAH	2,349			239,595	284,115
23	KAB. YALIMO	8,907			247,078	306,574
24	KAB. LANI JAYA				159,102	159,102
25	KAB. NDUGA	7,824			302,378	328,273
26	KAB. PUNCAK	31,841			332,697	364,538
27	KAB. DOGIYAI	4,141			201,277	206,493
28	KAB. INTAN JAYA	23,646			527,331	550,977

No	Kabupaten/Kota	Extremely Deep (>200cm)	Very Deep (76200cm)	Deep (51-75cm) /very Deep (75-200cm)	Deep (51-75cm)	Jumlah
29	KAB. DEIYAI	3,244			127,635	130,879
	Jumlah (ha)	2,096,859	1,032,759	970,87	6,518,009	10,618,496
	Jumlah (%)	19.75%	9.73%	9.14%	61.38%	100.00%

Sumber : Hasil Perhitungan GIS dari peta lahan gambut

Provinsi Papua terkenal sebagai wilayah dengan kawasan Mangrove yang luas dan tersebar di 13 kabupaten dengan total luas mangrove pada tahun 2000 yaitu 1,2 juta Ha. Selama enam tahun yaitu dari tahun 2000 hingga tahun 2006 luas kawasan mangrove berkurang sekitar 6,71% akibat penebangan dan reklamasi kawasan pesisir menjadi tambak. Kegiatan yang bersifat mendorong terjadinya reklamasi ataupun penebangan hutan mangrove harus dihentikan. Pemerintah maupun masyarakat harus menyadari dan memahami berbagai macam fungsi hutan mangrove yang harus dikelola secara bijaksana agar tidak berimbas pada berbagai bencana lingkungan yang ditimbulkan. Secara garis besar, mangrove memiliki fungsi sebagai penahan ombak, penyaring limbah yang berasal dari daratan (*land base polution*), tempat bertelur, pemijahan, dan pemeliharaan ikan dan udang, penyerap karbon, penahan abrasi, dan berbagai fungsi lainnya yang saling berkaitan. Untuk itu kawasan mangrove di Papua harus dilindungi dan dikelola dengan bijaksana.

Tabel 2.28 Kawasan Mangrove Di Provinsi Papua

NO	KABUPATEN	LUAS MANGROVE (Ha)		PERUBAHAN LUAS (%)
		TAHUN 2000	TAHUN 2006	
1	Kota Jayapura	299	284	-5.02%
2	Kab. Jayapura	209	139	-33.49%
3	Kab. Sarmi	4,274	3,212	-24.85%
4	Kab Memberamo Raya	185,860	162,026	-12.82%
5	Kab. Nabire	24,804	23,431	-5.54%
6	Kab. Biak Numfor	5,998	4,795	-20.06%
7	Kab. Supiori	3,561	3,603	1.18%
8	Kab. Waropen	28,783	26,329	-8.53%
9	Kab. Yapen	5,773	3,999	-30.73%
10	Kab. Asmat	305,172	278,585	-8.71%
11	Kab. Mimika	268,788	276,671	2.93%
12	Kab. Mappi	63,360	58,227	-8.10%
13	Kab. Merauke	343,766	316,157	-8.03%
Jumlah		1,240,647	1,157,458	-6.71%

Sumber: hasil perhitungan GIS dari peta Hutan Mangrove

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan anak masih kurang memadai, terutama berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup dimana indeks pembangunan gender pada tahun 2002 adalah 54,3%. Kualitas hidup perempuan dan anak ditentukan dengan mencermati indikasi rasio partisipasi sekolah, kualitas kesehatan perempuan dan anak serta komparasi upah antar gender. Demokratisasi telah mendorong peran perempuan dan peningkatan pemberdayaan perempuan (*gender empowerment*) dalam dunia kerja, partisipasi sosial, dunia politik, ekonomi dan dalam pengambilan keputusan yang tercermin dari indeks pemberdayaan gender pada tahun 2002 sebesar 49%. Namun demikian kultur atau tradisi yang berlaku hubungan sosial antara laki-laki-perempuan yang berlangsung dalam keluarga maupun masyarakat belum berpihak pada kepentingan kaum perempuan. Selain itu tingkat pemahaman dan penyadaran terhadap isu gender di masyarakat masih sangat terbatas. Isu yang terkait dengan peran perempuan di Papua masih sangat kurang, demikian pula upaya-upaya yang dilakukan untuk perlindungan kepada kaum perempuan dan anak-anak.

Penataan Ruang

Ruang merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan wilayah. Konsep ruang mempunyai beberapa elemen, yaitu: dimensi (besaran, terukur, panjang, lebar, tinggi dengan segenap variasinya); bentuk, wujud, sosok, konfigurasi atau gatra yang sering disebut geometri sehingga ada istilah *the geometry of environment*, dan pada dasarnya menggunakan tata bahasa unsur dimensi ruang; bagian-bagian, terdiri dari bagian-bagian ruang yang menjadikannya satu-satuan ruang dengan kriteria tertentu. Bagian-bagian ruang terbagi menurut kriteria fungsional-ekonomis, sosial, kultural, ekologis, politis, administratif; struktur, terdiri atas bagian-bagian ruang fungsional yang membentuk satu satuan ruang untuk mewadahi, mendukung tujuan tertentu; organisasi, lebih tinggi daripada struktur karena dalam organisasi, aspek hirarki atau tata tingkat lebih menonjol sehingga mempertegas tata urutan kalau itu menyangkut proses. Dari Rancangan Peraturan Presiden Tentang Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Papua, ada beberapa catatan penting yang perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan dan penyusunan isu strategi mengenai tata ruang Provinsi Papua di masa mendatang yaitu sebagai berikut.

- RTRW Pulau Papua merupakan penjabaran struktur pola ruang wilayah nasional ke dalam kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang Pulau Papua.

- Kedudukan RTRW Pulau Papua adalah sebagai alat untuk mensinergikan aspek-aspek yang menjadi kepentingan Nasional yang direncanakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dengan aspek-aspek yang menjadi kepentingan daerah yang direncanakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
- RTRW Pulau Papua disusun berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan.
- program-program pengembangan ruang yang diprioritaskan secara garis besarnya meliputi pembangunan jaringan transportasi, sumber daya air, energi dan tenaga listrik, dan kawasan-kawasan tertentu.

Pemerintah Papua berkomitmen untuk mempertahankan kawasan hutan seluas 70% dari luas Provinsi Papua. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Papua saat menyampaikan paparan tentang RTRW Provinsi Papua 2010-2030 bersama Menteri Kehutanan, di Jakarta, 3 September 2010. Penataan ruang di provinsi Papua bertujuan Mewujudkan Tata Ruang Lestari untuk Mendukung Pembangunan yang Terpadu, Harmonis, Sejahtera, dan Mandiri. Proses Penyusunan RTRW Provinsi Papua dilakukan dengan menerapkan lima prinsip inovatif yaitu, (1) Penyusunan RTRW secara SWAKELOLA, (2) Partisipasi antar-Kelembagaan Pemerintah dan non Pemerintah yang dinamis dan efektif, (3) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) berdasarkan Analisis Fakta, (4) Peningkatan Kapasitas Provinsi, (5) Bimbingan tindak lanjut kepada Kabupaten agar supaya RTRW Kabupaten/Kota mengacu kepada RTRW Provinsi. Hasil penyusunan RTRWP Papua menunjukkan adanya beberapa perubahan peruntukan dan fungsi kawasan, yaitu Areal Penggunaan Lain (APL) bertambah 401.975 ha (+47,7%), Hutan Lindung bertambah 3.151.028 ha (+43.8%), Hutan Produksi berkurang 4.960.251 ha (-60%), HPK berkurang 2.847.146 ha (43.9%), HPT bertambah 4.338.821 ha (237.7%), KSA/KPA bertambah 312.225 ha (4.4%). (PIK, 2010).

Keseriusan dalam pengelolaan ruang sesuai dengan tata ruang yang telah disusun utamanya untuk menjamin pembangunan dan keberlanjutan lingkungan untuk mendukung kehidupan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Kehidupan yang harmonis dan selaras dengan alam dan kawasan-kawasan yang telah disesuaikan berdasarkan fungsinya sangat perlu untuk diperhatikan dan dipatuhi. Hal ini agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang justru berimbas pada kerusakan seluruh sarana dan prasarana pembangunan yang telah dilaksanakan dan memberikan dampak sosial yang besar dan kerusakan permanen atau jangka panjang. Hal ini dapat dilihat bahwa Satuan Pengembangan Wilayah Papua telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua sebagai berikut :

Tabel 2.29 Satuan Wilayah Pengembangan Provinsi Papua

SWP	Pusat Pengembangan	Wilayah Pengembangan	Peran dan Fungsi Pusat Pengembangan	Penduduk Tahun 2030 (Jiwa)
SWP I	Kab/Kota Jayapura	Wilayah Relayanan Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang dan Seluruh Kabupaten Se Provinsi Papua	Bukota Provinsi dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Pusat pengembangan utama di bagian wilayah utara Sempul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang ke kawasan internasional Pusat kegiatan industri dan jasa-jasa berskala nasional Sempul utama transportasi skala nasional	747,898
SWP II	Merauke	Wilayah Relayanan Kabupaten Boven Digoei, Mappi	Bukota Kabupaten dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Pusat pengembangan utama di bagian wilayah selatan Sempul utama kegiatan ekspor-impor dan kawasan perbatasan dengan PNG. Pusat kegiatan industri dan pertanian berskala nasional Sempul utama transportasi skala nasional	441,632
SWP III	Biak	Wilayah Relayanan Kabupaten Supiori, Kep. Y apen, Waropen	Bukota Kabupaten dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Pusat pengembangan utama di kawasan Teluk Cendrawasih. Sempul utama kegiatan ekspor-impor berskala nasional Pusat kegiatan pertanian, industri dan perdagangan Sempul utama transportasi skala internasional	306,091
SWP IV	Nabire	Wilayah Relayanan Kabupaten Paniai, Dogiyai, Intan Jaya, Deiyai	Bukota Kabupaten dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Pusat kegiatan pertanian dan pertambangan yang melayani beberapa kabupaten Sempul transportasi yang melayani beberapa kabupaten Sempul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN Biak	493,081
SWP V	Jayawijaya	Wilayah Relayanan Kab. Yalimo, Nduga, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Tolikara, Puncak Jaya, Yahukimo	Bukota Kabupaten dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Pusat kegiatan pertanian yang melayani beberapa kabupaten Sempul transportasi yang melayani beberapa kabupaten di Pegunungan Tengah	796,675
SWP VI	Miriika	Wilayah Relayanan Kabupaten Asmat, Puncak	Bukota Kabupaten dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Pusat pengembangan utama di bagian wilayah selatan Sempul utama kegiatan ekspor-impor berskala internasional Pusat kegiatan pertambangan dan industri berskala nasional Sempul utama transportasi skala nasional	399,549
SWP VII	Sarmi	Wilayah Relayanan Kabupaten Mamberamo Raya	Bukota Kabupaten dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Pusat kegiatan pertanian yang melayani beberapa kabupaten Sempul transportasi yang melayani kabupaten Mamberamo Raya, Jayapura Sempul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN Jayapura	72,210

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam negeri

Perkembangan demokrasi sejak tahun 1997 hingga pemilu tahun 2004 yang lalu telah mengakhiri masa transisi demokrasi menuju proses konsolidasi demokrasi. Amandemen UUD 1945 yang dilaksanakan sebanyak empat kali telah menata kembali kewenangan, kekuasaan, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dengan adanya penataan tersebut telah memberikan peluang akan keseimbangan kekuasaan dalam menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Selanjutnya telah ada beberapa Undang-undang yang merupakan implikasi dari amandemen UUD 1945. Reformasi di bidang politik telah mengatur partai politik yang termuat dalam UU nomor 31 tahun 2002 tentang partai politik. Selain itu UU nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum dan UU nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan DPD dan DPRD. Dalam hubungan dengan pengembangan demokrasi maka telah dicapai kemajuan yang cukup berarti melalui pemilu tahun 2004. Melalui pemilu telah dipilih secara langsung wakil rakyat baik sebagai anggota DPD maupun DPRD.

Perkembangan demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat menyalurkan aspirasi secara terbuka di sisi lain adanya aspirasi yang lebih ekstrim, seperti adanya tuntutan sebagian masyarakat untuk memisahkan diri dari NKRI. Tuntutan masyarakat tersebut merupakan akumulasi dari ketidakadilan, ketimpangan sosial dan ekonomi serta pelanggaran hak asasi manusia. Kondisi ini melatarbelakangi lahirnya Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Undang-undang ini memberlakukan kebijakan khusus yang mengatur tentang nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, hak asasi manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme serta persamaan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selain itu melalui UU tersebut dimaksudkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi Papua secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli guna mengejar ketertinggalan dari provinsi lainnya di Indonesia. Di dalam UU nomor 21 tersebut diatur pula bentuk dan susunan pemerintah daerah meliputi DPRD selaku Badan Legislatif, Badan Eksekutif dan Majelis Rakyat Papua (MRP).

Dalam upaya mendorong kemandirian daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah, maka telah diatur hubungan pusat dan daerah dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Di dalam undang-undang tersebut telah diatur kewenangan

Pemerintah dan hubungannya dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota atau Provinsi dan Kabupaten dan Kota.

Perkembangan demokrasi tercermin melalui kesadaran masyarakat dalam kehidupan politik yang dalam jangka panjang diharapkan akan mendorong masyarakat untuk semakin aktif berpartisipasi dalam mengambil inisiatif guna pengelolaan urusan-urusan publik. Ini dapat tercermin dari pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden di mana dapat berlangsung sukses dan partisipasi masyarakat untuk menyalurkan haknya sangat tinggi. Perkembangan ini merupakan kontribusi yang diberikan partai politik dan masyarakat sipil. Selain itu, kebebasan pers dan media telah berkembang secara baik terutama dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah.

Pembinaan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Papua berjalan dengan cukup baik. Hal ini tercermin dengan terselenggaranya forum komunikasi antara pemerintah daerah, pimpinan DPRP, tokoh agama dan tokoh adat dalam kesetaraan dan keterbukaan. Selain itu, meningkatnya pengetahuan dan wawasan organisasi kemasyarakatan dalam penyampaian aspirasi sehingga setiap pengambilan keputusan merupakan konsensus dari sebagian besar masyarakat.

Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi kultural orang asli Papua yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan kehidupan beragama.

Tuntutan sebagian masyarakat untuk lepas dari NKRI menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Namun saat ini ketentraman dan ketertiban semakin meningkat seiring semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dan bekerjasama dengan pihak POLRI dan TNI dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

Sementara itu, ketika pertikaian yang disebabkan isu SARA dan teror bom telah terjadi di beberapa daerah di Indonesia, Provinsi Papua tetap dalam keadaan kondusif. Hal ini dikarenakan adanya komitmen seluruh komponen masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan ketentraman dan keamanan di Tanah Papua dengan slogan “Papua sebagai Tanah Damai”. Langkah-langkah yang ditempuh adalah dengan memanfaatkan dan memberdayakan forum yang terdiri dari lembaga agama, adat serta Muspida yang secara temporer mengadakan pertemuan guna membicarakan masalah-masalah yang berkembang dan terjadi serta solusi penanganan dan penyelesaiannya.

Disamping itu gangguan-gangguan ketentraman dan ketertiban masih terjadi di beberapa daerah yang disebabkan oleh isu “Merdeka” dan pertikaian antar suku yang menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Proporsi jumlah aparat keamanan atau polisi dengan luas wilayah masih terdapat ketimpangan sehingga pihak keamanan memiliki keterbatasan dalam menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban secara preventif, kuratif maupun persuasif.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kesungguhan pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Banyak hal yang berkaitan dengan pencapaian *good governance*, karena melibatkan banyak pemangku kepentingan (*stakeholders*). Salah satu hal yang penting dalam pencapaian *good governance* adalah ketersediaan regulasi yang mengatur setiap kegiatan di daerah tersebut.

Untuk memastikan pelayanan umum berjalan dengan lancar, terdapat beberapa instansi pemerintah di Provinsi Papua yang merupakan perwakilan dari instansi pemerintah pusat. **Error! Reference source not found.** menggambarkan beberapa instansi yang berada di provinsi Papua.

Tabel 2.30 Instansi Pemerintah yang ada Di Provinsi Papua

Sekretariat Daerah	Dinas	Badan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Kebudayaan dan Pariwisata	Perpustakaan dan Arsip Daerah
Biro Organisasi	Kehutanan dan Konservasi	Kepegawaian dan Diklat Aparatur
Biro Pengelolaan Barang	Tenaga Kerja dan Kependudukan	Perencanaan Pembangunan Daerah
Biro Bina Mental Spiritual	Kesehatan	Kesatuan Bangsa , Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah
Biro Pemberdayaan Perempuan	Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir	Koordinasi Penanaman Modal
Biro Umum dan Perlengkapan	Koperasi	Inspektorat Provinsi
Biro Hukum	Pekerjaan Umum	Pengelola Sumber Daya Manusia Papua
Biro Humas dan Protokol	Pendidikan, Pemuda dan Olah raga	Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga
Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur	Pendapatan Daerah	Pengelolaan Infrastruktur
Biro Tata Pemerintahan	Pendidikan Pengajaran	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Sekretariat Daerah	Dinas	Badan
Biro Pemerintahan Kampung	Perhubungan	Kantor Penghubung Daerah
	Kelautan dan Perikanan	Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri
	Perindustrian dan Perdagangan	Kantor Satuan Polisi Pamon Praja
	Perkebunan dan Peternakan	Promosi dan Investasi
	Pertambangan & Energi	Keuangan dan Asset Daerah
	Peternakan	Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Pertanian dan Ketahanan Pangan Tenaga Kerja	
	Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	
	Dinas Perindustrian, Perdagangan,	
	Koperasi dan Usaha Kecil	
	Menengah Provinsi Papua	

Sumber: Website resmi Pemerintah Provinsi Papua (diolah)

Beberapa hal perlu disadari untuk tidak secara mudah melakukan pemekaran wilayah. Modal dasar pembangunan dari suatu wilayah yang akan dimekarkan harus benar-benar dipahami sehingga dapat diperkirakan kemampuan daerah yang akan dimekarkan untuk mengelola secara mandiri pemerintahannya dan jaminan kepastian pelaksanaan pembangunan dalam jangka panjang dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Hal ini untuk mengantisipasi agar pemekaran wilayah yang dilakukan justru hanya akan menambah beban anggaran pemerintah. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah adanya indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan pemekaran wilayah baik dari indikator fisik maupun sosial, sehingga dengan jelas dapat dilakukan antisipasi ataupun langkah-langkah perbaikan sekiranya terjadi kebuntuan dalam pembangunan maupun ketidakmampuan wilayah itu untuk mengembangkannya.

2.4.2 Urusan Pilihan

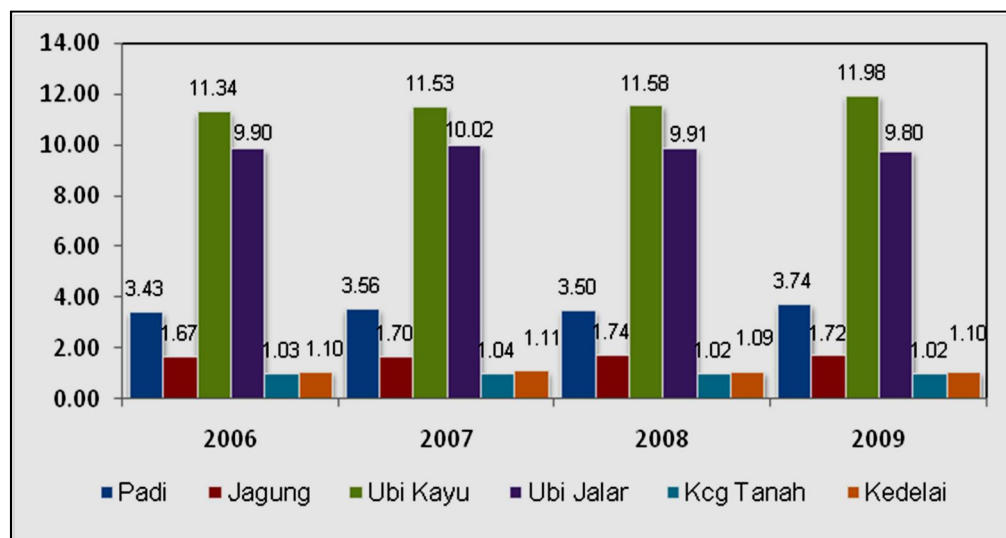
Urusan Pilihan merupakan urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhususan, dan keunggulan yang ada di Provinsi Papua

Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat penting peranannya di dalam perekonomian daerah. Oleh karena sektor ini selain mampu memberikan peluang kesempatan kerja yang luas terhadap masyarakat, juga mampu menciptakan pendapatan regional dan menyumbangkan sebagian besar produksinya terhadap perkembangan ekspor daerah. Agar dampaknya tersebut dirasakan secara optimal bagi masyarakat maka pemerintah Provinsi Papua telah mengarahkan pembangunan sektor pertanian kepada peningkatan produksi dan produktifitas pertanian, perluasan aneka ragam hasil produksi pertanian, peningkatan ketrampilan sumber daya manusia khususnya bagi petani, dan peningkatan produksi ekspor komoditi hasil pertanian. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut maka sektor pertanian selalu dikembangkan secara berkelanjutan agar menjadi pertanian yang modern, efisien dan tangguh.

Namun demikian, secara faktual perkembangan pertanian di Papua, khususnya tanaman pangan, jika diperhatikan dari kecenderungan produktifitasnya ternyata bergerak lambat. Tingkat produktivitas 6 komoditi tanaman pangan yang strategis setiap tahunnya mengalami kenaikan sangat kecil, bahkan cenderung tetap. Produktifitas lahan untuk tanaman padi sepanjang tahun 2006-2009 rata-rata hanya mengalami peningkatan sekitar 2,59% per tahun, kemudian untuk ubi kayu rata-rata tumbuh 1,88% per tahun, sedangkan kedelai sebesar 0,14% per tahun. Adapun untuk tanaman ubi jalar dan kacang tanah malah terlihat menurun sekitar 0,34% per tahun.

Grafik 2.10 Perkembangan Produktifitas Lahan Tanaman Pangan Di Provinsi Papua Tahun 2006 – 2009



Sumber: BPS Papua, 2010 (diolah)

Perkebunan

Tanaman lainnya yang sangat potensial untuk dikembangkan budidayakan di Provinsi Papua adalah perkebunan, dimana pengelolaan tanaman perkebunan ini sangat terkait erat dengan tiga pelaku usaha yakni masyarakat, swasta, dan negara atau pemerintah. Luas areal tanaman perkebunan di Provinsi Papua sampai dengan tahun 2007 sudah mencapai 127.705 hektar dengan jumlah produksinya sebanyak 108.178 ton, dengan kata lain tingkat produktifitas lahan yang dihasilkan mencapai 0,85 ton per hektar.

Tabel 2.31 Luas Areal Dan Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Pengusahaan Tahun 2007

JENIS PENGUSAHA	LAHAN (HEKTAR)	PRODUKSI (TON)	PRODUKTIFITAS (TON/HEKTAR)
Rakyat	84.155	46.599	0,55
Negara	10.300	29.200	2,83
Swasta	33.250	32.379	0,97
Jumlah	127.705	108.178	0,85

Sumber: BPS Papua, 2010 (diolah)

Lahan perkebunan di Provinsi Papua lebih banyak diusahakan oleh rakyat yaitu kurang lebih sekitar 65,90% dari total lahan yang tersedia. Demikian juga dengan jumlah produksinya, didominasi oleh hasil perkebunan rakyat sekitar 43,08% dari total pangsa produksi perkebunan. Namun demikian, tingkat produktifitas lahan perkebunan rakyat ternyata jauh lebih rendah dibandingkan perkebunan negara. Sebagaimana yang disajikan pada tabel dibawah ini secara rata-rata tingkat produktifitas perkebunan negara bisa mencapai 2,83 ton per hektar, sedangkan perkebunan rakyat hanya 0,55 ton per hektar. Ini berarti tingkat teknologi usaha perkebunan yang dilakukan oleh negara jauh lebih baik dibandingkan perkebunan rakyat.

Tabel 2.32 Potensi Perkebunan Rakyat Di Provinsi Papua Tahun 2008

Jenis Komoditi	Lahan (Ha)	Produksi (Ton)	Petani (org)	Produktivitas		Penguasaan Lahan (ha/org)
				Lahan (ton/Ha)	Tani (ton/org)	
Karet	4682	1531	6881	0.33	0.22	0.68
Kelapa Sawit	9818	16135	11234	1.64	1.44	0.87
Kopi	8492	2664	18536	0.31	0.14	0.46
Kelapa	314	1252	36252	3.99	0.03	0.01
Coklat	20964	11515	24343	0.55	0.47	0.86
Cengkeh	2061	69	3280	0.03	0.02	0.63
Kelapa Hibrida	122	26	278	0.21	0.09	0.44

Jenis Komoditi	Lahan (Ha)	Produksi (Ton)	Petani (org)	Produktivitas		Penguasaan Lahan (ha/org)
				Lahan (ton/Ha)	Tani (ton/org)	
Jarak	467	4	547	0.01	0.01	0.85
Lada	41	9	154	0.22	0.06	0.27
Kapuk	737	64	5989	0.09	0.01	0.12
Panili	341	1	490	0.00	0.00	0.70
Jambu Mente	3356	509	7587	0.15	0.07	0.44
Pinang	1653	350	5407	0.21	0.06	0.31
Sagu	458	106	1360	0.23	0.08	0.34
Total	53506	34235	122338	0.64	0.28	0.44

Sumber: BPS Papua, 2010 (diolah)

Jenis komoditi perkebunan yang paling banyak diusahakan oleh rakyat selama ini adalah kelapa sawit dan coklat. Jumlah produksi kelapa sawit yang diusahakan rakyat sampai dengan tahun 2008 kurang lebih mencapai 16.135 ton atau menguasai pangsa produksi perkebunan rakyat sekitar 47,13%. Sedangkan produksi coklat sebanyak 11.515 ton atau 33,64% dari total produksi perkebunan. Komoditi perkebunan lainnya yang cukup banyak dikelola oleh rakyat adalah karet, kopi, kelapa pinang dan sagu.

Kehutanan

Dari tahun ke tahun, luas hutan yang ada di Provinsi Papua semakin berkurang. Pada tahun 2007, luas hutan di Papua sebesar 32.271.799 ha, kemudian pada tahun 2008 turun menjadi 31.690.080 ha (turun 1,80 persen) dan pada tahun 2009 berkurang lagi sebesar 10,83 persen. Luas hutan lindung sebesar 8.277.916 ha atau 29,29 persen dari total keseluruhan. Luas hutan yang digunakan untuk kawasan suaka alam/kawasan pelestarian alam sebesar 5.675.861 ha.

Tabel 2.33 Luas Hutan Menurut Peta Paduserasi Provinsi Papua (Ha)

Tahun	Hutan Lindung	Kawasan Suaka Alam	Hutan Produksi		
			Terbatas	Tetap	Hutan Produksi yang dikonservasikan
2007	6.808.711	na	1.817.062	8.189.687	8.189.687
2008	9.190.585	na	1.763.531	8.833.039	8.833.039
2009	8.277.916	5.675.861	1.904.896	8.135.076	8.135.076

Sumber: BPS Papua 2010 (diolah)

Adapun produksi kehutanan yang dapat dihasilkan oleh Papua selama ini adalah kayu bulat yang meliputi meranti, merbau, sengon, dan lain-lain, diperkirakan ada 150 jenis kayu komersial yang tersedia di hutan Papua. Selain itu ada juga hasil hutan

ikutannya berupa kulit masoi, rotan, kayu gaharu, arang, kulit lawang, tali kuning dan gambir.

Energi dan Sumber Daya Mineral

Potensi bahan galian tambang baik yang strategis maupun dipermukaan seperti tembaga, perak, emas, minyak, gas alam, marmer, pasir kwarsa, kapur dan lain-lain banyak tersedia. Untuk bahan tambang emas dan tembaga diperkirakan proven deposit yang tersedia di kawasan konsesi Freeport saja mencapai sekitar 2.5 milyar ton, belum ditambah dengan 10 titik lainnya yang berada di kawasan Pegunungan Tengah, yang diperkirakan juga mengandung bahan tambang yang berlimpah dengan nilai kurang lebih sama dengan kawasan Freeport.

Struktur perekonomian Papua hingga saat ini didominasi oleh sektor pertambangan, terutama hasil pertambangan PT Freeport dengan rata-rata share 60 persen. Selama tahun 2009, produksi konsentrat tembaga dan emas PT Freeport mencapai 2.468.158 DMT, produksi terbanyak terjadi pada Bulan Mei dengan jumlah produksi 280.555 DMT. Ketergantungan pada satu sektor saja tentu tidak dapat menjamin keberlanjutan sumber pendanaan pembangunan karena suatu saat sumber daya alam sebagai sumber atau modal pembangunan yang terus dikuras tanpa ada penciptaan kembali akan habis. Keberlanjutan sumber pembiayaan pembangunan akan terganggu. Di samping itu, secara nyata juga sudah tampak bahwa hasil dari sektor pertambangan belum sepenuhnya mampu menjamin peningkatan atau perbaikan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pertambangan. Untuk saat ini tenaga kerja yang bekerja di wilayah tambang masih didominasi oleh tenaga kerja yang berasal dari luar Papua.

Tabel 2.34 Produksi Pertambangan PT. Freeport Menurut Jenis Hasil

Bulan	Bijih diproses (DMT)	Kadar tembaga diproses (%)	Kadar emas diproses (PPM)	Produksi Konsentrat		
				Jumlah Produksi Konsentrat (DMT)	Kadar Tembaga (%)	Kadar Emas (PPM)
Januari	6.998.148	1,07	0,96	227.776	30,06	24,24
Pebruari	6.477.294	1,10	1,11	222.548	30,02	27,43
April	6.829.906	1,10	1,38	231.868	29,36	33,36
Mei	7.686.218	1,16	1,61	280.555	28,96	37,35
Juni	7.116.356	1,05	1,52	228.435	29,37	39,66

Bulan	Bijih diproses (DMT)	Kadar tembaga diproses (%)	Kadar emas diproses (PPM)	Produksi Konsentrat		
				Jumlah Produksi Konsentrat (DMT)	Kadar Tembaga (%)	Kadar Emas (PPM)
Juli	7.651.897	1,00	1,55	245.819	28,39	41,21
Agustus	7.524.869	0,86	1,25	210.719	27,66	38,40
September	7.014.169	0,82	1,19	193.339	27,01	35,46
Oktober	7.649.129	0,81	1,27	208.484	26,96	39,00
Nopember	6.313.358	0,89	1,38	208.215	25,52	36,73
Desember	7.623.024	0,77	1,05	210.400	24,99	31,91

Sumber: Papua Dalam Angka, 2010 (diolah)

Selain potensi mineral, Provinsi Papua memiliki potensi pengembangan energi terbarukan yang bersumber pada tenaga angin, tenaga surya, tenaga air, dan tenaga gelombang laut. Potensi yang sangat besar ini belum dimanfaatkan. Potensi energi terbarukan selain diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, juga dapat menjadi jawaban atas kebutuhan energi di Provinsi Papua berdasarkan kondisi geografis. Potensi-potensi ini memiliki peluang untuk dikembangkan baik oleh masyarakat asli Papua sendiri dengan menerapkan IPTEK yang dapat dipelajari dan dikembangkan, maupun bekerja sama dengan pihak swasta yang berbasis lingkungan.

Kelautan dan Perikanan

Selain tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan, potensi sumber daya alam lainnya yang tersedia di Papua adalah sumber daya perikanan dan kelautan, dimana produksi perikanan pada tahun 2009 tercatat 242.969 ton yang terdiri dari 233.165 ton perikanan laut (95,96 persen), 7.515,8 ton dari perairan umum (3,09 persen) dan 2.289,1 ton dari perikanan budidaya (0,94 persen). Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, produksi perikanan tahun 2009 naik sebesar 3,64 persen. Adapun nilai produksi perikanan selama tahun 2009 mencapai 4,346 triliun rupiah atau meningkat 37,79 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari total nilai produksi tersebut, 95,57 persennya merupakan nilai produksi perikanan laut.

Tabel 2.35 Produksi Perikanan Provinsi Papua (TON)

Tahun	Perikanan Tangkap		Budidaya	Jumlah
	Laut	Umum		

Tahun	Perikanan Tangkap		Budidaya	Jumlah
	Laut	Umum		
2007	224.190,80	6.926,70	1.587,80	232.705,30
2008	225.054,30	7.311,90	2.072,00	234.438,20
2009	233.165,00	7.515,80	2.289,10	242.969,90
2010	231.543,20	7.519,50	1.052,20	240.115,00

Sumber: PDA Provinsi Papua, BPS Provinsi Papua, 2011

Beberapa jenis komoditi laut yang telah diusahakan oleh nelayan rakyat selama ini dari jenis ikan antara lain ikan kakap, tuna, bawal, merah, kembung, tenggiri, dan lain-lain. Kemudian dari binatang kulit keras yang sangat potensial diantaranya keping dan udang. Terakhir dari binatang kulit lunak adalah cumi-cumi, sotong dan rumput laut. Potensi perikanan tangkap yang sangat besar dan hingga kini belum sepenuhnya digarap dapat menjadi salah satu prioritas pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kendala jarak terhadap pusat-pusat penangkapan ikan harus diatasi dengan segera dan dikelola dengan manajemen yang terintegrasi dari penangkapan hingga pengolahan hasil termasuk pemasarannya. Sumbangan sektor pertanian ikan tangkap harus mampu menggantikan peran sektor pertambangan yang bersifat eksploitatif dan merusak lingkungan dan menimbulkan beban pembangunan berupa hilangnya manfaat sosial yang selama ini seluruh biaya perbaikan lingkungan justru dihitung sebagai pos pengeluaran yang mampu memberikan nilai tambah pada perekonomian.

Pariwisata

Provinsi Papua adalah salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki banyak sekali obyek wisata antara lain obyek Wisata Alam, Wisata Gunung, Wisata Bahari, Wisata Pantai, Wisata Sejarah, Wisata Budaya, Wisata Minat Khusus, Wisata Kuliner, Wisata Olah Raga, Wisata Belanja, dan lain-lain. Di Papua terdapat beberapa pegunungan sebagai obyek wisata, diantaranya yang terkenal adalah pegunungan Jayawijaya yang merupakan nama untuk deretan pegunungan yang terbentang memanjang di tengah provinsi Papua Barat dan Papua (Indonesia) hingga Papua Nugini. Selain menjadi tempat wisata bagi para pendaki, Pegunungan Jayawijaya juga menjadi wisata bagi para peminat khusus peneliti geologi dunia. Pegunungan Jayawijaya merupakan satu-satunya pegunungan dan gunung di Indonesia yang memiliki puncak yang tertutup oleh salju abadi.

Provinsi Papua juga memiliki beberapa taman nasional yang sudah dikenal lama oleh wisatawan manca negara, yang paling terkenal adalah Taman Nasional Lorentz. Dengan luas wilayah sebesar 25.000 km², Taman Lorentz menjadi taman nasional terbesar di Asia Tenggara. Taman Nasional Lorentz merupakan perwakilan dari ekosistem terlengkap untuk keanekaragaman hayati di Asia Tenggara dan Pasifik. Kawasan ini juga merupakan salah satu diantara tiga kawasan di dunia yang mempunyai gletser di daerah tropis. Selain sebagai tempat rekreasi dan wisata alam seperti penjelajahan hutan, pendakian gunung, panorama alam, air terjun, Taman Nasional Lorentz juga dapat ditawarkan sebagai tempat pengamatan berbagai jenis flora dan fauna.

Taman lainnya yang potensial sebagai obyek wisata, khususnya wisata bahari adalah Taman Nasional Teluk Cenderawasih yang merupakan taman nasional perairan laut terluas di Indonesia, terdiri dari daratan dan pesisir pantai (0,9%), daratan pulau-pulau (3,8%), terumbu karang (5,5%), dan perairan lautan (89,8%). Taman Nasional Wasur yang terletak di Kabupaten Merauke juga merupakan salah satu obyek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan. Di taman nasional ini ditemukan sekitar 390 jenis burung, dan terdapat 80 jenis mamalia. Salah satu ciri Taman Nasional Wasur adalah rumah rayap (musamus) yang dikenal juga dengan sebutan rumah semut.

Di Kabupaten Jayapura, ada sebuah danau yang sangat mempesona panoramanya yakni danau Sentani yang telah menjadi salah satu tujuan wisata di Kabupaten Jayapura. Danau ini sangat sesuai sebagai fasilitas rekreasi dan olah raga air. Dalam dua tahun terakhir ini Danau Sentani telah berbenah diri, dan menjadi ajang promosi wisata di Provinsi Papua melalui pelaksanaan sebuah festival yang dinamakan Festival Danau Sentani atau FDS. Pada tahun 2010 yang lalu, FDS digelar melalui tiga konsep utama yaitu konsep pagelaran yakni atraksi dan lomba budaya khas Papua, konsep pameran yakni promosi, investasi dan perdagangan dan ketiga adalah konsep wisata.

Selain Danau Sentani, danau lainnya yang juga eksotis dan mempesona adalah Danau Paniai. Danau yang berada di Kabupaten Paniai terletak di daerah pegunungan dan perbukitan yang berhawa sejuk dan menyimpan aneka jenis ikan air tawar dan udang serta nilai-nilai seni budaya Suku Mee dan Suku Moni. Danau Paniai merupakan salah satu danau terbaik dan terindah di Indonesia karena menyuguhkan panorama alam yang rancak, air danau yang biru, dan suasana sekitar nan asri. Disamping itu juga terdapat bebatuan dan pasir di tepian danau, serta dikelilingi oleh tebing-tebing yang tinggi.

Pembangunan pariwisata sebagai salah satu unsur industri kreatif dapat menyumbang pada peningkatan perekonomian daerah. Peningkatan infrastruktur kepariwisataan, promosi dan festival kebudayaan dapat mendukung investasi dan kunjungan wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini akan merangsang pemberdayaan masyarakat lokal melalui kegiatan ekonomi yang kreatif dan inovatif serta terbukanya lapangan kerja baru yang akhirnya akan menyumbang pada tumbuhnya perekonomian lokal.

Perindustrian dan Perdagangan

Nilai ekspor dan impor Papua mempunyai proporsi yang sangat besar dibandingkan dengan total PDRB. Secara riil nilai ekspor ditambah impor mencapai 62% dari nilai riil PDRB (Sumber BI Jayapura, 2004). Kondisi ini disebabkan oleh pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat Papua berupa bahan makanan, makanan jadi, kendaraan bermotor, bahan bangunan, produk elektronik dan beberapa barang kebutuhan pokok lainnya, sampai saat ini masih didatangkan dari luar Papua dan bahkan dari luar negeri.

Ekspor non migas Provinsi Papua dengan komoditi konsentrat tembaga yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total ekspor Provinsi Papua sekitar 70,38% atau mencapai nilai US\$ 538.878.971,28. Sedangkan ekspor non migas lainnya sebesar 23,10% berupa komoditi yang menjadi unggulan Provinsi Papua seperti Plywood, Ikan Beku, dan Udang Beku dengan nilai US\$ 176.860548,63.

2.2. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi khusus daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.5.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Tinjauan terhadap kemampuan ekonomi daerah bertujuan untuk mengetahui kualitas pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin baik kualitas pertumbuhan maka semakin tinggi pula daya saing daerah tersebut. Kemajuan ekonomi perlu didukung oleh kemampuan mengembangkan potensi daerah sendiri guna mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk di dalamnya adalah dana bagi hasil penerimaan sumber daya alam (sektor kehutanan, pertambangan

umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, penambangan gas alam dan penambangan panas bumi), retribusi dan pajak daerah. Pengembangan potensi daerah berkaitan dengan semangat otonomi khusus adalah upaya bagaimana meningkatkan harkat dan martabat masyarakat asli Papua dan ikut terlibat dalam proses pembangunan ekonomi. Pengambilan keputusan dalam kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar/asing yang mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di Provinsi Papua selalu dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan seringkali merugikan Pemerintah daerah karena Pemerintah Daerah hanya mendapat bagian dari pajak dan retribusi sedangkan nilai kekayaan tanah dan kandungannya yang dieksploitasi tidak dibagikan kepada daerah.

Makna Otonomi Khusus dalam pemberdayaan masyarakat asli Papua adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan demikian seluruh kebijakan dan pengelolaan sumber daya alam harus dikembalikan kepada Provinsi Papua guna mengatur dan menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan dan kesejahteraan serta peningkatan ekonomi masyarakat asli Papua. Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana OTSUS harus menjadi stimulus untuk menciptakan kemandirian ekonomi yang terus berangsur-angsur dikurangi. Namun hingga tahun 2010 kemampuan PAD Provinsi Papua masih sangat rendah yaitu baru sekitar 6,5% dari total kebutuhan dana pembangunan yang diperlukan di Papua. Pengembangan potensi-potensi ekonomi untuk menghasilkan penerimaan daerah harus terus dikembangkan.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga yang mana dapat mempengaruhi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Di Provinsi Papua, komposisi pengeluaran untuk konsumsi makanan masih lebih dominan dibandingkan konsumsi non makanan, artinya pemenuhan kebutuhan dasar pangan masih menjadi prioritas pengeluaran konsumsi rumah tangga dibandingkan untuk bentuk konsumsi lainnya. Hal ini dapat menjadi salah satu indikator masih terdapat kemiskinan di daerah tersebut. Pada tahun 2010, persentase konsumsi makanan mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, yaitu 60,20 persen pada tahun 2009 menjadi 61,10 persen pada tahun 2010. Kenaikan tersebut mengindikasikan adanya pergeseran pola konsumsi penduduk dan tingkat kesejahteraan penduduk Papua tahun 2010 menurun dibanding tahun sebelumnya.

Sedangkan konsumsi non makanan terbanyak adalah konsumsi untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga.

Nilai tukar petani (NTP) Provinsi Papua pada tahun 2008 mencapai 106,1 dan selalu berada di atas nilai rata-rata nasional hingga tahun 2010. Pada tahun 2011 terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya dengan nilai 103,02 dan berada di bawah rata-rata nasional yaitu 104,81. Penurunan tersebut menunjukkan adanya peningkatan dari indeks yang dibayar petani, baik untuk proses usaha maupun konsumsi rumah tangga.

Perkembangan harga barang/jasa secara umum di Papua di tahun 2004 ditunjukkan oleh laju pergerakan IHK di Kota Jayapura. Laju Pertumbuhan IHK sebesar 4,48% pada tahun 2010 lebih cepat dibandingkan tahun 2009 sebesar 1,91%. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan hanya barang-barang konsumsi bila dibanding tahun 2009. Laju inflasi Kota Jayapura pada Juli 2011 sebesar 3,91%, yang mana berada sedikit di bawah laju inflasi nasional sebesar 4,61%.

Berdasarkan data BPD tahun 2008 ketersediaan energi di Provinsi Papua mencapai 2.992 Kkal/kapita/hari, walaupun telah memenuhi standar nasional sebesar 2.550 Kkal/kapita/hari namun kontribusi energi tersebut sebagian besar masih berasal dari pangan nabati.

Tingkat konsumsi energi/kalori penduduk Provinsi Papua sebesar 1.826,65 Kkal/kapita/hari atau baru mencapai 83,00 persen dari standar nasional sebesar 2.200 Kkal/kapita/hari. Demikian juga tingkat konsumsi protein sebesar 43,27 gram/kapita/hari atau baru mencapai 87,00 persen dari standar nasional yang dibutuhkan sebesar 50,00 gram/kapita/hari.

2.5.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan sarana dan prasarana ketenagalistrikan di Provinsi Papua masih sangat minim. Kebutuhan listrik di ibukota kabupaten/kota sudah tersedia namun dengan kapasitas pasokan yang terbatas sehingga sering terjadi pemadaman, sedangkan ibukota kabupaten pemekaran dan kawasan perkampungan maupun pedalaman terpencil masih memiliki fasilitas listrik yang sangat terbatas. Pengembangan listrik sebagian besar masih memanfaatkan PLTD sehingga sangat dipengaruhi oleh pasokan BBM. Kekayaan sumberdaya alam yang ada seperti air, laut, angin maupun sinar matahari belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan listrik.

Energi listrik memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan sudah menjadi bagian kebutuhan dasar sejajar dengan kebutuhan pangan, sandang dan papan. Upaya untuk meningkatkan kemajuan daerah di Provinsi Papua melalui

pengembangan kapasitas listrik PLN tampaknya sulit direalisasikan. Kondisi ini akibat infrastruktur kelistrikan, khususnya yang dibangun oleh PLN sangat tidak memadai untuk memenuhi permintaan sumber energi listrik dari masyarakat yang selalu meningkat dan lebih besar setiap tahunnya.

Pembangkit listrik yang dibangun PLN di Provinsi Papua sampai dengan tahun 2010 hanya sejumlah 246 unit, dengan kapasitas terpasang kurang lebih sebesar 185.276 Kwh. Sementara beban puncak pada pemakaian listrik PLN dari masyarakat rata-rata adalah sebesar 104.904 Kwh. Ini berarti PLN sebenarnya mempunyai kapasitas cadangan sebesar 80.372 Kwh.

Selain kurangnya fasilitas listrik PLN yang tersedia, distribusi penyebaran yang tidak merata juga menjadi masalah kelistrikan di Provinsi Papua. Berdasarkan data BPS tahun 2010, distribusi listrik PLN di Provinsi Papua lebih terkonsentrasi kepada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti di Kota Jayapura dan Merauke. Kedua daerah ini mendapat sambungan listrik PLN dengan kapasitas terpasang masing-masing sebesar 85.300 kwh (46,04%) untuk Kota Jayapura dan sebesar 21.268 kwh (11,48%) untuk Kabupaten Merauke. Sedangkan di daerah-daerah kecil seperti Kabupaten Mappi, Supiori, Asmat dan Keerom rata-rata kapasitas listrik yang terpasang hanya 538 kwh. Beberapa daerah yang terletak di bagian pedalaman dan pegunungan seperti Kabupaten Yahukimo, Tolikara, Pegunungan Bintang dan Asmat, sampai saat ini belum terpasang listrik PLN. Masyarakat dan pemerintah daerah setempat memanfaatkan mesin disel atau genset untuk membangkitkan tenaga listriknya, yang sudah tentu memiliki kapasitas yang sangat terbatas dan hanya dapat dinikmati oleh sedikit rumah tangga saja.

Minimnya pemerataan fasilitas listrik juga ditunjukkan oleh panjang jaringan listrik dan kepadatan jaringan listrik, di mana yang paling panjang jaringannya adalah di Kota Jayapura sepanjang 1,028.44 km diikuti Kabupaten Merauke 997.30 km. Sedangkan yang paling pendek jaringannya adalah di Kabupaten Waropen yakni 21.18 km. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.25.

Kepadatan jaringan listrik di Kota Jayapura paling tinggi dibandingkan semua daerah di Provinsi Papua, oleh karena di Kota Jayapura untuk setiap luas wilayah 1 km² terdapat jaringan listrik PLN sepanjang 65.47 km. Setelah Kota Jayapura, daerah berikutnya yang cukup padat jaringan listriknya adalah Kabupaten Nabire yang mempunyai rasio sebesar 13.29 km/km². Untuk kabupaten-kabupaten lainnya mempunyai rasio yang sangat rendah dibawah 5 km/km², seperti Kabupaten Yapen Waropen dengan rasionya sebesar 0.65 dan Kabupaten Paniai sebesar 0.03. Ini berarti

di Kabupaten Yapen Waropen, dalam satu km² hanya terdapat jaringan listrik PLN sepanjang 0.65 km atau 65 meter. Sedangkan di Nabire 3 meter untuk rasio yang sama.

Tabel 2.36 Kepadatan Jaringan Listrik PLN Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2010

Kabupaten/Kota	Jaringan Listrik (Km)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan (Km/Km ²)
Merauke	997.3	43979	0.02
Jayawijaya	578.25	12680	0.05
Jayapura	584.33	15309	0.04
Nabire	298.72	16312	0.02
Mimika	320.86	20040	0.02
Kep Yapen	189.68	3131	0.06
Biak Numfor	695.12	2360	0.29
Boven Digoel	143.22	28471	0.01
Sarmi	126.88	25902	0.00
Keerom	228.17	9365	0.02
Supiori	21.18	24628	0.00
Kota Jayapura	48.88	775	0.06
Total Papua	4760.41	317062	0.01

Sumber : BPS Papua 2011 (diolah)

Tabel 2.37 Potensi Sungai Di Provinsi Papua Sebagai Pembangkit Tenaga Listrik

NO	NAMA SUNGAI	LOKASI	KAPASITAS DAYA (MW)
1	Digoel	Boven Digoel	1.522
2	Eilanden	Asmat	2.291
3	Lorentz	Asmat, Jayawijaya	232
4	Cemara	Mimika	237
5	Otokwa	Mimika	297
6	Mimika	Mimika	154
7	Siriwo	Nabire, Paniai	310
8	Mamberamo	Mamberamo Raya	9.932
9	Urumuka	Mimika	336
Jumlah			15.631

Sumber: Kanwil DPE Irja dan Dinas Pertambangan Provinsi Papua Tahun 2009

2.5.3 Investasi

Kegiatan investasi di Provinsi Papua masih sangat rendah, itupun masih didominasi kegiatan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dibandingkan dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Jumlah rencana investasi PMDN yang disetujui pada tahun 2009 adalah 29 perusahaan yang tersebar di 11 kabupaten/kota namun hanya 21 perusahaan yang merealisasikannya. Jumlah terbanyak di Kabupaten Jayapura yaitu 8 perusahaan (27%), sedangkan sisanya berkisar antara 1 sampai 4 perusahaan.

Dari berbagai jenis usaha yang terealisasi sebagian besar bergerak di bidang usaha perkebunan (9 perusahaan) dan industri berbasis kayu (5 perusahaan). Jumlah tenaga kerja Indonesia yang ditargetkan bekerja di bidang investasi PMDN Pada tahun 2009 adaah 63.311 orang namun realisasinya hanya 118 orang (1,8%). Dilihat dari realisasi nilai investasinya, maka tampak bahwa realisasi nilai investasi PMDN masih sangat rendah yaitu hanya sekitar Rp 1,811 trilyun (2,8%) dari Rp 63 trilyun yang ditargetkan. Kondisi ini tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Dari sisi PMA, jumlah perusahaan yang disetujui untuk melakukan investasi adalah 74 perusahaan yang tersebar di 13 kabupaten/kota di mana yang terbanyak yaitu 24 perusahaan ada di Kabupaten Mimika, khususnya terkait untuk usaha pertambangan. Namun dari rencana tersebut baru 42 PMA yang merealisasikannya. Meskipun nilai investasi yang ditargetkan lebih rendah dibandingkan nilai rencana investasi PMDN, namun dari sisi nilai investasi yang direalisasikan justru melebihi yang ditargetkan yaitu dari Rp 5,1 trilyun terealisasi Rp 6,5 trilyun.

Tabel 2.38 Rencana dan Realisasi PMDN dan PMA di Provinsi Papua Tahun 2007-2009

Tahun	Jumlah Proyek PMDN (buah)	Jumlah Proyek PMA (buah)	Nilai Investasi PMDN (Rp trilyun)	Nilai Investasi PMA (Rp trilyun)	Jumlah TK PMDN (orang Ind)	Jumlah TK PMA (orang Ind)	
2006	Rencana	36	48	18.03	4.81	539,162	33,374
	Realisasi	*)	21	2.81	6.29	11,717	14,317
	%		43.75%	15.59%	130.77%	2.17%	42.90%
2007	Rencana	32	54	37.43	5.38	453,964	92,105
	Realisasi	19	29	1.45	6.52	5,012	17,101
	%	59.38%	53.70%	3.87%	121.19%	1.10%	18.57%
2008	Rencana	28	65	57.39	5.07	459,687	97,446
	Realisasi	21	36	1.47	6.53	4,381	17,871

Tahun		Jumlah Proyek PMDN (buah)	Jumlah Proyek PMA (buah)	Nilai Investasi PMDN (Rp trilyun)	Nilai Investasi PMA (Rp trilyun)	Jumlah TK PMDN (orang Ind)	Jumlah TK PMA (orang Ind)
	%	75.00%	55.38%	2.56%	128.80%	0.95%	18.34%
2009	Rencana	29	74	63.02	5.16	63.311	103.671
	Realisasi	21	42	1.81	6.57	11.45	17.98
	%	72.41%	56.76%	2.87%	127.33%	18.09%	17.34%
2010	Rencana	29	79	62.320	5.310	50,524	106,770
	Realisasi	*)	44	2.401	8.250	12,278	18,892
	%		55.70%	3.85%	155.37%	24.30%	17.69%
2011	Rencana	30	87	62.331	5.316	50.530	114.517
	Realisasi	*)	87	3.263	8.251	12.400	20131
	%		100%	5,23%	155%	24,53%	17,57%

Sumber: BPS Papua (2010)

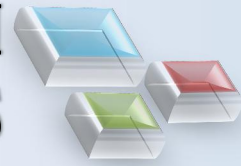
Dari sisi perbankan tampak bahwa perkembangan posisi simpanan dan posisi kredit baik rupiah maupun valuta asing menurut kelompok bank yang ada di Provinsi Papua belum menunjukkan perkembangan yang signifikan karena keberadaan bank khususnya swasta nasional masih terpusat di beberapa kabupaten saja dan kegiatan masyarakat terkait perbankan juga belum maksimal. Kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk menyerap dana sebagai modal pinjaman usaha masih relatif rendah sehingga memungkinkan terjadinya *capital out flow* dari Papua yang sangat tinggi karena ketidakmampuan penyerapan dana tersebut. Secara keseluruhan, kemampuan penyerapan dana pinjaman atas simpanan (*Loan to Deposit Ratio*) masih berkisar antara 29% hingga 42%. Apabila dilihat berdasarkan persentase dari kemampuan penyerapan kredit atas simpanan tampak bahwa Bank Perkreditan Rakyat mampu menyalurkan yang terbaik. Namun apabila dilihat dari nilai nominalnya, maka Bank Pemerintah mampu menyalurkan pinjaman dengan nilai tertinggi meski secara persentase masih tetap di bawah 50%. Untuk itu, upaya mendorong berbagai jenis kegiatan usaha yang mampu memberikan nilai tambah di dalam Provinsi Papua khususnya, perlu didorong dan ditingkatkan melalui penciptaan usaha-usaha berbasis lokal dan kemudahan akses pada perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Tabel 2.39 Posisi Dana Simpanan Dan Posisi Kredit Rupiah Dan Valuta Asing di Provinsi Papua Tahun 2007 – 2009 (RP TRILYUN)

Kelompok Bank	2006	2007	2008	2009
Pemerintah				

Kelompok Bank	2006	2007	2008	2009
Simpanan	8,87	10,75	11,08	12,68
Pinjaman	3,24	3,11	4,29	5,56
(%)	36,5	28,9	38,7	43,9
Swasta Nasional				
Simpanan	2,88	1,81	2,64	2,99
Pinjaman	0,52	0,52	0,78	0,97
(%)	18,0	28,7	29,5	32,4
Perkreditan Rakyat				
Simpanan	0,11	0,09	0,11	0,15
Pinjaman	0,11	0,08	0,15	0,18
(%)	100	88,8	136	120
TOTAL				
Simpanan	11,86	12,65	13,83	15,82
Pinjaman	3,87	3,71	5,22	6,71
(%)	32,6	29,2	37,7	42,4

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS



Pembangunan ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata, adil, dan mampu memberikan manfaat dalam jangka panjang, termasuk dalam hal kelestarian sumber daya alam dan lingkungan yang terus terjaga dan menjadi sumber berlangsungnya pembangunan. Untuk dapat menentukan rencana pembangunan atau arah yang dituju, perlu dipertimbangkan secara seksama kemampuan pelaksana pembangunan dari sisi ketersediaan sumber daya manusia, sumber pendanaan, sumber daya alam, pengetahuan dan teknologi, dukungan sosial, politik, dan terutama pola pikir jangka panjang yang mampu menjamin keberlanjutan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan sebagai pendukungnya. Oleh karena itu, berdasarkan gambaran umum wilayah Provinsi Papua yang ada, maka perlu diketahui terlebih dahulu berbagai permasalahan pembangunan yang hingga saat ini masih dihadapi sehingga berbagai isu strategis dapat ditentukan berdasarkan gambaran tersebut. Selain itu, berdasarkan gambaran umum juga dapat diketahui potensi-potensi di Provinsi Papua yang belum dikelola secara baik dan menjadi peluang untuk dikelola secara berkelanjutan, serta berbagai kelemahan dan tantangan lainnya yang harus diantisipasi dan dicari pemecahannya. Kesemuanya itu harus dikemas dalam rencana pembangunan yang berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Papua untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang menghadapi permasalahan dan tantangan baik yang bersifat lokal (daerah), nasional, maupun global. Dalam kondisi Provinsi Papua saat ini, ada berbagai hal yang dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan khususnya belajar dari kegagalan pembangunan di daerah lain dan dengan tekad untuk mencapai keberhasilan pembangunan jangka panjang yang tetap menjaga kelestarian lingkungan Papua. Berdasarkan kondisi dan situasi yang berkembang di Provinsi Papua hingga saat ini, akan diuraikan permasalahan dan isu-isu strategis untuk memberi arahan dalam perumusan visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan Provinsi Papua tahun 2005-2025.

3.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan terjadi apabila ada gap atau perbedaan antara target yang diharapkan dengan hasil yang dicapai. Pemerintah Provinsi Papua harus mampu

menjawab permasalahan tersebut dan memberikan pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat serta harus mampu mendorong terciptanya kemandirian masyarakat untuk berkembang sesuai dengan keperluan dasar hidup mereka. Dengan demikian masyarakat Papua dapat berkembang dan hidup sejahtera, serta mampu menentukan masa depan mereka yang didukung oleh program pembangunan pemerintah yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diverifikasi dari informasi pada gambaran umum kondisi daerah, yang selanjutnya akan dituangkan dalam perumusan visi, misi, dan sasaran perencanaan jangka panjang daerah. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing aspek dan urusan, serta kesepakatan dari pemangku kepentingan, maka permasalahan pembangunan jangka panjang Provinsi Papua dijabarkan sebagai berikut :

3.1.1 Kependudukan

Salah satu permasalahan mendasar yang menghambat pelaksanaan pemerataan pembangunan di Provinsi Papua adalah persebaran penduduk di Provinsi Papua yang tidak merata. Beberapa daerah memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, khususnya di kota Jayapura dan beberapa kabupaten lainnya, sedangkan sebagian besar memiliki tingkat kepadatan penduduk yang sangat rendah. Hal ini menjadi kesulitan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk dapat mengalokasikan kegiatan pembangunan secara merata, khususnya dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, listrik dan air bersih, perumahan, maupun akses pada transportasi, pasar, dan bentuk pemberdayaan masyarakat lainnya. Hal ini akan mengkait pada upaya perbaikan di semua sektor, sehingga diperlukan berbagai terobosan yang harus mampu diciptakan oleh pemerintah Provinsi Papua yang didukung oleh pemerintah kabupaten untuk mengatasi berbagai permasalahan akibat ketidakmerataan persebaran penduduk dan sulitnya akses pembangunan. Beberapa isu utama pada masalah kependudukan adalah:

1. Terpusatnya kegiatan masyarakat di beberapa wilayah mendorong tingginya tingkat migrasi penduduk baik dari dalam Papua maupun luar Papua.
2. Pengembangan wilayah yang tidak merata menyebabkan semakin tingginya ketimpangan pembangunan dan berbagai masalah kependudukan yang diakibatkannya.
3. Tingginya angka pertumbuhan penduduk lebih didorong oleh tingginya jumlah migran dari luar Papua

4. Semakin terdesaknya jumlah penduduk asli Papua dibandingkan dengan jumlah penduduk migran berpotensi menimbulkan konflik.

3.1.2 Pendidikan

Rendahnya kualitas sumber daya manusia masih menjadi isu utama di Provinsi Papua. Hal ini disebabkan masih belum meratanya penyediaan pelayanan pendidikan, masih rendahnya budaya sekolah serta masih adanya berbagai keterbatasan dalam penyelenggaraan pendidikan, dapat ditandai rata-rata lama sekolah masih 6,66 tahun pada tahun 2010 belum mencapai pendidikan dasar 9 tahun, Pergerakan APM pada masing-masing jenjang pendidikan juga cenderung meningkat, namun pada tahun 2010 terjadi penurunan pada tingkat SD. APM SD pada tahun 2005 sebesar 81,85 persen terus meningkat hingga mencapai 86,98 persen pada tahun 2009, namun menurun pada tahun 2010 menjadi 76,22 persen. Sebaliknya, masing-masing APM SMP dan SMA menunjukkan kecenderungan positif yaitu pada tahun 2005, APM SMP dan SMA adalah 41,04% dan 21,19 %. Ini terus meningkat hingga pada tahun 2010 mencapai 49,62 persen (APM SMP) dan 36,06 % (APM SMA), Berdasarkan data Susenas tahun 2008, jumlah anak usia dini (3-6 tahun) di Provinsi Papua adalah sebanyak 222.456 anak, di mana sebanyak 18.737 anak telah atau sedang mengikuti pendidikan PAUD baik melalui jalur formal maupun non formal. Dengan demikian, baru 8,42 persen anak di Provinsi Papua yang memperoleh akses terhadap PAUD, dengan rincian 2,97 persen telah mengikuti program PAUD dan 5,45 persen sedang mengikuti program PAUD. Angka PAUD pada tahun 2008 terlihat menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2007, anak yang memperoleh akses PAUD di Papua sebesar 12,64 persen. Kondisi ini masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan angka partisipasi PAUD di Indonesia sebesar 20 persen dari 20 juta anak yang ada, dan ini merupakan angka terendah di dunia (UNESCO). Dengan kata lain kesenjangan pendidikan antara Papua dengan rata-rata Indonesia masih sangat tinggi. Ada banyak hal yang menyebabkan masih rendahnya partisipasi masyarakat di pendidikan, antara lain akses ke sekolah, biaya pendidikan dan transportasi, jarak dari rumah ke sekolah, ketersediaan tenaga guru, sarana prasarana, dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Keterbatasan tenaga guru juga merupakan masalah lain. Dari sisi jumlah maupun rasio guru murid, terlihat bahwa jumlah guru cukup memadai. Masalahnya, banyak guru yang enggan ditempatkan di daerah-daerah terpencil, sehingga terjadi kesenjangan jumlah guru antara daerah yang dekat dengan pusat kota dengan daerah-daerah terpencil seperti di wilayah pegunungan dan pesisir pantai. Secara rinci dapat dikatakan bahwa beberapa isu utama di bidang pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana pendidikan yang terbatas dan belum merata di setiap daerah khususnya di daerah terpencil.
2. Masih rendahnya budaya sekolah yang berkembang di masyarakat yang selama ini masih hidup dalam pola budaya tradisional sehingga menyebabkan angka partisipasi sekolah masih rendah.
3. Masih rendahnya rata-rata angka melek huruf di Provinsi Papua.
4. Masih kurangnya ketersediaan sekolah kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan ekonomi lokal.
5. Masih terbatasnya jumlah guru di tiap daerah terpencil dan tidak mampu menjangkau lokasi penduduk yang tersebar.
6. Masih tingginya angka putus sekolah.
7. Masih terpolanya penyelesaian pendidikan dengan mengutamakan pembangunan sarana fisik bangunan gedung sekolah yang belum tentu sesuai untuk penyelesaian masalah pendidikan karena lokasi penduduk yang tersebar.
8. Masih rendahnya kualitas tenaga guru, sarana, dan prasarana pendidikan.

3.1.3 Kesehatan

Kondisi pelayanan kesehatan masyarakat Papua tidak jauh berbeda dengan kondisi pelayanan pendidikan. Pelayanan kesehatan belum sepenuhnya menjangkau masyarakat khususnya mereka yang tinggal di daerah terpencil. Beberapa indikator masih kurangnya pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan.
2. Masih rendahnya angka harapan hidup masyarakat.
3. Masih tingginya kesenjangan tingkat pelayanan kesehatan antar wilayah.
4. Masih tingginya angka balita dengan gizi buruk
5. Masih terbatasnya jumlah tenaga medis dan paramedis.
6. Rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang cukup memadai hanya terdapat di beberapa daerah dengan akses yang memadai.
7. Belum adanya sekolah pendidikan tenaga medis maupun paramedis yang mampu menghasilkan tenaga kesehatan yang memadai.
8. Tingginya jumlah penderita penyakit malaria, ISPA, diare, dan HIV/AIDS.
9. Rendahnya budaya hidup sehat.
10. Masih rendahnya kualitas SDM di bidang pelayanan kesehatan.
11. Pusat pelayanan kesehatan belum didukung dengan ketersediaan listrik dan air bersih serta sanitasi yang memadai.

12. Jumlah Puskesmas, PUSTU, Puskesmas Keliling termasuk fasilitasnya masih sangat kurang.

3.1.4 Pekerjaan Umum

Infrastruktur transportasi berupa jalan, jembatan, pelabuhan udara, pelabuhan laut/sungai merupakan kunci untuk membuka keterisolasian suatu wilayah untuk mendukung terjadinya pembangunan wilayah. Selain itu, infrastruktur pendukung seperti listrik, air bersih, dan telekomunikasi juga sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan atau aktivitas masyarakat di berbagai bidang. Permasalahan di bidang infrastruktur yang dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat Papua antara lain adalah:

1. Jaringan jalan masih terbatas dan belum menjangkau hingga ke pusat-pusat permukiman masyarakat.
2. Jaringan transportasi darat, udara, maupun laut/sungai belum mencukupi untuk mendorong kegiatan ekonomi lokal serta kebutuhan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
3. Fasilitas listrik, air bersih, dan telekomunikasi belum menjangkau seluruh wilayah.
4. Panjang jalan dengan kondisi baik masih rendah.
5. Indeks kemahalan yang sangat tinggi untuk membangun infrastruktur karena sumber material masih harus didatangkan dari luar Papua.

3.1.5 Perhubungan

Selain karena belum tersedianya infrastruktur jaringan transportasi yang memadai, moda transportasi yang ada di Papua juga masih sangat kurang dan masih kurang memadai. Kondisi alam yang sangat spesifik harus disiasati dengan moda transportasi yang sesuai dan tergantung pada kondisi alam yang ada. Penerbangan perintis sangat diperlukan untuk menghubungkan beberapa wilayah yang terisolir, demikian pula dengan moda transportasi air memegang peranan penting untuk menghubungkan daerah pedalaman yang terhubung dengan laut maupun sungai sehingga memudahkan penyaluran kebutuhan pokok masyarakat maupun menghubungkan masyarakat dengan wilayah lain. Hal ini sangat dibutuhkan untuk mendukung aktivitas masyarakat baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun kegiatan ekonomi lokal maupun antar pulau.

3.1.6 Ketahanan Pangan

Pola makan nasional yang didasarkan pada beras telah menyebabkan pola makan masyarakat Papua juga berubah. Pada awalnya, masyarakat Papua sangat

tergantung pada ketersediaan sagu maupun hasil pertanian tanaman pangan lokal lainnya untuk memenuhi kebutuhan pangannya, namun sekarang berubah pada ketergantungan beras. Oleh karena itu, Pemerintah Papua menghadapi dua tantangan yaitu kemampuan mencukupi kebutuhan pangan beras dan mengembalikan pola diversifikasi pangan. Oleh karena itu, dalam jangka panjang pemerintah harus mampu mengatasi masalah ketahanan pangan khususnya melalui :

1. Pengembangan sistem ketahanan pangan yang terintegrasi dari sub sistem ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan konsumsi pangan yang cukup secara jumlah, mutu dan gizi.
2. Pengembangan pangan spesifik lokal Papua yang berdasarkan agroekosistem dan budaya setempat, baik untuk dikonsumsi maupun untuk dikembangkan lebih lanjut dalam industri pangan skala kecil, menengah, dan besar.
3. Kewaspadaan pangan yang mencakup pemantauan aspek-aspek penting ketahanan pangan, analisis dan evaluasi kondisi ketahanan pangan, pengambil keputusan serta pelaksanaan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah kerawanan pangan, termasuk masalah mutu dan keamanan pangan.

3.1.7 Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak

Pemecahan masalah gender harus didasarkan pemahaman adanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar yaitu hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dalam beberapa kasus, khususnya ketahanan ekonomi rumah tangga, sudah terbukti bahwa perempuan memegang peranan penting. Perempuan mampu melakukan multi fungsi tugas rumah tangga baik sebagai pencari nafkah, pengasuh anak, penyelenggara kehidupan keluarga secara bersamaan. Oleh sebab itu masalah utama yang dihadapi perempuan di Papua adalah:

1. Meningkatkan *Gender Development Index* (GDI) atau Indeks Pembangunan Gender melalui pemberantasan buta aksara, meningkatkan partisipasi sekolah, memperhatikan proposi upah gender dan proposi perempuan bekerja tanpa upah.
2. Menangani kultur atau budaya masyarakat, di mana pemahaman tentang hak dasar perempuan belum dipahami oleh sebagian masyarakat.
3. Mengatasi dan mencegah kekerasan terhadap perempuan.
4. Rendahnya *Gender Empowerment Measurement* (GEM) atau Indeks Pemberdayaan Gender yang tercermin dari terbatasnya akses bagi perempuan dalam pengambilan keputusan baik di lingkup keluarga maupun masyarakat dan rendahnya kualitas perempuan sehingga peran dalam politik, pemerintahan, ekonomi

dan kemasyarakatan menjadi terbatas. Namun, dari sektor informal perempuan Papua cukup dominan.

Dari sisi permasalahan perlindungan anak, dapat dilihat dari indikator sebagai berikut: masih tingginya angka putus sekolah di Papua, belum adanya pelayanan bagi korban kekerasan pada anak dan pengakuan pada hak dasar anak. Padahal, anak-anak merupakan penerus pembangunan Papua.

3.1.8 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi dengan kondisi sumber daya alam khususnya hutan yang masih 'perawan', hampir sebagian besar wilayah Papua merupakan hutan primer. Dilema dalam pemanfaatan sumber daya alam ini adalah apabila sumber daya alam dianggap sebagai modal pembangunan yang mampu mempercepat pertumbuhan suatu daerah, maka hal yang termudah adalah melakukan eksploitasi dengan cara mengizinkan berbagai perusahaan untuk memanfaatkannya. Namun dengan perkembangan kesadaran arti lingkungan dan adanya kepedulian global tentang pentingnya menjaga lingkungan, maka sumber daya alam di Papua dapat juga menjadi modal pembangunan tanpa harus merusak atau mengeksploitasi sumber daya alamnya.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi Papua terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah:

1. Masih rendahnya pemahaman pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sebagai sebuah fungsi ekosistem untuk mendukung kehidupan manusia.
2. Masih sempitnya cara pandang yang cenderung melihat sumber daya alam sebagai modal pemberian Tuhan yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan manusia tanpa diimbangi dengan penciptaan kembali dan pengelolaan yang terkendali.
3. Masih rendahnya pengetahuan dan teknologi pemanfaatan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan.
4. Pemenuhan kebutuhan pembangunan daerah terlebih dalam era otonomi daerah semakin memicu cepatnya eksploitasi sumber daya alam.
5. Makin tersingkirnya dan berkurangnya akses masyarakat Papua yang sudah terbiasa hidup menyatu dengan alam untuk dapat memanfaatkannya sebagai dasar pemenuhan kehidupan mereka sehari-hari.

6. Adanya perbedaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya alam baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah Kota/Kabupaten.
7. Orientasi pembangunan yang didasarkan pada target pertumbuhan ekonomi cenderung memicu eksploitasi sumber daya alam dengan lebih cepat.
8. Adanya kekeliruan indikator pembangunan yang didasarkan pada target pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan nilai tambah yang berasal dari seluruh kegiatan ekonomi namun tidak memasukkan unsur kehilangan modal alam dan kerusakan lingkungan ke dalamnya.
9. Masih kurangnya SDM yang mampu menterjemahkan aset sumber daya alam sebagai nilai tambah dalam pembangunan tanpa harus melakukan eksploitasi yang tidak berkelanjutan.
10. Perencanaan pembangunan yang disusun selama ini cenderung berwawasan jangka pendek dan belum berpihak pada keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan.
11. Tingginya ancaman tingkat eksploitasi di kawasan hutan baik untuk kegiatan pertambangan, perkebunan, permukiman, dan pembukaan lahan untuk kebutuhan investasi lainnya.

3.1.9 Perekonomian dan Keuangan Daerah

Pembangunan ekonomi daerah sampai saat ini mengalami kemajuan tetapi masih jauh dari cita-cita untuk mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh dan handal dalam rangka mensejahterakan masyarakat Papua. Oleh karena itu, isu besar kemajuan perekonomian Papua 20 Tahun mendatang adalah untuk pembangunan ekonomi yang merata secara berkelanjutan dan berkualitas untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengejar ketertinggalan dari Provinsi-Provinsi lain di Indonesia.

Secara internal permasalahan ekonomi di tingkat lokal Papua adalah :

1. Tingkat pertumbuhan ekonomi tanpa tambang masih sangat rendah. Perencanaan ekonomi yang didasarkan pada nilai tambang dan adanya dana OTSUS akan memberikan hasil yang bias tetapi harus diantisipasi dalam perencanaan jangka panjang apabila sumbangan dari tambang dan dana OTSUS berakhir.
2. Tingkat pendapatan masyarakat masih sangat rendah dan dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi.

3. Kelembagaan ekonomi belum berkembang, di mana sistem perbankan belum sepenuhnya dimanfaatkan dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat untuk menggunakan fasilitas dana pinjaman bank untuk mendukung usaha ekonomi lokal.
4. Infrastruktur ekonomi berkaitan dengan sistem produksi dari hulu ke hilir belum memadai, konsep ekonomi yang belum memihak masyarakat, masih rendahnya akses skema kredit bagi usaha kecil dan menengah, serta akses pada pasar yang masih jauh tertinggal.
5. Letak geografis Papua yang sulit dan terlalu luas menyebabkan jaringan infastuktur tidak memadai untuk menuju pada sentra-sentra produksi kegiatan usaha masyarakat khususnya di sektor pertanian dan kalutan.

Secara eksternal, masalah tersebut dihadapkan pada situasi di mana persaingan ekonomi antar pulau dan antar negara makin tajam akibat semakin pesat dan derasnya arus globalisasi. Perkembangan ekonomi regional di kawasan Asia Timur dan Asia Selatan yang pesat dengan raksasa-raksasa ekonomi global di masa-masa yang akan datang seperti Cina dan India merupakan salah satu yang perlu dipertimbangkan secara cermat di dalam menyusun pengembangan struktur dan daya saing perekonomian daerah. Dengan demikian, integrasi perekonomian lokal ke dalam proses globalisasi dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dan sekaligus dapat meminimalkan dampak yang akan muncul.

Dari sisi kapasitas fiskal daerah, Provinsi Papua masih sangat tergantung pada sumber penerimaan transfer dari pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) yang berasal dari Hasil Sumber Daya Alam tambang dan dana OTSUS. Hal yang perlu diperhatikan bahwa dana-dana ini bersifat sementara di mana keberadaannya harus mampu mendorong kemandirian ekonomi Papua dan menjadi saat tinggal landas untuk menuju keberhasilan dan kemandirian pembangunan ekonomi Papua. Pencapaian Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pendapatan pajak dan retribusi daerah masih sangat kecil yang berarti bahwa kegiatan ekonomi daerah belum berjalan maksimal.

3.1.10 Pertanahan

Masalah yang berkaitan dengan konflik lahan masih terus mendominasi bidang pertanahan. Hal ini perlu mendapatkan tanggapan dan arahan jalan keluar yang serius agar konflik lahan dapat di atasi. Karena sistem kepemilikan lahan di Papua masih lebih berdasarkan kepemilikan hak atas tanah ulayat dan sering kali bertentangan atau tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan terkait masalah tanah dan ijin pemanfaatannya, maka hal ini sangat mudah memicu terjadinya konflik atas tanah dan menghambat kegiatan investasi yang terkait dengan pemanfaatan lahan.

3.1.11 Ketersediaan Listrik

Wilayah Papua yang telah dialiri listrik relatif masih sangat sedikit, akibatnya jumlah masyarakat yang terlayani aliran listrik juga masih sangat sedikit. Potensi alam yang mampu menjadi sumber potensial pembangkit listrik belum sepenuhnya digali. Ketergantungan listrik yang dibangkitkan dengan bahan bakar fosil masih sangat tinggi. Untuk itu perlu segera dicari dan dilakukan terobosan-terobosan untuk mengatasi hal ini sehingga listrik dapat segera tersedia merata hingga keseluruh pelosok Papua. Listrik sangat dibutuhkan untuk pusat-pusat pendidikan dan pelayanan kesehatan serta untuk mendukung aktivitas kegiatan produksi. Untuk itu, ketersediaan listrik menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Papua yang segera harus dipenuhi.

3.1.12 Sarana Air Bersih

Seperti halnya kebutuhan listrik, ketersediaan air bersih juga menjadi salah satu kebutuhan dasar yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Ketersediaan air untuk mendukung pelayanan kesehatan, produktivitas kegiatan ekonomi, maupun kebutuhan rumah tangga masih sangat kurang memadai meskipun sumber baku air bersih relatif banyak tersedia tetapi pengusahaannya yang masih perlu ditingkatkan khususnya pada daerah-daerah terpencil dan di kampung-kampung.

3.1.13 Sanitasi

Akses penduduk Papua terhadap sanitasi lingkungan yang baik masih jauh dari rata-rata nasional. Akses rumah tangga untuk mendapat sanitasi yang baik di Papua terendah dari semua provinsi yaitu hanya 21,48 persen. Secara umum kondisi Papua masih di bawah rata-rata nasional, artinya upaya perbaikan sanitasi harus ditingkatkan melalui sosialisasi dan pemberian contoh hidup sehat.

3.1.14 Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan

Harus diakui bahwa kualitas sumber daya manusia Papua masih sangat rendah dan belum mampu bersaing dengan sumber daya manusia yang berasal dari luar Papua. Apabila hal ini terus dibiarkan, maka masyarakat Papua akan tertinggal dalam berbagai bidang kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia harus benar-benar menjadi salah satu program prioritas pemerintah Papua. Rendahnya kualitas SDM ini akan berimbas pada masalah ketenagakerjaan, di mana masyarakat Papua akan sulit mendapatkan kesempatan bekerja dengan posisi yang memadai. Rendahnya kegiatan investasi di Papua menyebabkan rendahnya ketersediaan lapangan pekerjaan dan menghasilkan tingkat pengangguran yang tinggi. Kemampuan masyarakat untuk memiliki jiwa pengusaha

(*enterprenuer*) juga masih rendah karena pemicu untuk menciptakan iklim berinvestasi juga belum berkembang di Papua. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa permasalahan SDM dan ketenagakerjaan di Papua adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas SDM.
2. Masih rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja.
3. Masih rendahnya kegiatan investasi dan iklim berusaha sehingga tingkat kesempatan kerja rendah.

3.1.15 Penataan Ruang

Rencana Tata Ruang Provinsi Papua telah berhasil disusun meskipun pada saat penulisan RPJP ini belum mendapatkan pengesahan resmi dari pemerintah pusat. Proses penyusunan RTRW dilakukan secara bersama antara semua SKPD di bawah koordinasi BAPEDA Provinsi dan dilakukan secara swa-kelola. Hal ini dimaksudkan agar apa yang disusun dan direncanakan benar-benar sesuai dengan kepentingan penataan ruang daerah selama 20 tahun ke depan. Selanjutnya, RPJP yang disusun saat ini juga mengacu pada RTRW Provinsi Papua. Permasalahan jangka panjang yang timbul dalam penataan ruang di Provinsi Papua adalah:

1. Menjamin kepatuhan pada penataan ruang yang telah direncanakan khususnya terhadap pemberian ijin investasi terkait dengan pembukaan lahan agar sesuai dengan peruntukan dan fungsinya.
2. Memahami tentang arti pentingnya ketaatan pada tata ruang yang telah direncanakan agar pelaksanaan pembangunan tidak membawa dampak negatif dan justru menciptakan kerusakan dan ketidakberlanjutan ruang.
3. Menjamin dilakukannya perencanaan ruang di tingkat Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan ketetapan RTRW Provinsi yang telah disusun bersama untuk menjamin keberlanjutan ruang, khususnya dalam pemberian ijin investasi terkait pembukaan lahan dan pengembangan kawasan-kawasan strategis.
4. Menjamin RTRW Provinsi sebagai acuan utama dalam pemanfaatan ruang yang mampu mengawal kebutuhan pembangunan baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

3.1.16 Perencanaan Pembangunan

Pemerintah telah menetapkan bahwa suatu daerah harus memiliki perencanaan pembangunan untuk jangka panjang yaitu untuk periode tahun 2005-2025 yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang kemudian

menjadi dasar penyusunan RPJMD dan Rencana Kerja Tahunan (RKPD). Saat ini, Pemerintah Provinsi Papua baru memiliki RPJMD periode tahun 2006-2011. Oleh karena itu, tantangan perencanaan pembangunan daerah adalah menjaga konsistensi arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan tahunan terhadap visi, misi dan kebijakan pembangunan jangka panjang.

3.1.17 Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Kampung

Pemerintah Provinsi Papua telah melaksanakan program pemberdayaan kampung dalam bentuk RESPEK, di mana program ini juga sejalan dengan program pemberdayaan masyarakat yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dalam bentuk program PNPM. Kedua bentuk program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Papua dan menciptakan kemandirian masyarakat kampung. Masalah yang dihadapi dalam pemberdayaan dan kemandirian masyarakat kampung adalah terkait dari keseluruhan permasalahan di setiap sektor pembangunan, seperti ekonomi, SDM, pendidikan, dan sebagainya.

3.1.18 Ketentraman dan Ketertiban

Provinsi Papua sebagai Provinsi yang terletak di kawasan paling Timur Indonesia memiliki peran penting bagi NKRI karena letaknya yang berbatasan dengan PNG. Sebagai kawasan perbatasan negara, Provinsi Papua perlu mendapatkan perhatian khusus agar ketahanan dan keamanan negara tetap terjamin dengan cara membangun koridor perbatasan negara sebagai kawasan strategis. Selain itu, seluruh masyarakat memiliki kewajiban untuk menjaga ketentraman dan ketertiban wilayah. Namun dengan kondisi sosial budaya yang ada di Papua yang relatif tidak disiapkan untuk menjawab perubahan atau perkembangan jaman, akan memberikan dampak tersendiri bagi kelangsungan ketentraman dan ketertiban wilayah. Oleh karena itu, untuk menjamin tertatanya kehidupan di Papua perlu jawaban atas beberapa permasalahan berikut:

1. Minimnya pendampingan bagi penduduk agar siap menghadapi perubahan kemajuan jaman dengan tetap menjunjung tinggi budaya Papua.
2. Tingginya kesenjangan pembangunan untuk mengatasi gejolak masyarakat.
3. Rendahnya sosialisasi dan contoh perilaku hidup yang jauh dari budaya konsumerisme.

3.2. ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan isu atau hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus yang ditetapkan berdasarkan analisis situasi dan kondisi yang terus berlangsung dan memiliki dampak luas terhadap suatu pembangunan. Isu ini harus

dikelompokkan dan mendapatkan prioritas tahapan dalam pelaksanaan pembangunan selama dua puluh tahun perencanaan pembangunan. Isu strategis, apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Demikian pula sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan diperkirakan dapat mempengaruhi agenda pembangunan dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. Seperti telah disebutkan di atas bahwa isu strategis juga didasarkan pada analisis gambaran umum kondisi daerah, isu nasional, dan isu internasional.

3.2.1 Isu Internasional

Salah satu isu strategis di tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun mendatang, adalah komitmen *Millenium Develepment Goals* (MDGs) yang ditetapkan pada UN Summit tahun 1990 oleh PBB. Dengan telah diadopsinya komitmen MDG's oleh Indonesia, maka merupakan keharusan bagi Provinsi Papua bersama daerah lainnya di seluruh Indonesia untuk mencermati indikator dan target yang harus dicapai. Selain MDG's, isu internasional yang saat ini sedang berkembang dan akan memberikan efek bagi masa depan pembangunan dunia dan Indonesia secara umum dan Provinsi Papua secara khusus, antara lain: penerapan *green economic* (ekonomi ramah lingkungan) yang diantaranya ditempuh melalui pembangunan rendah karbon dan efisiensi penggunaan sumber daya alam; krisis ekonomi global yang masih mengancam perekonomian; perdagangan bebas WTO, APEC dan AFTA yang cenderung mengarah kepada perdagangan bebas dunia global dan regional; penerapan sumber-sumber alternatif untuk mengantisipasi semakin menipisnya cadangan mineral dunia; mengantisipasi perubahan iklim global (*global warming/climate change*); serta kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat yang mampu mengantisipasi hambatan jarak antar waktu.

3.2.2 Isu Nasional

Isu jangka panjang nasional yang dapat dijadikan referensi dalam merumuskan isu strategis diantaranya adalah dokumen RPJP Nasional dan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Review terhadap RPJPN bertujuan untuk mengetahui arah pembangunan nasional dan sasaran pembangunan pada setiap tahapan lima tahunan. Pemahaman terhadap arah dan sasaran pembangunan jangka panjang memandu RPJPD Provinsi Papua agar selaras dengan tujuan pembangunan

nasional. Adapun tahapan dan skala prioritas pada RPJPN 2005-2025 ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Tahapan Dan Skala Prioritas Rpjpn 2005-2025

RPJM I (2005-2009)	Menata kembalidanmembangun Indonesia di segala bidang <input type="checkbox"/> Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik
RPJM II (2010-2014)	Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang <input type="checkbox"/> Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing daerah
RPJM III (2015-2019)	Menetapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang <input type="checkbox"/> Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK
RPJM IV (2020-2024)	Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur <input type="checkbox"/> Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif

Sumber: RPJP Nasional, 2005-2025

Pemerintah Pusat telah mengkaji ulang RPJPN 2005-2025 serta menerbitkan *Master Plan* Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dalam rangka mewujudkan visi sebagai negara maju dan sejahtera pada tahun 2025 melalui percepatan transformasi ekonomi. Dalam pelaksanaannya, khususnya di Papua, penerapan MP3EI harus mengedepankan pendekatan *not bussiness as usual* melainkan mengacu pada visi dan misi pembangunan berkelanjutan yang diterapkan di Provinsi Papua dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan terfokus pada prioritas yang konkrit dan terukur, serta tetap merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan pembangunan berkelanjutan.

Koridor ekonomi Papua-Kepulauan Maluku terdiri dari Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara. Tema pembangunan koridor ekonomi Papua-Kepulauan Maluku adalah sebagai **Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi dan Pertambangan Nasional**. Strategi pembangunan ekonomi koridor ekonomi Papua-Kepulauan Maluku difokuskan pada 5 kegiatan ekonomi utama, yaitu Pertanian pangan-MIFEE (*Merauke Integrated Food & Energy Estate*), Tembaga, Nikel, Migas, dan



Perikanan. Namun demikian, sesuai dengan dasar penyusunan RTRW yang telah dilakukan di Provinsi Papua, maka baik RPJPN, Master Plan, dan semua kebijakan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat tetap harus menjamin keberlanjutan pembangunan berkelanjutan di semua bidang di Provinsi Papua. Hal ini harus sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan berdasar RTRW Provinsi Papua, RPJP Provinsi Papua, maupun RPJM Provinsi Papua dan dokumen perencanaan lainnya yang tetap mengedepankan kesejahteraan masyarakat asli Papua dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan kata lain, sudah saatnya kebijakan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat harus tetap mengutamakan kepentingan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan di Provinsi Papua.

Di samping itu, mengingat luasnya wilayah Provinsi Papua, maka perlu rayonisasi pembangunan untuk memudahkan perencanaan dan pengawasan pembangunan, serta pemerataannya di segala bidang. Adapun pembagian rayon tersebut dapat dilakukan sebagai berikut :

NO	WILAYAH	KABUPATEN/KOTA
1	Utara I	Biak, Yapen, Waropen, Supiori, Nabire (Dogiai, Intan Jaya, Deyai, Paniai)
2	Utara II	Jayapura, Keerom, Sarmi, Pegunungan Bintang, Mamberamo Raya, Kota Jayapura
3	Tengah	Wamena, Lani Jaya, Tolikara, Yahukimo, Mamberamo Tengah, Nduga
4	Selatan I	Merauke, Boven Digoel, Mappi
5	Selatan II	Timika, Asmat, Puncak Jaya, Puncak

Berdasarkan analisis atas permasalahan pembangunan dan tantangan pembangunan daerah serta isu internasional dan isu nasional, maka isu strategis pembangunan jangka panjang Provinsi Papua dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2 Isu Strategis Provinsi Papua

NO	ISU STRATEGIS	DESKRIPSI
I	SOSIAL – BUDAYA	
A	Pendidikan	
a.1	Program pendidikan dasar wajib 9 tahun	Perlu terobosan baru agar semua masyarakat dapat mengikuti program pendidikan dasar 9 tahun dengan berbagai inovasi untuk mensiasati kendala geografi, baik melalui jalur pendidikan resmi, sekolah asrama,

NO	ISU STRATEGIS	DESKRIPSI
		pembelajaran jarak jauh.
a.2	Peningkatan kualitas pendidikan	Kesenjangan guru dan sarana/prasarana pendidikan harus semakin diperkecil. Peningkatan jumlah guru dan pendidik lokal mutlak dilakukan untuk menghindari kekosongan tenaga pengajar. Insentif untuk guru agar terus mau mengembangkan diri dan terlibat aktif dalam pendidikan perlu diperhatikan.
a.3	Percepatan peningkatan kualitas SDM	Mengirimkan lulusan SLTA, S1, dan S2 untuk belajar kejenjang lebih tinggi melalui program beasiswa, dan menjadi tenaga utama peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan maupun program-program kejuruan bagi masyarakat Papua lainnya. Program kerjasama untuk pelaksanaannya baik dilakukan di dalam maupun di luar Papua sangat diperlukan.
a.4	Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan	Sarana dan prasarana yang dibangun berdasarkan prioritas kebutuhan dan bersifat terintegrasi dalam jangka panjang. Kebutuhan berupa gedung sekolah, balai latihan kerja, listrik, air bersih, maupun sarana pembelajaran lainnya termasuk buku dan alat-alat praktek.
a.5	Peningkatan kesadaran masyarakat	Budaya sekolah dan pendidikan belum sepenuhnya dipahami, sosialisasi tentang pentingnya pengetahuan dan pengembangan diri perlu terus dilakukan.
B	Kesehatan	
b.1	Peningkatan Angka Harapan Hidup	Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan sosialisasi pola dan budaya hidup sehat masih sangat dibutuhkan.
b.2	Peningkatan sarana dan prasarana	Kondisi geografis dan penyebaran penduduk yang tidak merata disiasati dengan penguatan tenaga lokal setempat tentang pelayanan kesehatan serta peningkatan sarannya. Rayonisasi pusat-pusat kesehatan diperlukan untuk mengatasi kendala jarak. Penyediaan kebutuhan listrik dan air bersih untuk pelayanan kesehatan mutlak diperlukan.
b.3	Peningkatan peran perempuan	Sangat penting terutama untuk mengurangi angka kematian bayi lahir dan ibu melahirkan, kasus balita gizi buruk, pengembangan budaya hidup sehat dan peningkatan sanitasi lingkungan.
b.4	Pemberantasan penyakit menular	Peningkatan kesadaran pola hidup sehat dan pengetahuan tentang bahaya penyakit menular dan upaya

NO	ISU STRATEGIS	DESKRIPSI
	malaria dan HIV/AIDS	pencegahannya.
C	IPTEK	
c.1	Pengembangan dan penelitian	Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK melalui penguasaan Ilmu Pengetahuan Dasar dan Terapan, Ilmu Sosial dan Humaniora. Pengembangan kerjasama melalui transfer pengetahuan maupun teknologi untuk penelitaian dan penerapan IPTEK di bidang pendidikan, kesehatan, energi alternatif, pengembangan ekonomi lokal, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, ketahanan pangan, kepemudaan, peran perempuan, dan pengembangan budaya asli Papua.
c.2	Pemahaman dan pemanfaatan	Penguasaan, penerapan, dan penyediaan IPTEK dan Infokom di semua sektor dan wilayah memudahkan sistem pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang terintegrasi dan merata.
D	Kemiskinan	
d.1	Mengurangi jumlah penduduk miskin	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana kebutuhan hidup dasar (sandang, pangan, dan papan) serta pemerataan aksesnya.
d.2	Mengurangi kesenjangan	Pemerataan pembangunan yang bersifat program jangka panjang dan berbagai alternatif atau inovasi bentuk pembangunan yang sesuai dengan kondisi geografis, penyebaran penduduk, dan keterisolasian
d.3	Penguatan kelompok rentan	Masyarakat Papua yang sebagian merupakan masyarakat pesisir, petani, dan peramu merupakan kelompok rentan yang harus dilindungi dari berbagai ancaman bencana alam maupun ketimpangan kebijakan pembangunan agar tidak terjerat dalam kemiskinan sistem maupun struktural
d.4	Perubahan sikap mental	Budaya konsumerisme yang berkembang di Papua harus diantisipasi dan dilakukan penyadaran arti pentingnya memperhatikan kebutuhan hidup dalam jangka panjang, sekaligus mengubah hidup tidak sehat yang berakibat pada tingginya tingkat penderita HIV/AIDS
E	Ketenagakerjaan	
e.1	Kesempatan kerja	Tingkat investasi dan perkembangan dunia usaha di Papua masih sangat rendah. Kesempatan kerja khusus untuk orang Papua juga sangat rendah akibat rendahnya kualitas SDM. PNS masih menjadi sasaran utama untuk

NO	ISU STRATEGIS	DESKRIPSI
		mendapatkan pekerjaan. Migrasi orang luar Papua akan terus terjadi dan tetap akan mendominasi untuk mengisi peluang kerja apabila tidak ada perubahan kualitas SDM (minat dan bakat) orang asli Papua.
e.2	Angka Rasio Ketergantungan	Tingginya angka rasio ketergantungan menyebabkan sulitnya masyarakat Papua untuk mampu mengembangkan diri menjadi tenaga yang semakin berkualitas dan mengembangkan kreasi untuk mandiri.
F	Pemberdayaan Masyarakat	
f.1	Peningkatan kesejahteraan sosial	Masyarakat asli Papua harus menjadi target utama dalam pembangunan yang disusun dengan melibatkan dan mengedepankan kepentingan serta kebutuhan pengembangan kesejahteraan mereka.
f.2	Pembangunan masyarakat kampung	Masih kuatnya adat dan budaya masyarakat yang tinggal di kampung-kampung adat menjadi kekuatan basis pengembangan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga target pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat semakin mudah dilaksanakan. Pemberdayaan masyarakat kampung dilakukan melalui kebijakan program pembangunan dan pendampingan yang berkelanjutan.
f.3	Pengembangan jati diri dan budaya Papua	Pembangunan yang dilakukan dengan semaksimal mungkin melibatkan masyarakat Papua akan memperkuat jati diri dan budaya Papua sebagai kekayaan dan modal pembangunan manusia Papua seutuhnya yang berciri khas lokal namun mampu bersaing di tingkat nasional maupun global melalui kearifan lokal dan keberlanjutan sumber daya alam dan fungsinya dalam jangka panjang.
f.4	Pengembangan budaya berprestasi dan inovatif	Melalui pengembangan program-program pemberdayaan dan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat Papua akan menimbulkan hasrat untuk berkembang dan mengejar ketertinggalan, serta mampu memiliki jangkauan jangka panjang yang didukung oleh kekayaan sumber daya alam dan kearifan lokal serta kesadaran untuk membangun diri menjadi masyarakat inovatif dan kreatif yang diperhitungkan oleh masyarakat dunia.
f.5	Peningkatan kapasitas pemerintah	Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah agar mampu menjadi penentu kebijakan yang berpihak pada masyarakat Papua termasuk mendorong percepatan target

NO	ISU STRATEGIS	DESKRIPSI
	daerah	pembangunan yang berorientasi pada program peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.
f.6	Peningkatan peran serta masyarakat	Masyarakat yang demokratis dan berkualitas yang mampu berpartisipasi di berbagai bidang baik kelembagaan sosial, politik, dan ekonomi; keberpihakan, perlindungan, pemberdayaan dalam pemenuhan hak dasar; hak menentukan pendapat sesuai dengan norma adat, penguatan dan pengakuan eksistensi nilai-nilai adat serta budaya serta kelembagaannya; serta memiliki hak berpendapat untuk mendukung pencapaian target kesejahteraan masyarakat, mengembangkan dan mempertahankan fungsi lembaga pranata masyarakat, termasuk mengawal pelaksanaan UU No 21 tahun 2001 tentang OTSUS.
G	Penguatan hukum, kerukunan beragama, Ketentraman dan Ketertiban,	
g.1	Kerukunan beragama	Pengembangan akhlak dan martabat manusia didasarkan pada kekuatan spiritualitas dan kerukunan beragama menjadi kekuatan bersama mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua.
g.2	Penegakan hukum	Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari peraturan daerah harus disesuaikan dengan kondisi lokal masyarakat Papua yang masih memegang teguh hukum adat dan budaya sebagai dasar kehidupan, termasuk cara pandang terhadap sumber daya alam dan lingkungannya.
g.3	Tata pemerintahan	Pemerintah yang tanggap akan kebutuhan masyarakat, penyelenggaraan pemerintah yang tidak berpihak pada kelompok atau golongan tertentu, keseriusan pelaksanaan program pembangunan, dan transparansi dalam pelaksanaannya menjadi modal utama untuk meningkatkan dan memantapkan pembangunan untuk menuju pembangunan jangka panjang dan berkelanjutan.
g.4	Ketentraman dan Ketertiban	Ketentraman dan ketertiban di dalam Papua harus terus ditingkatkan, budaya kekerasan, khususnya kepada perempuan dan anak, serta gangguan ketertiban harus dihilangkan karena hanya akan berdampak pada kehidupan yang tidak produktif.
H	Peran pemuda, dan olah raga	
h.1	Kepemudaan	Pembinaan dan peningkatan peran pemuda yang berjiwa inovatif, trampil, mampu bersaing secara positif demi pembangunan masyarakat Papua seutuhnya menjadi

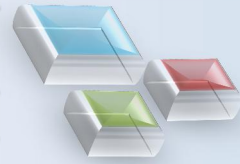
NO	ISU STRATEGIS	DESKRIPSI
		modal pembangunan yang utama.
h.2	Olah Raga	Sportivitas yang terbentuk melalui pengembangan olah raga akan mempengaruhi pola pikir dan pengembangan jiwa pemuda untuk berpartisipasi dalam pembangunan dalam upaya memajukan masyarakat Papua untuk keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan.
I	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	
i.1	Peningkatan IPM	Empat aspek dasar penghitungan IPM harus ditingkatkan untuk mengejar ketinggalan Papua yaitu dari aspek Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-Rata Tingkat Konsumsi Riil per Kapita, Rata-Rata Lama Sekolah, hingga ke kampung orang asli Papua (tidak hanya perkotaan).
i.2	Jaminan Sosial	Untuk mendukung kenaikan IPM, maka jaminan sosial dan perlindungan bagi masyarakat miskin harus ditingkatkan (Jamsos: pembebasan biaya pendidikan, kesehatan, melindungi kelompok rawan sosial)
II	EKONOMI	
A	Pembangunan Ekonomi lokal	
a.1	Akses pada sumber daya alam	Papua dengan kondisi sumber daya alamnya dapat menjadi kekuatan tersendiri untuk pengembangan ekonomi lokal berdasarkan konsep keberlanjutan dengan pelaku utama adalah masyarakat asli Papua. Pengembangan teknologi pemanfaatan sumber daya alam dan proses pengolahan hasil produksinya yang ramah lingkungan dan berpijak pada daya dukung lingkungan beserta seluruh sistemnya dalam jangka panjang menjadi syarat utama pemanfaatan sumber daya alam.
a.2	Akses pada permodalan dan pasar	Minimnya pengetahuan dan jaminan yang dimiliki masyarakat Papua kepada akses permodalan diatasi melalui program pendampingan yang memungkinkan masyarakat memiliki akses modal dan pengetahuan yang benar untuk pemanfaatan dan pengelolannya hingga sampai pada tahap pembangunan ekonomi lokal yang mandiri. Akses pada pasar yang sesuai dengan produk lokal yang dihasilkan sangat penting, dan menjadi tugas pemerintah dan pemerintah daerah serta mitra usaha untuk mengembangkannya namun tetap dalam koridor pembangunan ekonomi lokal demi peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua.
a.3	Pengembangan	Peningkatan ketrampilan di berbagai bidang usaha melalui

NO	ISU STRATEGIS	DESKRIPSI
	ketrampilan dan berusaha	lembaga pelatihan maupun sekolah kejuruan diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, pengembangan energi ramah lingkungan, ketahanan pangan industri jasa perdagangan, pariwisata, lembaga keuangan, pertambangan yang ramah lingkungan.
a.4	Pengembangan investasi dan iklim usaha	Pengembangan investasi berbasis kemitraan dengan mengedepankan pemanfaatan hasil dan nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua, termasuk jaminan kelancaran usaha, produktivitas terhadap hasil dan pemanfaatan lahan, jaminan pada akses pasar dan keberlanjutan usaha.
a.5	Keunggulan dan daya saing	Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah di Papua harus mampu menjadi kekuatan posisi tawar Papua dalam melakukan kerjasama di bidang ekonomi maupun untuk yang dilakukan tersendiri. Konsep keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif dipahami dan menjadi pilihan dalam menentukan arah pertumbuhannya.
B	Keuangan dan Perekonomian	
b.1	Sumber Keuangan	Tersedianya sumber keuangan dan PAD yang dapat mendukung kebutuhan pembiayaan pembangunan menuju ke arah mandiri, serta sumber-sumber pendanaan alternatif lainnya yang dikembangkan berdasarkan prinsip keberlanjutan, di samping sumber dana yang berasal dari pemerintah pusat.
b.2	Perekonomian	Pertumbuhan ekonomi yang merata yang berasal dari sumber-sumber pembangunan yang berkelanjutan, memasukkan dasar perhitungan biaya dan manfaat sosial atas pemanfaatan sumber daya alam, berbasis pada struktur ekonomi lokal yang kokoh, mandiri, dalam jangka panjang.
III	INFRASTRUKUR	
A	Infrastruktur Makro	
a.1	Sarana dan Prasarana	Dukungan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi lokal, sosial, dan budaya harus menjadi program prioritas pemerintah termasuk sarana dan prasarannya serta pendampingannya. Kualitas aparat yang cepat tanggap dan mampu memotivasi perkembangan dunia usaha yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi lokal dan pemerataan kesejahteraan sosial masyarakat asli Papua.

NO	ISU STRATEGIS	DESKRIPSI
a.2	Prioritas pembangunan infrastruktur	Keterisolasian dan persebaran penduduk yang tidak merata, akses pada pendidikan, kesehatan, kesempatan berusaha dan peningkatan kualitas produksi pertanian dalam arti luas perlu ditunjang dan menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, bandar udara, serta pelabuhan untuk menghubungkannya dengan wilayah lain yang sudah lebih dahulu berkembang sebagai upaya mengurangi kesenjangan.
a.3	Moda transportasi	Dikembangkan untuk menghubungkan seluruh titik sentral pengembangan wilayah baik melalui darat, udara, sungai/danau sesuai dengan kondisi wilayah.
a.4	Telekomunikasi	Dibutuhkan untuk memperlancar kebutuhan komunikasi antar pemerintah baik pusat, daerah, hingga kampung untuk mendukung kebutuhan pembangunan di segala bidang.
B	Infrastruktur Dasar	
b.1	Kelistrikan	Dibutuhkan semakin banyak pembangkit listrik termasuk jaringannya dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada: tenaga air, tenaga angin, dan tenaga surya untuk menjadi sumber energi listrik yang terbarukan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan skala lokal maupun seluruh Papua
b.2	Air bersih	Selain untuk mendukung kebutuhan rumah tangga dan kegiatan industri juga sangat diperlukan untuk mendukung kesehatan masyarakat sehingga berdampak untuk meningkatkan kualitas SDM.
b.3	Sanitasi lingkungan	Keberlanjutan sistem lingkungan yang terjaga melalui sanitasi dan budaya bersih serta kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan menjadi salah satu kunci utama untuk mendukung keberlanjutan. Meskipun saat ini belum dirasakan sebagai gangguan, namun justru harus dipertahankan.
C	Penataan Ruang	
c.1	RTRW Papua	Menjadi dasar batasan fisik pemanfaatan lahan dan penentuan kawasan yang harus dipatuhi oleh semua pihak agar tercapai keselarasan dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang yang tetap menjaga fungsi lingkungan (air, tanah, udara). Menjadi dasar regulasi yang terkait dengan pemanfaatan ruang.

NO	ISU STRATEGIS	DESKRIPSI
c.2	Pengembangan kawasan dan wilayah	Pengembangan kawasan cepat tumbuh; pembangunan wilayah perbatasan, perkotaan dan kampung; keseimbangan pembangunan antara perkotaan dan kampung; kesenjangan antar wilayah; pemekaran wilayah (provinsi, kabupaten, dan kampung), harus tetap tunduk pada RTRW yang telah ditetapkan agar kesatuan dan keberlanjutan fungsi lingkungan tetap terjaga.
c.3	Kapasitas aparat pemerintah daerah	Pengetahuan tentang penataan ruang beserta fungsinya harus dipahami untuk pengendalian pemanfaatan ruang guna menghindari kesalahan program pembangunan wilayah, terlebih di daerah yang rawan bencana.
c.4	Kepemilikan dan pengelolaan tanah adat	Identifikasi kepemilikan tanah adat untuk kepastian hak kelola.
c.5	Pemekaran wilayah	Dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan didukung dengan kajian mendalam.
c.6	Kawasan Perbatasan	Papua merupakan kawasan strategis di bidang pertahanan dan keamanan Negara karena terletak di kawasan perbatasan. Peningkatan kewaspadaan dan kesiapan aparat dan masyarakat khususnya yang tinggal di kawasan perbatasan perlu terus ditingkatkan. Kawasan perbatasan dikembangkan menjadi beranda depan pembangunan.
c.7	Lingkungan	Penataan kawasan, pemanfaatan lahan, kegiatan industri, maupun seluruh kegiatan masyarakat harus mengacu pada kemampuan daya dukung lingkungan serta dilakukan penataan sejak dini, termasuk untuk sanitasi lingkungan untuk menghindari beban pembangunan di masa mendatang.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH



Visi dan misi merupakan sarana paling sederhana tentang bagaimana gambaran masa depan suatu daerah dapat dikomunikasikan dan disepakati. Visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah adalah kesepakatan seluruh *stakeholders* tentang apa dan bagaimana wujud Provinsi Papua dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan serta kerangka umum bagaimana mencapainya. Melalui visi dan misi daerah ini dapat dilihat wujud Provinsi Papua pada akhir tahun 2025 sebagaimana diinginkan bersama masyarakat dalam wujud yang nyata.

Visi dan misi pembangunan dirumuskan berdasarkan gambaran umum kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis Provinsi Papua saat ini dan sasaran serta arah pembangunan yang diharapkan. Visi dan misi pembangunan juga tidak lepas dari aspek tata ruang dan pengelolaannya sehingga visi dan misi pembangunan selaras dengan dinamika ruang dan kemungkinan pengembangannya yang mengarah pada keberlanjutan ekosistem pendukung pembangunan itu sendiri.

4.1. VISI

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya perubahan ke arah yang lebih baik bagi suatu bangsa. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh merupakan tahapan dalam kerangka pencapaian masyarakat yang adil dan makmur. Untuk itu dibutuhkan visi yang jelas dan terarah tentang apa yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

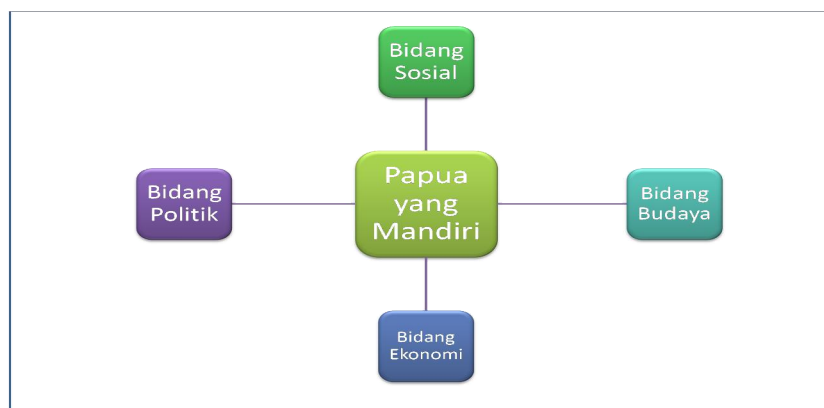
Visi pembangunan jangka panjang merupakan gambaran ideal di masa datang berdasarkan apa yang diharapkan oleh masyarakat Provinsi Papua tentang diri dan daerahnya berdasarkan perkembangan kondisi saat ini. Visi dirumuskan untuk mengkonfirmasi dinamika pembangunan dan perkembangannya, serta harapan bagaimana Papua akan dibawa dan diarahkan dalam pembangunan jangka panjang. Suatu visi tidak dimaksudkan sebagai “impian mengambang” yang tak berdasar melainkan sesuai fakta serta analisis data dan informasi yang relevan.

Berpijak pada kondisi Provinsi Papua saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh Provinsi Papua, maka Visi Pembangunan Daerah Tahun 2005-2025 adalah :

**PAPUA YANG MANDIRI
SECARA SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI, DAN POLITIK**

Dari pernyataan visi diatas, tampak jelas bahwa terdapat 1 (satu) pokok visi tentang “Papua yang Mandiri” dan dijelaskan dalam 4 (empat) elemen atau meliputi: bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik, sebagai tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan jangka panjang Provinsi Papua. Dengan demikian, visi tersebut menekankan bahwa pada akhir periode RPJPD tahun 2025, ingin diwujudkan kemandirian secara sosial, kemandirian secara budaya, kemandirian secara ekonomi, dan kemandirian secara politik bagi Provinsi Papua dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan. Untuk lebih mudahnya, wujud “Papua yang Mandiri” di tiap bidang dapat dilihat dalam 0

Gambar 4.1 Keterhubungan 4 (Empat) Elemen Pokok Visi



Dari gambar di atas, tampak bahwa kemandirian yang diinginkan oleh masyarakat Papua adalah kemandirian di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Visi tersebut memberi pesan yang jelas bahwa berbagai permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah di masa lalu dan masa datang akan terpecahkan manakala kemandirian secara sosial, budaya, ekonomi, dan politik dapat terwujud yang pada akhirnya akan menghantarkan pada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Papua yang lebih baik.

Papua yang mandiri adalah masyarakat Papua yang mampu mewujudkan kualitas kehidupan yang lebih baik dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan

sendiri, berbasis aset alam dan kearifan lokal setiap daerah. Kemandirian yang dimaksud di sini adalah kemandirian yang mengenal adanya hubungan kerjasama, yang saling menguntungkan dengan semua pihak untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Papua demi kemajuan masyarakat asli Papua berdasarkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai universal. Pencapaian kondisi kemandirian sebagaimana dimaksud sangat memungkinkan karena dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua mengamankan dan memberikan peluang kepada masyarakat Papua untuk merancang masa depannya berdasarkan nilai adat istiadat dan memberikan kewenangan untuk menentukan arah pembangunannya sendiri yang luas serta keberpihakan yang sebesar-besarnya terhadap masyarakat asli Papua. Oleh karena itu perbaikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang kondusif akan memberikan peluang bagi masyarakat Papua dalam mewujudkan kemandiriannya dalam kerangka NKRI.

Kemandirian sosial tercermin pada peningkatan kualitas Manusia Papua serta modal sosial masyarakat asli Papua sehingga mampu berperan dalam pembangunan daerah termasuk meningkatkan kualitas hidup berbasis aset alam lokal yang memperhitungkan aspek-aspek keberlanjutan. Kualitas Manusia Papua tercermin dari meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, angka harapan hidup yang lebih tinggi dan kesetaraan gender, meningkatnya kualitas intelektual, dan meningkatnya profesionalisme dan daya inovasi masyarakat Papua yang tinggi. Modal sosial masyarakat tercermin dari rasa saling percaya dan kemampuan untuk memecahkan masalah bersama.

Kemandirian budaya ditujukan untuk mengaktualisasikan jati diri, identitas dan karakter masyarakat asli Papua berdasarkan nilai-nilai luhur, kearifan lokal, dan tatanan aturan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dengan tetap memperhatikan tatanan nasional. Kemandirian budaya juga berkaitan dengan pengakuan terhadap berbagai kekayaan adat istiadat serta pemahaman keragamannya sebagai suatu kekayaan untuk dijadikan inspirasi pembangunan untuk menjaga eksistensinya.

Kemandirian ekonomi adalah suatu kondisi tercapainya peningkatan dan pemerataan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara simultan dan berkelanjutan serta mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka peningkatan kualitas hidup mereka, melalui peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan aset alam secara mandiri, berkelanjutan dan bertanggung jawab, penguatan kecukupan pemenuhan kebutuhan lokal, penciptaan sumber-sumber pemenuhan kebutuhan alternatif; peningkatan akses terhadap kebutuhan hidup; peningkatan kesempatan

mengaktualisasikan diri sesuai bakat dan minatnya; pembangunan yang tersebar dan setara melalui keterpaduan antar sektor pembangunan dan investasi berbasis kampung.

Kemandirian politik dicapai melalui terwujudnya sistem dan kelembagaan politik serta hukum yang berkeadilan. Kemandirian politik tercermin melalui lembaga politik dan kemasyarakatan didasarkan oleh aturan hukum dan aturan adat. Kapasitas pendidikan politik tercermin melalui peningkatan partisipasi dan peran masyarakat secara nyata dan efektif dalam sistem pengambilan keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai budaya masyarakat dengan menganut etika demokrasi, sehingga terjamin hak-hak masyarakat berdasarkan nilai adat dan nilai universal serta ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat Papua termasuk aspek gender.

4.2. MISI

Misi pada dasarnya merupakan upaya yang harus dilakukan agar visi yang telah ditetapkan dapat dicapai pada kurun waktu tertentu. Misi juga menjadi alasan mengapa suatu entitas organisasi lahir dan dibutuhkan serta dengan komitmen apa untuk jangka panjang dibuat kepada *stakeholders*. Dengan demikian, misi pembangunan jangka panjang adalah komitmen untuk menyelenggarakan serangkaian pembangunan yang memenuhi perspektif pemangku kepentingan pembangunan Provinsi Papua guna menjamin tercapainya visi pembangunan jangka panjang daerah.

Dalam mewujudkan visi pembangunan Provinsi Papua, ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan Kemandirian Sosial;**
2. **Mewujudkan Kemandirian Budaya;**
3. **Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pengembangan Wilayah;**
4. **Mewujudkan Kemandirian Politik;**
5. **Mewujudkan Kemandirian Masyarakat Asli Papua.**

Lima misi di atas dicetuskan sebagai panduan utama pengembangan arah kebijakan pembangunan jangka panjang untuk menjamin tercapainya visi daerah sebagaimana telah dijelaskan di sub-bab sebelumnya.

1. **Mewujudkan Kemandirian Sosial** adalah meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Papua yang sehat, cerdas, berbahagia, dan berinovasi tinggi untuk penguasaan, pemanfaatan, pengembangan, dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta

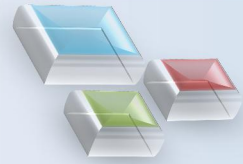
pembangunan yang adil dan merata . Tujuan penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah agar semua orang dapat mengembangkan diri dan berkontribusi sesuai minat dan bakatnya masing-masing, untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.

2. **Mewujudkan Kemandirian Budaya** adalah pengembangan kelembagaan adat, agama, dan perempuan, terintegrasi ke dalam sistem formal; pengembangan jati diri masyarakat dan kebanggaan menjadi orang Papua; serta peningkatan budaya berprestasi dan inovatif.
3. **Mewujudkan Kemandirian Ekonomi** adalah peningkatan pemenuhan kecukupan kebutuhan dan kualitas hidup masyarakat Papua yang berbasis pada kekuatan lokal; peningkatan pembangunan infrastruktur yang membantu memenuhi kecukupan kebutuhan secara lokal; pemenuhan kebutuhan berbasis aset alam lokal secara berkelanjutan pengelolaan dan penataan ruang dan wilayah yang dirancang berdasarkan daya dukung serta peruntukan ruang yang telah disepakati bersama; tercapainya peningkatan dan pemerataan akses dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat; pengelolaan aset alam secara mandiri, berkelanjutan dan bertanggungjawab.
4. **Mewujudkan Kemandirian Politik** adalah peningkatan peran masyarakat yang demokratis; Peningkatan kualitas aparatur sebagai fasilitator/ mediator pembangunan; Peningkatan kesadaran dan komitmen masyarakat dalam menjaga keutuhan bangsa berdasarkan hukum; implementasi kelembagaan dan hukum adat ke dalam sistem formal.
5. **Mewujudkan Kemandirian Masyarakat Asli Papua** adalah suatu kondisi di mana masyarakat asli Papua berperan utama dalam kepemimpinan dan pelaksanaan pembangunan di Papua, hingga pembangunan di Papua berjalan berdasarkan jati diri masyarakat asli Papua. Kemandirian ini terwujud secara merata di semua kampung dan di tingkat provinsi melalui kerjasama yang harmonis dan demokratis di antara seluruh masyarakat adat dari semua kampung. Kemandirian masyarakat asli Papua tercermin dari kemampuan masyarakat asli Papua untuk menentukan sendiri arah pembangunan Papua dan berperan utama pada berbagai sektor pembangunan. Kemandirian Masyarakat Asli Papua diwujudkan melalui pengakuan terhadap nilai serta hak adat masyarakat asli Papua serta berbagai aktivitas percepatan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat asli Papua dalam peningkatan kualitas hidup dan kemampuan mengambil peran dalam pembangunan,



berbagai inovasi affirmative action bagi masyarakat asli Papua, pengembangan IPTEK berbasis budaya asli Papua dan sumberdaya lokal, sehingga mudah diterapkan oleh masyarakat asli Papua di kampung-kampung, serta merealisasikan kewenangan, peran dan tanggung jawab orang asli Papua dalam pengambilan keputusan untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam kerangka NKRI.

BAB V ARAH KEBIJAKAN JANGKA PANJANG



Tujuan perencanaan pembangunan adalah memberikan arah kegiatan pembangunan yang diprogramkan untuk dilaksanakan berdasarkan kajian mendalam atas biaya dan manfaat yang menjadi konsekuensi apabila suatu kegiatan pembangunan dilaksanakan. Biaya yang ditimbulkan adalah biaya sosial secara total dalam arti biaya ekonomi maupun biaya non ekonomi yang harus ditanggung oleh seluruh masyarakat. Demikian pula dengan manfaat yang diterima atau diharapkan merupakan manfaat sosial yaitu manfaat ekonomi dan non ekonomi yang akan diterima oleh seluruh masyarakat.

Sasaran pembangunan jangka panjang adalah kuantifikasi pencapaian visi dan misi RPJPD Provinsi Papua yang merupakan komitmen bersama untuk diwujudkan dalam 20 tahun ke depan. Sasaran juga disusun berdasarkan kajian atas “*cost-benefit*” dan kinerja pembangunan existing serta potensi manfaat sosial yang akan diperoleh masyarakat di masa datang. Untuk merasionalkan kemampuan sumber daya daerah dalam mencapai berbagai sasaran pembangunan tersebut maka disusunlah tahapan-tahapan pencapaian melalui arah kebijakan. Arah kebijakan pembangunan menunjukkan agenda atau tema yang merupakan fokus pembangunan 5 (lima) tahunan selama 20 (dua puluh) tahun. Arah kebijakan jangka panjang daerah dibuat di setiap tahapan yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam sasaran pokok. Dengan demikian, pencapaian sasaran pokok dilakukan secara bertahap dalam 4 (empat) periode lima tahunan pembangunan sesuai arah kebijakan.

5.1. SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Sasaran pembangunan jangka panjang pada dasarnya adalah kuantifikasi visi dan misi pada akhir periode perencanaan. Sasaran menjelaskan target dari capaian pembangunan jangka panjang Provinsi Papua pada akhir tahun 2025. Sasaran juga mencerminkan apa yang ingin diselesaikan dan diantisipasi dimasa datang atas permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah dalam jangka panjang.

Atas dasar itu, sasaran pembangunan jangka panjang Provinsi Papua adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Kemandirian Sosial;
2. Terwujudnya Kemandirian Budaya;
3. Terwujudnya Kemandirian Ekonomi dan Pengembangan Wilayah;
4. Terwujudnya Kemandirian Politik;
5. Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Asli Papua.

1. Terwujudnya kemandirian sosial

Kemandirian sosial mencerminkan terselenggaranya kehidupan dan tersedianya pranata sosial yang disepakati oleh masyarakat. Kemandirian sosial masyarakat Papua tercermin dari tercapainya kualitas hidup manusia untuk menggambarkan kualitas kesehatan dan pendidikan yang mampu berperan dalam pembangunan daerah termasuk mengelola aset alam dan lingkungan hidup untuk memenuhi kecukupan hidup masyarakat Papua yang memperhitungkan aspek-aspek keberlanjutan. Kualitas hidup tercermin dari meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, angka harapan hidup yang setinggi-tingginya dan kesetaraan gender, meningkatnya kualitas intelektual dan kesehatan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem pendidikan dan kesehatan formal dan nonformal, kualitas kader pendidikan dan kesehatan, dan adanya manusia Papua yang terampil dan memiliki daya inovasi di kampung-kampung secara profesionalisme. Kemandirian sosial juga ditunjukkan dengan adanya sistem pelayanan sosial dasar dalam hal ini sistem pendidikan, kesehatan formal dan nonformal serta pelayanan sosial dasar lainnya berbasis budaya dan kearifan lokal. Terwujudnya kemandirian sosial secara lebih rinci dapat dilihat pada sasaran berikut ini:

- a. Meningkatnya kualitas hidup Manusia Papua ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia mencapai di atas 70 dan pertumbuhan penduduk yang seimbang, meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) di semua jenjang pendidikan dan meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pendidikan.
- b. Meningkatnya derajat kesehatan yang diukur dari Usia Harapan Hidup masyarakat Papua di atas rata-rata 70 tahun yang didukung meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan dalam bentuk peningkatan jumlah kader kesehatan dan untuk meningkatkan kualitas hidup di semua kampung.
- c. Terjaminnya kualitas gizi dan pangan di keluarga dan seluruh wilayah yang ditandai dengan rata-rata provinsi terhadap akses konsumsi normatif terhadap ketahanan pangan dibawah 0,50.
- d. Pembangunan yang tersebar setara ke seluruh wilayah, terwujudnya kualitas hidup dan kecukupan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat di kampung-kampung.

- e. Terpenuhinya kebutuhan rumah yang sehat sesuai dengan kondisi alam, budaya dan karakteristik fisiologis masyarakat Papua yang beragam serta menggunakan bahan-bahan lokal.
- f. Meningkatnya kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya indeks pemberdayaan gender (IPG) dan menurunnya indeks disparitas gender (IDG) serta perlindungan anak;
- g. Terbangunnya jaringan informasi dan telekomunikasi yang berkualitas serta menjangkau seluruh kampung.

2. Terwujudnya kemandirian budaya

Masyarakat yang berbudaya secara mandiri akan memberikan arah bagi terwujudnya identitas daerah yang sesuai dengan nilai-nilai adat dimana nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon perubahan lingkungan secara positif dan produktif. Sehingga akan meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Papua sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Terwujudnya kemandirian budaya secara lebih rinci dapat dilihat pada sasaran berikut ini:

- a. Terbentuknya sistem kelembagaan adat, agama, perempuan dan pemuda yang mandiri untuk meningkatkan kapasitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.
- b. Terwujudnya masyarakat yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berbudi luhur;
- c. Terbentuknya jati diri dan kebanggaan sebagai orang Papua melalui penerapan nilai-nilai budaya dalam peningkatan prestasi ilmu pengetahuan, seni, dan olah raga;
- d. Terwujudnya budaya berprestasi dan inovatif dengan kebebasan beraktivitas, berekspresi dan berkesenian, disertai dengan tingginya keinginan untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik

3. Terwujudnya Kemandirian Ekonomi dan Pengembangan Wilayah

Kemandirian ekonomi adalah suatu kondisi tercapainya peningkatan dan pemerataan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara simultan dan berkelanjutan serta mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka peningkatan kualitas hidup mereka, melalui peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan aset alam secara mandiri, berkelanjutan dan bertanggung jawab, penguatan kecukupan pemenuhan kebutuhan lokal, penciptaan sumber-sumber pemenuhan kebutuhan alternatif; peningkatan akses terhadap kebutuhan hidup; peningkatan kesempatan

mengaktualisasikan diri sesuai bakat dan minatnya.; pembangunan yang tersebar dan setara melalui keterpaduan antar sektor pembangunan dan investasi berbasis kampung.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, peningkatan pelestarian lingkungan, manfaat dan kesetaraan dengan memperhatikan arahan rencana tata ruang wilayah.

Terwujudnya kemandirian ekonomi secara lebih rinci dapat dilihat pada sasaran berikut ini:

- a. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh di seluruh wilayah Papua yang berbasiskan ekonomi lokal yang mandiri.
- b. Terbangunnya ekonomi lokal di tingkat kampung yang memanfaatkan Aset Alam secara berkelanjutan dan berbasis peran aktif masyarakat adat.
- c. Terbangunnya infrastruktur ekonomi dan pasar¹ yang mendorong berkembangnya sektor riil²
- d. Tersedianya infrastruktur skala kampung (termasuk energi, transportasi, komunikasi) secara merata di semua kampung di seluruh Papua, untuk memungkinkan masyarakat mengakses dan meningkatkan manfaat kebutuhan hidupnya secara efisien dan berwawasan lingkungan.
- e. Meningkatnya sarana dan prasarana dasar untuk mendukung pertumbuhan wilayah-wilayah strategis: kawasan tumbuh cepat, pusat-pusat permukiman masyarakat lokal, kawasan perbatasan dan sekitarnya dalam sistem pengembangan wilayah terpadu sebagai kesatuan sosial, ekonomi dan budaya dengan memperhatikan potensi, karakteristik dan daya dukung lingkungan;
- f. Terwujudnya tata ruang wilayah yang mampu mengakomodasikan berbagai kepentingan bagi pengembangan wilayah secara terpadu, sinergi dengan melibatkan semua komponen (*stake holder*) sesuai kondisi dan potensi wilayah;
- g. Berkembangnya investasi dan bertumbuhnya sentra-sentra produksi komoditi unggulan daerah
- h. Terlaksananya perlindungan sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati, sumber daya alam buatan, konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, cagar budaya dan keanekaragaman hayati, dengan terbentuknya aturan hukum yang mengatur serta memperhatikan hak-hak masyarakat adat;

¹Pasar didefinisikan sebagai berbagai jenis sistem pertukaran (dikembangkan sesuai konteks lokal)

²Sektor riil di kampung = sistem produksi lokal

- i. Peningkatan peran masyarakat adat dalam pengelolaan kawasan (hutan dan non hutan)

4. Terwujudnya Kemandirian Politik

Pemahaman dan penghayatan demokrasi akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan optimalisasi potensi masyarakat. Terwujudnya kemandirian politik secara lebih rinci dapat dilihat pada sasaran berikut ini:

- a. Terwujudnya masyarakat yang demokratis dimana masyarakat Papua mampu menentukan sendiri paradigma, tujuan, strategi dan inovasi pembangunannya sehingga terciptatata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang berlandaskan hukum serta birokrasi yang akuntabel, transparan, dan dapat dipercaya;
- b. Terwujudnya penerapan UU Nomor 21 tahun 2001 secara nyata dan konsekuen sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat asli Papua;
- c. Meningkatnya peran masyarakat dalam menegakan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat, serta peran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketentraman wilayahnya.

5. Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Asli Papua

Kondisi masyarakat asli Papua yang sebagian besar berada di daerah pedalaman dan terpencil serta belum sepenuhnya tersentuh oleh pembangunan mengakibatkan terjadinya kesenjangan pada hampir semua sektor kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah nyata untuk meletakkan kerangka dasar yang kokoh bagi Kemandirian masyarakat asli Papua. Terwujudnya kemandirian masyarakat asli Papua secara lebih rinci dapat dilihat pada sasaran berikut ini :

- a. Pengakuan Eksistensi nilai-nilai adat dan budaya asli Papua serta hak-hak masyarakat adat melalui pengakuan hak ulayat adat, masyarakat adat dan hukum adat, sebagai dasar dari seluruh aspek pembangunan
- b. Terciptanya lingkungan yang kondusif bagi percepatan peningkatan kualitas hidup dan kemampuan masyarakat asli Papua dalam mengambil peran dalam pembangunan
- c. inovasi ilmu pengetahuan berbasis budaya asli Papua dan sumberdaya lokal, berdasarkan prinsip berkelanjutan, berkembang secara progresif sehingga masyarakat kampung secara cepat dapat menerapkannya tanpa menimbulkan gegar budaya.

Terealisasinya kewenangan, peran dan tanggung jawab orang asli Papua dalam pengambilan keputusan untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam kerangka NKRI.

Tabel 5.1 Indikator Makro Pencapaian Sasaran Pembangunan Jangka Panjang

NO	SASARAN JANGKA PANJANG	INDIKATOR	KONDISI AWAL TAHUN 2005	TARGET AKHIR TAHUN 2025
1.	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Papua	IPM	62,28	70.04
2.	Menurunnya Kemiskinan	Persentase penduduk Miskin	40,83%	Di bawah 20%
3.	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Perekonomian	Laju pertumbuhan ekonomi riil		6.21%
		PDRB Perkapita	Rp 23,44 Juta	Di atas Rp 40 juta

5.2. ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

5.2.1 Arah Kebijakan Jangka Panjang

Untuk mencapai kemandirian secara sosial, budaya, ekonomi dan politik sesuai dengan sasaran yang diharapkan, maka Arah Pembangunan Jangka Panjang dalam 20 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

I. Mewujudkan Kemandirian Sosial

Untuk mencapai kondisi kemandirian sosial masyarakat, maka pembangunan daerah dalam jangka panjang diarahkan untuk :

1. Meningkatkan Kualitas SDM

Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia dilakukan untuk mewujudkan kemandirian sosial. Manusia yang mandiri memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, kreatif dan inovatif sebagai pelaku pembangunan bagi kemajuan daerah untuk mencapai kualitas hidup manusia serta memungkinkan setiap orang dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kualitas manusia yang bermutu tinggi ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia yang dimodifikasi sesuai dengan kondisi lokal Papua, Indeks Pembangunan Gender (IPG).

a. Pendidikan

Pembangunan pendidikan memberikan daya dorong yang tinggi dalam peningkatan kualitas SDM. Pendidikan masyarakat semakin tinggi akan memberikan andil yang bermakna pada perbaikan ekonomi dan penurunan kemiskinan. Pembangunan pendidikan bukan hanya dititikberatkan kepada peningkatan pengetahuan dan ketrampilan tetapi juga perubahan budi pekerti, perubahan pola pikir, daya inovasi, kepedulian terhadap alam, kerabat, kampung dan budaya lokal.

Pelayanan pendidikan harus semakin intens dan meningkat melalui berbagai jenis, jenjang dan jalur yang terjangkau oleh masyarakat, melalui : Penempatan dan penyebaran tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan profesinya; Memberikan tunjangan berbasis *non cash* secara bertahap kepada tenaga pendidik yang berada di seluruh kampung; Menyiapkan sumber daya lokal sebagai kader pendidik di seluruh kampung; Meningkatkan manajemen dalam pengelolaan hak-hak tenaga pendidik dan kader pendidik; Meningkatkan kualitas kader pendidik dan perbaikan kualitas proses belajar mengajar; Peningkatan sarana dan prasarana yang sesuai dengan alam dan budaya lokal untuk meningkatkan minat belajar, adanya kemudahan akses pendidikan beserta fasilitas pendukungnya.

Penyediaan pelayanan pendidikan harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan masyarakat, budaya lokal dan aspirasi masyarakat di setiap kampung. Pada tahap awal diarahkan untuk menciptakan tenaga terampil sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap kampung. Pelayanan pendidikan dengan prinsip berbasis budaya dan alam lokal, sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelayanan pendidikan terus ditingkatkan guna meningkatkan kapasitas intelektual dan menciptakan kemandirian orang Papua.

b. Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan pengembangan kemandirian jangka panjang untuk meningkatkan kualitas manusia yang diarahkan untuk meningkatkan upaya kesehatan dengan memperkuat Puskesmas Plus dan jaringannya sebagai tempat pelayanan dan melatih/transfer ilmu kepada kader-kader kesehatan masyarakat. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan para tenaga kesehatan. Meningkatkan jumlah kader kesehatan di setiap kampung, dalam rangka mengembangkan kemandirian pelayanan kesehatan di kampung. Peningkatan ketersediaan dan pemerataan obat-obatan, sesuai dengan kasus gangguan kesehatan yang sering dialami masyarakat di kampung; Pengembangan obat-obatan tradisional sebagai alternatif pengobatan yang sesuai dengan budaya dan kearifan lokal; Perbekalan kesehatan diseluruh puskesmas serta jaringannya yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Perbaikan gizi masyarakat melalui penganekaragaman pangan dan pemanfaatan potensi pangan lokal di kampung-kampung. Pencegahan dan pemberantasan penyakit yang umum di derita di Papua antara lain Malaria, Paru, ISPA, Kolera, dan khususnya HIV/AIDS dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat; penyediaan sarana/fasilitas kesehatan terutama Puskesmas dan Posyandu ditingkatkan pelayanannya menjadi Puskesmas

Plus, dan perluasan fungsi Posyandu sebagai tempat pelayanan terpadu, tidak hanya mencakup aspek kesehatan. Manajemen sistem petugas dan kader kesehatan dilakukan secara terpadu dan terpusat di Puskesmas setiap kampung. Pemberdayaan masyarakat sebagai kader kesehatan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Untuk menciptakan kemandirian masyarakat Papua, pelayanan kesehatan selain upaya kuratif dan rehabilitatif perlu diberikan perhatian khusus dan peningkatan kualitas pelayanan promotif dan preventif dengan menggunakan perspektif ekologis, dengan meningkatkan kualitas alam sehingga meningkatkan kualitas kesehatan manusia.

c. Kependudukan

Keluarga merupakan unit terkecil yang merupakan pilar dalam pembangunan daerah. Untuk itu dilakukan upaya pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau dan bermutu bagi terwujudnya keluarga yang berkualitas. Selain itu dilakukan penataan persebaran dan mobilitas penduduk diarahkan dengan pengendalian migrasi masuk penduduk dari luar Papua. Dalam jangka pendek, migrasi dilakukan untuk mempercepat upaya mencapai kemandirian kampung. Persebaran dan mobilitas penduduk diatur secara seimbang sesuai dengan daya dukung alam. Pengaturan persebaran penduduk dilakukan melalui pembangunan di semua bidang dengan memperhatikan potensi wilayah, etnis dan budaya, agar terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat di kampung-kampung. Sistem administrasi kependudukan harus ditangani secara baik sehingga dapat menjadi input yang berarti bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta terjaminnya hak-hak penduduk dan perlindungan masyarakat Papua.

d. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peningkatan kualitas perempuan dan anak memberikan andil yang besar dalam peningkatan kualitas SDM. Untuk itu pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidup anak harus mendapat perhatian yang lebih tinggi pada berbagai bidang pembangunan. Disamping itu harus diturunkan secara berarti berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak serta penguatan kelembagaan dengan orientasi gender.

e. Pemuda

Pemuda sebagai aset pembangunan dimasa depan harus ditingkatkan peran dan partisipasinya dalam pembangunan. Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas terutama pada bidang IPTEK, ekonomi, sosial budaya dan politik. Disamping itu

pada bidang olah raga difokuskan pada peningkatan budaya olah raga dan prestasi olah raga.

2. Pemanfaatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

- a. Pengembangan IPTEK mencakup upaya penguasaan ilmu pengetahuan dasar dan terapan, pengembangan ilmu sosial dan humaniora bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu pengembangan teknologi dan pemanfaatan hasil penelitian untuk peningkatan kemandirian dan daya saing penduduk dengan memperhatikan nilai-nilai budaya, agama, etika, kearifan lokal serta daya dukung dan kelestarian lingkungan.
- b. Pengembangan IPTEK diarahkan pada penyediaan informasi dan teknologi untuk mendukung upaya pembangunan diberbagai bidang terutama ketahanan pangan, sumber energi, sektor produksi, pendidikan dan bidang kesehatan. Selain itu, pengembangan SDM IPTEK, peningkatan anggaran riset dan kebijakan riset lintas sektor. Pengembangan IPTEK tersebut merupakan kerjasama perguruan tinggi, berbagai lembaga penelitian dan dunia usaha pada tingkat daerah, nasional maupun internasional.
- c. Pengembangan IPTEK untuk sektor ekonomi diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kemanfaatan IPTEK daerah dalam rangka mendukung daya saing secara nasional dan global. Hal ini dilakukan melalui peningkatan penguasaan dan penerapan IPTEK secara luas dalam perwujudan sistem produksi, pengembangan lembaga penelitian yang memiliki kemandirian di dalam pembiayaan, perwujudan sistem pengakuan atas hasil temuan (royalty system, patent, HKI) dan kualitas produk (SNI, ISO), penerapan standar mutu yang mengacu pada sistem pengukuran, standarisasi, pengujian dan mutu, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana IPTEK.
- d. Pengembangan IPTEK sektor ekonomi diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan pemanfaatan IPTEK daerah bagi peningkatan produktivitas, melalui kebijakan dan regulasi, penyediaan sarana dan prasarana untuk pengembangan Iptek, mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu mengembangkan dan menyebarkan penerapan IPTEK. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan, serta pengembangan kelembagaan untuk mendorong keterkaitan sistem inovasi dalam pengembangan kegiatan usaha mandiri.

3. Pembangunan yang Merata dan Adil

Pembangunan yang merata dan adil adalah pembangunan berbasis kampung dengan prinsip kesetaraan pemenuhan kebutuhan hidup dan pencapaian kualitas hidup, dimana pemerintah sebagai fasilitator yang memberi peran utama bagi seluruh masyarakat Papua pada berbagai strata dan wilayah sehingga mendorong kemandirian masyarakat dan dapat menikmati secara langsung hasil pembangunan, meliputi :

- a. Penanggulangan kemiskinan diarahkan dengan pendekatan berbasis hak (*right based approach*) yang ditujukan kepada perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat dengan prinsip kesetaraan. Selain itu upaya penanggulangan kemiskinan akan dicapai melalui pendidikan dasar untuk semua; mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; menurunkan angka kematian anak; meningkatkan kesehatan ibu; memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya; memastikan kelestarian lingkungan hidup; membangun kemitraan global untuk pembangunan. Masyarakat harus ditingkatkan pemahaman tentang potensi dan jati dirinya sehingga menimbulkan kepercayaan diri untuk menyelesaikan persoalannya secara swadaya.
- b. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan kepada peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan perlindungan sosial. Disamping itu, perlu peningkatan penataan sistem pelayanan sosial maupun ketersediaan sarana pelayanan sosial. Pemerintah, memainkan peran sebagai fasilitator bagi percepatan pembangunan. Masyarakat harus mendapatkan aksesnya secara mudah dan cepat untuk peningkatan kualitas hidup setinggi-tingginya. Harus ada kebijakan pembangunan yang dapat mewujudkan kesejahteraan di seluruh wilayah Papua. Disamping itu, peningkatan perhatian terhadap wilayah-wilayah yang mengalami bencana maupun rawan bencana dengan mengembangkan sistem peringatan dini dan sistem penanggulangan kebencanaan, dengan mengutamakan pengetahuan masyarakat lokal tentang kebencanaan.
- c. Pendekatan pembangunan di kampung-kampung dititikberatkan pada pemberdayaan masyarakat, yang diarahkan melalui peningkatan kualitas peran dalam pembangunan agar dapat mandiri serta peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola aset-aset alam, sosial, dan aset fisik yang tersedia.
- d. Meningkatkan dan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah pada seluruh kampung di Papua, dengan memperkuat peran pemerintah dalam proses fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui: (a) meningkatkan daya inovasi dan kemandirian masyarakat untuk menciptakan sistem pelayanan prasarana dasar, salah satunya dengan meningkatkan fungsi POSYANDU sebagai lembaga

pelayanan mandiri masyarakat secara menyeluruh, yang meliputi aspek kesehatan, pendidikan dan berbagai aspek lain sesuai kebutuhan masyarakat; (b) menjamin ketersediaan dan kualitas pelayanan prasarana dasar terutama pelayanan pendidikan dan kesehatan, seiring dengan proses meningkatkan daya inovasi masyarakat. (c) pembangunan infrastruktur dasar untuk meningkatkan jangkauan layanan, dilakukan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan dan kemandirian lokal, dengan mengutamakan pada perluasan jangkauan informasi dan komunikasi.

- e. Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan kepada peningkatan kualitas manusia dan daya inovasi masyarakat, sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri dan tidak akan bermigrasi ke daerah lain. Arah kebijakan ini dilakukan melalui peningkatan keterampilan, peningkatan kesempatan kerja dan peluang berusaha dalam rangka mewujudkan kemandirian kampung dan peningkatan inovasi yang mendukung Pembangunan Berkelanjutan terutama penguatan masyarakat asli Papua.
- f. Pengembangan kapasitas pemerintah daerah diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan perangkat daerah dan kelembagaan masyarakat dalam penyelenggaraan Otonomi Khusus, agar dapat berperan serta secara optimal sesuai dengan kebutuhan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Organisasi didesain secara proporsional seefektif mungkin dengan prinsip hemat struktur kaya fungsi, sesuai dengan tujuan organisasi. Hubungan kelembagaan antara pemerintah daerah dan masyarakat dikembangkan sistem kemitraan baik dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu badan legislatif juga ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat menghasilkan produk-produk hukum maupun upaya-upaya pengawasan yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan yang berpihak kepada kebutuhan masyarakat terutama masyarakat asli Papua.
- g. Peningkatan kualitas aparat birokrasi dan pembangunan pada bidang aparatur diarahkan untuk menciptakan aparat birokrasi yang memiliki integritas, profesional, tanggap dan cepat dalam memberikan pelayanan publik untuk menghasilkan pemerintahan yang bersih dan bisa dipercaya. Untuk itu harus diciptakan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman bagi aparatur pemerintah tentang prinsip-prinsip ketata pemerintahan yang baik untuk menciptakan aparat birokrasi yang bebas dari KKN dibarengi dengan tindakan yang tegas dan tidak diskriminatif. Selain itu, harus diterapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih pada semua tingkatan.

- h. Pendekatan pembangunan perumahan rakyat di seluruh wilayah Papua, dilakukan dengan memberikan akses yang setara bagi masyarakat Papua, berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, kearifan lokal, penggunaan sumberdaya lokal dengan memperhatikan kondisi wilayah, tanpa merusak fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.
- i. Pembangunan Informasi dan Komunikasi dilakukan dengan pengembangan sarana dan prasarana layanan informasi dan sistem jaringan komunikasi ke seluruh wilayah dan sesuai dengan kelompok sasaran serta meningkatkan penyebaran dan pemanfaatan arus informasi. Hal ini menjadi prioritas untuk menghubungkan antara kampung-kampung di seluruh Papua.

II. Mewujudkan Kemandirian Budaya

Terciptanya kemandirian budaya adalah sangat penting dimana masyarakat Papua mampu menyikapi interaksi dengan budaya global secara percaya diri dan cerdas berdasarkan budaya lokalnya, serta mampu mengelola perubahan budayanya sehingga menjamin kestabilan sosial dan meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Papua sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

1. Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan kapasitas dan partisipasi kelembagaan agama guna membentuk masyarakat yang beriman, bertaqwa dan berbudi luhur yang menjadi kekuatan pendorong mencapai kemajuan dalam pembangunan, diarahkan melalui penyediaan tenaga pelayan keagamaan ke daerah-daerah terpencil, peningkatan pemahaman masyarakat tentang nilai dan norma ajaran agama dalam kehidupan kemasyarakatan serta pembangunan, penyediaan sarana dan prasarana keagamaan.
2. Pengembangan jatidiri juga dilakukan melalui pembangunan olahraga yang diarahkan pada peningkatan budaya dan prestasi olahraga dengan melakukan pembinaan olah raga secara dini dan terukur. Mendorong masyarakat untuk ikut secara aktif mendukung pemberdayaan olah raga terutama olah raga prestasi serta penyediaan sarana dan prasarana.
3. Budaya berprestasi dan inovatif terus dikembangkan agar mampu mengorganisir diri dalam memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kualitas hidup sesuai dengan kearifan lokal, alam dan lingkungannya, berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengembangan budaya berprestasi dan inovatif dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca dan menulis, pengembangan kreatifitas masyarakat, menerima perubahan dan mengarahkan budaya konsumtif masyarakat

menuju budaya produktif. Kreatifitas berkesenian tetap di dorong untuk mewujudkan keseimbangan aspek material, spiritual dan emosional.

III. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pengembangan Wilayah

Kemandirian ekonomi sangat berhubungan erat dengan pengembangan wilayah yang diarahkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua, arah kebijakan untuk perwujudan kemandirian ekonomi dan pengembangan wilayah adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Perekonomian dengan Menyiapkan Sarana dan Prasarana Ekonomi Berbasis Keunggulan Masing-masing Wilayah

Pembangunan perekonomian di Provinsi Papua didasari dengan penyiapan sarana dan prasarana pendukung dengan memperhatikan atau berbasis potensi masing-masing wilayah, melalui:

- a. Pembangunan ekonomi Provinsi Papua dikembangkan untuk memperkuat ekonomi daerah yang berbasis potensi masing-masing wilayah. Hubungan antar wilayah/kampung perlu didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar wilayah/daerah yang kokoh serta berkesinambungan. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan: mengelola secara berkelanjutan peningkatan produktivitas daerah melalui penguasaan, penyebaran, penerapan dan penciptaan IPTEK menuju perekonomian yang berbasis kemandirian lokal; mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi dan pemerintahan yang baik (good governance), serta mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan sesuai karakteristi/kondisi wilayah dan keunggulan daerah/wilayah, dengan memperhatikan adat-istiadat dan sosial budaya masyarakat Papua. Pembangunan ekonomi Provinsi Papua dikembangkan untuk memperkuat basis ekonomi daerah melalui pemanfaatan sumber daya daerah secara efisien dan berkelanjutan, menciptakan kebijakan dan regulasi serta mendorong Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) untuk berkembang dan berperan dalam pembangunan ekonomi. Hubungan antar wilayah/daerah perlu didorong dengan membangun keterkaitan dengan sistem produksi dan distribusi yang kokoh. Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan perwilayahan berdasarkan karakteristi/kondisi wilayah dan potensi masing-masing wilayah serta peningkatan produktivitas sumber daya ekonomi secara berkelanjutan, meningkatkan mutu produk dan menciptakan nilai tambah.
- b. Perekonomian dikembangkan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi rakyat berbasiskan kemandirian lokal dan kedaulatan ekonomi daerah, melalui penguatan

kemauan dan kemampuan masyarakat lokal dalam berinovasi dan memproduksi serta mengelola ekonomi lokal yang kuat dan mandiri, menjamin akses terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan pada masyarakat setempat serta mengembangkan jaringan dan informasi pasar lokal mengenai kebutuhan hidup, komoditas unggulan dan spesifik lokal tiap wilayah. Pengelolaan kebijakan perekonomian daerah perlu memperhatikan secara cermat dinamika globalisasi, komitmen daerah di berbagai even perjanjian ekonomi nasional dan internasional dengan mengutamakan kelompok masyarakat yang masih lemah, khususnya masyarakat asli Papua, menjaga kemandirian dan kedaulatan ekonomi daerah.

- c. Pembinaan, pemanfaatan SDA, peningkatan produksi, pengolahan, distribusi/pemasaran, permodalan, penyediaan sarana dan prasarana ekonomi yang berpihak kepada masyarakat lokal, khususnya masyarakat asli Papua, yang disertai dengan regulasi.
- d. Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai dinamika kebutuhan masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan modal sosial masyarakat dalam menyusun kerangka regulasi dan perijinan secara efisien, efektif dan non diskriminatif; mendorong berkembangnya modal sosial masyarakat, perlindungan konsumen, mendorong pengembangan kualitas produk dan jasa, merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan teknologi yang diarahkan untuk pemenuhan kecukupan kebutuhan lokal serta pengembangan ekonomi daerah dengan menciptakan sistem pengelolaan usaha kecil yang memperkuat basis ekonomi kampung.
- e. Peranan Pemerintah adalah sebagai fasilitator, regulator dan sekaligus sebagai katalisator pembangunan diberbagai bidang dalam mendorong terwujudnya sistem ekonomi lokal yang kuat dan mandiri sertaterjaganya sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar wilayah/kampung yang kokoh serta berkesinambungan.
- f. Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan kemandirian lokal yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, inovatif dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif dan prima agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh dan handal.
- g. Kebijakan pasar diarahkan untuk mendorong kemampuan masyarakat menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pekerjaan informal. Demikian pula terciptanya hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian industrial yang memuaskan semua pihak merupakan ciri-ciri

pasar kerja yang diinginkan. Selain itu, mendorong peningkatan kemampuan masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah (*value added*) yang tinggi untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan mewujudkan kemandirian, melalui pelatihan yang strategis untuk peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian integral dari investasi SDM. Kebijakan pasar kerja daerah diarahkan untuk mendorong terbukanya lapangan kerja (padat karya) dan meningkatnya kualitas angkatan kerja secara bertahap. Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui meningkatkan kualitas pendidikan (formal dan informal), menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha disemua sektor.

- h. Pengembangan investasi daerah diarahkan untuk mendukung terwujudnya kemandirian masyarakat secara berkelanjutan dan berkualitas dengan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pendukung yang sesuai dengan kasanah budaya setempat.
- i. Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah di sektor primer terutama sektor pertanian kehutanan, kelautan, dan pertambangan didorong agar mampu mencukupi kebutuhan skala kampung dan wilayah di Papua dengan mutu serta kualitas prima. Hal ini merupakan faktor strategis dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan ketahanan pangan lokal. Kebijakan ketahanan pangan masyarakat ditingkat rumah tangga diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan lokal melalui diversifikasi bahan pangan lokal. Program/kegiatan ini harus dilaksanakan melalui perencanaan yang baik dan sesuai dengan kearifan lokal Papua.
- j. Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah disektor pertanian, kehutanan dan kelautan untuk mencukupi kebutuhan skala kampung dan wilayah di Papua dijalankan dengan mengembangkan sistem produksi yang dinamis, efisien dan berkelanjutan. Diperlukan partisipasi aktif seluruh masyarakat, berdasarkan nilai budaya dan adat istiadat masyarakat. Kegiatan ini dilakukan melalui revitalisasi kelembagaan pada tingkat operasional meliputi lembaga keuangan, lembaga distribusi, optimalisasi sumber daya, dan pengembangan SDM yang berkualitas, yang bersinergi dan/atau terintegrasi dengan lembaga-lembaga adat dan kampung. Selain bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di perkampungan, serta dapat menciptakan diversifikasi perekonomian perkampungan yang pada gilirannya untuk meningkatkan kemandirian ekonomi daerah.
- k. Pembangunan dan pengembangan industri diarahkan untuk mewujudkan peningkatan industri lokal yang mampu mendorong perkembangan kemandirian ekonomi daerah. Struktur industri yang sehat dengan menghilangkan praktik-praktik monopoli melalui

prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik dan benar (*Good corporate governance*). Struktur industri di perkuat dengan menjadikan industri kecil dan menengah yang mandiri, di tingkat kampung dan wilayah, sebagai basis industri daerah yang sehat. Sehubungan itu diperlukan pola pembinaan yang tepat bagi usaha masyarakat, industri lokal, menengah dan koperasi melalui pelatihan, pendampingan dan perlindungan (afirmatif). Pengembangan kawasan strategis ekonomi berdasarkan potensi wilayah diarahkan untuk menjadikan industri lokal dan menengah menjadi basis industri daerah yang mandiri melalui diversifikasi produk industri hulu sampai hilir melalui efektivitas pengelolaan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu/KAPET).

- l. Pengembangan industri lokal dibangun dengan basis kekayaan SDA Propinsi Papua. Untuk itu pembangunan industri 20 tahun mendatang diarahkan untuk : (a) Pengembangan industri lokal yang mengelola SDA dengan mengutamakan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan; (b) Pengembangan industri lokal yang memperkuat kemampuan dan pembangunan jaringan interaksi, komunikasi, dan informasi antar wilayah; (c) Pengembangan industri lokal yang mampu merespon dinamika kebutuhan masyarakat dan pembangunan; (d) Pengembangan industri lokal yang memperkuat kemandirian daerah dan keterkaitan antar industri lokal ke depan; (e) Pengembangan industri lokal yang dapat mengintegrasikan industri hulu dan industri hilir. Untuk memperkuat perekonomian daerah, diperlukan pembangunan industri yang dapat menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal) yang sehat dan berkesinambungan untuk (a) diversifikasi produk industri hulu hingga hilir;(b) Penguatan hubungan antar industri lokal dalam bentuk kemitraan, serta penguatan hubungan antara industri pada sektor primer dan jasa dan dengan sektor sekunder dan sektor tersier; dan(c) Penyediaan sarana dan prasarana (transportasi, komunikasi, energi, teknologi; pengukuran, standarisasi, pengujian, dan pengendalian kualitas (metrology, sandardization, testing and quality - MSTQ); serta sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan tenaga industri.
- m. Perdagangan luar negeri Papua diarahkan untuk mendukung kemandirian perekonomian daerah agar mampu menghadapi ekonomi global. Diupayakan melalui : (a) Perkuatan posisi daerah di dalam berbagai kerja sama perdagangan nasional dan internasional untuk mengembangkan strategi daerah di dalam kemandirian ekonomi, pengembangan perkampungan dan perlindungan aktivitas perekonomian daerah dari praktik persaingan dan praktik perdagangan nasional dan internasional yang tidak sehat; (b) Pengembangan citra, standar produksi barang dan jasa yang berkualitas

internasional dan fasilitasi perdagangan internasional yang bernilai tambah tinggi yang berdampak pada kemandirian ekonomi daerah.

- n. Perdagangan antar pulau diarahkan untuk peningkatan pemenuhan kebutuhan hidup secara adil dan setara, sambil secara bertahap meningkatkan kemampuan produksi lokal, dan peningkatan pendapatan daerah, melalui produk-produk yang bernilai tambah tinggi untuk menghasilkan surplus perdagangan yang berdampak pada kemandirian ekonomi daerah.
- o. Perdagangan lokal diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi yang efisien dan efektif untuk menjamin kemandirian ekonomi untuk mewujudkan terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dalam harga yang dapat terjangkau oleh masyarakat secara adil dan merata serta sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, dengan: (a) Perkembangan kelembagaan perdagangan yang efektif dalam menjamin sistem distribusi yang efisien dan efektif dan perlindungan konsumen; (b) Terintegrasinya aktivitas perekonomian daerah dan terbangunnya kesadaran dan berbagai instrumen kebijakan yang mendukung penggunaan produk lokal, (c) Meningkatkan perdagangan antar wilayah/daerah dengan mengedepankan prinsip kecukupan kebutuhan hidup di tingkat lokal
- p. Pengembangan kepariwisataan diutamakan pada kegiatan ekoturisme yang bernilai tambah tinggi, sehingga secara efektif dan efisien dapat mendukung upaya pengembangan kemandirian ekonomi dengan dampak lingkungan dan budaya serendah mungkin. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan alam dan potensi daerah serta adat istiadat dan sosial budaya masyarakat Papua. Hal ini dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip ekoturisme secara sangat disiplin dengan tingkat inovasi yang tinggi, sehingga tidak membutuhkan pembangunan infrastruktur yang berdampak besar serta tidak menimbulkan degradasi nilai adat, budaya lokal dan modal sosial masyarakat.
- q. Pengembangan Koperasi dan UKM diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang berbasis kerakyatan, khususnya pemihakan kepada masyarakat asli Papua, dalam penyediaan barang dan jasa, kebutuhan masyarakat banyak, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat kemandirian perekonomian daerah. Pengembangan Koperasi dan UKM dilakukan melalui peningkatan daya inovasi dan kemampuan masyarakat lokal dalam kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap dinamika kebutuhan masyarakat, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi serta kemampuan berinovasi secara mandiri. Pengembangan Koperasi dan UKM secara

nyata akan berlangsung terintegrasi dengan penerapan berbagai arah kebijakan lainnya menuju pada kemandirian ekonomi daerah.

- r. Lembaga keuangan dikembangkan agar memiliki kemampuan untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas serta mampu memiliki daya tahan terhadap kemungkinan krisis melalui implementasi sistem jaringan pengaman lembaga keuangan di daerah, yang berjalan selaras dengan pengakuan dan fasilitasi terhadap sistem pertukaran tradisional yang telah dikembangkan oleh masyarakat asli Papua. Peningkatan kontribusi Lembaga Perbankan dan Keuangan Non Bank dalam pendanaan pembangunan, diarahkan untuk meningkatkan intermediasi masyarakat terhadap pemanfaatan fasilitas keuangan/perbankan, mengembangkan lembaga-lembaga penjamin keuangan dan pendampingan bagi masyarakat Papua terutama penduduk lokal. Dengan demikian, setiap jenis investasi (baik jangka pendek maupun jangka panjang) akan memperoleh sumber pendanaan yang sesuai dengan karakteristik jasa keuangan. Selain itu semakin beragamnya lembaga keuangan baik yang bersifat tradisional maupun non tradisional akan memberikan alternatif pendanaan lebih banyak bagi masyarakat di Tanah Papua, dengan mengedepankan pemihakan pada masyarakat asli Papua.
- s. Jasa infrastruktur dan keuangan, dikembangkan sesuai dengan kebijakan pengembangan ekonomi daerah agar mampu mendukung secara efektif peningkatan kemandirian ekonomi daerah dalam menghadapi ekonomi global dengan menerapkan sistem dan standar pengelolaan yang mampu mendorong peningkatan ketahanan serta nilai tambah bagi kemandirian perekonomian daerah untuk mendukung daya inovasi dan kemandirian masyarakat, penguasaan dan pemanfaatan teknologi daerah dan pengembangan keprofesian tertentu, serta mendukung kepentingan daerah dalam pengentasan kemiskinan dan pengembangan perekonomian di perkampungan yang selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan pemihakan pada masyarakat asli Papua.
- t. Pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, akuntabel dan bertanggungjawab, serta dapat menjamin efektivitas pemanfaatan dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah. Peningkatan kualitas pendapatan daerah dalam kaitannya dengan upaya peningkatan kualitas hidup dan kemandirian ekonomi didasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan: (a) secara bertahap pendapatan pemerintah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang berkelanjutan dan berdasarkan ekonomi lokal yang kuat serta investasi berbagai aset daerah yang selaras dengan pembangunan berkelanjutan dan keberpihakan pada masyarakat asli Papua, antara lain, sektor UKM dan industri hijau; (b) mengurangi

ketergantungan pada pendapatan yang bersumber dari retribusi terkait pelayanan pendidikan dan kesehatan, (c) mengurangi ketergantungan pada pendapatan daerah yang bersumber dari ekstraksi SDA yang tidak berkelanjutan dan investasi lahan skala luas maupun perdagangan bahan mentah, antara lain untuk mengurangi ketergantungan ekonomi daerah pada harga komoditas yang fluktuatif dan tidak berkelanjutan; (d) meningkatkan pendapatan dengan optimalisasi pemungutan pajak serta penerapan pajak progresif setinggi mungkin, kecuali di sektor UKM dan industri hijau. Pengembangan sistem pengelolaan aset finansial pemerintah daerah yang berkelanjutan melalui: (a) peningkatan efisiensi belanja, khususnya belanja aparatur, dengan tujuan seimbang dengan kemampuan memperoleh pendapatan yang berkelanjutan dan tidak tergantung pada ekstraksi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui; (b) mengutamakan penggunaan anggaran pemerintah pada investasi manusia (terutama kesehatan dan pendidikan), teknologi peningkatan kemandirian (sektor produksi, dalam konteks mencapai kecukupan material) dan kecukupan infrastruktur di kampung-kampung.

- u. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif, dengan mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan pemihakan pada masyarakat asli Papua, melalui sinkronisasi dan deregulasi peraturan, penguatan kapasitas kelembagaan, termasuk kelembagaan adat, serta penyederhanaan prosedur perizinan serta penegakan hukum dalam mendorong kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Upaya untuk mewujudkan hal ini adalah: (a) Memberikan jaminan pemenuhan hak-hak masyarakat lokal, pelestarian alam dan kepastian usaha melalui rencana penataan ruang yang berlandaskan ketepatan hukum dan perundangan serta pengendalian pelaksanaannya secara konsisten; (b) Menghapus ekonomi biaya tinggi dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan peran masyarakat lokal dalam ijin pemanfaatan ruang; (c) meningkatkan kemampuan masyarakat lokal untuk melakukan investasi mandiri (d) Sinkronisasi peraturan perundangan antar sektor berdasarkan prinsip kepastian hukum serta deregulasi dan debirokratisasi.

2. Infrastruktur

Dalam rangka pengembangan wilayah yang akan mendorong peningkatan kemandirian ekonomi daerah, harus didukung oleh infrastruktur yang dapat menghubungkan berbagai wilayah di Papua dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan alam Papua. Arah kebijakan pembangunan Infrastruktur adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan sarana dan prasarana yang secara kuantitas dan berkualitas ditujukan untuk: (a) Pengembangan sistem jaringan transportasi; (b) Pengembangan sarana layanan pos dan sistem jaringan telekomunikasi; (c) Pengembangan sistem jaringan prasarana energi dan tenaga listrik; (d) Pengembangan sistem pengelolaan sumberdaya air; (e) Pengembangan sistem jaringan prasarana perkotaan.
- b. Pengembangan Sistem Transportasi yang sesuai dengan alam dan yang menghubungkan antar kampung dalam wilayah dalam upaya mewujudkan kemandirian kampung dan memperkuat modal sosial. Pengembangan moda transportasi memanfaatkan infrastruktur alam. Pengembangan sistem transportasi terpadu meliputi upaya untuk: (a) Membuka akses hubungan antar kampung; (b) Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dan antar kampung; (c) Mendukung peningkatan pemanfaatan produk kampung dan pertukaran antar kampung; dan (d) Pengembangan hubungan antar wilayah dengan mengutamakan transportasi laut, udara, sungai dan penyeberangan sesuai dengan kebutuhan.
- c. Pemeliharaan ruas-ruas jalan pada jaringan jalan Provinsi yang sudah ada yang terpadu dengan jaringan transportasi Udara, Laut, Sungai dan Penyeberangan serta pengembangan jaringan transportasi darat melalui sistem Jaringan jalan dalam wilayah-wilayah yang terhubung dengan transportasi Udara dan/atau Laut dan/atau sungai/penyeberangan sesuai dengan kebutuhan, alam dan budaya masyarakat lokal.
- d. Pengembangan sistem jaringan transportasi angkutan sungai dan danau penyeberangan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka memfasilitasi kebutuhan transportasi antar wilayah dan antar kampung, sebagai bagian dari inovasi sistem jaringan transportasi yang memanfaatkan infrastruktur alam, material lokal dan hemat energi.
- e. Pengembangan sistem jaringan transportasi laut meliputi upaya untuk: (a) Memfasilitasi kebutuhan transportasi antar wilayah dengan memanfaatkan jalur pelayaran perintis yang sudah ada; (b) Meningkatkan kelancaran proses koleksi dan distribusi orang dan barang dalam rangka fasilitasi kegiatan ekonomi kampung dan antar wilayah yang sesuai dengan kebutuhan wilayah; dan (c) Mengembangkan transportasi laut yang memanfaatkan infrastruktur alam dan sumber energi yang tersedia secara alami. (e) Meningkatkan pengembangan sistem jaringan transportasi laut intern pulau Papua
- f. Pengembangan sistem jaringan transportasi udara meliputi upaya untuk: (a) Memantapkan fungsi bandara yang sudah ada, khususnya bandara-bandara perintis untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah yang tidak dapat dikembangkan jaringan transportasi darat (jalan atau sungai/danau) atau laut dengan wilayah lainnya, dalam

- rangka mengembangkan sistem transportasi terpadu.; (b) Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dalam lingkup Pulau Papua; (c) Mendukung pengembangan pariwisata di wilayah-wilayah potensi wisata, dengan tetap mempertahankan kealamiahan serta upaya pemeliharaan dan proteksi alam. dan (e) Menerapkan standar pelayanan dan keamanan penerbangan yang setinggi mungkin, dengan memanfaatkan teknologi termaju di tingkat global yang diterapkan sesuai dengan kondisi lokal.
- g. Pengembangan teknologi transpor sejalan dengan kebutuhan-kebutuhan kampung/wilayah dengan inovatif yang sesuai dengan ketersediaan bahan dan material serta prasarana alami termasuk ketersediaan energi, yang dapat dikelola oleh masyarakat secara mandiri.
- h. Pengembangan sarana layanan pos dan sistem jaringan telekomunikasi yang meliputi (a) Penyediaan prasarana sistem jaringan telekomunikasi yang proporsional di setiap wilayah; (b) Penyediaan sarana telekomunikasi yang sesuai dengan kebutuhan di kampung dan di wilayah; dan (c) Penyediaan operator telekomunikasi yang berkualitas yang dapat melayani kampung dan wilayah. Serta (d) Pemantapan efisiensi layanan Pos yang sesuai dengan kebutuhan.
- i. Pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana energi meliputi upaya untuk: (a) Memenuhi kebutuhan masyarakat dimulai dari skala lokal;(b) Memberikan dukungan yang optimal bagi pemanfaatan dan peningkatan produksi skala lokal; (c) Pengembangan teknologi sumber energi terbarukan dan sistem produksinya sesuai dengan ketersediaan infrastruktur alam dan karakteristik alam lokal di seluruh wilayah; dan (d) Pengembangan daya inovasi, keahlian dan ketrampilan masyarakat untuk dapat mengelola secara mandiri sistem produksi energi yang dikembangkan.
- j. Pengembangan sistem pengelolaan sumberdaya air meliputi upaya untuk: (a) Menjamin kelestarian fungsi sarana dan prasarana sumberdaya air melalui pengamanan kawasan-kawasan tangkapan air; (b) Menjamin ketersediaan dan penyediaan prasarana air baku sehingga terjamin kebutuhan air bersih bagi masyarakat di kampung-kampung dan menunjang produktivitas skala lokal; (c) Menanggulangi bencana alam yang terkait dengan air, diantaranya banjir, longsor dan kekeringan, dengan mengutamakan upaya proteksi dan restorasi alam ; dan (d) Mempertahankan kawasan lindung.
- k. Pengembangan sistem jaringan prasarana perkotaan meliputi: (a) Melakukan proteksi aset alam untuk menjamin kecukupan material air, udara dan tanah yang sehat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sarana dan prasarana dasar perkotaan yang terdiri atas air bersih, air limbah, persampahan, jalan kota, listrik dan telekomunikasi secara terpadu dalam rangka memantapkan fungsi

- kota; (b) pengelolaan sarana dan prasarana dasar yang terintegrasi antar wilayah; (c) Menjamin keberlanjutan pelayanan sarana dan prasarana dengan cara mengembangkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana berbasis masyarakat; dan (d) Mempertahankan kualitas lingkungan perkotaan dari ancaman pencemaran air, udara dan tanah.
- l. Pembangunan perkotaan diarahkan untuk mengembangkan prasarana dan sarana dasar perkotaan, minimal meliputi 7 (tujuh) aspek yaitu jalan kota, jaringan air minum, jaringan drainase, jaringan air limbah (sewerage), persampahan, jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi. Penataan Ruang, dan pelaksanaan pembangunan supaya didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota yang terdiri atas RDTRK dan RTRK. Setiap rencana tata ruang yang telah disusun harus segera memiliki penetapan hukumnya dalam bentuk Peraturan Daerah, sehingga menjadi alat pengelolaan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota sesuai dengan fungsi ruang secara efektif dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
 - m. Pembangunan perkotaan harus memiliki prinsip-prinsip berikut a) dilakukan secara demokratis oleh seluruh stake holders kota; b) pemanfaatan sumberdaya perkotaan secara lebih efisien yang akan menjamin keseimbangan lingkungan perkotaan yang baik dan berkelanjutan; c) program pembangunan harus bertumpu pada budaya lokal yang spesifik untuk masing-masing individu kota, sehingga memiliki ketahanan dan kota yang berkembang atas landasan budaya dan mempunyai jati diri yang mantap dalam menghadapi globalisasi; d) pembangunan perkotaan harus mencerminkan keadilan (socially justice), yang terejawantahkan dari dalam mekanisme dan kapasitas pelayanan perkotaan terhadap masyarakat kota, dimana yang mempunyai akses yang sama pada fasilitas pelayanan perkotaan; dan e) program pembangunan perkotaan harus selalu didudukkan dalam kerangka wilayah yang lebih luas maupun nasional, sehingga pembangunan perkotaan akan meningkatkan produktivitas perkotaan dalam kerangka pengembangan ekonomi perkotaan dan sekaligus ekonomi wilayah yang lebih luas.
 - n. Pembangunan perkotaan dan infrastruktur didorong untuk dilaksanakan melalui pola kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (public-private-community partnership). Kondisi ini memperlihatkan adanya penguatan peran swasta dan masyarakat luas dalam pembangunan wilayah dan kota. Peran pemerintah secara bertahap dilakukan pengalihan bukan lagi sebagai penyedia (provider) prasarana dan sarana permukiman, akan tetapi cenderung mengarah pada peran sebagai pendorong dan penggerak pembangunan (enabler), yang dilakukan oleh komponen-komponen dalam masyarakat.

3. Terwujudnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

- a. Sinkronisasi perangkat peraturan dan perundangan pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan menerbitkan peraturan daerah sebagai implementasi UU No. 21 tahun 2001.
- b. Pemetaan ruang wilayah dengan sinkronisasi wilayah adat masyarakat (hak ulayat) yang dilegalisasi dengan perundangan dan penataan serta pemanfaatan ruang sesuai fungsi peruntukan dan daya dukung. Fungsi lindung kawasan dipertahankan 50 % harus terpenuhi dengan mengintegrasikan antara fungsi lindung dan budaya sehingga hak masyarakat adat dapat terjamin.
- c. Menetapkan model pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup berbasis masyarakat dan berdasarkan prinsip pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan SDA yang berkelanjutan.
- d. Memulihkan dan mengembalikan lingkungan rusak kepada fungsinya semula untuk meningkatkan daya dukungnya.
- e. Menetapkan indikator lingkungan sebagai keberhasilan pembangunan yang dipatuhi dan terkoordinasi antar semua instansi pelaku pembangunan.

4. Pengembangan Wilayah

- a. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang ditandai dengan pemerataan pembangunan diseluruh wilayah dengan tetap dalam kerangka pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Kondisi ini dapat diwujudkan dengan upaya menjadikan kebijakan penataan ruang menjadi bagian yang integral dari kebijakan pembangunan secara keseluruhan. Upaya ini dapat diwujudkan melalui a) Rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana tata ruang (RTR) kawasan harus disusun dengan sebaik-baiknya dan harus memiliki kekuatan hukum; b) pemanfaatan ruang harus sesuai dengan rencana tata ruang serta dilaksanakannya pengendalian pemanfaatan ruang atau penegakan hukum (law enforcement) secara efektif; c) peningkatan pemahaman kebijakan penataan ruang dan rencana tata ruang; d) peningkatan partisipasi stake holders; dan e) peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah terutama menyangkut koordinasi antar instansi berkaitan dengan kebijakan penataan ruang.
- b. Masyarakat di Kawasan Perbatasan, Pendekatan pembangunan wilayah perbatasan mengutamakan pendekatan kesejahteraan dan ketentraman. Kawasan perbatasan merupakan cermin kemajuan masyarakat suatu bangsa serta merupakan pintu masuk dan lalu lintas barang dan jasa antar bangsa, maka prioritas diberikan pada aktifitas ekonomi dan perdagangan. Selain itu pada wilayah perbatasan yang tertinggal dan terpencil harus didukung dengan pelayanan kebutuhan dasar, fasilitas pelayanan

sosial, sarana dan prasarana perhubungan, informasi dan telekomunikasi. Pemerintah harus merubah cara pandang menjadi outward looking sehingga pembangunan kawasan perbatasan negara mendapatkan perhatian yang secukupnya. Pembangunan kawasan perbatasan harus mampu menyeimbangkan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dan pendekatan keamanan (security approach). Untuk mengembangkan kawasan perbatasan dilakukan melalui upaya-upaya a) PLB dan PPLB harus dapat berfungsi secara efektif; b) peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola kawasan perbatasan; c) peningkatan aksesibilitas kawasan perbatasan, terutama dengan pengembangan prasarana perhubungan di sepanjang garis perbatasan, yang bertujuan untuk meningkatkan mobilitas pengamanan wilayah dan utilitas untuk menumbuhkan rasa tenang dan kesejahteraan masyarakat; dan d) pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di sepanjang kawasan perbatasan, minimal 1 (satu) kawasan di setiap kabupaten/kota sepanjang kawasan perbatasan.

- c. Pembangunan dilaksanakan untuk mewujudkan keseimbangan antara pembangunan wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan. Pembangunan perkotaan harus diupayakan dalam konteks pembangunan wilayah yang luas. Pembangunan perkotaan harus dikaitkan dengan wilayah-wilayah sekitar perkotaan (hinterland) yaitu wilayah perdesaan. Pembangunan prasarana dasar harus mampu menyentuh wilayah perdesaan sehingga sumberdaya di wilayah perdesaan tidak mengalir ke wilayah perkotaan.
- d. Pembangunan harus ditujukan untuk mengurangi, meminimalkan dan meniadakan kesenjangan antar wilayah. Upaya ini dilaksanakan dengan menjadikan kebijakan pembangunan keseluruhan. Rencana Tata Ruang wilayah provinsi (RTRWP) Papua harus menjadi payung bagi pengambilan kebijakan pembangunan sektor, pembangunan wilayah maupun pemanfaatan ruang.
- e. Pemekaran wilayah pada tingkat kelurahan, kampung, distrik, kabupaten/kota dan provinsi merupakan hal yang penting dalam rangka memperpendek rentang kendali pemerintahan guna peningkatan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun Pemekaran kabupaten/kota dan provinsi harus dilakukan dengan kehati-hatian tinggi dan didasari dengan kajian yang cermat yang memperhatikan kesatuan sosial budaya, kesiapan SDM dan kemampuan ekonomi serta perkembangan dimasa datang dengan persetujuan Majelis rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

IV. Mewujudkan Kemandirian Politik

1. Mewujudkan Masyarakat Yang Demokratis

Pemahaman dan penghayatan demokrasi serta transparansi akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan memaksimalkan potensi masyarakat dalam menentukan sendiri arah dan kebijakan pembangunan serta mengontrol penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Masyarakat yang demokratis merupakan landasan penting untuk tercapainya masyarakat yang mandiri. Untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis dilakukan dengan menguatkan kelembagaan sosial dan politik; memperkuat peran masyarakat; melaksanakan tata pemerintahan yang terdesentralisasi pada tingkat distrik dan kampung; meningkatkan partisipasi dan transparansi; mendorong peningkatan peran media massa dan pers dalam pembangunan. Seluruh arah kebijakan peningkatan kemandirian politik dilaksanakan dengan mengutamakan pemihakan kepada masyarakat asli Papua.

- a. Penataan proses politik yang diarahkan pada proses pengambilan keputusan yang diwujudkan dengan : meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka melalui upaya sosialisasi dan pendidikan politik secara berkesinambungan, terutama pada masyarakat Asli Papua; menciptakan dan melembagakan Komunikasi Politik sehingga kepentingan orang asli Papua dapat diartikulasikan dan diagregasikan dalam pembuatan/pengambilan keputusan serta pelaksanaan dari keputusan tersebut; mewujudkan komitmen terhadap pentingnya kebebasan media massa, kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat secara bertanggungjawab.
- b. Penguatan kelembagaan sosial dan politik pada proses pelembagaan demokrasi dilakukan dengan: mempromosikan dan mensosialisasikan konstitusi, hukum, kelembagaan agama, adat, perempuan dan politik bagi sebuah proses demokratisasi; pengaturan yang sah tentang keberadaan kelembagaan adat ditingkat kampung, distrik, kabupaten/kota dan provinsi; menata hubungan kelembagaan adat dengan kelembagaan politik; memberikan peran dan ruang-ruang dalam pengambilan keputusan adat; melaksanakan pemerintahan yang terdesentralisasi pada tingkat distrik dan kampung; dan menciptakan pelembagaan demokrasi untuk mendukung konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan.
- c. Dalam rangka melaksanakan Undang-undang No.21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua secara murni dan konsekuen untuk mencapai tujuan dari amanat otonomi khusus, dilakukan dengan mengembangkan lembaga-lembaga formal dan informal, peraturan daerah provinsi (Perdasi) dan peraturan daerah khusus (Perdasus) serta instrumen pemerintahan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-undang No.21 tahun 2001.

- d. Penataan peran masyarakat diarahkan pada : pembentukan kemandirian dan kedewasaan masyarakat serta penataan fungsi-fungsi positif dari pranata-pranata kemasyarakatan dan lembaga politik untuk membangun kemandirian masyarakat dalam mengelola berbagai potensi konflik sosial; pelaksanaan perencanaan partisipatif, sebagai bagian mendasar dari tata pemerintahan yang baik (good governance), dimana setiap warga negara, khususnya orang asli Papua, dapat menentukan sendiri arah dan kebijakan pembangunan.
- e. Pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif, yudikatif dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi masyarakat asli Papua.
- f. Peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik yang dilakukan dengan: pengenalan hak dan kewajiban politik masyarakat, peningkatan peran media massa dan pers; menjamin hak masyarakat untuk berpendapat dan mengontrol jalannya pemerintahan dan pembangunan secara demokratis; mewujudkan pemerataan informasi dengan mendorong lahirnya media-media lokal yang independen; menciptakan dan memanfaatkan jaringan teknologi informasi dan komunikasi agar mampu memberikan informasi tentang pembangunan ke seluruh masyarakat.

2. Mewujudkan Masyarakat Papua Aman dan Damai yang Berdasarkan Hukum

Potensi terganggunya ketentraman dan ketertiban disebabkan oleh kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta masih adanya sebagian masyarakat yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Potensi konflik horisontal yang banyak terjadi di daerah lain akan meresahkan dan berakibat pudarnya rasa aman di masyarakat. Terjaminnya ketentraman dan ketertiban akan menciptakan rasa aman bagi masyarakat, merupakan jaminan bagi terlaksananya pembangunan.

- a. Pembangunan agama diarahkan untuk menciptakan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan saling menghargai, rasa percaya dan harmonisasi antar kelompok sehingga tercipta kehidupan toleransi dan tenggang rasa di masyarakat. Disamping itu dengan keberagaman etnik yang ada di masyarakat, pembangunan budaya diarahkan untuk menghargai nilai budaya masing-masing etnik sebagai suatu nilai keunggulan Provinsi Papua.
- b. Mengembangkan budaya politik yang diarahkan pada proses penanaman nilai-nilai berbangsa dan bernegara melalui: penciptaan kesadaran dan penanaman nilai-nilai tentang persamaan, penghormatan, berbangsa dan bernegara melalui berbagai

- wacana dan media serta peningkatan kesadaran tentang bela negara melalui sarana formal maupun informal.
- c. Penerapan dan penegakan hukum dan HAM dilaksanakan secara tegas dan profesional dengan tetap berdasarkan pada penghormatan HAM, pewujudan keadilan dan kebenaran dengan proses yang transparan dan terbuka dalam rangka mewujudkan ketertiban serta memantapkan stabilitas daerah.
 - d. Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi yang diarahkan dengan memberikan akses terhadap segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, memberikan akses dalam proses pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan serta membentuk perilaku masyarakat yang mempunyai rasa memiliki dan taat hukum. Peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum, harus dibarengi dengan dukungan pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat dengan cepat dan dengan biaya yang murah.
 - e. Penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur diarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, pemberian sanksi bagi aparatur yang menyalahgunakan wewenang, peningkatan pengawasan baik internal, fungsional dan pengawasan masyarakat serta peningkatan etika birokrasi.

V. Mewujudkan Kemandirian Masyarakat Asli Papua

Keberpihakan kepada masyarakat asli Papua adalah roh dari seluruh RPJP ini. Pada seluruh aspek kemandirian telah tercakup arah kebijakan yang bertujuan membangun Papua yang mandiri di mana masyarakat asli Papua berperan utama pada pembangunan Papua. Bagian Kemandirian Masyarakat Asli Papua ini berisi berbagai arah kebijakan khusus, yang ditujukan untuk mempercepat proses transisi menuju Papua yang mandiri, di mana masyarakat asli Papua yang berperan utama. Upaya transisi ini dibutuhkan, mengingat saat ini masih terdapat kondisi struktural yang menghambat masyarakat asli Papua untuk mengambil peran utama dalam pembangunan Papua.

Kondisi masyarakat asli Papua yang sebagian besar berada di kampung-kampung belum sepenuhnya tersentuh oleh pembangunan, mengakibatkan terjadinya kesenjangan pada hampir semua sektor kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kesejahteraan dan sosial politik. Oleh karena itu untuk mencapai kemajuan, keseimbangan dan kesetaraan dengan masyarakat lainnya di Indonesia, diperlukan langkah-langkah yang strategis untuk meletakkan kerangka dasar yang kokoh bagi Kemandirian masyarakat asli Papua.

Kemandirian Masyarakat Asli Papua diwujudkan melalui pengakuan eksistensi nilai-nilai adat dan budaya asli Papua, peningkatan kualitas hidup dan kemampuan masyarakat asli Papua dalam mengambil peran dalam pembangunan, percepatan penguatan ekonomi yang selaras dengan kearifan tradisional masyarakat asli Papua, pengembangan dan peningkatan inovasi ilmu pengetahuan berbasis budaya asli Papua dan sumberdaya lokal serta penguatan politik masyarakat asli Papua.

1. Pengakuan Eksistensi Nilai-Nilai Adat dan Budaya Asli Papua

Pengakuan eksistensi nilai-nilai adat dan budaya, diarahkan melalui :

- a. Pembangunan dan pengembangan kelembagaan adat, nilai-nilai adat dan budaya asli Papua dalam kebijakan, regulasi serta kegiatan pembangunan untuk mewujudkan karakter dan jati diri masyarakat asli Papua sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Untuk mewujudkannya dilakukan melalui Pengakuan hak ulayat masyarakat asli Papua untuk dikelola berdasarkan kearifan-kearifan lokal sehingga mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat pemilik hak ulayat; mengembangkan peran adat dalam pembangunan serta pembinaan lembaga-lembaga adat untuk menjadi mitra dalam pembangunan; pengakuan dan fasilitasi terhadap sistem pertukaran tradisional maupun berbagai bentuk ekonomi tradisional lainnya serta pelembagaan hukum dan peradilan adat melalui regulasi sehingga akan terbentuk hubungan yang adil dan harmonis di antara masyarakat adat di seluruh Papua. Sedangkan pembangunan karakter dan jati diri masyarakat asli Papua merupakan kombinasi antara nilai-nilai adat Papua yang religius, kebersamaan dan persatuan serta nilai modern yang universal, akan dilaksanakan melalui pengembangan nilai-nilai adat sesuai dengan potensi masyarakat adat dan menerapkan nilai-nilai tersebut untuk pembangunan. Pelestarian nilai-nilai budaya, menggali identitas kultural masyarakat mencakup pengembangan seni tari, seni ukir dan seni rupa; makanan lokal, kearifan lokal, serta pengembangan nilai-nilai budi pekerti berdasar adat istiadat, yang diikuti dengan peningkatan kesadaran dan rasa kebanggaan masyarakat tentang kekayaan dan nilai budaya asli Papua dalam berbagai aspek kehidupan Papua. Selain itu pembangunan jati diri juga dilaksanakan melalui pembangunan olahraga. Pembinaan olahraga secara dini, mendorong pemberdayaan masyarakat dalam olahraga serta, pembinaan olahraga unggulan yang mengarah pada prestasi.
- b. Menempatkan hak ulayat masyarakat adat dalam kebijakan penataan ruang, yang bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai sosial budaya atas lingkungan hidup masyarakat. Arah kebijakan ini dicapai melalui 2 (dua) upaya pokok yaitu pertama, percepatan pemetaan tanah ulayat untuk mendapatkan kesepakatan di antara

masyarakat adat serta memiliki kekuatan hukum; dan kedua, pengembangan sistem kebijakan dan kelembagaan perlindungan aset alam dan akses masyarakat terhadap alam di kawasan adatnya, yang diikuti dengan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya melestarikan aset alam di wilayah adat mereka.

- c. Perlindungan dan penerapan prinsip kehati-hatian budaya pada pembangunan bagi masyarakat yang belum banyak bersentuhan dengan budaya luar. Prinsip kehati-hatian budaya adalah sebagai bentuk upaya untuk memastikan masyarakat tidak mengalami gegar budaya dalam interaksinya dengan berbagai budaya luar. Prinsip ini diterapkan berdasarkan semangat penghormatan terhadap semua bentuk kebudayaan serta hak setiap masyarakat untuk berkembang secara alami dan menentukan sendiri arah pembangunannya.
- d. Percepatan penyelesaian seluruh aturan turunan dari UU OTSUS agar pengakuan terhadap nilai adat dan budaya asli Papua secepatnya mendapatkan posisi yang jelas dan kuat secara nasional.

2. Percepatan Peningkatan Kualitas Hidup dan Kemampuan Masyarakat Asli Papua Untuk Berperan Pada Pembangunan

Untuk mempercepat peningkatan kualitas hidup dan kemampuan masyarakat asli Papua, diarahkan melalui :

- a. Memprioritaskan akses bagi orang asli Papua pada berbagai sumberdaya dan fasilitas pembangunan, yang diarahkan melalui pengembangan basis hukum kebijakan afirmatif berdasarkan UU otsus dan kelembagaannya di kampung; pengembangan kompatibilitas sistem formal dengan budaya orang asli Papua; menghilangkan hambatan bagi masyarakat asli Papua untuk mengakses fasilitas peningkatan kualitas hidup, mengambil peranan kepemimpinan dalam pembangunan ilmu pengetahuan modern yang bermanfaat, dengan pengembangan kader pendidikan, kader kesehatan dan pendamping di kampung-kampung.
- b. Mengembangkan pembangunan berbasis kampung yang mampu menjalankan pembangunan kampung secara simultan, dengan menekankan pada pengembangan kemandirian dan daya inovasi masyarakat di semua kampung dalam meningkatkan kualitas hidup berdasarkan sumberdaya lokal di sekitarnya, sehingga keterisolasian tidak menjadi hambatan dalam pembangunan. Sistem penghargaan inovatif dikembangkan untuk mendorong kemandirian dan daya inovasi masyarakat, hal ini dikembangkan dengan mengkombinasikan mekanisme yang sudah berjalan saat ini dalam pemerintahan, dengan sistem tradisional yang bersifat *non cash* dan diperkuat

dengan penerapan berbagai inovasi sistem ekonomi *non cash* modern di tingkat global. Mekanisme penghargaan ini perlu dikaitkan dengan prioritas akses masyarakat asli Papua pada berbagai sumberdaya dan fasilitas pembangunan, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan dan aspek peningkatan kualitas hidup lainnya.

3. Percepatan Penguatan Ekonomi Yang Selaras Dengan Kearifan Tradisional Masyarakat Asli Papua

Perekonomian Provinsi Papua yang merupakan bagian dari perekonomian nasional dan global diupayakan untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat asli Papua, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemberdayaan ekonomi orang asli Papua diarahkan pada :

- a. Menjamin akses bagi masyarakat, untuk memperoleh sumber daya ekonomi;
- b. Melindungi dan mengembangkan sistem ekonomi masyarakat lokal masyarakat asli Papua meliputi sistem pertukaran, pengelolaan sumberdaya serta berbagai bentuk ekonomi tradisional lainnya.
- c. Memperkuat kemampuan dan kelembagaan masyarakat lokal untuk mengelola sistem produksi, konsumsi dan infrastruktur secara mandiri
- d. Pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan berkelanjutan
- e. Percepatan Pemenuhan sarana dan prasarana dasar di wilayah distrik dan kampung diarahkan pembangunan jaringan transportasi antar kampung, pengembangan tenaga listrik terbarukan dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi bagi masyarakat asli Papua
- f. Pengembangan wilayah diarahkan pada pembangunan berbasis kampung dengan prinsip kesetaraan pemenuhan kebutuhan hidup dan pencapaian kualitas hidup di seluruh wilayah Papua, sehingga mewujudkan pelayanan pemerintahan yang lebih mampu mendorong percepatan kemandirian masyarakat asli Papua. Pembangunan berbasis kampung harus sesuai dengan karakteristik biofisik dan budaya lokal.

4. Pengembangan Dan Peningkatan Inovasi Ilmu Pengetahuan Berbasis Budaya Asli Papua Dan Sumberdaya Lokal

Berdasarkan prinsip berkelanjutan, secara progresif sehingga masyarakat kampung secara cepat dapat menerapkannya tanpa menimbulkan gegar budaya, melalui (1) Pengembangan riset tentang teknologi, sistem pemerintahan dan perekonomian berbasis budaya asli Papua, untuk memperoleh dasar ilmiah dari berbagai kearifan lokal

masyarakat yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan dan pencapaian kualitas hidup di kampung-kampung; (2) Pengembangan sistem pendidikan dan transfer ilmu pengetahuan yang dapat dijalankan secara mandiri oleh masyarakat di semua kampung; dan (3) Pengembangan sistem kelembagaan riset inovasi berbasis kampung serta kemampuan masyarakat kampung untuk mengelola riset dan pengembangan secara mandiri.

5. Penguatan Politik Orang Asli Papua

Penguatan politik orang Asli Papua, diarahkan melalui :

- a. Meningkatkan kesadaran politik dan peran aktif orang asli Papua sehingga dapat berperan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- b. Memperkuat peran lembaga adat dalam pemerintahan dan pembangunan, dengan mengharmonisasi berbagai regulasi dan sistem pemerintahan yang tumpang tindih dengan pemerintahan adat.
- c. Pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif, yudikatif dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi kultural masyarakat asli Papua. MRP merupakan perwakilan dari semua suku di Papua, dan perlu diperkuat wewenangnya untuk menghasilkan dan memutuskan rancangan peraturan.

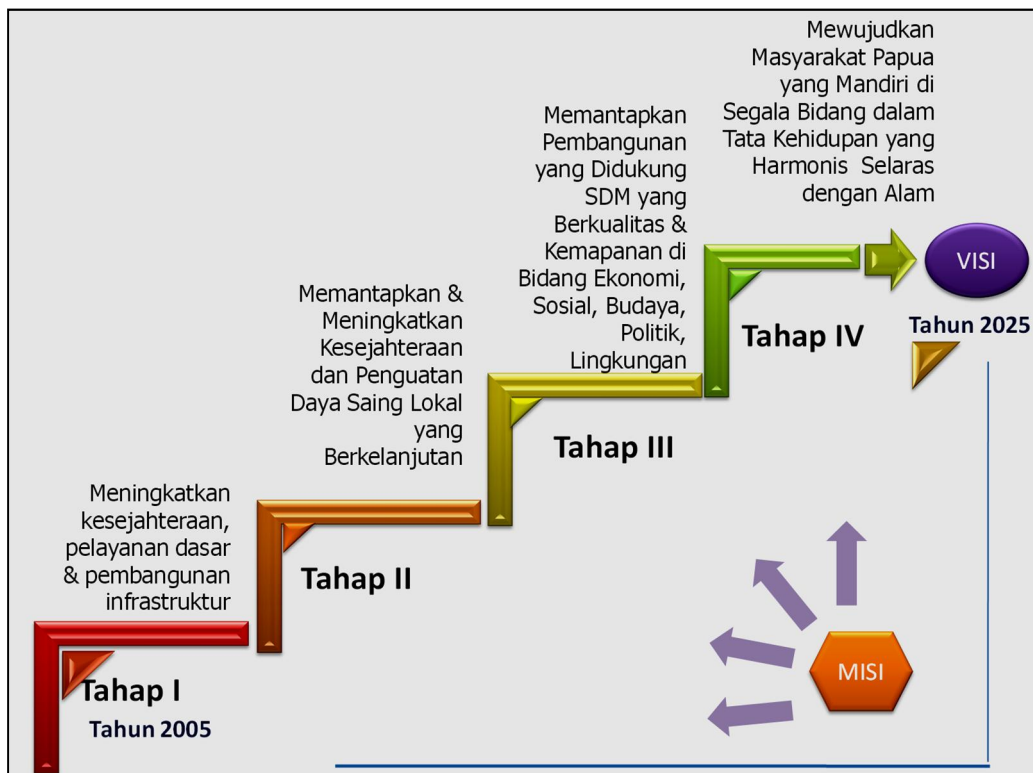
5.2.2 Tahapan Pembangunan Jangka Panjang

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Papua 2005-2025 dikelompokkan menjadi 4 (empat) tahapan, yaitu tahap I, II, III dan IV. Arah kebijakan pembangunan disusun dalam tahapan pembangunan dan prioritas setiap tahapan. Prioritas ini mencerminkan urgensi permasalahan pembangunan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan fokus atau tema pembangunan dalam setiap tahapan memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka panjang Provinsi Papua. Tema tersebut untuk memudahkan pemahaman bahwa satu tahapan ke tahapan berikutnya saling terkait dan menjadi satu kesatuan yang utuh selama masa 20 tahun. Arah kebijakan pembangunan disusun untuk sektor-sektor paling prioritas yang harus diperhatikan dan saling terkait dalam periode 20 (dua puluh) tahun.

Atas dasar tema pembangunan inilah disusun arah kebijakan lebih jelas sehingga RPJPD memiliki keselarasan dengan pentahapan dalam RPJPN. Selanjutnya, tahapan-tahapan dimaksud dijadikan sebagai dasar dan disesuaikan dengan pentahapan RPJMD. Tema pembangunan yang diterjemahkan ke dalam arah kebijakan pembangunan lima

tahunan (dan sasaran pokoknya) ini yang menjadi acuan calon Gubernur dan wakil Gubernur dalam merumuskan visi dan misi. Dengan demikian, siapapun kepala pemerintahan Provinsi Papua, kebijakan pembangunan selama periode kepemimpinannya akan tetap mengarah pada visi dan misi pembangunan jangka panjang yang telah dituangkan dalam RPJPD ini. Sasaran pokok pembangunan harus dituangkan dalam dokumen RPJMD periode terkait. Agenda atau tema pembangunan tiap periode pembangunan dapat dilihat pada gambar 5.1 berikut ini:

Gambar 5.1 Tahapan Pembangunan Jangka Panjang



Sebagaimana terlihat dalam gambar diatas, pencapaian visi dan misi pembangunan 20 tahun Provinsi Papua ditempuh melalui 4 (empat) tahapan besar.

Prioritas Pembangunan Tahap I (2006 – 2011)

Meningkatkan Kesejahteraan, Pelayanan Dasar dan Pengembangan Infrastruktur

Periode pembangunan tahap I sudah dilaksanakan dan dituangkan dalam RPJMD Provinsi Papua tahun 2006-2011 dengan fokus pada penataan kembali pemerintahan

daerah, pembangunan Papua yang aman, damai dan sejahtera serta peningkatan dan percepatan pembangunan infrastruktur yang ditujukan untuk mewujudkan Papua baru.

Kemandirian sosial dan budaya ditandai dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia Papua; meningkatnya derajat kesehatan dan peningkatan usia harapan hidup; meningkatnya kualitas gizi masyarakat, meningkatnya pembangunan di tingkat kampung; meningkatnya pemenuhan rumah yang layak huni; meningkatnya peran kualitas perempuan dalam pembangunan, meningkatnya akses informasi dan telekomunikasi melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, perbaikan dan kecukupan pangan dan gizi; revitalisasi perekonomian rakyat yang berdaya saing; pemberdayaan perempuan. Selain itu pelaksanaan pembangunan dimulai dari kampung dengan menerapkan program Respek. Program-program di bidang kependudukan untuk membangun keluarga kecil yang sejahtera juga dikembangkan termasuk upaya hidup berdampingan dengan alam dan memelihara lingkungan hidup untuk menghindari pencemaran dan perusakan lingkungan. Untuk menjamin terciptanya dan terpeliharanya kedamaian dilakukan dengan membina dan memelihara kehidupan yang selaras dan berpusat pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang dilakukan bekerja sama dengan semua lembaga keagamaan. Selain itu pembangunan IPTEK yang tepat guna juga dikembangkan sebagai sarana pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Didukung oleh penyediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, peningkatan prasarana telekomunikasi untuk dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah terpencil.

Papua yang mandiri dalam bidang ekonomi dan pengembangan wilayah ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkesinambungan; meningkatnya pembangunan struktur perekonomian yang kokoh; meningkatnya pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan; meningkatnya pemerataan pendapatan; meningkatnya ketersediaan moda transportasi; meningkatnya sarana dan prasarana dasar; meningkatnya pelaksanaan kegiatan pembangunan berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, peningkatan pelestarian lingkungan, manfaat dan keadilan dengan memperhatikan arahan rencana tata ruang wilayah; meningkatnya infrastruktur ekonomi dan pasar yang mendorong berkembangnya sektor riil dan percepatan pertumbuhan ekonomi melalui program turun kampung untuk menjangkau pembangunan semua kampung terutama untuk kelompok masyarakat miskin dan menjadikan mereka sebagai subyek pembangunan melalui pemberdayaan dan pengembangan perekonomian rakyat berbasis sumber daya lokal yang berorientasi pasar. Mengembangkan program-program pelatihan ketrampilan kerja dan

pengembangan program pembinaan pengusaha kecil dan menengah untuk semakin mandiri dan mampu bersaing. Pembangunan prasarana perhubungan/transportasi darat, laut, dan udara untuk membuka keterisolasian dan menghubungkan pusat-pusat ekonomi dan perdagangan.

Kemandirian politik ditandai dengan meningkatnya nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat, meningkatnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*), penerapan UU Nomor 21 tahun 2001 secara nyata dan konsekuen sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat Papua, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat, serta meningkatnya ketentraman wilayah melalui reformasi birokrasi; mendorong peran serta lembaga politik, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga adat dalam pembangunan; pembinaan masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban secara swadaya dan swakarsa; pembinaan kesadaran hukum dan taat hukum

Kemandirian masyarakat asli Papua ditandai dengan meningkatnya pengakuan eksistensi nilai-nilai adat dan budaya asli Papua serta hak-hak masyarakat adat; meningkatnya realisasi pemberian kewenangan, peran dan tanggung jawab bagi masyarakat asli Papua dalam pengambilan keputusan untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam kerangka NKRI melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan; peningkatan kualitas perempuan dan anak asli Papua; pemenuhan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat Papua; pemberdayaan masyarakat asli Papua di kampung, pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat asli Papua. Pemberdayaan ekonomi orang asli Papua dicapai melalui pembangunan keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pemasaran secara berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat asli Papua, mendorong pembangunan prasarana dan sarana terpadu yang mendukung pelayanan dasar sosial dan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan berkelanjutan.

Prioritas Pembangunan Tahap II (2012 – 2017)

Memantapkan dan Meningkatkan Kesejahteraan dan Penguatan Daya Saing Lokal yang Berkelanjutan

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian serta sebagai keberlanjutan RPJMD ke-1, maka RPJMD ke-2 ditujukan untuk memantapkan pembangunan di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk

pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing lokal yang berkelanjutan serta pemenuhan infrastruktur daerah.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua tetap difokuskan, dengan meningkatkan pencapaian IPM; menurunkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran; pertumbuhan ekonomi riil yang berkualitas; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang sesuai dengan kondisi lokal; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; kesejahteraan, dan perlindungan anak; terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antarindividu, antarkelompok masyarakat dan antardaerah; dipercepatnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial; serta makin mantapnya nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter masyarakat asli Papua.

Kualitas SDM masyarakat Papua menjadi dasar untuk mampu meningkatkan daya saing perekonomian lokal yang dilakukan melalui penguatan di bidang pertanian tanaman pangan, pemanfaatan hasil hutan non kayu, pemanfaatan potensi perikanan, dan pemanfaatan potensi sumber daya alam sebagai sumber alternatif pembangunan. Potensi ini dapat dikembangkan apabila disertai dengan peningkatan kemampuan dan pengetahuan untuk memanfaatkannya dan didukung oleh kemampuan pemerintah daerah untuk memfasilitasinya melalui pengembangan teknologi; percepatan pembangunan infrastruktur; peningkatan kualitas lembaga maupun sekolah kejuruan; serta penataan kelembagaan ekonomi yang mampu mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Percepatan peningkatan tujuan di atas harus didukung dengan pengembangan dan pemantapan jaringan infrastruktur transportasi yang telah ada, peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, khususnya bioenergi, panas bumi, tenaga air, tenaga angin, dan tenaga surya untuk kelistrikan; serta peningkatan ketersediaan air bersih untuk mendukung kegiatan usaha maupun kegiatan rumah tangga dan fasilitas umum lainnya.

Untuk mencapai kemandirian ekonomi lokal yang berkelanjutan, maka pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup harus didasarkan pada kesadaran masyarakat dan partisipasi aktif semua pihak termasuk semua fungsi kelembagaan dan peran pemerintah daerah dalam mendorong dan melaksanakan proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sehingga, sumber daya alam sebagai modal penguatan kegiatan ekonomi local dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing masyarakat asli Papua, serta modal pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu, perencanaan tata ruang Provinsi

Papua yang telah dihasilkan dan diselaraskan dengan pemanfaatan lahan dan pola ruang dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan harus secara konsisten dilaksanakan dan dipatuhi. Tujuan dan arahan pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di Papua harus diselaraskan dengan perencanaan daerah yang telah disusun dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan ketentuan daerah.

Prioritas Pembangunan Tahap III (2017 – 2022)

Memantapkan Pembangunan yang didukung SDM yang Berkualitas dan Kemapanan di Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Politik, Lingkungan

Memasuki pembangunan Tahap III, seiring dengan penguatan masyarakat yang secara kontinyu dilakukan sejak pembangunan Tahap I dan II, maka kualitas SDM orang asli Papua sudah semakin baik dan berkualitas dalam mendukung pembangunan di segala bidang.

Pelaksanaan pembangunan pada tahap ini dilakukan dengan terus meningkatkan kemandirian, kemitraan, dan keterlibatan orang asli Papua dalam segala bidang pembangunan yang berorientasi pada kemandirian dan kemapanan local berbasis keberlanjutan, ketahanan pangan, kemampuan daya saing berbasis keunggulan kompetitif, didukung tenaga kerja lokal yang handal, perlindungan perempuan dan anak, serta menekankan pada kesetaraan gender serta terwujudnya lembaga jaminan sosial. Kemapanan ini juga ditunjukkan dengan pelembagaan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal yang didukung oleh kepatuhan dan penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban serta budaya kerja yang professional.

Selanjutnya budaya demokrasi dan saling menghormati perbedaan dan pendapat dengan menitikberatkan kesatuan bangsa dalam koridor NKRI tetap sehat dan berkembang secara dinamis, namun tetap berbasis pada kearifan lokal, khususnya dalam pelaksanaan otonomi khusus yang memasuki tahun ke-20. Pelaksanaan otonomi khusus tetap berprinsip pada peningkatan kesejahteraan orang asli Papua yang dilandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memberikan manfaat social setinggi-tingginya; penguatan kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan; peningkatan kemampuan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan bencana alam; menghindari pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali dan berorientasi jangka pendek.

Sarana dan prasarana dasar yang telah ada terus dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya sehingga keamanan di bidang infrastruktur menjamin keberlanjutan kemandirian lokal, yang dituangkan dalam program yang berkesinambungan, melalui pendampingan dan penguatan kelembagaan sosial; keamanan di bidang kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, fasilitas pendidikan dan kesehatan dilengkapi akses pada sumber daya yang dibutuhkan dengan berbasis budaya lokal yang mampu mempertahankan kemandirian masyarakat Papua berdasarkan perkembangan IPTEK yang mampu dipahami dan dikuasai untuk diterapkan sebagai sarana pendukung kemandirian lokal.

Prioritas Pembangunan Tahap IV (2022 – 2025)

Mewujudkan Masyarakat Papua yang Mandiri di Segala Bidang dalam Tata Kehidupan yang Harmonis Selaras dengan Alam

Pada periode pembangunan Tahap IV ini, visi pembangunan Papua yaitu Papua yang mandiri secara sosial, budaya, ekonomi, dan politik sudah terbentuk dan tertanam di dalam setiap individu orang asli Papua. Tahapan ini menjadi landasan yang kokoh dengan berakhirnya pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua untuk memasuki tahapan pembangunan jangka panjang selanjutnya yang berorientasi pada cara pandang visioner, berdasarkan sikap mental dan perilaku adil, menjunjung tinggi kesetaraan dan kebersamaan, didukung moral dan budaya gotong royong, saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai luhur kemanusiaan, mempertahankan eksistensi dan jati diri orang asli Papua sebagai kebanggaan, terpenuhinya kenyamanan dan kualitas hidup yang mampu menggerakkan setiap individu berperilaku jujur, terbuka, berbela rasa baik kepada sesama dan alam ciptaan sebagai konsep dan pola pikir hidup sosial, didukung oleh keseimbangan dan keberlanjutan fungsi lingkungan sebagai modal pembangunan yang lestari dan berkelanjutan.

Pada tahap pembangunan ini, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat ditunjukkan oleh kualitas SDM orang asli Papua yang mandiri, profesional, handal, paham dan mampu terlibat dalam pengembangan IPTEK, struktur ekonomi lokal yang kokoh dan berdaya saing, didukung oleh terpenuhinya permukiman yang sehat, sanitasi lingkungan yang memadai, pola hidup bersih dan sehat yang menjadi bagian dari budaya masyarakat, persentase penduduk miskin yang rendah, rendahnya ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, ketersediaan energi listrik yang terbaru, ketersediaan air bersih, ketersediaan dan keamanan pranata hukum, sosial,

serta kelembagaannya, yang didukung oleh ketahanan dan keamanan, serta sikap hidup toleran. Efisiensi dan efektifitas pembangunan dapat terus diukur melalui ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam dan fungsi lingkungan yang menjamin terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

Pemenuhan pelayanan dasar dan pembangunan infrastuktur dasar serta pembangunan yang tetap memperhatikan lingkungan menjadi fokus utama pada tahap pertama untuk menjadi landasan bagi keberhasilan pada tahap-tahap selanjutnya. Peningkatan infrastruktur, aksesibilitas wilayah serta ketentraman dan ketertiban yang menjadikan keadaan Papua yang kondusif untuk mencapai kemandirian ekonomi lokal merupakan dasar tema pembangunan pada tahap selanjutnya. Pada tahap berikutnya peningkatan kemapanan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lingkungan yang didukung oleh SDM yang berkualitas di seluruh wilayah sudah menjadi dasar pemahaman seluruh masyarakat Papua untuk mewujudkan dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat Papua. Pada tahap akhir dari perencanaan ini di tahun 2025 terbentuknya masyarakat Papua yang mandiri disegala bidang dalam tata kehidupan yang harmonis dan selaras dengan alam, yang memiliki makna sangat dalam untuk mewujudkan dan mempertahankannya. Kesejahteraan masyarakat, kemapanan ekonomi lokal yang berdaya saing menjadi tujuan akhir 20 tahun mendatang sehingga mampu tercapinya visi pembangunan jangka Panjang Provinsi Papua yang mandiri secara sosial, budaya, ekonomi dan politik.

5.3. SASARAN POKOK

Sasaran pokok merupakan instrumen pengukuran kinerja berdasarkan tema dan arah kebijakan pembangunan setiap tahapan. Sasaran pokok pembangunan jangka panjang dibagi dalam empat periode pembangunan Provinsi Papua 2005-2025, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD periode berkenaan berdasarkan periode atau tahapan pembangunan jangka panjang daerah.

Secara garis besar, sasaran pokok pembangunan adalah sebagai berikut:

- Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
- Pemerataan dan Peningkatan Kemampuan Ekonomi Daerah
- Peningkatan Pelayanan Umum
- Peningkatan Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

Lebih lanjut, indikator dan target sasaran pokok disajikan dalam Tabel V.2 berikut ini:

Tabel 5.2 Indikator Target Kinerja Sasaran Pokok Pembangunan Provinsi Papua 2005 – 2025

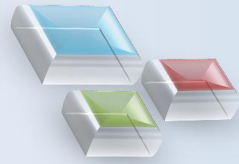
NO	SASARAN POKOK	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2006)	TARGET AKHIR	TARGET KINERJA			
						TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
1	Peningkatan Kesejahteraan masyarakat	IPM	%	62,7	85	65,3	70	75	80
		Angka Melek Huruf	%	75,4	90	75,8	77	80	85
		Umur Harapan Hidup	tahun	67,6	75	70,29	72,02	73,79	75
		Penolong kelahiran dengan tenaga medis	%	48,9	75	55,04	62,49	69,94	75
		Rata-rata lama sekolah	tahun	6,5	12	6,7	8	10	12
		AKB per 1000 kelahiran hidup	jiwa	41	19	28	23	19	19
		AKI per 100,000 kelahiran hidup	jiwa	326	115	200	100	160	115
		Persentase penduduk 15 tahun ke atas dengan pendidikan SMP+	%	36,4	70	41,43	50	60	70
		Persentase penduduk miskin (2011)	%	40,78	5	31,2	22	15	5
		2	Pemerataan dan Peningkatan Kemampuan Ekonomi Daerah	Laju Pertumbuhan PDRB Non tambang	%/Thn	8,8	Rata-rata 7	Rata-rata 7	Rata-rata 7
Gini Ratio	%			0,42	0,31	0,42	0,4	0,4	0,4
Produksi Padi	Ton/ha			3,85	6	3,83	4,6307264	5,3807264	6
Produksi Ubi Jalar	Ton/ha			10,07	12,5728	10,07	11,0728	11,8228	12,5728
Produksi Ubi Kayu	Ton/ha			11,89	14,4656	11,89	12,9656	13,7156	14,4656
Produksi Jagung	Ton/ha			1,75	3,92	1,75	2,42	3,17	3,92
Perikanan	Ton			240,115	432433,5498	240,115	292136,6117	355428,8565	432433,5498
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%			0,8		0,8			
Tingkat Pengangguran Terbuka	%			5,8	2,5	3,9	2,5	2,5	2,5
Persentase rumah sehat	%			69,4	81,4	69,4	69,4	75,4	81,4
3	Peningkatan Pelayanan Umum	Rasio Elektrifikasi	%	36,7	60	36,7	40	50	60
		Rasio Guru SD Terhadap Sekolah	%	7	14	8	9	11	12
		Rasio Murid SD Terhadap Ruang Belajar	%	29,08	40	31	35	30	30
		Rasio Murid SD Terhadap Guru	%	29,6	30	32	32	30	30
		Rasio Guru SMP Terhadap Sekolah	%	15	14	9	10	12	14
		Rasio Murid SMP Terhadap Ruang Belajar	%	34	40	35,18	35	35	40
		Rasio Murid SMP Terhadap Guru	%	14	30	21,33	25	30	30
		Rasio Guru SMA/MA Terhadap Sekolah	%	24	22	16	17	20	22
		Rasio Murid SMA/MA Terhadap Ruang Belajar	%	30	40	30	35	35	40
		Rasio Murid SMA/MA Terhadap Guru	%	11	40	19	25	30	40
4	Peningkatan Fasilitas Wilayah / Infrastruktur	Rasio Dokter Terhadap Penduduk	%	5,646	2,500	3,865	3,400	3,000	2,500
		Rasio Bidan Terhadap Penduduk	%	1,169	700	1,022	1,000	900	700
		Rasio Perawat Terhadap Penduduk	%	827	500	730	700	600	500
		Proporsi Akses Air Bersih	%	31,3	70	35	40	50	70
		Persentase Rumah Sehat	%	63,4	0,814	63,4	69,4	75,4	81,4
		Panjang Jalan Nasional	km	13,872	17,000	14,000	15,000	16,000	17,000
		Panjang Jalan Provinsi	km	4,758	5,000	6,000	7,000	8,000	9,000
		Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	%	0,011893026	0,011893026	0,011893026	0,011893026	0,011893026	0,011893026
		Jumlah Barang Dibongkar Melalui Pelabuhan Udara	Kg	83839163	174295598,5	83839163	107002378	136565162,1	174295598,5
		Jumlah Barang Dimuat Melalui Pelabuhan Udara	Kg	84453427	175572609,2	84453427	107786351,8	137566733,5	175572609,2

Tabel 5.2 (lanjutan)

NO	SASARAN POKOK	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2006)	TARGET AKHIR	TARGET KINERJA			
						TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
5	Peningkatan Iklim Berinvestasi	Jumlah Barang Antar Negara Dibongkar Melalui Pelabuhan Laut	Ton	1489	1729	1489	1564,953965	1644,782345	1729
		Jumlah Barang Antar Negara Dimuat Melalui Pelabuhan Laut	Ton	5	10,4	5	6,8	8,6	10,4
		Jumlah Barang Antar Pulau Dibongkar Melalui Pelabuhan Laut	Ton	1386958	1386963	1386958	1386960	1400830,61	1386963
		Jumlah Barang Antar Pulau Dimuat Melalui Pelabuhan Laut	Ton	154657	179551,9757	154657	162546,0613	170837,544	179551,9757
		Akses air bersih	%	58,7	75	60	60	70	75
		Luas Kawasan Hutan	%	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99
		Persentase Luas Hutan Lindung	%	61,45	61,45	61,45	61,45	61,45	61,45
		Persentase Luas Hutan Produksi	%	33,54	33,54	33,54	33,54	33,54	33,54
		Area Penggunaan Lain	%	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01
		Jumlah Proyek PMDN		29	121,14	29	46,70479	75,21853134	121,1401969
		Jumlah Proyek PMA		79	142,27	79	96,11557929	116,9392985	142,2745369
		Realisasi nilai investasi PMDN	trilyun rupiah	-9,5	10,03	3,87	6,23	10,03	10,03
		Realisasi nilai investasi PMA	trilyun rupiah	-4,3	19,77	11,04	14,78	19,77	19,77
		Total Investasi	trilyun rupiah	10,652	29,80357451	10,652	14,90853375	21,00385999	29,80357451
Jumlah Unit Bank	Unit	203		203					

BAB VI

KAJIDAH PELAKSANAAN



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dokumen ini memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang selaras dengan visi dan misi RPJPN 2005-2025, disesuaikan dengan kondisi riil dan aspirasi pemangku kepentingan atau masyarakat Provinsi Papua. RPJPD Provinsi Papua 2005-2025 selanjutnya akan menjadi acuan dan pedoman bagi pemerintah Provinsi Papua dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD), sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih.

6.1. PRINSIP KAJIDAH PELAKSANAAN

RPJPD Provinsi Papua 2005-2025 merupakan pedoman pembangunan yang mempunyai jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Selain itu RPJPD Provinsi Papua 2005-2025 adalah pedoman dalam penyusunan RPJMD Provinsi Papua. Oleh karena itu, maka prinsip-prinsip kaidah pelaksanaan, ditetapkan sebagai berikut:

1. Agar terjadi kesinambungan dalam penyusunan kebijakan daerah, maka masyarakat yang mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua, di setiap tahapannya harus memperhatikan RPJPD Provinsi Papua 2005-2025 dan menjadikannya sebagai pedoman dalam menyusun visi dan misi kepala daerah, yang selanjutnya akan dituangkan ke dalam RPJMD Provinsi Papua;
2. Lembaga eksekutif dan legislatif Provinsi Papua dengan didukung oleh instansi vertikal yang ada di wilayah Provinsi Papua dan masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan arah kebijakan dalam RPJPD Provinsi Papua 2005-2025;
3. Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua, perlu menyebarluaskan dokumen RPJPD ini kepada seluruh pemangku kepentingan daerah, terutama kepada calon gubernur dan wakil gubernur melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua dan partai-partai

politik di wilayah Papua sehingga sasaran pembangunan 20 tahun dapat dilaksanakan secara berkesinambungan;

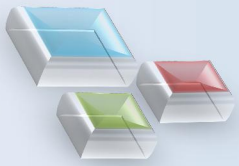
4. Gubernur dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJPD Provinsi Papua 2005-2025 dengan mengerahkan secara optimal semua potensi dan kekuatan sesuai sasaran pokok periode berkenaan;
5. Dalam rangka implementasi RPJPD Provinsi Papua 2005-2025, Bappeda Provinsi Papua berkewajiban untuk melaksanakan penjabaran RPJPD Provinsi Papua 2005-2025 kedalam RPJM Daerah Provinsi Papua.

6.2. PERUBAHAN DOKUMEN PERENCANAAN

Perubahan dokumen RPJPD Provinsi Papua ini dapat berubah berdasarkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan yang berlaku;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Perubahan yang mendasar, mencakup antara lain: bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional; dan
4. Merugikan kepentingan nasional, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

BAB VII PENUTUP



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua tahun 2005-2025 yang berisi tentang visi, misi, dan arah pembangunan Provinsi Papua, merupakan pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan *stakeholders* dalam pelaksanaan pembangunan 20 tahun yang akan datang. Hal dimaksud dilakukan melalui dipedomannya arah kebijakan pembangunan lima tahunan oleh calon kepala daerah dan dicantumkannya sasaran pokok dalam RPJMD di masing-masing tahap.

Keberhasilan pembangunan Provinsi Papua merupakan perwujudan dari Visi Papua Mandiri Secara Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik, yang harus didukung oleh: 1) Komitmen dari Kepemimpinan Pemerintah Provinsi yang kuat dan demokratis; 2) Konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi; 3) Keberpihakan kepada masyarakat terutama penduduk asli Papua; 4) Peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan; 5) Komitmen dan dukungan dari Pemerintah Pusat dalam melaksanakan RPJPD Provinsi Papua.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati dan tetap menggelorakan optimisme membangun Provinsi Papua untuk esok yang lebih baik, kita serahkan semua pada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kasih-Nya menyertai upaya-upaya kita semua mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Papua demi kejayaan masyarakat Papua.